Pengantar

ABDURRAHMAN WAHID

RAGAM EKSPRESI ISLAM NUSANTARA

Pengantar
ABDURRAHMAN WAHID

RAGAM EKSPRESI ISLAM NUSANTARA

RAGAM EKSPRESI ISLAM NUSANTARA

ISBN 978 -979- 98737- 6–7

Pengantar
Abdurrahman Wahid

Tim Editor:
Supervisor:
Yenny Zannuba Wahid

Penanggung jawab:
Ahmad Suaedy

Anggota:
Subhi Azhari
Rumadi
Nurul Huda Ma'arif
Nurun Nisa'
Gamal Ferdhi
Widhi Cahya

Rancang Sampul:
Jarot Wisnu Wardhana

Tata Letak:
M. Isnaini "Amax's"

Urusan Percetakan :
A. Farid

Cetakan I :
Oktober 2008

Diterbitkan oleh:

Seeding Plural and Peaceful Islam

Jl. Taman Amir Hamzah No. 8
Jakarta Selatan 10320
Telp. : +62-21-3928233, 3145671
Fax : +62-21-3928250
Email : info@wahidinstitute.org
Website : www.wahidinstitute.org

Buku ini merupakan kumpulan suplemen the WAHID Institute yang pernah diterbitkan di
Majalah GATRA (Oktober 2005 - September 2006) dan Majalah TEMPO (Oktober 2006 - Maret 2008).
Redaktur Ahli: Yenny Zannuba Wahid, Ahmad Suaedy, Lies Marcoes-Natsir, Budhy Munawar-Rachman.
Sidang Redaksi: Ahmad Suaedy, Rumadi, Abd. Moqsith Ghazali, Gamal Ferdhi, M. Subhi Azhari,
Nurul H. Maarif, Nurun Nisa.

PENGANTAR PENERBIT

Layaknya seorang gadis rupawan, Islam kini sedang menjadi rebutan banyak pihak. Namun masih belum ada yang memperhatikan dengan seksama ragam ekspresi lokal, baik yang tradisional maupun dinamika perkembangan mutakhirnya. Semakin dalam ditelusuri dan diikuti jejaknya, ragam Islam lokal makin menarik dan bervariasi.

Di sini kami tampilkan Islam yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang merupakan kelanjutan historis dari Islam Nusantara, yaitu Islam yang multi wajah tapi saling memahami satu dengan yang lainnya. Inilah Islam yang memberikan ruang bagi pertemuan, dengan negosiasi dan sintesa kehidupan. Islam yang menghujam ke dalam relung kehidupan masyarakat. Ia berhadapan dengan dinamika ekspresi masyarakat. Dengan demikian Islam yang tampil di ruang publik tidak hanya Islam yang garang, fundamentalistik dan menebar ancaman.

Dari penelusuran, the WAHID Institute banyak menemukan khazanah Islam Nusantara. Kemudian kami tuangkan ke dalam Majalah GATRA dan Majalah TEMPO dalam bentuk artikel sisipan bulanan. Setiap bulan selama dua setengah tahun, kami mencoba secara konsisten memuat itu di GATRA Oktober 2005 sampai September 2006. Sedang di TEMPO pada Oktober 2006 hingga Maret 2008.

Dalam membahas suatu tema, kami menggunakan gaya narasi. Informasi yang ditampilkan pun harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Maka untuk mendapatkan data-data bagi penulisan sisipan ini selain wawancara, juga riset pustaka maupun liputan langsung ke lapangan. Informasi yang ditampilkan membuka mata publik bahwa khazanah Islam Nusantara begitu kaya. Kami menyuguhkan ragam ekspresi Islam itu.

Alhamdulillah, ternyata selama dua tahun enam bulan menerbitkan suplemen itu banyak manfaat yang didapat bagi khalayak. Sejumlah pembaca menghubungi lembaga kami untuk mengetahui lebih detail dan mendalam nara sumber, lokasi dan data-data yang kami tampilkan di sisipan itu. Bahkan mereka meminta informasi-informasi yang pernah ditampilkan di dua majalah tersebut dipublikasi ulang.

Untuk memenuhi keinginan itu, kami menerbitkan kembali tiga puluh edisi sisipan di dua majalah mingguan itu dalam bentuk buku. Tata letaknya kami percantik. Beberapa foto hasil liputan yang tidak sempat hadir di majalah, karena keterbatasan halaman, ditampilkan di sini. Juga foto-foto terbaru yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Buku ini hadir berkat dukungan dari banyak pihak, The Asia Foundation (TAF), terutama Budhy Munawar-Rachman dan Lies Marcoes-Natsir, juga kepada teman-teman di Majalah TEMPO dan Majalah GATRA yang dengan penuh semangat dan konsisten bekerjasama dengan kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para nara sumber, partner dan koresponden yang telah bekerjasama dengan baik, namun tidak mungkin disebut satu per satu di sini. Hanya berkat mereka semua ini dapat terlaksana.

Akhirnya, selamat membaca.[]

Matraman, Oktober 2008

The WAHID Institute

PENGANTAR *GATRA*

Sajian warna-warni dinamika terkini kaum santri. Diracik dan disuguhkan "orang dalam". Dikelola sekelompok analis muda berpikiran terbuka yang menguasai pokok masalah dan memahami konteks persoalan dengan baik. Dikemas renyah dengan gaya jurnalistik. Ditelaah dari sudut yang tidak biasa. Bahkan kadang mengejutkan. Begitulah kesan umum suplemen the WAHID Institute yang dimuat tiap awal bulan selama setahun di Majalah GATRA, mulai November 2005.

Di antara sumbangan penting suplemen ini adalah upayanya menampilkan wajah moderat kreatif kaum santri arus utama yang selama ini cenderung menjadi "mayoritas diam" (*silent majority*). Mereka yang lebih *sepi ing pamrih* padahal *rame ing gawe*. Mereka yang banyak berkreasi, tapi tidak terlalu memikirkan publikasi. Padahal kinerja sosial mereka penting menjadi pembelajaran bagi publik luas.

Keberadaan mereka tidak diketahui luas, kecuali oleh kalangan yang intensif menjalin komunikasi dan kerja sama dengan mereka, seperti para pengelola suplemen ini. Bagi peneliti atau jurnalis pada umumnya yang jarang berinteraksi dengan dunia santri, diperlukan kemauan kuat dan ketekunan tersendiri untuk bisa menyelami dan menemukan dinamika subtil dan etos sosial mereka.

Misalnya sejumlah pesantren yang mengembangkan spirit kewirausahaan dan keterampilan bisnis di kalangan santri. Secara tidak langsung, gerakan ini merupakan investasi jangka panjang untuk meredam benih terorisme bernuansa agama, yang belakangan jadi tantangan nyata di Indonesia. Karena faktanya, sebagian pelaku bom bunuh diri dipicu oleh situasi kesulitan ekonomi. Begitu pula kiprah para agamawan daerah yang peduli pelestarian lingkungan hidup yang dikelola dalam kerja sama lintas agama. Dua kebajikan sekaligus bisa mereka sinergikan: lingkungan hidup terpelihara, harmoni antar agama terawat.

Semua itu penting untuk mengimbangi kebanyakan isi media cetak dan elektronik yang lebih sering disesaki wajah Islam dengan ekspresi keagamaan penuh amarah dan reaksioner. Wajah demikian meski berteriak paling lantang, tapi sejatinya hanya merepresentasikan kalangan terbatas, dengan pelaku itu lagi itu lagi. Bila tidak didudukkan secara proporsional, tentu ketidakseimbangan isi media semacam itu bisa mendistorsi realitas sebenarnya. Padahal masih banyak energi positif yang tumbuh dari pelbagai kearifan lokal yang terserak, yang penting menjadi sumber edukasi bagi publik luas. Sebagaimana tema-tema yang diangkat suplemen the WAHID Institute tersebut.

Terjalinnya kerja sama antara the WAHID Institute dan GATRA dalam publikasi suplemen ini juga karena adanya kesamaan *concern* untuk mengangkat kebajikan lokal yang tersembunyi di berbagai daerah dan kelompok sosial pinggiran, yang selama ini cenderung diabaikan oleh publikasi media. Selain tersebar dalam beberapa edisi reguler, setiap lebaran, majalah berita mingguan GATRA mengangkat edisi khusus dengan spirit demikian itu.

Misalnya, tema "*Beragam Jalan Islam Pinggiran*" (Lebaran 2003), yang mengulas dengan empati kelompok keagamaan yang secara ajaran maupun jumlah pengikut selama ini terhitung "pinggiran". Lalu, "*Hajatan Demokrasi*" (Lebaran 2004), yang memotret *living democracy* di basis simpul-simpul Islam Indonesia, baik moderat maupun garis keras. Kemudian, "*Spirit Ekonomi Santri*" (Lebaran 2006) yang terinspirasi dari salah satu suplemen the WAHID Institute.

Paling akhir, "*Mozaik Muslim Nusantara*" (Lebaran 2008) yang melakukan reportase mendalam tentang model toleransi agama berbasis budaya di komunitas muslim pada kawasan minoritas Muslim, seperti Papua, Flores, Minahasa, Tana Toraja, Dayak, dan sebagainya.

Publikasi suplemen the WAHID Institute merupakan satu dari empat paket kerja sama, yang juga terdiri dari penerbitan buku yang dikembangkan dari edisi khusus *Hajatan Demokrasi* (2004), penerjemahan buku itu ke bahasa Inggris, dan diskusi buku di empat kota: Jakarta, Makassar, Mataram, dan Banjarmasin. Bahwa rangkaian suplemen the WAHID Institute itu kini juga dibukukan, tentu merupakan perkembangan yang menggembirakan.

Disatukannya seluruh edisi suplemen yang semula terserak itu, dalam bentuk buku, dapat mempermudah pembaca menelaah ulang sajian tersebut secara lebih terpadu. Pembaca yang hanya menjumpai beberapa edisi, dan kehilangan edisi yang lain, kini dapat menjumpai keseluruhan. Sehingga benang merah pesan moral-intelektual semua sajian itu bisa ditangkap lebih utuh.

Selamat membaca![]

Jakarta, Oktober 2008

Asrori S. Karni
Redaktur Majalah GATRA

PENGANTAR *TEMPO*

Membaca serial suplemen the WAHID Institute di Majalah TEMPO seperti bertamasya mengunjungi aneka rupa pemikiran Islam. Di awal perjalanan, "pemandu wisata" sudah menyiapkan paket "*tour*": hanya berkunjung ke tempat yang menyebarkan pemikiran Islam yang damai dan toleran. Jangan berharap tiba-tiba kita diajak berbelok ke tempat yang percaya agama perlu ditegakkan dengan pedang dan golok, misalnya.

Semua "lokasi" sudah ditentukan dengan kesadaran penuh sejak awal. Dan di akhir paket "*tour*" itu, sang pemandu dengan bersemangat menginginkan peserta membawa pulang kesan bahwa Islam agama yang rukun dengan penganut keyakinan lain, membela pluralisme, dan yang terpenting: menolak kekerasan. Semangat itu kelihatan jelas mulai dari mencari ide cerita, pemilihan sumber dan penulis kolom.

Kesan itu secara umum berhasil disampaikan. Sebagian ditentukan oleh cara menulis yang popular, riset yang serius, dan reportase yang sungguh-sungguh. Ini sebuah bacaan yang tidak ditulis satu arah untuk publik yang harus menelan bahan mentah-mentah seperti "khotbah" shalat Jumat. Atau seperti selebaran "penuh doktrin" di masjid-masjid, yang isinya membuat bulu kuduk berdiri karena sarat ancaman dosa dan neraka.

Kutipan kalimat para kiai atau pemikir di sini dipilih yang tenang, rileks, melegakan seperti meneguk air es di panas terik. Teknik mengutip cuplikan komentar tokoh ini dalam jurnalistik antara lain merupakan cara menghindari bosan. Namun, terlalu banyak nama yang dikutip juga bisa membawa pembaca bagai bercerita tentang hutan tropis: ada begitu banyak pohon yang harus diingat agar cerita bisa mengendap lama di kepala. Mengutip hanya yang kalimat terpenting dari pemikiran sang tokoh, juga membuat glosari pemikirannya dalam ruang lain, merupakan cara yang biasa dikerjakan untuk mengurangi *bejibun*nya nama dan predikat dalam satu artikel.

Dari sisi lain, banyaknya nama itu merupakan sebuah pameran kekayaan yang luar biasa. Anak-anak muda kalangan nahdliyin yang mengerjakan suplemen ini berhasil mengabarkan bahwa dari balik pesantren yang suka dicap kumuh dan kolot itu ternyata tersimpan mutiara pemikiran yang berharga. Tidak hanya bagi Islam, pemikiran itu berguna bagi alam semesta sesuai keyakinan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin.*

Bukan hanya pemikiran. Suplemen berseri ini menunjukkan betapa luas spektrum kepedulian dan sekaligus keprihatinan kalangan muda Nahdlatul Ulama. Sebagian artikel yang disajikan cukup informatif dan berguna menghindari salah pengertian dan kesalahpahaman. Misalnya tentang tarekat dan tasawuf (edisi 31 Desember 2006). Misi penyadaran disampaikan lewat pengakuan kelompok yang pernah bergelimang kekerasan, meskipun rasa "khotbah" terasa belum hilang benar dari teks itu (edisi 4 Februari 2007). Kisah novelis dan sastra pop yang tumbuh di kalangan kaum sarungan menunjukkan sisi lain yang baru bagi orang luar (edisi 4 Maret 2007). Hubungan erat dengan kelompok *grass root* dipertontonkan melalui isu lingkungan, bahaya nuklir, bencana lumpur Lapindo (edisi 1 Juli 2007). Toleransi juga ditunjukkan dengan memuat kolom Romo Sandyawan Sumardi tentang kemanusiaan (edisi 2 Desember 2007).

Yang juga diangkat ke permukaan adalah para kiai pesantren yang selama ini nyaris tak pernah disentuh media massa. Di tempat pendidikan Islam dengan sejarah sangat panjang itu ternyata berdiam banyak kiai

yang dalam ilmunya. Kedalaman itu terlihat dari cara mereka memilih pemeo, perumpamaan, idiom, yang membumi dengan masyarakat yang dilayani. Mereka yang sehari-hari berkutat mengajar dan membolak-balik kitab kuning inilah yang diharapkan menjaga sikap khas kaum nahdliyin: lentur dalam menyikapi berbagai persoalan hidup, termasuk hidup bernegara. Sebuah sikap yang semakin relevan saat ini.

Toleransi luas yang ditawarkan kaum nahdliyin barangkali semacam "pereda" rasa cemas atas munculnya kelompok dengan rasa toleransi tipis. Sebuah paragraf di suplemen ini menuliskan:

> *Menjelang pemakaman Jalaluddin Rumi, seorang Kristen menangis tersedu. Dia mencurahkan kesedihannya. "Kami menghormati Rumi seperti Musa, Daud, dan Yesus zaman ini. Kami semua adalah para pengikut dan muridnya," ungkapnya*.

Indonesia hari ini merupakan sebuah komunitas yang jauh dari saat Rumi wafat itu. Tapi sesungguhnya masalah utama bukan soal hubungan antar agama, melainkan di dalam Islam sendiri. Problem yang mengganggu adalah hadirnya kelompok yang seolah-olah mengklaim diri sebagai "polisi Tuhan". Seperti merasa didaulat menjadi otoritas "pengatur kehidupan", kelompok ini tak pernah perduli dengan yang lain, melabrak apa yang mereka anggap sebagai "musuh".

Memang menyedihkan. Tapi yang paling getir adalah menyadari betapa sedikit usaha mengatasi kelompok itu. The WAHID Institute, yang didirikan mantan presiden Abdurrahman Wahid dan sekalian pendukung anti-kekerasan, termasuk yang sedikit itu dan karenanya menonjol. Suplemen yang dihasilkan institute itu karenanya merupakan buah pikiran yang jarang di masa ini, sekaligus pernyataan sikap yang pantas dicatat dengan cetak tebal.

Majalah TEMPO punya "tradisi" untuk menampung pikiran-pikiran baru Islam, juga agama lain, yang mendorong kemajuan masyarakat. Almarhum Nurcholish Madjid dulu seperti "berumah" di TEMPO, begitu juga Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah menjadi penghuni tidak tetap perpustakaan TEMPO di Proyek Senen Jakarta. Jalaluddin Rakhmat, Ulil Abshar-Abdalla, Din Syamsuddin, Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, adalah sederet nama yang sering mengisi rubrik kolom di Majalah TEMPO.

Itu sebabnya suplemen the WAHID Institute ini bagi kami menjadi semacam pelengkap untuk memperkaya koleksi pemikiran Islam. Suplemen ini memang mengajak pembacanya hanya sampai "beranda rumah" dan tidak "masuk ke dalam". Tapi sebagai satu *gepok* bacaan populer yang ingin menjangkau segmen pembaca lebih luas, rasanya kedalaman yang dibawakan sudah lebih dari cukup.

Serial ini walaupun tampil dalam jangka hanya setahun pasti sudah mempunyai pembaca setianya sendiri. Di antara kecemasan melihat sepak terjang kelompok bertoleransi tipis, suplemen ini akan dikenang, akan ditunggu-tunggu.[]

Jakarta, Oktober 2008

Toriq Hadad
Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO

MELINDUNGI DAN MENYANTUNI SEMUA PAHAM

Oleh: Abdurrahman Wahid
Pendiri The WAHID Institute

Ketika berbicara di depan rapat akbar di sebuah kabupaten di Kalimantan Tengah, penulis ditanya; mengapa melindungi Gerakan Ahmadiyah Indonesia? Penulis menjawab ia tidak memahami secara mendalam ajaran Ahmadiyah, Muhammadiyah, Syi'ah, Mu'tazilah dan lain-lain. Penulis melindungi mereka karena hal itu menjadi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Jika orang seperti penulis saja tidak mau bertanggungjawab atas jaminan yang disebutkan oleh konstitusi kita itu, maka semua golongan, termasuk yang bukan Islam, tidak akan ada yang mau peduli. Ini berarti Undang-Undang Dasar 1945, tidak lagi mempunyai gigi, dan negara kita tidak punya dasar sama sekali.

Selama jaminan-jaminan seperti itu tetap dijalankan, selama itu pula orang masih merasa ada gunanya bernaung di bawah negara Republik Indonesia. Dari sudut inilah pembelaan yang diberikan penulis mempunyai arti.

Pembelaan terhadap kaum minoritas di Indonesia juga bukan karena sebab-sebab lain. Umpamanya saja, kekhawatiran bahwa fundamentalis Islam akan menguasai kehidupan politik kita. Sebab penulis berpendapat bahwa fundamentalisme agama di negeri kita sudah mencapai ujung perjalanan. Tiga sampai empat tahun lagi, justru pihak muslim moderat yang akan menguasai kehidupan politik. Dengan demikian membuat agama Islam di negeri ini menjadi moderat.

Kegalakan kelompok-kelompok fundamentalis itu layaknya tarikan nafas penghabisan. Senyampang belum tergusur dari kehidupan politik, mereka mengajukan tuntutan yang tidak-tidak. Kita justru harus menolak tuntutan mereka itu. Hal inilah yang perlu dilakukan untuk menjaga keutuhan negara kita. Tuntutan 'aneh-aneh' itu berangkat dari kurangnya pengetahuan dan keyakinan mereka akan dasar-dasar negara kita sendiri. Front Pembela Islam (FPI) yang didirikan oleh dua Jenderal Angkatan Darat dan dua Jenderal Kepolisian, sebenarnya sudah harus dibubarkan. Padahal sudah sejak lama Undang-Undang menyatakan bahwa orang tidak boleh membawa senjata tajam dan menebar ancaman di muka umum. Tapi FPI bertambah berani bertindak, karena adanya sejumlah orang pejabat yang tidak menginginkan ia dibubarkan, termasuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di masa lalu. Bahkan sekarang keadaan menjadi runyam, yaitu beberapa anggota LSM yang dicederai FPI malah dituduh memprovokasi kelompok itu di lapangan Tugu Monas.

Jika demikian, apa gunanya kita memiliki UUD 1945? Ini benar-benar merisaukan hati penulis. Padahal, kondisi itu terjadi karena kita tidak setia kepada dasar negara Pancasila, yang dibawakan Bung Karno pada 6 Juni 1945. Karena ketololan kita jualah, bangsa ini mengalami persoalan-persoalan yang seharusnya tidak perlu. Kita sekarang mengulang kembali perdebatan yang sudah kita lakukan sebagai bangsa di masa lampau. Ini berarti pelambatan perjalanan sejarah kita sebagai bangsa.

Padahal, banyak masalah lain yang memerlukan penyelesaian. Salah satunya adalah, bahwa bangsa kita hidup dalam suasana perdagangan bebas, yang memiliki ketergantungan sangat besar pada penjualan produk hutan, pertambangan dan pengolahan hasil lautan. Bagaimana kita dapat melepaskan dari ketergantungan seperti itu, sedangkan kita termasuk dalam sistem globalisasi ekonomi dunia?

Kenyataan lain yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun yaitu sikap untuk bebas berpikir, bertindak dan bersikap. Mayoritas bangsa kita adalah toleran dan santun kepada semua ajaran. Namun mereka adalah mayoritas membisu (*silent majority*), dan tidak mau menunjukkan sikap apapun. Oleh sebab itu penulis kerap mengemukakan sikap sangat jelas. Tujuannya agar *silent*

majority itu mengikutinya meski tanpa mengatakan apa-pun. Karena itu, penulis sering dinilai sebagai seorang yang berpandangan pluralis, baik oleh sesama gerakan Islam maupun orang-orang beragama lain.

Kini tumbuh angkatan muda pemikir yang sekarang sudah mulai 'menggerakkan' masyarakat, melalui sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang jelas untuk melindungi mereka yang lemah. Pada waktunya nanti kejelasan sikap seperti itu akan merupakan warisan bagi kehidup-an bangsa kita.

Keragaman ber-Islam bangsa ini sudah terlihat pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Awalnya dari para ulama di Al-Azhar, Kairo. Sebagian mereka memutuskan larangan berziarah kubur. Dari mereka itulah nantinya akan muncul gerakan Muhammadiyah di negeri kita. Ulama yang membolehkan ziarah kubur nantinya akan mengkongkritkan pendapat mereka itu dalam bentuk kelahiran NU (Nahdlatul Ulama). Sebenarnya, bukan mereka itulah yang harus diamati sekarang. Tapi justru orang Muhammadiyah yang sering berziarah kubur, dan angkatan muda NU yang tidak pernah ziarah kubur. Dari hal ini dapat kita ketahui bahwa perkembangan historis agama Islam di negeri kita sangat dipengaruhi oleh pertemuan antara ajaran Islam dan perkembangan ajaran-ajaran lain.

Dengan mengemukakan hal ini, penulis bermaksud menunjukkan bahwa dinamika ajaran Islam di negeri ini juga mengalami pasang surut. Sejarah perkembangan agama Islam ini sejajar dengan sikap pluralis yang dimiliki bangsa Indonesia ketika kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan menyerbu Pulau Jawa abad ke-8 Masehi melalui Pekalongan. Dari Pekalongan mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke pedalaman Jawa Tengah. Mereka bertemu dengan Kerajaan Kalingga yang beragama Hindu di sekitar daerah Kabupaten Wonosobo sekarang. Mereka melanjutkan perjalanan ke selatan, tanpa memaksa orang-orang Hindu itu beragama Budha. Di daerah Magelang, sekitar Muntilan sekarang, mereka mendirikan Candi Borobudur.

Mereka yang tidak turut mendirikan candi tersebut, meneruskan perjalanan ke kawasan Yogyakarta. Di tempat itu mereka mendirikan Kerajaan Kalingga yang beragama Budha pada abad ke-8 Masehi. Pada abad tersebut, berdirilah Candi Roro Jonggrang di Prambanan. Baik Kalingga Hindu maupun Kalingga Budha sama-sama marah atas berdirinya candi tersebut. Akibat penentangan itu Candi Roro Jonggrang ditinggalkan oleh penduduknya yang beragama Hindu-Budha ke Kediri di Jawa Timur di bawah kepemimpinan Prabu Darmawangsa. Di Kediri mereka mendirikan kerajaan Kediri, yang kemudian menjadi kerajaan Daha, dengan raja sangat terkenal bernama Prabu Airlangga. Dua abad kemudian, mereka berpindah ke kawasan Singasari, tetap dengan agama Hindu-Budha.

Di Singasari, kurang lebih 10 kilometer sebelah utara kota Malang sekarang, pada abad ke-11 Masehi mereka mendirikan kerajaan Hindu-Budha, dengan rajanya yang terkenal Tunggulametung dan Ken Arok. Dia inilah yang memperistri Ken Dedes, yang dianggap memiliki kesaktian sendiri. Pada abad ke-13 Masehi, Prabu Kertanegara dari Singasari harus mere-lakan menantunya mendirikan kerajaan baru di Terik, pinggiran sungai Brantas dekat Krian. Kerajaan inilah yang kemudian menjadi Kerajaan Majapahit yang di-dirikan oleh menantu Prabu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya. Menurut dugaan penulis, Raden Wijaya adalah seorang Tionghoa dari angkatan Laut Tiongkok, yang waktu itu hampir seluruhnya adalah anggota tarekat. Di bawah perlindungan orang-orang Muslim Tiongkok yang menjadi anggota tarekat itu, Majapahit lalu tumbuh sebagai negara multi agama dan etnis.

Walaupun beragama Islam, kaum santri yang

menjadikan nama tempat berdirinya kerajaan Majapahit di Terik, yang berarti tarikat, tetap menghargai multi agama itu. Hal inilah yang kemudian mendasari Mpu Tantular di abad ke-15 Masehi, merumuskan kerajaan Majapahit memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inilah yang di kemudian hari, dalam tahun 1945, mendasari Bung Karno untuk merumuskan Pancasila sebagai sikap hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, sejarah modern Indonesia juga diwarnai oleh gagasan pluralistik tersebut.

Sikap menghargai keragaman itu ternyata juga menjadi sejarah organisasi kemasyarakatan yang bernama Nahdlatul Ulama (NU). Seorang tokoh Syarikat Islam di Surabaya, bernama Umar Said Tjokroaminoto melakukan pembahasan dengan dua orang sepupunya, KH. M. Hasyim Asyari dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang dan KH. A. Wahab Chasbullah dari Pondok Pesantren Tambak Beras (juga di Kabupaten Jombang). Mereka melakukan diskusi tiap hari Kamis di Surabaya, sekitar 100 km jauhnya dari Jombang, tentang hubu-ngan antara ajaran agama Islam dan semangat kebangsaan.

Dalam pembahasan-pembahasan itu mereka disertai oleh menantu Umar Said Tjokroaminoto yang bernama Soekarno, di kemudian hari dikenal dengan nama Bung Karno. Jadi, hubungan antara agama Islam dan semangat kebangsaan mereka utamakan, bukannya masing-masing elemen itu dibahas secara tersendiri. Inilah yang membuat gagasan Islam di Indonesia menjadi sangat menarik. Karena watak kultural dari agama Islam yang berpadu dengan adat-istiadat bangsa ini menjadi mengemuka dan kehilangan watak politisnya.

Fenomena ini sebenarnya umum terdapat dalam perkembangan agama Islam di seluruh dunia. Tapi, karena kini perkembangan agama Islam dan masyarakat di kawasan anak benua India hingga pantai Atlantik di sebelah barat, bersifat sangat politis, maka perkembangan masyarakat kaum muslimin yang bersifat non politis menjadi tidak diperhatikan. Juga di Afrika sebelah Barat (seperti Nigeria, Tanzania, dan Zanzibar) dan Cape Town di Afrika Selatan, luput dari perhatian orang.

Di tempat-tempat seperti itu, Islam berkembang tidak sebagai ideologi politik, melainkan sebagai perkembangan budaya. Penulis pernah menyampaikan kepada Rektor Universitas PBB di Tokyo pada 1985 yaitu Soedjatmoko dari Indonesia, bahwa perlu dibangun di Tokyo, dan di beberapa negara pusat lembaga kajian Islam lokal seluruh dunia. Namun itu tidak terwujud hingga meninggalnya Doktor Soedjatmoko beberapa tahun kemudian karena alasan-alasan birokratis. Hingga saat ini upaya mendirikan sebuah pusat kajian Islam tetap saja tidak kunjung ada. Dengan demikian perkembangan masyarakat-masyarakat Islam non politis di seluruh dunia menjadi tidak terwujud, sementara pikiran-pikiran DR. Ali Syariati dan Imam Ayatullah Khomeini yang sangat bersifat ideologis dan politis berkembang sangat pesat.

Kajian-kajian non politis dan kultural itu, yang juga dapat dinamai kajian-kajian setempat (*local studies*), tentang berbagai masyarakat Islam menjadi terabaikan sama sekali. Menurut penulis, kalau kita ingin mengetahui tentang berbagai aspek masyarakat modern, kajian-kajian lokal seperti itu juga harus diberi perhatian utama. Apalagi dalam kerangka kajian masyarakat muslim moderat.

Tujuan itulah yang ingin dicapai buku ini, dengan menyajikan kekayaan lokal di hadapan para pembaca. Kalau para pembaca serius terhadap perkembangan Islam moderat, tentu haruslah diberi perhatian dan apresiasi cukup besar terhadap kajian Islam setempat atau yang bersifat lokal. Ia merupakan bagian dari pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri. Untuk itulah buku ini merupakan rintisan yang baik, meskipun masih dalam tahap yang sangat awal.[]

Jakarta, Oktober 2008

DAFTAR ISI

أشهد أن لا إله إلا الله
محمدية
وأشهد أن محمدا رسول الله
نهضة العلماء
N U

Generasi Hibrida NU kerap membahas problem mutakhir keumatan

dok. WI/ Subhi Azhari

Dua Simpul Satu Nasib:

Kisah Generasi Hibrida NU dan Muhammadiyah

Ayunan pendulum NU dan Muhammadiyah tergantung pengendalinya. Ketika pengendaliannya cenderung ke kanan, kaum muda progresif di dua organisasi itu kian tersingkirkan.

Perhatian muktamirin Nahdlatul Ulama (NU) ke-31, Boyolali tersedot kepada selebaran yang berisi penolakan terhadap Islam liberal. Isinya adalah pesan dari beberapa kiai senior agar orang-orang yang distigma sebagai 'Islam liberal' tidak masuk dalam kepengurusan NU.

Istilah Islam liberal, dalam arti generik, dilekatkan kepada siapa saja yang berpikiran progresif. "Orang-orang liberal itu harus tetap dihargai sebagai warga NU. Tapi untuk dijadikan pengurus perlu pertimbangan," kata KH. Ali Maschan Moesa, Ketua PWNU Jatim pada waktu itu.

Bahkan Komisi Taushiyah Muktamar NU yang digelar di Asrama Haji Donohudan itu memperkuatnya. Komisi itu menyatakan, agar pengurus NU dari berbagai tingkatan dibersihkan dari orang-orang yang berpaham liberal. Komisi *Bahts al-Masail al-Maudhu'iyyah* juga menolak metode hermeneutika yang dinilai sebagai agenda Islam liberal untuk menghancurkan Islam.

Paham ini menjadi momok bagi para petinggi NU. Sampai-sampai Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi pun musti turun tangan. "Saya minta nama NU tidak dibawa-bawa dalam gerakan pemikiran ini, karena bisa berakibat buruk bagi *jam'iyyah* NU yang komunitasnya sangat beragam," kata pengasuh Ponpes al-Hikam Malang itu ketika memberi sambutan dalam Muktamar Pemikiran Islam NU awal Oktober 2003 lalu, di Pesantren Salafiyah Syafi'iyyah, Situbondo. Pernyataan senada diulang Hasyim ketika memberi pidato pengantar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Muktamar NU ke-31 itu.

Tuduhan yang beredar di kalangan nahdliyin, adalah gerakan pemikiran anak-anak muda NU yang progresif telah melabrak batas-batas doktrin Islam.

Padahal, menurut Abdul Moqsith Ghazali, banyak sekali akar progresifisme pemikiran Islam yang dapat ditemukan dari tradisi pesantren. Moqsith mengungkap beberapa indikator. "Ber*hilah* (menyelaraskan hukum, *red.*) di dalam fikih banyak dilakukan para kiai NU. Penerimaan para kiai NU terhadap Pancasila sebagai satu-satunya asas merupakan cerminan dari progresifisme itu," ujar peneliti the WAHID Institute ini.

Al-Qur'an sendiri, tambah ustadz yang hafal beberapa kitab kuning ini, memiliki watak dan karakteristik yang progresif. "Dulu poligami dipraktekkan tanpa batas, maka al-Qur'an datang dengan membatasi jumlah perempuan yang boleh dinikahi, empat orang perempuan," jelas Moqsith.

Karena itu dia berani menyimpulkan, para Nabi dan

Rasul sesungguhnya orang-orang yang progresif. "Mereka menentang *monotoni* dan *status quo*. Di tengah masyarakat, mereka mendapatkan banyak caci-maki karena pandangan-pandangannya melawan arus dan mendobrak kemapanan."

Tapi, kecurigaan dan hujatan terhadap orang dan kelompok yang dianggap 'liberal' tetap terjadi, bahkan datang dari sesama anak muda NU sendiri.

'Bersih-bersih' di NU diikuti Muhammadiyah. Bahkan beberapa petinggi ormas yang lahir di Yogyakarta itu secara gamblang menyoal keabsahan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Mereka menduga, lembaga tempat berhimpunnya anak muda progresif di Muhammadiyah, itu membawa agenda Islam liberal.

Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus PP Muhammadiyah, Yunahar Ilyas mengatakan, organisasi dalam Muhammadiyah harus ditanwirkan atau dimuktamarkan. "Kalau jaringan itu berlawanan dengan Muhammadiyah, bagaimana?" katanya seperti dikutip situs Majlis Tabligh Muhammadiyah (25/8/2004) .

doc.WI/ Subhi

Forum JIMM

Bahkan dalam Sidang Komisi D Muktamar ke-45 yang berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung mempertanyakan keberadaan JIMM yang mereka sejajarkan dengan Jaringan Islam Liberal (JIL). Selain itu, JIMM dinilai membingungkan masyarakat bawah.

Walau mengusung hermeneutik, teori sosial, dan wacana *new social movement*, JIMM menolak stempel itu. Gerakan JIMM, jelas Ahmad Fuad Fanani, tetap pada ciri utama Muhammadiyah yang kuat dalam gerakan sosial (amal usaha). Hanya saja, JIMM berupaya memberi muatan baru.

"Tak cukup dengan kepedulian sosial, tapi pemihakan sosial untuk mengubah kondisi sosial," kata Program Officer Kajian dan Pelatihan JIMM itu.

Lahirnya organisasi itu, diawali dari keprihatinan kawula muda Muhammadiyah atas stagnasi tradisi berfikir di lingkungan Muhammadiyah. "Tradisi berfikir Muhammadiyah memang tertinggal jauh dari Nahdlatul Ulama (NU) yang selama ini justru dicap sebagai organisasi tradisional," aku Moeslim Abdurrahman, salah seorang mentor JIMM.

"Kebekuan itu akibat gelombang konservatisme yang semakin kuat di Muhammadiyah," jelas mantan Direktur Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSBPS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, Yayah Khisbiyah kepada Ahmad Suaedy dari the WAHID Institute di Melbourne, Australia.

Resiko memang akan selalu dihadapi para pendobrak kemapanan. Apalagi, jika yang ditabrak adalah kemapanan doktrin agama, utamanya teologi. Wacana teologi, kata Yayah, sangat sensitif bagi umat Muhammadiyah. Sehingga JIMM mudah dituduh macam-macam, karena berani mempersoalkan teologi yang mapan di Muhammadiyah," kata perempuan yang enggan aktif di JIMM karena merasa ilmu agamanya tak mumpuni ini.

Meski sempat gencar diserang, namun hasil akhir Muktamar Muhammadiyah tidak lagi menyinggung persoalan JIMM. Hanya saja agenda perjuangan perempuan Muhammadiyah untuk masuk dalam jajaran pimpinan Muhammadiyah terhadang. Karena menurut sebagian besar muktamirin, ide ini merupakan bagian dari gerakan feminisme yang mereka kategorikan sebagai cabang liberalisme.

Kendati beda tempat dan waktu, dua muktamar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu seolah bersepakat dalam agenda pembahasan. Selain memilih pucuk pimpinan, perhelatan akbar rutin itu juga menyorot fenomena munculnya generasi hibrida dalam tubuh organisasi Islam itu, yaitu nahdliyin dan warga muhammadiyah muda yang menguasai jurus-jurus 'liberal'.

Tak ayal, istilah Islam liberal menjadi 'musuh bersama' dua organisasi itu. Siapapun yang disifati istilah itu, sama artinya dengan sesat dan harus disingkirkan. Padahal kata tersebut memiliki beragam makna.

Di Belanda, partai liberal adalah yang paling konservatif dan rasis. Di Amerika, liberal kadang berarti progresif yang membela hak asasi dan sebagainya. Oleh sebab itu, Indonesianis dan Islamis Martin van Bruinessen mengatakan tak ada definisi mutlak Islam Liberal.

"Orang di Amerika juga tidak senang dengan cap Islam liberal yang dibangun oleh Charles Kurzman. Muslim di Amerika sendiri merasa ada problem makna antara Islam yang mereka kehendaki dengan liberalisme", ungkap pengajar dari Universitas Utrecht Belanda ini dalam diskusi di Kantor the WAHID Institute (12/7/05).

Sayangnya, keragaman makna itu tak pernah dipahami, baik oleh peserta Muktamar NU ke-31 maupun peserta Muktamar Muhammadiyah ke-45. Pokoknya, yang 'berbau' Islam liberal harus dienyahkan.

Tekanan kepada 'generasi hibrida' dua organsasi Islam kian menguat setelah MUI mengeluarkan 11 fatwa dalam Munas ke-7. Salah satu isinya yaitu mengharamkan liberalisme, sekularisme, dan pluralisme yang tokoh-tokoh kuncinya berasal dari NU dan Muhammadiyah.

Moderatisme mereka itu wajar saja karena organisasi yang dibesut KH. Hasyim Asy'ari pada 1926 dan KH. Ahmad Dahlan pada 1912 itu adalah ikon moderatisme Islam Indonesia. Tapi layaknya sebuah pendulum, sikap itu tidaklah statis. Kadangkala condong ke 'kanan' dan pada saat yang lain ke 'kiri', tergantung siapa aktor pengendalinya.

Sikap petinggi NU dan Muhammadiyah pada beberapa kasus, seperti dukungan 'pemberangusan' Jamaah Ahmadiyah, penutupan beberapa tempat ibadah di Jawa Barat, dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pluralisme, liberalisme, dan sekularisme, menunjukkan kecenderungan ke 'kanan'. Sikap itu tidak bisa digeneralisasi, namun dominannya pengurus MUI, yang juga sibuk di NU dan Muhammadiyah, secara tidak langsung telah mewarnai benak dua ormas itu.

Sampai di sini kita patut bertanya, apakah NU dan Muhammadiyah masih berada dalam jalur 'moderatisme'? Bagaimana masa depan Islam moderat pasca Muktamar NU ke-31 dan Muhammadiyah ke-45?

Martin van Bruinessen pernah mengatakan, masa depan pemikiran Islam moderat di Indonesia kian suram pasca kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif dari pucuk NU dan Muhammadiyah. Mudah-mudahan tengara Martin ini tidak terbukti.

Gamal Ferdhi, Rumadi, Nurul H Maarif

PLEDOI DARI BUYA DAN KIAI

dok.WI/ Gamal Ferdhi

A. Syafi'i Maarif

KETIKA *mainstream* petinggi Islam bahu-membahu menghalau laju pemikir muda progresif yang mereka cap liberal, dua tokoh kunci Islam Indonesia Ahmad Syafi'i Ma'arif dan Abdurrahman Wahid memiliki pandangan berbeda terhadap aksi anak-anak muda yang sebagian besar dari NU dan Muhammadiyah ini.

Buya demikian Ahmad Syafi'i Ma'arif biasa disapa, meminta penyikapan terhadap kontroversi Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) harus dilakukan dengan sopan dan dialog. "Ini cara yang beradab menurut Islam", papar Ketua Umum PP Muhammadiyah 2000-2005 ini saat menyampaikan pidato *iftitah* Sidang Tanwir Muhammadiyah di Basement UMM Dome, Malang, Jumat (1/7/2005).

Menurutnya, banyak organisasi intelektual muda

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Gus Dur di depan massa

Muhammadiyah seperti Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah (PM), maupun Nasyiatul Aisyiyah (NA). Jadi kenapa JIMM, yang memproklamirkan diri sebagai jaringan intelektual, harus dibenci?

"Kalau tidak difasilitasi, persyarikatan (Muhammadiyah, *red.*) juga yang akan rugi," tegasnya.

Selain itu, Buya menyambut gembira kemunculan JIMM. "Hiburan tersendiri mendengar JIMM. Ternyata potensi kita luar biasa. Hanya saja selama ini belum manifes," katanya kala membuka acara *Tadarus Pemikiran Islam: Kembali ke al-Qur'an, Menafsir Makna Zaman*, 18-20 November 2003 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jawa Timur yang diprakarsai JIMM.

"Saya sujud syukur membaca tulisan-tulisan Anda (anggota-anggota JIMM.*red*)," imbuhnya.

Sedang Gus Dur, panggilan akrab KH. Abdurrahman Wahid, menyesalkan reaksi negatif kaum nahdliyin terhadap aktifitas anak muda progresif di NU. Menurut Gus Dur, munculnya arus progresifisme itu terkait persoalan-persoalan di kalangan kaum muslim.

"Karena ia khawatir pendapat 'keras' akan mewarnai jalan pikiran kaum muslim pada umumnya. Mungkin juga, ia ingin membuat para 'muslim pinggiran' merasa di rumah mereka sendiri (*at home*) dengan pemahaman mereka," tulis Gus Dur dalam kolom berjudul *Ulil dengan Liberalismenya*.

Ketakutan kaum muslim terhadap kebebasan berfikir, diperkirakan Gus Dur, akan memunculkan dua sikap. *Pertama*, 'larangan terbatas' untuk berpikir bebas. *Kedua*, sama sekali menutup diri terhadap kontaminasi (penularan) dari proses modernisasi.

Sikap-sikap tersebut, tentu saja, memiliki konsekuensi masing-masing. "Konsekuensi dari sikap pertama akan melambatkan lahirnya pemikiran moderat dalam dunia Islam. Padahal pemikiran-pemikiran ini harus dimengerti oleh mereka yang dianggap sebagai orang luar"," tulis Gus Dur.

Sedang konsekuensi sikap kedua, jelas pendiri the WAHID Institute ini, puncaknya dapat berwujud radikalisme yang bersandar pada tindak kekerasan. "Dari pandangan inilah lahir terorisme yang sekarang 'menghantui' dunia Islam," tegas cucu pendiri NU ini.

Karena itu, Gus Dur mengajak umat Islam untuk terus mengembangkan pemikiran Islam. "Hanya dengan cara menemukan' pemikiran seperti itu, barulah Islam dapat berhadapan dengan tantangan sekularisme," tandas Gus Dur.

Gamal Ferdhi

GUS DUR :

LIBERALISASI TAK PERLU LABEL

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) termasuk tokoh yang merespon positif munculnya trend pemikiran progresif di kalangan anak-anak muda NU. Ketua Umum PBNU tiga periode ini mengakui, NU berperan liberalisasi, tapi pelabelan akan membuat peran itu gagal. Berikut wawancara Subhi Azhari dari the WAHID Institute dengan mantan Presiden RI itu, di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (10/10/05).

Abdurrahman Wahid

Bagaimana Gus Dur melihat trend pemikiran progresif di kalangan anak muda NU saat ini?

Itu tidak bisa dicegah. Sekarang *kan* pikiran anak muda NU lain dengan pikiran NU. Di NU sendiri mereka tidak kerasan dan kalau dibiarin terus begini bisa rontok. Kita tidak usah jauh-jauh. Di pesantren sendiri sudah mulai rontok. Orang tidak mau lagi ngomong dengan NU, tapi malah ke parpol. Ini akibat pengaburan sisi-sisi politik dan bisa menimbulkan bahaya baru. Jadi suatu ketika harus ada revolusi di NU. Jika tidak, NU menjadi tidak relevan atau mungkin NU jadi sendirian.

Mungkinkah kelak generasi muda yang progresif memimpin NU?

Bisa saja, tergantung keberaniannya merebut. Yang bagus-bagus kayak Nasaruddin Umar dan lain-lain, sekarang sedang '*berantem*' dengan yang tua-tua. Kalau mereka (sayap progresif, *red.*) menang, berarti NU masih bisa diperbaharui dan bisa ditolong. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah.

Bagaimana Gus Dur melihat liberalisme di NU?

Nahdlatul Ulama itu gerakan yang tidak mempunyai pengertian liberalisasi. Itu *kan* muncul belakangan. Padahal NU itu gerakan yang dari waktu ke waktu melakukan peremajaan. Umpamanya sistem sekolah yang tadinya kuno sekali, lalu datang ayah saya (KH. Abdul Wahid Hasyim, *red.*) dan KH. Abdullah Ubaid memulai gerakan untuk memodernisir pendidikan.

Apakah upaya para kiai itu termasuk liberalisasi?

Ya jelas, tapi mereka tidak berfikir begitu. Makanya saya selalu bilang, liberalisasi di NU itu gagal kalau pakai label. Tapi pada dasarnya, NU itu fungsinya liberalisasi.

Apakah warga NU sudah siap menerima pemikiran-pemikiran seperti itu?

Itulah, *labelling* itu tidak berguna, NU liberal, NU apa, *nggak* perlu itu. Saya ini *diapa-apain* ya NU liberal. Tapi saya tidak mau formalitas itu. Sebab saya merasa diri saya juga ada sisi kuno, ada sisi modern. Dari dulu anak muda itu saya dorong terus. Orang yang tradisional tetap saja menganggap saya tradisional dan memang iya. Karena, bagi saya hal-hal yang baik harus kita terusin. Yang tidak baik kita ubah atau buang. Umpamanya menghormati yang tua, pergaulan yang bagus, itu tempatnya NU di masyarakat.

Jadi, liberalisasi itu inheren dalam NU?

Iya. Walaupun selalu ada ruang untuk hal-hal yang 'tidak masuk akal', seperti orang ke kuburan dan mencari berkah dari orang yang sudah meninggal.

Fenomena itu tidak pernah bisa hilang?

Betul. Malah NU makin lama makin besar. Padahal secara teoritik, meskinya tambah kecil, karena yang liberal tambah banyak.Tapi ini malah terbalik. Ha ha ha…

Perhelatan Islam

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Jejak Agamawan Organik

Belakangan ini, wilayah politik praktis lebih menggiurkan minat agamawan. Makin sedikit tokoh agama yang peduli pada problem empirik masyarakatnya. Berikut kiprah mereka yang masih menapaki peran sedikit itu.

Semilir angin melambaikan deretan nyiur di Pesantren al-Urwatul Wutsqaa, Sidenreng Rappang (Sidrap). Tampak di beranda salah satu rumah dalam komplek pesantren itu, H. Anwar Imran Mu'in Yusuf (33 tahun) tengah melepas lelah. Imran baru pulang menghadiri *workshop* nasional the WAHID Institute, di Kota Padang. Tiga hari acara ditambah dua hari perjalanan pergi pulang, membuatnya lelah.

Ulama muda itu memanfaatkan waktu bersantainya sembari menambah ilmu. Di tangannya, tampak kitab karya mantan pemimpin tertinggi Universitas al-Azhar Mesir, Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi berjudul *al-Fatawa al-Kubra* (Fatwa-fatwa Agung, *red.*).

H. Anwar Imran Mu'in Yusuf

Gurutta Imran, demikian ia biasa dipanggil, memang mumpuni dalam memahami kitab-kitab Islam klasik. Ia juga tergolong 'darah biru' ulama Sidrap, karena masih cucu ulama besar Anre Gurutta H. Abdul Mu'in Yusuf. Beliau adalah Ketua MUI Sulawesi Selatan periode 1987-1997 yang digelari Kali Sidenreng (hakim agama di Sidenreng, *red.*). Meski memiliki dua modal besar itu, namun Gurutta Imran tak segan mengkritisi MUI, jika tak lagi berjalan sesuai prinsipnya. Ketegasan sikap Imran diperlihatkan ketika Munas MUI 2005 mengeluarkan 11 fatwa menghebohkan. Pengasuh Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa ini menyatakan keluar dari keanggotaan MUI Sidrap. "Fatwa-fatwa itu tidak lagi menunjukkan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*," tegasnya.

Bukan hanya itu, Gurutta Imran turut membela hak-hak komunitas agama Tolottang yang diberi label oleh pemerintah sebagai pemeluk Hindu. "Mereka adalah bagian dari masyarakat Sidrap yang hak-hak publiknya harus dijamin," ujarnya.

Alumnus Universitas al-Azhar Mesir ini memang tidak punya banyak waktu untuk sekedar bersantai. Selain menjadi

pengasuh pesantren dengan 400 orang santri, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di luar pesantren, seperti diskusi, seminar, advokasi kebijakan publik, hingga pendampingan masyarakat lokal.

Seabreg kegiatan sosial yang datang, ditunaikannya tanpa pandang bulu. "Tidak ada persoalan. Karena kita ini *khadimul ummah* (abdi masyarakat, *red.*)," kata suami Hj. Kasmawati R. Mahmud ini.

Menurutnya, seorang agamawan harus mampu mengartikulasikan realita. "Juga menjadikan spirit ketuhanan sebagai alat kritik sosial serta respon terhadap berbagai bentuk ketidak-adilan di masyarakat," tegas Imran

Gurutta Imran adalah satu figur agamawan muda muslim yang dibutuhkan publik. Memiliki karakter keberagamaan kuat, kemampuan intelektual mumpuni, namun tak abai membaca situasi sosial politik yang ada di sekelilingnya. Meminjam istilah Antonio Gramsci, sosiolog Italia, figur jenis ini disebut sebagai intelektual organik, yakni intelektual yang melakukan perubahan bersama masyarakat.

Peran sebagai aktor perubahan juga dimainkan sebagian agamawan, yang oleh Moeslim Abdurrahman disebut sebagai agamawan organik. Mereka tak sebatas membimbing ritualitas dan spiritualitas umat, tapi menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat tentang asal penindasan dan bagaimana menyikapinya.

Karena itu, isu-isu ketidakadilan, HAM, konflik perburuhan, petani, persoalan jender, pemberantasan korupsi, permberdayaan ekonomi, penyelamatan lingkungan dan masalah pendidikan, menjadi bidang kerja para agamawan organik ini.

Tak jauh beda dengan Imran, Tuan Guru Haji Syamsul Hadi Muhsin, 40 tahun, mengambil peran membangun perekonomian masyarakat. Pengasuh Pondok Pesantren Nurussabah, Batunyala Praya, Lombok Tengah yang mumpuni dalam ilmu-ilmu keislaman klasik ini tergugah melihat ketertinggalan ekonomi dan pendidikan masyarakat sekitarnya.

Syamsul memang hobi bertani. Dengan memadukan ilmu keagamaan dan teknik bertani dari khazanah pengetahuan modern, lulusan Universitas al-Azhar Mesir 1994 ini pun mengajak masyarakat menyulap lahan tidur menjadi produktif. Dipilihlah tanaman jahe. Di samping mudah pembudidayaannya, prospek pasar tanaman itu di dalam dan luar Lombok memang menjanjikan. Dengan modal jejaring LSM kenalannya, ia mencari bibit jahe.

Syamsul pun membentuk dua kelompok tani. Masing-masing beranggotakan 30 petani yang mengelola lahan tidur seluas 10 hektare di Desa Cempaka, Kecamatan Mantang, Lombok Tengah. Sedang 15 petani lainnya mengelola 5 hektare lahan tidur di Pulau Gili Air, Lombok Barat.

Ketika panen jahe kelompok binaan Syamsul memuaskan, puluhan kelompok petani lain berbondong-bondong mengikuti jejaknya. "Karena upaya ini konkrit mereka antusias," katanya.

Kemudian bersama the WAHID Institute, Wakil Ketua Aliansi Pondok Pesantren Antikorupsi (AP-PAK) se-NTB ini, berniat mendirikan Koperasi Sejahtera untuk mewadahi animo para petani di daerahnya pada April 2005.

Jejak keberpihakan kepada masyarakat juga dapat ditemui dalam diri Bahruddin, 40 tahun. Pria yang lahir di Desa Kalibening, sebuah desa sejuk di Kecamatan Tingkir, Salatiga ini alumni dan pengajar di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Salatiga pimpinan KH. Mahfud Ridwan. Mahfud juga dikenal sebagai tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat akar rumput.

Dari pergumulannya dengan masyarakat setempat, Bahruddin turut membidani kelahiran kelompok tani al-Barakah yang ia artikan berkah dari alam. Program kelompok itu beragam. Bukan hanya cara mengatasi hama dan irigasi, pentingnya pertanian organik sebagai sistem pertanian terpadu juga menjadi perhatian mereka.

"Saya mendirikan lembaga pendidikan dan berbagai lembaga itu bersama masyarakat dengan hasil yang luar biasa. Itu menunjukkan, bahwa mereka punya kemandirian dan kearifan," jelas ayah tiga anak ini.

Pengalaman ini membuatnya kritis terhadap para aktivis yang menganggap masyarakat hanya sebagai obyek proses perubahan. "Masyarakat memiliki potensi yang tidak pernah terekspos. Kita sering melupakan hal tersebut," imbuhnya.

Saat ini Bahruddin dipercaya menjadi Direktur SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah. Lembaga ini dikenal sebagai salah satu sekolah alternatif yang berbasis pada komunitas dengan prinsip pendidikan murah. Sekolah ini begitu dekat dengan masyarakat sekitar, karena didirikan bersama mereka.

Walau Qaryah Thayyibah cukup kesohor dan menjadi tujuan orang tua murid menyekolahkan anaknya, namun Bahruddin enggan mendirikan asrama. "Kalau ada siswa dari luar wilayah Salatiga, meski berasal dari keluarga kaya, dia harus mau mukim bersama masyarakat di sini," kata lulusan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, kampus Salatiga ini. Tujuannya agar masyarakat sekitar turut mendapat 'berkah' dari hadirnya sekolah ini.

Seperti halnya Bahruddin, keyakinan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan juga mengilhami Ahmad Najib Wiyadi, 31 tahun.

Menurutnya, beribadah bukan hanya membaca al-Qur'an, shalat, haji atau puasa. Misi utama seorang muslim adalah membebaskan seseorang atau sekelompok orang dari derita kemiskinan, kebodohan, ketertindasan, perlakuan tidak adil, diskriminasi struktural, dan penggusuran. "Itu misi Islam sebagai agama rahmat," tegas Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Sleman tahun 1998-1999 ini.

Dari pemahaman itu, Wiyadi bersama beberapa aktivis IMM mendirikan Rumah Singgah Ahmad Dahlan pada 1999. Selanjutnya, berkembang menjadi Pondok Pesantren Anak Jalanan Ahmad Dahlan.

"Anak-anak itu tidak mempunyai apa-apa. Namun mereka tetap harus hidup dan menapak hari depan, seperti anak-anak yang lain. Itu bukan salah mereka," ujar alumnus Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga ini.

Di pesantren anak jalanan ini, Wiyadi mendidik para santrinya agar mandiri dan belajar hidup layaknya anak-anak pada umumnya. "Dua tahun lalu, rutin mandi, gosok gigi, serta memakai sandal saja, sudah prestasi besar," kenang suami Yuke Nurdiana Andiani ini.

Kini, 56 santrinya ditempatkan dalam tiga kelompok. Santri yang masih sulit dibina, sebanyak 31 anak, ditempatkan di rumah singgah. Sedang 17 anak yang sudah agak tertib, dimukimkan di pesantren anak jalanan, yang berlokasi di Selokraman, Kota Gede, Yogyakarta. Sisanya, 8 anak, ditempatkan di pusat pelatihan.

Wiyadi juga membimbing santrinya berwirausaha. Mulai dari pengumpul kertas bekas, jualan *ballpoint*, maupun memelihara ikan hias. Meski sudah menunjukkan kemajuan,

Wiyadi tetap bercita-cita agar santri binaannya mampu lebih mandiri.

"Intinya menjadikan mereka bisa mendidik, memimpin dan mengorganisir diri sendiri untuk melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan penggusuran dan melawan apa saja yang membuat mereka tidak berdaya, sekaligus tidak tergantung kepada siapapun, termasuk negara," ujar mahasiswa pascasarjana Jurusan Pengembangan Hukum Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.

Spirit pembebasan itu, tegas Wiyadi, berasal dari al-Qur'an yang memerintahkan agar berpihak kepada kaum *mustadl'afin* (yang dilemahkan, *red.*) atau kaum proletar.

Pembelaan serupa juga dilakukan KH. Muhammad Yusuf Chudlori, 32 tahun, yang akrab disapa Gus Yusuf. Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam, Tegalrejo, Magelang ini dekat dengan masyarakat, utamanya masyarakat lereng gunung Merapi dan Sumbing.

Bersama Sutanto Mendut, seniman Magelang, Gus Yusuf menggagas berdirinya Komunitas Merapi. Melalui komunitas ini digelar berbagai kegiatan, seperti kesenian gunung, pemberdayaan masyarakat gunung, juga festival gunung.

"Di sela-sela festival misalnya, kita mengadakan dialog dengan masyarakat seputar persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan cara itu komunikasi kita bisa terbuka dan cair," jelas alumni Ponpes Lirboyo 1994 ini.

Kiat itu diadaptasi Gus Yusuf dari mendiang ayahandanya, KH. Chudlori. Kiai Chudlori lebih menganjurkan membeli gamelan ketimbang membangun masjid di komunitas masyarakat gunung. "Pertimbangannya sederhana. Gamelan adalah sarana bagi masyarakat untuk berkumpul, sehingga ada ruang persemaian nilai bersama yang dibangun," ujarnya.

Pengelola radio FM yang dinamakannya Fast, kependekan dari *fastabiqulkhairat*, ini juga mendampingi korban narkoba melalui Komunitas Gerakan Antinarkoba dan Zat Adiktif (Komganaz). Selaku salah satu presidium gerakan itu, ia banyak menggelar dialog-dialog di kampus, sekolah, juga masjid. "Kita mengadakan pendekatan preventif," katanya.

Kesadaran untuk terus memikirkan nasib masyarakat pinggiran, menurut ayah dua putra ini, antara lain bersumber dari doktrin Islam. "Di Islam kita dituntut untuk *ta'awanu* (saling tolong-menolong, *red.*) dan *rahmatan* (sayang, *red.*) kepada seluruh makhluk," tegas Gus Yusuf.

"Selain itu, karena saya hidup di kaki gunung, maka saya mendirikan Akademi Gunung," imbuhnya lagi.

Melalui Akademi Gunung ini, Gus Yusuf memfasilitasi pemasaran hasil pertanian masyarakat kaki Merapi dan Sumbing, seperti kubis, kentang, sayur-sayuran, tembakau, dan lain sebagainya.

Ia memang bangga dengan kehidupan masyarakat gunung. "Di gunung, masih banyak hal yang *genuine*. Masyarakat perkotaan resah soal lonjakan ekonomi dan BBM, masyarakat gunung justru lebih *survive*," terangnya. Kemandirian masyarakat gunung ini pun disampaikannya dengan seloroh, "Sampai soal Fatwa MUI, masyarakat gunung juga tidak terpengaruh."

Gus Yusuf juga tak segan mengkritik sikap banyak kiai yang hanyut dalam arus politik. "Akibatnya, ruang kultural yang dulunya menjadi basis kiai semakin tergeser oleh fenomena munculnya dai-dai instan yang cenderung melepaskan pandangan agama terhadap realitas sosial yang ada," tegasnya.

dok. Wiyadi

Anak asuh Rumah Singgah Ahmad Dahlan

Karena itu, ia menuntut kalangan elite pesantren untuk kembali bersama-sama menemani rakyat kalangan bawah, mulai dari petani, buruh dan komunitas marginal lainnya.

Tuntutan Gus Yusuf penting didengar, terutama setelah banyak kiai dan agamawan yang terlalu larut dalam pusaran politik praktis. Akibatnya, tak tersedia cukup waktu untuk mengurus problem nyata jamaah sekitarnya.

Kita semakin kehilangan agamawan yang menurut Hiroko Horikoshi (1976), selain mampu berperan sebagai alat penyaring informasi yang masuk ke lingkungan santri, juga berperan kreatif dalam perubahan sosial.

Forum agamawan kerap bersuara lantang menjelang muktamar, pemilu, suksesi gubernur/bupati atau *reshuffle* kabinet. Tapi ketika kenaikan BBM mencekik, penggusuran maupun diskriminasi merajalela, suara mereka nyaris tak terdengar.

Memang, tak semua agamawan melupakan *khittah*-nya sebagai pembela kaum miskin dan tertindas. Lahirnya agamawan muda yang kritis merupakan bukti masih adanya kesadaran itu. Jika di lingkungan Muhammadiyah perjuangan itu lebih banyak melalui jalur institusi, di NU justru lebih bergerak di level individu (baca: *Untuk Umat dari Pinggir Pagar*).

Tampilnya agamawan organik itu, seolah menjadi oase di tengah kemarau figur agamawan seperti KH. Hasyim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama dan KH. Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk kepentingan masyarakat. Kita rindu kiai seperti itu.

M. Subhi Azhari, Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi

NYAI HJ. SITI RUQAYYAH MA'SHUM

ADA UNTUK BERKHIDMAT

BERBAGAI poster dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab memenuhi dinding Musholla al-Ma'shumiy di Prajekan, Bondowoso. Semua mengekspresikan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Baik kesetaraan dalam rumah tangga, masyarakat maupun pemerintahan. "*Ma akramahunna illa karim wa ma ahanahunna illa la'im* (Hanya orang mulia yang memuliakan perempuan dan hanya orang hina yang menghinakan perempuan)." Begitu bunyi salah satu poster pembelaan atas perempuan yang dinukil dari petuah Sahabat Ali bin Abi Thalib, yang anggun terpampang di sana.

DOK.WI/ WITJAK

Hj. Siti Ruqayyah Ma'shum

Mushalla berkeramik putih itu disesaki tak kurang 250 ibu-ibu Majlis Ta'lim al-Ma'shumiy. Mereka yang berumur antara 25 sampai 70 tahun itu rela berhimpitan untuk *nyare elmu* (mencari ilmu, *red*.) pada Nyai yang sore itu terlihat membaca baris-baris kitab kuning. al-Qur'an dan beberapa kitab klasik lainnya tampak tertumpuk di atas dampar kecil di sampingnya. Sejurus kemudian, Nyai Hj. Siti Ruqayyah Ma'shum, 35 tahun, menerjemahkan sekaligus menguraikannya dalam Bahasa Madura.

Dengan cara inilah, perintis sekaligus pengasuh Ponpes Putri al-Ma'shumiy, Jl. Raya Prajekan, Bondowoso, Jawa Timur itu, menanamkan nilai-nilai kesetaraan perempuan dan laki-laki. "Saya menggunakan cara yang dipahami masyarakat untuk memberi pemahaman tentang kesetaraan ini," ujarnya kepada Ahmad Suaedy dari the WAHID Institute yang bertandang ke padepokannya.

Aktivitas itu hanyalah salah satu rutinitas Nyai Ruqayyah, di samping mengasuh sedikitnya 30 santri putri berusia antara 9-15 tahun. Perempuan berputera satu kelahiran Bondowoso, ini terkenal gigih memperjuangkan keadilan bagi perempuan dari aneka tindak kekerasan, diskriminasi dan pelecehan.

Tidak terbatas di forum pengajian, ia juga melayani konseling gratis kepada masyarakat sekitar, kapan saja. "Karena saya di kampung, problem apa saja, siapa saja, selalu dibawa ke sini," jelas Nyai yang kerap mendampingi perempuan korban perkosaan di Jember dan Bondowoso ini.

'Nasib' seperti telah menggariskannya sebagai pejuang bagi perempuan. "Allah berkehendak terhadap membuminya keadilan. Saya melakukan semua itu karena misi ini," ujarnya.

Ruqayyah yang secara kultural adalah warga NU, memilih berjuang di luar garis organisasinya. Ini berbeda dengan kiprah sekelompok perempuan urban di Jakarta yang tergabung dalam Aisyiyah. Atas dukungan Kedutaan Besar Australia, organisasi perempuan *onderbouw* Muhammadiyah ini membantu korban bom yang meledak di depan Kedutaan Besar Australia 9 September 2004.

Mereka dipilih bukan saja karena sifat kerelawanan yang telah tumbuh dan mengakar pada banyak anggotanya, juga karena mereka memiliki jaringan sekolah, rumah sakit dan balai kesehatan. Bantuan Pemerintah Australia sebesar 1 juta dollar Australia itu disampaikan langsung oleh Dubes Australia David Ritchie. "Bantuan itu untuk mendorong keluarga korban mencapai kemandirian, termasuk menuntaskan pendididkan anak-anaknya," kata Ketua Bagian Pembina Kesejahteran Sosial Aisyiyah Hj. Nurni Akma.

Dengan struktur organisasi yang mapan, Aisyiyah mudah menggerakkan anggotanya untuk membantu korban bencana di daerah manapun. Lembaga ini dinilai sebagai satu-satunya organisasi Islam yang paling siap menangani korban, tidak hanya dalam tahap *emergency* (gawat darurat) juga tahap *recovery* (pemulihan).

Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi

dok.WI/ Witjak

JASAD TANPA RUH

Oleh: dr. Rumadi
Peneliti The WAHID Institute

KANG Sobari merasa gelisah dan malu setelah bertemu seorang teman lamanya. Pasalnya, si kawan yang tidak berpendidikan tinggi itu mampu mendirikan dan mengelola sebuah lembaga pendidikan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Sementara saya, kata penulis buku *Kang Sejo Melihat Tuhan* ini, dengan pendidikan tinggi, hidup di Jakarta, menjadi 'selebriti', tapi belum menyumbangkan suatu apapun untuk masyarakat. "Masih lebih bermakna kawan di kampung itu daripada saya," lanjutnya.

Ungkapan jujur Kang Sobari itu merupakan kegelisahan banyak orang, terutama para 'santri urban' yang semakin kehilangan akar. Agamawan menjadi 'selebriti' yang berkhotbah dari satu stasiun TV ke stasiun TV lain. Selalu menjanjikan surga melalui layar kaca. Tak dituntut kedalaman ilmu, hanya dengan retorika yang baik plus suara merdu, sudah lebih dari cukup. Di layar TV itu, agamawan kita bagaikan 'penjual obat' yang kesepian.

Padahal kalau diperhatikan, para agamawan pada awalnya sangat dekat dengan masyarakat. Mereka hidup bersama masyarakat dan melakukan aktifitas yang manfaatnya secara langsung dirasakan masyarakat sekitar. Lihat misalnya, KH. Hasyim Asy'ari, KH. As'ad Syamsul Arifin dan kiai-kiai sepuh lainnya. Mereka bukan sekedar ulama pandai berceramah, tapi juga *social worker* yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat sekitar.

Zaman telah berubah. Peran-peran pastoral agama semakin tidak populer. Jalan pintas menuju popularitas, baik secara politik maupun ekonomi, lebih menjadi pilihan. Kalau toh misalnya, ada tokoh agama yang mempunyai banyak pengikut, 'dirubung' banyak orang, dikunjungi tokoh-tokoh politik, hal itu lebih karena wibawa spiritualitasnya atau karena keturunan orang yang disegani. Ujung-ujungnya, hal itu modal politik.

Dalam situasi demikian, kritik dan kontrol terhadap 'selebriti agama' sangat penting diberikan. Agama harus menjadi spirit untuk melakukan perubahan, bukan untuk mencari popularitas. Popularitas memang bukan barang haram, tapi bukan di situ esensi agama.

Di sinilah pentingnya kita berfikir ulang tentang agama dan segala bentuk ekspresinya. Namun, *rethinking* itu harus diorientasikan untuk mengembalikan fungsi transformasi agama. Hal ini penting, karena jika agama sudah kehilangan fungsi, ini sama artinya ia kehilangan ruh. Sebab itu, meski jasad agama masih tampak segar dan tegar, pada dasarnya ia tidak mempunyai ruh. Ibaratnya jasad tanpa ruh.

Agama seperti ini lebih menunjukkan kebesaran fisik daripada kebesaran jiwa. Isu-isu yang dimunculkan pun isu-isu fisik agama, seperti rebutan jumlah pemeluk, tempat ibadah, aliran sesat dan seterusnya. Akibatnya, ummat beragama menjadi sangat sensitif dengan isu-isu fisik kuantitatif daripada isu-isu kualitatif.

Sampai di sini, saya tiba-tiba terpikir, apa yang sebenarnya didapatkan ketika banyak orang mengencangkan 'urat leher'nya memperdebatkan Islam liberal dan Islam fundamentalis. MUI mengeluarkan fatwa ini dan itu untuk paham dan pendapat yang dianggap berbahaya. Bahkan ada yang berencana membunuh kawan seagama, karena pikirannya dianggap berbahaya, menyerang aliran agama yang dianggap sesat, dan melakukan pengeboman di mana-mana.

Apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Agamakah? Rasanya terlalu ceroboh kalau hal itu dilakukan untuk melindungi agama, membesarkan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang memperebutkan 'pepesan kosong' yang tidak mempunyai dampak apapun terhadap kehidupan masyarakat. Imajinasi keberagamaan kita terlanjur dibangun untuk membela hal-hal 'atas' yang abstrak. Bukan untuk membela hal-hal yang konkrit. Agama menjadi identik dengan masalah abstrak. Sedang yang konkrit dianggap sebagai masalah sekuler yang tidak ada kaitannya dengan agama.

Sebab itu, agama tidak bisa berlama-lama berada dalam kondisi ini. Jasad dan ruhnya harus segera disatukan untuk mengembalikan fungsi pembebasan agama. Singkatnya, agamawan organik merupakan prototipe manusia beragama yang mampu menyatukan jasad dan ruh itu.

NURLAILA DIRYAT, adalah Direktur Salma Fareeha, lembaga yang beranggotakan ibu-ibu pedagang sayur, tahu, bawang, cabe dan hasil bumi lainnya. Dengan 500 orang anggota, kelompok itu melahirkan program modal swadaya dalam bentuk kredit bergulir kepada setiap anggota. "Melalui program ini, bisa sedikit meringankan beban mereka yang sebagian besar adalah tumpuan keluarga," ujar perempuan yang tengah merampungkan program doktoralnya di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Untuk memonitor program itu, perempuan kelahiran Banyumas, ini harus rela bolak-balik Jakarta-Purwokerto. Lewat Salma Fareeha, Nurlaila juga melakukan pendampingan para pekerja seks komersil (PSK) dan anak-anak jalanan.

dok.WI/ Witjak

Nurlaila Diryat

KH. DIAN NAFI', mengasuh Pondok Pesantren al-Muayyad, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Pria kelahiran Windan Sukaharjo ini menyatakan spirit agama merupakan pendorong paling kuat untuk melahirkan perdamaian, persaudaraan dan rekonsiliasi antar umat manusia. Prinsip itu ia tanamkan pada santri-santrinya.

Bahkan suami Murtafiah Mubarokah ini mempraktekkannya dengan terjun langsung membantu rekonsiliasi di Maluku yang dilanda konflik sejak tahun 1999. "Jika kita berhasil memfasilitasi rekonsilliasi, maka kita tidak berhak atas pujian, karena mereka lah yang telah bersedia melakukan rekonsiliasi. Itu hak mereka," ujar Dian mengenang pengalamannya di Maluku.

Subhi Azhari, Nurul H. Maarif

KH. Dian Nafi'

UNTUK UMAT DARI PINGGIR PAGAR

ACEP ZAMZAM NOOR, adalah Mualim (panggilan anak ulama di Jawa Barat, *red.*) kelahiran Tasikmalaya yang sempat nyantri di Pesantren As-Syafi'iyah, Jakarta. Namun putera mantan Rais 'Aam PBNU KH. Ilyas Ruchyat ini lebih menyenangi profesi sebagai penyair dan pelukis. Hingga pada 1991-1993 ia belajar di Universita Italiana per Stranieri, Italia, atas beasiswa dari Pemerintah Italia.

Karena kecintaannya kepada dunia seni, Acep lebih memilih aktif di luar pesantren dengan mendirikan Sanggar Sastra Tasik dan Partai Nurul Sembako. "Pesantren sudah banyak yang menggarap. Saya justru keluar bertemu teman-teman luar pesantren," ujarnya.

Diakuinya pesantren tidak menyediakan sarana apa pun untuk menjadi seniman, tapi ada nuansa pesantren yang bisa membuat orang menjadi apa saja. Menurut Acep, dengan berpuisi kita menjadi peka terhadap lingkungan, peka terhadap ketidakadilan, dan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan orang banyak.

dok.WI/ Witjak

Acep Zamzam Noor

Menanam Gerakan Menuai Kesetaraan

Santriwati di sebuah forum

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Gerakan perempuan Islam di Indonesia lebih matang ketimbang negeri muslim lain. Fase rintisan telah dilewati dengan kerja keras nan panjang

Markas Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) Yogyakarta terlihat riuh. Siang itu digelar diskusi peran agama dalam mengonstruksi relasi lelaki dan perempuan. Panas akhir Juli 2003 itu semakin terasa di sudut ruang kantor tak berpendingin itu.

Di sana terlihat Ziba Mir-Hosseini, feminis Muslim asal Iran bersimpuh penuh peluh. Ia tak mengeluh, bahkan sumringah begitu forum tersebut menyaksikan film dokumenter arahannya, *Divorce Iranian Style*. Film ini menggambarkan potret buram perempuan Iran di dunia perkawinan.

Di negerinya, film yang menampar wajah peradilan agama Iran itu tak boleh tayang. Justru di Indonesia diputar di hadapan santri lelaki dan perempuan dalam satu ruangan, tanpa hijab. "Aku iri," ujar Ziba berulang kali.

Alasannya, pemisahan ruang bagi lelaki dan perempuan adalah persoalan besar bagi kaum feminis Muslim di negeri-negeri Muslim. Namun di Indonesia, isu pemisahan ruang dianggap telah usai dan nyaris tak pernah menjadi isu teologis, walau bukan berarti tak pernah berhadapan dengan persoalan itu.

Syahdan, H. Agus Salim pernah jengkel saat hendak ceramah di depan anggota Jong Islamiten Bond pada 1930-an, karena melihat tabir yang menghalangi pandangan peserta perempuan. Ulama masa pergerakan ini menarik kain pembatas forum itu. "Pembatasan ruang adalah kebiasaan bangsa Arab, bukan perintah Islam," katanya beralasan.

Siti Ruhaini Dzuhayatin yang melakukan studi ceramah Agus Salim berpendapat, tindakan ulama besar itu menunjukkan Islam menghormati kaum perempuan. "Islam memberi hak yang sama bagi lelaki dan perempuan untuk memperoleh pengetahuan," katanya.

Perjuangan perempuan memperoleh haknya berawal dari keberanian R.A Kartini menggugat tradisi dan agama yang berkelindan dengan politik jajahan. Kartini menuntut hak pendidikan kaumnya. Upaya ini diikuti Nyai Ahmad Dahlan yang selalu menganjurkan kaum perempuan berkiprah di masyarakat. Suaminya, KH. Ahmad Dahlan, yang memberi inspirasi. Pendiri Muhammadiyah itu pernah berkata, "Pekerjaan dapur jangan dijadikan penghalang untuk menjalankan tugas dalam masyarakat."

Anjuran itu membangkitkan minat perempuan melakukan aktivitas sosial. Pada 1914, Nyai Dahlan mendirikan perkumpulan Sopo Tresno. Perkumpulan itu melahirkan Aisyiyah pada 1915. Organisasi perempuan yang bergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah pada 1922 itu, memilih pendidikan sebagai alat perjuangan bagi kemajuan perempuan.

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Sinta Nuriyah Wahid (tengah) dalam peluncuran sebuah buku

Strategi Aisyiyah juga ditempuh Rahmah el-Yunusiyyah di Padang Panjang. Dia mendirikan Madrasah Diniyah li al-Banat (sekolah agama untuk perempuan, *red.*) pada 1923. "Pendirian madrasah itu untuk mengoreksi sistem pendidikan Barat yang dikembangkan Pemerintah Belanda," jelas Sinta Nuriyah Wahid saat berkunjung ke sekolah tersebut awal Februari 2001.

Kesadaran membebaskan perempuan juga datang dari pesantren tradisional. KH. Bisri Syansuri membuka madrasah khusus santri putri di Pesantren Mamba'ul Ma'arif, Jombang pada 1930. Kerabatnya yaitu Menteri Agama Wahid Hasyim pada awal 1950-an mulai mengizinkan perempuan kuliah di Sekolah Guru Hakim Agama Islam, embrio Fakultas Syariah jurusan Qadha' di IAIN.

Jauh sebelum itu, Syeikh Arsyad al Banjari, seorang ulama abad 19 dari Banjarmasin, pernah memfatwakan pembagian waris berdasarkan 'Adat Perpantangan'. Harta waris dibagi dua dahulu antara suami dan istri, kemudian baru dibagikan kepada ahli waris. Keputusan fiqh ini dilatarbelakangi konteks sosial-ekonomi masyarakat Banjar, di mana sumber ekonomi keluarga diperoleh dari hasil kerja bersama antara suami dan istri. Hukum ini amat menghargai peran perempuan dalam rumah tangga. Gus Dur menilai, langkah Syeikh Arsyad itu adalah kontekstualisasi Islam Indonesia di bidang hukum agama yang tidak pernah dicapai oleh negara-negara Islam lain pada zamannya.

Dalam perkembangannya, perempuan Muslim Indonesia berhasil memperjuangkan haknya hingga ke tataran regulasi negara, seperti pembatasan praktik poligami. Padahal di masa pergerakan, isu poligami memicu perseteruan antara kelompok perempuan Islam dan kelompok sekuler. Antropolog dan feminis Muslim Lies Marcoes-Natsir mengatakan, perseteruan itu antara lain dipicu oleh kenyataan lemahnya kelompok feminis sekuler dalam menjawab persoalan teologis seputar isu jender. Maka hadirnya aktivis perempuan yang punya basis agama dapat mencairkan hubungan keduanya.

Inilah momentum awal kebangkitan gerakan feminis Indonesia pasca pergerakan. Kerja bersama dua kelompok tersebut antara lain mengundang dan menerjemahkan karya narasumber internasional, seperti Asghar Ali Engineer dan Riffat Hassan. Menurut Lies, kemesraan dua kelompok itu menghasilkan gerakan perempuan dalam tiga lapisan.

Di lapisan atas, sekelompok feminis melakukan perjuangan politik dengan mendesakkan pengarusutamaan jender dalam regulasi. Pada lapisan tengah, ormas perempuan Islam dan sekuler menggelar banyak loka karya Islam dan jender. Sedang di lapisan akar rumput, para *muballighat* mengaktualisasikan gagasannya lewat jaringan pesantren dan majelis taklim. Pesantren menjadi dapur gerakan itu. Dari sana lahir agamawan yang membela hak-hak perempuan seperti KH. Husein Muhammad (lihat: *'Memulung' Kebenaran Terpinggirkan*).

Selain itu, kalangan LSM perempuan di berbagai level terus bekerja. Yayasan Rahima Jakarta, misalnya, tekun menyorot Perda 'bertopeng' agama yang diskriminatif terhadap perempuan. PUAN Amal Hayati Jakarta, menangani isu kekerasan dalam rumah tangga dan membuka Woman Crisis Center PUSPITA di beberapa pesantren. Fahmina Cirebon melakukan sosialisasi ide lewat media, seperti rekaman *qasidah* dan *shalawat*. Mereka juga bekerja keras membaca ulang teks-teks keagamaan serta merumuskan metodologi yang memungkinkan untuk pembacaan ulang relasi lelaki dan perempuan (lihat: *Gelombang Feminisme Islam di Indonesia*).

Fase rintisan telah dilalui dalam pengalaman keindonesiaan. "Setiap gerakan perempuan lahir dari pengalaman dan rahimnya sendiri", ujar Fathia Nadia dari Komnas Perempuan. Melihat itu Ziba menilai, "Seharusnya sinar gerakan perempuan Islam di dunia berpusat dan berpancar dari Indonesia". Sebuah pujian sebagai hasil kerja keras yang panjang. Hasil itu kini bisa dituai.

Gamal Ferdhi, Rumadi

dok. pribadi

MASA DEPAN YANG MENANTANG

Oleh: Budhy Munawar-Rachman
Pengamat Islam dan Kesetaraan Jender

PERKEMBANGAN pemikiran dan advokasi jender di kalangan masyarakat Islam menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, sekaligus mencemaskan. Menggembirakan, karena advokasi yang memikirkan ulang dan membela hak-hak perempuan telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan selama 15 tahun belakangan ini. Banyak hal yang tak terpikirkan tentang isu jender dalam Islam, sekarang terpikirkan secara lebih jernih, terutama hal yang menyangkut keterlibatan perempuan Muslim dalam publik, baik dalam kehidupan sosial maupun politik.

Advokasi yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga Islam, seperti NU, Muhammadiyah, LSM, maupun Pusat Studi Wanita (PSW) di berbagai UIN/ IAIN/ STAIN menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan. Bukan hanya karena tersedianya berbagai model analisis jender, tetapi juga telah tumbuh subur gerakan-gerakan yang menyemai ide kesetaraan jender ini dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Sehingga boleh dikatakan, dari berbagai pemikiran Islam, pemikiran dan advokasi jender menempati perkembangan terdepan. Bandingkan dengan perkembangan isu pluralisme, yang sekarang semakin kontroversial. Isu pluralisme sampai sekarang belum mempunyai suatu kerangka yang mapan dan lengkap tentang apa itu "Pluralisme dalam Islam?" Apalagi sebagai modul pelatihan.

Berbeda dengan isu jender. Isu ini telah berkembang ke arah kemajuan penafsiran Islam yang sangat egaliter. Para aktivis telah menulis karya-karya yang sangat bermutu menyangkut penafsiran Islam atas kesetaraan jender ini. Dan yang sangat mengesankan, sebagian dari karya mereka mempunyai reputasi internasional, ketika misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Arab.

Meski perkembangan isu jender sangat menggembirakan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan pertama yang bisa dicatat adalah dinamika internal dalam dua organisasi massa Islam terbesar. Banyak analis yang mengemukakan bahwa wajah Islam di Indonesia sangat ditentukan oleh wajah Islam dari kedua organisasi ini. Islam di Indonesia akan tampak konservatif, kalau wajah Islam di NU dan Muhammadiyah konservatif. Begitu juga sebaliknya.

Bersamaan dengan perkembangan yang menggembirakan, kita juga melihat arus konservativisme dari kalangan NU dan Muhammadiyah yang menolak isu-isu kesetaraan jender. Isu seperti hak-hak reproduksi dan kepemimpinan perempuan, masih menjadi kontroversi. Itu sebabnya perkembangan fiqh perempuan yang menggunakan analisis fiqh klasik mendapatkan tantangan yang cukup keras di lingkungan Islam. Ambil contoh mengenai penolakan *Counter Legal Draft* (CLD) atas Kompilasi Hukum Islam yang telah ditolak oleh Departemen Agama.

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Pemisahan ruang saat kampanye di Aceh

Dari segi eksternal NU dan Muhammadiyah, dan institusi-institusi Islam, isu jender mendapat tantangan yang sangat keras khususnya setelah ditetapkannya otonomi daerah dan penerapan syari'ah Islam di beberapa kabupaten. Isu syari'ah ini perlu diperhatikan sungguh-sungguh, terutama berkaitan dengan dampaknya terhadap perempuan. Misalnya penerapan syari'ah sangat potensial menguatkan budaya patriarki dan kontrol terhadap perempuan dengan dasar legitimasi agama yang mapan. Ini sangat mungkin terjadi karena sedikitnya representasi perempuan dalam DPRD, atau Majelis Ulama di Daerah. Apalagi kalau ada fatwa dari ulama-ulama di daerah, yang biasanya didasarkan pada kitab kuning, tidak menyertakan usaha memahaminya secara kontekstual.

Akhirnya, perjuangan kesetaran jender adalah perjuangan demokrasi. Keberhasilan dalam penguatan isu jender akan menjadi keberhasilan dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Sejauh ini kita sudah melihat perkembangan yang sangat menggembirakan dalam pengembangan pemikiran Islam mengenai jender, dan *mainstreaming* jender di pesantren maupun masyarakat. Tetapi tantangan-tantangan ke depan juga mengkhawatirkan. Diperlukan suatu pemecahan kreatif sehingga gagasan dasar tujuan pengembangan pemikiran dan advokasi jender dalam Islam bisa mencapai cita-cita besar mengenai kesetaraan, harkat, dan kebebasan perempuan dalam memilih dan mengelola kehidupannya baik di dalam maupun di luar rumah tangga, sejalan dengan cita-cita penguatan *civil society*.

Gelombang Feminisme Islam di Indonesia

PERJUANGAN kesetaraan dan keadilan gender (sebut saja feminisme) telah berlangsung cukup lama. Terbentang cukup jauh, sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya, hingga era reformasi ini. Tokoh-tokohnya pun cukup beragam. Begitu juga menyangkut isu yang diusung. Jika kita kategorisasikan, gerakan feminisme di Indonesia setidaknya mempunyai empat gelombang .

Akhir abad 19-Awal Abad 20

Tahap rintisan yang diinisiasi oleh individu-individu. Belum terlembagakan dan terorganisasikan secara sinergik. Periode ini kira-kira berlangsung semenjak akhir abad 19 dan awal abad 20. Tokoh-tokohnya yang banyak ter*cover* dalam sejarah, antara lain, adalah RA Kartini, Rohana Kudus dan Rahmah el-Yunusiyah. Mereka bukan hanya menuntut adanya perbaikan bagi pendidikan perempuan, tapi juga secara spesifik menggugat praktek poligami, pernikahan dini, dan perceraian yang diselenggarakan secara sewenang-wenang. Gerakan individual seperti ini tentu saja tidak bisa diharapkan akan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dan massif. Mereka seperti berteriak di tengah belantara dunia patriarki.

Tahun 1920-1950

Institusionalisasi gagasan yang ditandai dengan bermunculannya organisasi-organisasi perempuan seperti Persaudaraan Isteri, Wanita Sejati, Persatuan Ibu, Puteri Indonesia, dan lain-lain. Periode ini berlangsung antara tahun 1920-an hingga akhir tahun 1950-an. Isu yang berkembang dalam periode ini masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu emansipasi perempuan di pelbagai bidang, termasuk juga resistensi mereka terhadap poligami, pembenahan bagi pendidikan perempuan. Hasil dari gerakan periode kedua ini, antara lain adalah lahirnya UU No. 22 Tahun 1946 yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa perkawinan, perceraian, dan rujuk harus dicatatkan. Tahun 1957, melalui Konferensi Besar, Nahdlatul Ulama (NU) memperbolehkan perempuan masuk dalam lembaga legislatif.

Tahun 1960-1980

Emansipasi perempuan dalam pembangunan nasional. Periode ini berlangsung semenjak tahun 1960-an hingga 1980-an. Bersamaan dengan semakin membaiknya pendidikan kaum perempuan, tanpa canggung sejumlah perempuan terlibat di dalam proses pembangunan yang saat itu digalakkan Orde Baru. Ormas keagamaan tradisional seperti NU mulai memasukkan perempuan ke dalam jajaran pengurus Syuriyah NU. Tercatatlah nama-nama seperti Nyai Fatimah, Nyai Mahmudah Mawardi, Nyai Khoiriyah Hasyim sebagai anggota syuriyah. Namun, tetap harus dicatat bahwa karena pelbagai faktor, perempuan yang masuk dalam ranah publik itu belum cukup proaktif dalam pengambilan-pengambilan keputusan.

Tahun 1990 hingga sekarang

Diversifikasi dan massifikasi gerakan perempuan hingga level terbawah dengan lahirnya LSM yang *concern* dengan isu perempuan. Ini berlangsung antara tahun 1990-an hingga sekarang. Kini keterlibatan tokoh-tokoh pesantren dalam gerakan kesetaraan gender demikian intensif. Ini hampir tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dan pada gelombang yang terakhir ini pula telah terjadi sinergi dan titik temu antara feminis sekuler dan feminis Muslim. Feminis sekuler yang kerap mendapatkan hambatan teologis terus mendapatkan sokongan dalil dari para feminis Muslim. Muara yang hendak dituju dari keduanya adalah sama, yaitu terhapuskannya diskriminasi terhadap perempuan dengan alasan apapun. Tokoh-tokoh seperti Ny Sinta Nuriyah Wahid, Mansour Faqih (alm.), Lies Marcoes-Natsir, KH. Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, Siti Musdah Mulia, Ruhaini Dzuhayatin, dan banyak lagi, patut dicatat atas kegigihannya dalam memperjuangkan keadilan gender. Di bawahnya kini telah lahir feminis Muslim muda yang relatif tangguh dan militan seperti Faqihuddin Abdul Kodir, Badriyah Fayumi, Ratna Batara Munti, Marzuki Wahid, dan lain-lain.

Abd. Moqsith Ghazali

SITI RUHAINI DZUHAYATIN

KESETARAAN DALAM PESAN IBU

"WONG wedok kudu duwe duit dhewe. Paling ora kanggo kebutuhane dhewe. Dadi, yen arep tuku wedak, ora kudu njalok bojo. Ben ora disepeleake mergo kabeh nggantungake urip nang bojo (Perempuan harus punya uang sendiri, minimal untuk kebutuhan sendiri. Jadi, jika mau membeli bedak tidak perlu minta suami. Biar tidak disepelekan karena bergantung hidup sepenuhnya pada suami, red.)"

dok. pribadi

Siti Ruhaini Dzuhayatin

SITI RUHAINI DZUHAYATIN, 42 tahun, masih ingat pesan sederhana ibunya itu, yang menyiratkan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Namun, selama enam tahun menjadi santri di Pesantren Pabelan Magelang, dia merasa banyak perlakuan diskriminatif terhadap santri perempuan. Mulai dari materi ajaran hingga kebijakan-kebijakan pesantren.

"Ketika menelaah kitab-kitab yang diajarkan, semuanya bermuara pada ketidakberuntungan perempuan. Beragam pertanyaan mengusik saya. Pasti ada yang salah dengan tradisi (pesantren, *red.*) ini," ujar Ruhaini yang lahir dari keluarga Muhammadiyah yang terpelajar.

Kepedulian mahasiswi S3 Jurusan Sosiologi Universitas Gajah Mada terhadap ketidakadilan jender berawal saat masih duduk di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (kini UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada awal 1990-an, dia memulai promosi gagasan-gagasannya tentang relasi jender dalam Islam, walau isu ini masih menjadi kajian terbatas. "Berbagai literatur yang bias jender, termasuk penafsiran-penafsiran terhadap al-Qur'an dan Hadits, saya kaji," ungkap peraih MA dari Monash University Australia.

Maka dalam bukunya berjudul *Feminist Theology and Islam in Indonesia* Ruhaini menawarkan hermeneutika, sebuah metode interpretasi untuk memahami makna teks agar ketepatan pemahaman dan penjabaran pesan-pesan Allah itu dapat ditelusuri secara komprehensif. "Berdasar metode ini, tidak ada *grand narrative* (cerita besar, *red.*) laki-laki. Justru yang dikedepankan adalah konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan," jelas pemimpin Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Yogyakarta.

Selain di tataran pemikiran, Ruhaini juga getol mendorong isu kesetaraan jender tercermin dalam program-program Muhammadiyah. Hingga Perempuan kelahiran Blora, Jawa Tengah ini pun menjadi perempuan pertama yang dapat menembus keanggotaan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah, lembaga yang memutuskan hukum dan doktrin bagi organisasi Islam itu.

Subhi Azhari, Gamal Ferdhi

dok.WI/ Gamal Ferdhi

dok.WI/ Witjak

Islam, tak ada penindasan terhadap perempuan," jelas pengasuh PP. Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon ini.

Karena itu dia berpendapat, ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan yang terdapat dalam kitab klasik harus dihilangkan. Ditambahkannya, Nabi Muhammad sendiri membawa pesan keadilan jender di tengah budaya patriarki. "Ketika ada perempuan yang lahir dibunuh secara diam-diam, al-Qur'an mengkritiknya dengan nada sinis dan pengingkaran," kata Kang Husein seraya mengutip QS. al-Takwir [81]: 8-9. Bahkan perempuan kala itu terus mendapatkan keadilan. "Ketika masyarakat Jahiliah tak memberikan hak waris pada perempuan, al-Qur'an memberikan satu banding dua," ungkap pendiri Balkis Women's Crisis Center Cirebon ini.

Dari prinsip bahwa Islam berlaku adil kepada semua manusia, penulis buku *Islam Agama Ramah Perempuan* ini berpendapat, "Perempuan dibolehkan menjadi imam shalat bagi perempuan maupun laki-laki."

KH. HUSSEIN MUHAMMAD

'MEMULUNG' KEBENARAN TERPINGGIRKAN

KH. HUSSEIN Muhammad adalah sedikit kiai yang gelisah menatap ketidakadilan terhadap perempuan. Menurutnya, sistem budaya dan agama turut memberi kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan. Dia melanjutkan, keterlibatan agama itu disebabkan ketidakmampuan agamawan memilah antara teks agama yang mencerminkan makna universal dengan yang kontekstual.

"Terganggu dengan kenyataan itu, saya lalu mencari jawabannya melalui kajian teks-teks keagamaan klasik yang kebetulan menjadi basis intelektual saya," ujar Kang Hussein sapaan akrabnya.

Hasilnya, penulis buku *Fiqh Perempuan* ini melihat apa yang tertera dalam kitab klasik adalah interpretasi dan responsi ulama terdahulu terhadap kebudayaan setempat. "Menutup peluang penafsiran kembali atas teks-teks kitab suci merupakan penghinaan terhadap kitab suci itu sendiri. Padahal jika merujuk esensi dasar

Indonesianis asal Perancis Andree Feillard, mempunyai penilaian tentang Kang Husein. "Dia selalu berusaha mencari makna esensial yang tertanam dalam satu ayat atau hadis menyangkut jender. Dan yang paling berani adalah soal kepemimpinan dalam shalat," tegasnya.

Kekaguman juga datang dari KH. A. Sahal Mahfudz. "Sebagai seorang yang memiliki latar belakang tradisi kitab kuning, Kiai Hussein mampu memetakan berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan secara teliti dan kritis," katanya.

Itulah Kang Hussein, yang dijuluki Ulil Abshar-Abdalla sebagai 'pemulung' wacana terpinggirkan. "Ada yang bilang *al-khata' al-masyhur khairun min al-shawab al-mahjur* (kesalahan yang populer lebih baik, dari kebenaran yang dipinggirkan). Saya memang 'pemulung' wacana *al-shawab al-mahjur* itu," pendiri Fahmina Institute Cirebon ini mengakui.

Nurul H. Maarif

Wisuda Mahasantri Ma'had Aly Darus-Sunnah

Memecah Kebekuan Regenerasi Ulama

Untuk mengisi stok ulama mumpuni yang semakin menipis, berbagai upaya ditempuh. Ma'had Aly (pesantren tinggi) jadi salah satu harapan.

Ruang dosen jurusan Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, siang itu dipadati mahasiswa. Mereka antri untuk mengikuti praktikum *qira'ah* (membaca al-Qur'an, *red.*). Dua tahun terakhir, praktikum *qira'ah* menjadi kegiatan wajib, terutama bagi mahasiswa semester awal. Pasalnya, banyak orang prihatin atas menurunnya kemampuan membaca kitab suci di kalangan mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Padahal dalam rangking keahlian agama, itu adalah kemampuan terendah.

"Mereka harusnya sudah mampu membaca dan memahami literatur-literatur klasik Islam, yang lazim disebut kitab kuning. Ilmu-ilmu penopang seperti *nahw, sharf, balaghah, mantiq* dan *ma'ani,* penting dikuasai," kata Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Hj. Chuzaimah Tahido Yanggo kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Kenyataan sebaliknya diungkap Kama Rusdiana, dosen di universitas yang sama. "Praktikum *qira'ah* saja banyak yang

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Calon Ulama di PonPes Ciwaringin , Cirebon

tidak lulus *kok*," kata Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah ini.

Pandangan senada datang dari Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama (Pekapontren Depag) Amin Haidari. Bahkan ia menilai, PTAI telah mengalami disorientasi. "Harusnya PTAI dipersiapkan untuk melahirkan ulama, tapi dalam kenyataannya tidak," kata Amin (lihat: *Semua Ma'had Aly Bisa Diakui Pemerintah*).

Kebekuan regenerasi ulama itu juga pernah meresahkan para tokoh muslim. Untuk mengatasi masalah itu, organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun bergegas mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam 'alternatif'.

Seperti upaya KH. As'ad Syamsul Arifin di penghujung tahun 80-an. Syahdan, pengasuh Ponpes Sukorejo, Situbondo itu gundah melihat banyak kiai sepuh NU meninggal dunia. Sedang generasi baru yang mampu mengemban misi keagamaan dan kemasyarakatan organisasi Islam terbesar itu, belum kunjung tampak.

Menurut Abdul Moqsith Ghazali dalam penelitiannya berjudul *Proses Pembelajaran di Ma'had Aly Sukorejo, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur,* dari kegundahan itu KH. As'ad berencana membentuk lembaga pendidikan yang secara khusus mempersiapkan lahirnya ahli fikih. Maka pada 1989, Kiai As'ad menggelar *halaqah* (forum diskusi, *red*.) dengan mengundang tak kurang dari 100 kiai.

Mereka di antaranya KH. Ali Yafie, KH. Abdul Muchith Muzadi, KH. Sahal Mahfudz, KH. Abdul Wahid Zaini (*alm.*), KH. Fahmi Saifuddin (alm.), KH. Tolchah Hasan, KH. Yusuf Muhammad (alm.) dan KH. Masdar F. Mas'udi. Selanjutnya pada 1990, berdiri Ma'had Aly di Ponpes Sukorejo, Situbondo dengan nama al-Ma'had al-Aly li al-'Ulum al-Islamiyah Qism al-Fiqh –biasa disebut Ma'had Aly Situbondo, dengan spesialisasi fikih dan ushul fikih.

Mulai tahun 2000, Ma'had Aly Situbondo membuka kelas perempuan, sehingga membuka kesempatan bagi hadirnya sosok perempuan yang ahli di bidang fikih. Sejumlah buku kreasi santri Ma'had Aly Situbondo telah diterbitkan, seperti *Fikih Rakyat: Pertautan Fikih dan Kekuasaan* (LKiS, 2002) dan lain-lain.

Layaknya perguruan tinggi, Ma'had Aly selanjutnya disingkat MA, juga memiliki kurikulum, penjenjangan, masa studi, rekruitmen, proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Tapi sesuai watak pondok pesantren yang beragam, wujud MA pun berbeda-beda. "Pendidikan di MA Situbondo ditempuh selama tiga tahun. Sistem SKS juga

diterapkan di sana," ujar Hendra Tirtana, alumni MA Situbondo 2002.

Dengan menambah beberapa prasyarat, santri MA Situbondo setara dengan lulusan Strata 2 (S2). Kendati fiqh dan ushul fiqh diutamakan, namun pelajaran lain tak dikesampingkan. "Malah sekarang ada *al-fikr al-hadits* (pemikiran kontemporer)," imbuh Hendra yang kini menempuh Pascasarjana UIN Jakarta.

Lain lagi Ma'had Darus-Sunnah al-'Aly li 'Ulum al-Hadits Ciputat, Banten. Lembaga pendidikan ini mengedepankan disiplin hadis dan ilmu hadis. "Bahkan kurikulum hadis dan ilmu hadis di sini lebih tinggi ketimbang S2 IIQ (Institut Ilmu Qur'an) maupun UIN," terang Abdullah Syafi'i Damanhuri, *musyrif* (asisten dosen) MA Darus-Sunnah.

Kitab-kitab yang diajarkan, imbuhnya, adalah kitab utama dalam hadis dan ilmu hadis, seperti *al-Kutub al-Sittah, Tadrib al-Rawi, al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid,* juga *Taysir Mushthalah al-Hadits*. "Tapi bukan berarti kitab fikih seperti *Bidayah al-Mujtahid* atau kitab ushul fikih seperti *al-Asybah wa al-Nadhair* dilupakan begitu saja. Keduanya turut dikaji di sini," jelasnya.

Sistem SKS juga diterapkan di MA yang didirikan Prof. DR. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA pada 1997 ini. Pada akhir semester, mahasantri juga diwajibkan membuat risalah (skripsi). "Santri menempuh pendidikan di sini selama delapan semester," terang Abdullah.

Ada juga MA yang diorientasikan mencetak ahli tafsir dan hadis, seperti MA al-Hikmah Sirampog, Brebes yang didirikan oleh KH. Masruri Mughni. Mulanya, sejak 1984 ia berbentuk *Takhashshush Qira'atil Kutub* yang dibangun untuk mengintensifkan kajian kitab kuning. Pada 1997 lembaga itu diubah menjadi MA dengan spesialisasi tafsir-hadis.

Mahasantrinya juga diwajibkan menulis risalah di akhir semester. "MA ini bekerja sama dengan STAISA (Sekolah Tinggi Agama Islam Sholahuddin al-Ayyubi) Jakarta untuk memperoleh ijazah S1," ungkap Marzuki Wahid dalam artikel berjudul *Ma'had Aly: Nestapa Tradisionalisme dan Tradisi Akademik yang Hilang* (*Tashwirul Afkar* XI/2001).

Sedangkan MA Pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Tasikmalaya difokuskan pada bidang akidah. Ini seiring dengan keahlian pendirinya KH. Choer Affandi. Mahasantri MA, yang didirikan pada 1980, ini harus menempuh masa studi tiga tahun. Kitab-kitab yang diajarkan misalnya, *Ghayah al-Wushul, Uqud al-Juman, Fath al-Wahhab,* dan sebagainya.

Karena masih menerapkan sistem salaf seperti *halaqah* (diskusi), *bandongan* (kiai membaca kitab dan santri-santri mencatat keterangannya) dan *sorogan* (santri satu per-satu membaca kitab di hadapan kiai), MA ini dinilai masih kental sistem pendidikan tradisionalnya. "Di sana tidak dikenal SKS," jelas Dudung Abdurrahman dalam penelitiannya, *Membangun Konsep Pendidikan Ma'had Aly (Istiqro'* vol. 3 No. 1/2004) .

Sedang MA Islam al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, yang didirikan pada 1988, menanamkan keahlian dakwah. Lembaga dalam naungan Yayasan Pendidikan Islam dan Asuhan Yatim Muslim al-Mukmin ini dibidani Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Baraja'. MA ini memformulasi ilmu-ilmu keislaman dan modern.

"Selain mengajarkan tafsir, ilmu tafsir, ilmu hadis, hadis, akhlak, juga mengajarkan psikologi, sosiologi, hukum, metodologi riset dan sebagainya, dengan sistem SKS," ungkap Dudung.

Terlepas dari perbedaan-perbedaan format itu, tujuan awal didirikannya MA adalah untuk mengantisipasi krisis ulama. Tujuan ini serupa dengan pendirian pesantren tinggi di lingkungan Muhammadiyah (baca: *Candradimuka Kader Unggulan)*. MA merupakan institusi pencetak ulama yang mampu menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman, terutama penguasaan kitab-kitab klasik yang menjadi referensi para ulama. "Dalam beberapa unsur, ia setingkat dengan perguruan tinggi, tapi lebih fokus pada pendidikan tinggi bertradisi pesantren," jelas Dudung.

Namun demikian, MA tidak bisa disamakan dengan perguruan tinggi Islam lain seperti Institut Agama Islam (IAI) atau Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) baik negeri maupun swasta. Ijazah formal dan ujian persamaan untuk memperoleh ijazah negara, juga tidak pernah dikeluarkan MA kepada santri yang telah lulus.

"Tapi *hardware* dan *software* pendidikannya seperti pondok pesantren, dengan berbagai kultur dan tradisi yang melingkupinya. Tapi karena kekhususannya, MA di berbagai pesantren diberi fasilitas khusus seperti asrama, ruang kelas, perpustakaan dan sarana aktualisasi seperti penerbitan atau ceramah di luar ponpes," jelas Marzuki Wahid.

Hal lainnya, adalah metode pembelajarannya yang melibatkan santri sebagai subyek belajar. "Kitab yang dikaji relatif tinggi dan cara mengkaji yang lebih kritis," imbuh Marzuki.

Kepala Seksi Pendidikan Keagamaan Departemen Agama Imam Syafe'i mengungkap, sebanyak 25 MA telah mendaftar ke instansinya. Lembaga-lembaga itu antara lain berada di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa dan Nusa Tenggara Barat.

"Tapi baru satu MA yang diakui pemerintah yaitu MA Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo. Sisanya masih mengikuti standarisasi kurikulum," jelas Imam Syafe'i kepada Rumadi dari the WAHID Institute.

Saat ini sebagian besar MA dan pesantren tinggi yang ada masih dalam perjuangan antara hidup dan mati. Kendala-kendala teknis seperti persediaan dana yang relatif minim karena hanya mengandalkan cadangan uang pesantren, menyebabkan MA kurang lincah dalam bergerak.

Menurut Abdul Moqsith Ghazali, sebagian besar MA tak ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Buku-buku yang tersedia dalam rak-rak perpustakaan MA juga sangat terbatas.

"Ini artinya mengelola lembaga pendidikan dengan tuntutan yang demikian tinggi tak cukup hanya dengan bermodal semangat dan niat baik. Ada yang harus dipenuhi seperti perpustakaan yang lengkap, di samping dosen yang bagus dan lingkungan belajar yang kondusif," kata kandidat doktor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.

Terlepas dari produk yang belum maksimal itu, apresiasi terhadap para pendiri MA dan pesantren tinggi tetap harus diberikan. Komitmen para kiai dan ulama untuk turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas santri dan mengatasi kelangkaan ulama yang bermutu di negeri ini patut dipuji.

Itulah upaya menghindari kedangkalan pemahaman ilmu keislaman, yang menurut KH. Abdurrahman Wahid sebagai sumber konservatisme, bahkan terorisme.

Kita tak pernah bisa membayangkan, apa jadinya sebuah negeri yang hanya dimuati oleh taburan fatwa para ulama 'karbitan' yang berkualifikasi rendah. Kata Rasulullah SAW, mereka akan berfatwa tak berdasarkan ilmu, sehingga mereka berada dalam ketersesatan dan akan menyesatkan.

Gamal Ferdhi, Subhi Azhari, Nurul H. Maarif

dok.pribadi

H. Amin Haidari, MA.
Direktur Pekapontren Depag RI

SEMUA MA'HAD ALY Bisa Diakui Pemerintah

KEBERADAAN Ma'had Aly masih menyisakan banyak masalah. Mulai dari kompetensi alumni, standarisasi kurikulum hingga pengakuan pemerintah. Pemerintah telah memiliki rencana untuk mengatasi problem itu. Berikut wawancara Subhi Azhari dari the WAHID Institute dengan Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren (Pekapontren) Depag RI H. Amin Haidari, MA.

Bisa dijelaskan tentang Ma'had Aly (MA)?

MA merupakan pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi ahli agama *(tafaqquh fi al-din)*. Ini berbeda dengan madrasah yang menampilkan dirinya sebagai lembaga pendidikan umum berciri khas Islam. MA juga sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan nilai-nilai kepesantrenan, misalnya nilai kemandirian, tradisi keilmuan, nilai-nilai kesederhanaan, dan ketokohan kiainya. Karena MA berfungsi sebagai lembaga pengkaderan ulama, maka lembaga ini berorientasi pada pendalaman ilmu-ilmu keislaman.

Bagaiman posisi MA dalam sistem pendidikan nasional?

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan, pendidikan keagamaan bisa diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jadi, MA itu ada dua model. MA formal yang mengikuti aturan Perguruan Tinggi (PT) dan MA *takhashshush* (bidang kajian khusus, *red.*) yang tidak terikat dengan PT. Posisi MA formal berbeda dengan MA *takhashshush* yang ada di pesantren-pesantren. MA *takhashshush* itu masuk dalam kategori pendidikan keagamaan non-formal.

Mana yang mendapat pengakuan pemerintah?

Keduanya bisa dapat pengakuan dari pemerintah, seperti ditegaskan dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan) No. 19 tahun 2005 pasal 93. Namun pengakuan itu disesuaikan dengan MA bersangkutan. Jika MA itu formal, maka lulusannya berhak mendapat legalisasi formal (ijazah PT, *red.*), baik untuk S1, S2, atau S3. Sedang MA non-formal, pengakuannya diberikan dalam bentuk sertifikat *takhashshush* sesuai keilmuan yang dikaji. Nantinya, sebagai lembaga pendidikan keagamaan tinggi, MA harus mengikuti ketentuan PT. MA yang setara S1 misalnya, harus menggelar kajian-kajian keilmuan dengan bobot minimal 140 SKS.

Lalu apa bedanya dengan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)?

PTAI telah mengalami disorientasi. Harusnya PTAI dipersiapkan untuk melahirkan ulama, tapi dalam kenyataannya tidak. Karena itu, jangan sampai kita terjerumus pada kesalahan yang sama.

Langkahnya bagaimana?

Harus ada akreditasi. Kontrol terhadap kualitas MA itu sendiri dilakukan oleh pakar yang bersangkutan atau praktisi MA, semacam Dewan MA yang terdiri dari pakar dan tokoh pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan. Dalam konteks ini, Depag hanya berfungsi administratif dalam pengembangan MA.

Bagaimana cara MA mendapat penyetaraan?

Penyetaraan MA dilakukan melalui usulan dari MA ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Memang, legalitas formal hanya dikeluarkan oleh BSNP, tetapi penentuan itu didasarkan pada rumusan yang sebelumnya kita sepakati. Kami, Direktorat Pekapontren hanya mengesahkan usulan yang diajukan dari setiap MA yang bersangkutan.

Selama ini apakah sudah ada MA yang disetarakan?

Ini memang sudah dilakukan di MA Salafiyah Syafi'iyah Situbondo untuk setara S2.

Saran Anda untuk MA selanjutnya?

MA ke depan harus mampu melahirkan ulama yang mampu mengintegrasikan tradisi keilmuan pesantren dan tradisi akademik perguruan tinggi.

dok.Pondok Shabran

Rangkaian kegiatan Pondok Shabran

PONDOK NURIYAH SHABRAN

Candradimuka

Kader Unggulan

PONDOK Shabran adalah salah satu pesantren tinggi yang dimiliki Muhammadiyah. Gedung pondok ini berasal dari wakaf Hajjah Nuriyah Shabran kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada tahun 80-an, sehingga nama sang pewakaf diabadikan pondok itu, yaitu Pondok Muhammadiyah Hajjah Nuriyah Shabran UMS, kerap disebut Pondok Shabran.

"Pondok Shabran didirikan sebagai bagian dari program UMS," ujar Direktur Pondok Shabran Syamsul Hidayat kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute.

Tak beda dengan Ma'had Aly yang berada di bawah naungan pesantren-pesantren NU, alasan pendirian pondok di bilangan Saripan Makamhaji Kartasura, Surakarta ini juga untuk menanggulangi kian langkanya ulama di Muhammadiyah.

"Pondok Shabran didirikan untuk mengatasi kelangkaan ulama. Karena itu, peserta diseleksi dengan ketat dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia," ujar Syamsul.

Mahasiswa S3 jurusan Akidah Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mengatakan Pondok Shabran adalah candradimuka kader unggulan Muhammadiyah. Untuk mewujudkannya dibuat kesepakatan antara PP Muhammadiyah, PW Muhammadiyah seluruh Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Lulusannya diharapkan menjadi ujung tombak penerus perjuangan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah di masa yang akan datang," jelas Syamsul.

Diungkap Syamsul, seluruh santrinya berlatar belakang mahasiswa. "Layaknya perguruan tinggi, pendidikan di sini ditempuh selama empat tahun dengan sistem SKS," katanya. Pelajaran pokok di pondok ini antara lain dakwah dan pemikiran Islam, dan tafsir hadits.

Tak sebatas teori, pondok ini juga menerjunkan santrinya ke masyarakat. "Dakwah di masyarakat seperti pada bulan Ramadhan, pembinaan masjid dan majlis taklim, juga menjadi program di sini," jelas Syamsul.

Menurut Syamsul, pondok yang kini dihuni 40 santri putra dan 30 santri putri ini, turut berperan mencairkan kebekuan hubungan antara Muhammadiyah dengan NU. "Selain mengkaji tradisi Muhammadiyah, santri-santri di sini juga mengkaji tradisi NU dan ormas-ormas lain," kata alumni UMS ini.

Bahkan pondok ini acap bekerjasama dengan pesantren mahasiswa yang berada di bawah naungan NU, semisal Ponpes Mahasiswa al-Muayyad, Windan, Surakarta asuhan KH. Dian Nafi', untuk menggelar seminar, terutama perihal ke-NU-an dan Ke-Muhammadiyah-an.

Dihentikannya seleksi kader santri dari cabang dan ranting Muhammadiyah di seluruh Indonesia pada 1993, mengakibatkan santri pondok itu semakin sedikit. "Jadi sekarang tergantung yang minat saja," jelas Syamsul.

Namun dia mengakui, kualitas santri yang mendaftar kian hari kian menurun. Penyebabnya, tak banyak calon santri yang memiliki latar belakang keahlian membaca kitab klasik.

Karena itu, untuk mengembalikan masa keemasan, pondok ini tidak lagi menerima santri sejak dua tahun belakangan. "Kami mau menata ulang Pondok Shabran," katanya optimis.

Nurul H. Maarif

dok.WI/Nurul Huda Maarif

Aksi brutal FPI di Monas 1 Juni 2008

dok.AKKBB

Menanti Negara Bernyali

Dalam setiap kesempatan pemerintah kerap berjanji akan melindungi kebebasan warga negaranya berkeyakinan. Nyatanya, tetap tak berdaya menghadapi kekerasan.

Ratusan massa bersenjata pentungan, tombak, pedang, dan arit berteriak mengobar amarah. *Sedut (*bakar*, red.)*! *Seda' (*hancurkan*, red.)*! Usir! Sesekali terdengar pekik *Allahu Akbar!* Mereka seakan punya hajat besar, meng-usir warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Sabtu (4/2/06) siang.

Sejurus kemudian batu berhamburan. Kaca-kaca dan genting mulai pecah. Molotov dilempar, api membumbung melalap puluhan rumah milik 31 kepala keluarga pengikut aliran Islam yang pertama kali masuk ke Indonesia pada 1925 itu.

Ratusan petugas Brimob dan Sabhara Perintis dari Polres Mataram dan Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) tak mampu menghalau massa. Warga Ahmadiyah menggigil ketakutan dan putus asa. "Biar kami mati di sini saja pak. Hanya (rumah, *red.*) ini yang kami punya," tangis seorang ibu anggota Jemaah Ahmadiyah sambil menggendong anaknya yang masih berumur dua tahun. Mereka tetap bertahan di rumahnya sebelum akhirnya dievakuasi ke Asrama Transito, Kantor Dinas Transmigrasi NTB.

Pengusiran terhadap warga Ahmadiyah berulang terjadi di NTB. Pada 2001, warga Ahmadiyah di Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur diserang warga sekitar. Begitu pula pada September 2002, sekitar 300 warga harus meninggalkan Ahmadiyah Pancor, Lombok Timur. Dilanjutkan Juni 2003, sebanyak 35 Kepala Keluarga (KK) Ahmadiyah di Sambi Elen diusir warga. Pengusiran warga Ahmadiyah juga terjadi di Sumbawa dan sejumlah tempat lainnya di NTB. Sebanyak 127 warga di Dusun Ketapang yang diusir beberapa waktu lalu merupakan warga Ahmadiyah yang terusir dari Lombok Timur.

Asa untuk hidup tenang telah putus. Tidak heran mereka berupaya mencari suaka politik. "Mencari suaka adalah jalan terakhir kalau memang pemerintah Indonesia sudah benar-benar tidak mau melindungi kami," ujar Shamsir Ali, penasehat organisasi Ahmadiyah NTB.

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Gus Dur dan tokoh lintas agama

Menurut pengasuh Pondok Pesantren al-Madany Lobar, Tuan Guru Haji (TGH) Muhammad Subhi As-Sasaki, yang mendorong kekerasan atas Ahmadiyah di Lobar adalah fatwa MUI yang menghukumi Ahmadiyah sebagai sesat dan Surat Keputusan (SK) Bupati yang melarang mereka hidup di Kabupaten itu. Para pemimpin agama daerah itu kemudian memprovokasi masyarakat untuk mengusir mereka. "Ini sungguh-sungguh pelanggaran kemanusiaan," ujar TGH Subhi prihatin (lihat: *Berguru Toleransi di Negeri Wahabi*).

Namun TGH Mahally Fikri, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lobar mempunyai pandangan berbeda. "Warga sudah lama menolak keberadaan anggota Ahmadiyah. Apalagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar telah menyatakan ajaran Ahmadiyah sebagai terlarang dalam SK Bupati Lobar No. 35/2001," katanya kepada *Liputan6 SCTV*. Instruksi pelarangan tersebut diterbitkan setelah Pemkab Lobar berkoordinasi dengan MUI Lobar dan Departemen Agama.

Terbitnya SK Bupati itu menunjukkan dengan jelas kacaunya sistem regulasi di Indonesia. Bagaimana bisa SK Bupati dapat bertentangan dengan konstitusi? "Pada praktiknya banyak peraturan yang bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Tidak beragama saja tidak boleh diusir, apalagi orang beragama," kata Wakil Ketua Komnas HAM Zumrotin K. Soesilo (lihat: *Penyerangan Terus Terjadi Karena Pemerintah Tidak Tegas*).

Padahal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memberi sinyal yang jelas mengenai keharusan negara memberi perlindungan kepada warganya. "Indonesia tidak menganut istilah agama yang diakui atau tidak diakui negara. Negara tidak akan pernah mencampuri ajaran agama. Tugas negara adalah memberikan perlindungan dan pelayanan," kata Presiden dalam Perayaan Imlek 2557 di Jakarta, pada hari yang sama dengan penyerangan di Lombok Barat itu.

Ucapan presiden itu dapat diartikan, pemerintah tidak mendiskriminasi agama dan kepercayaan warganya. Anehnya, Menteri Agama, Maftuh Basyuni, justru minta Ahmadiyah keluar dari Islam dan membuat agama baru. "Ahmadiyah itu jelas aliran sesat. Permasalahan akan selesai bila mereka membuat agama baru dan jangan menggunakan Islam. Kalau masih *ngaku* Islam, maka bisa dituduh melakukan penodaan agama," ujarnya.

Pernyataan Menag itu dinilai naif, karena mentang-mentang berkuasa dapat memerintahkan orang untuk membentuk agama baru. "*Masak* menteri dapat memutuskan sebuah agama baru. Enak saja *nyuruh-nyuruh*," kata Ketua Umum PB Ahmadiyah Abdul Basith.

Pandangan dan perlakuan diskriminatif mengakibatkan, Jemaah Ahmadiyah berniat meminta suaka ke luar negeri. "Jika pemerintah tidak sanggup lagi menjamin keselamatan kami, terbangkan kami ke kedutaan asing seperti Kanada atau Australia yang bisa memberi suaka kepada kami," demikian bunyi petisi yang dibacakan seorang perwakilan warga Ahmadiyah Lobar, Zainal Abidin.

Ancaman suaka politik dari warga Ahmadiyah ini menjadi bola panas. Isu ini bisa menjadi citra buruk Pemerintah Indonesia yang dianggap tidak mampu melindungi keamanan warganya. "Saya kira ini satu sinyal kalau Pemerintah Indonesia tidak mampu lagi atau tidak berkeinginan melindungi hak minoritas untuk hidup aman. Sesuatu yang sangat buruk untuk Indonesia," ujar Indonesianis Martin van Bruinessen kepada *Radio Netherland* (6/2/06).

Niatan suaka itu dinilai Departemen Luar Negeri mengada-ada. Suaka hanya bisa diberikan bila negara tidak mampu lagi memberi perlindungan dan kekerasan itu dilakukan oleh negara. "Kasus Ahmadiyah adalah konflik antar masyarakat dan Ahmadiyah tidak menghadapi pengejaran oleh negara," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri Desra Percaya di Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/2/2006).

Menurutnya, berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tentang Pemberian Status Suaka, suaka dapat diberikan kepada mereka yang ketakutan karena menghadapi ancaman pengejaran oleh aparat pemerintahnya karena empat hal yaitu masalah agama, etnis, kelompok dan afiliasi politik.

Namun dalam pandangan Koordinator Kontras Usman Hamid, syarat Ahmadiyah mendapat suaka seperti terdapat dalam Konvensi Jenewa telah terpenuhi. "Cukup alasan bagi pengikut Ahmadiyah meminta suaka, bila pemerintah benar-benar tidak dapat menjamin perlindungan politik, hukum dan keamanan mereka," katanya.

Kekerasan fisik dan psikis atas kelompok kepercayaan dan minoritas tidak hanya dirasakan Jemaah Ahmadiyah. Berbagai agama, kepercayaan dan keyakinan banyak yang hingga kini mengalami diskriminasi. Semisal kepercayaan Tolottang di Sulawesi Selatan, Parmalim di Sumatera Utara, Kaharingan di Kalimantan, Wetu Telu di Lombok, dan Sunda Wiwitan di Kuningan terus mengalami kekerasan terselubung. Mereka diberi dua pilihan, dimasukkan dalam lima agama resmi yang diakui pemerintah atau dianggap sesat sehingga dipaksa meninggalkan keyakinannya.

Kelompok masyarakat yang tidak mau mencantumkan agama yang diakui pemerintah juga tidak bisa mendapatkan pelayanan hak-hak sipilnya, seperti pencatatan perkawinan, akte kelahiran, KTP dan sebagainya. Kebijakan diskriminatif seperti ini jelas merupakan kejahatan yang disponsori negara *(state-sponsored evil)*. Karenanya, diskriminasi negara ini tidak bisa dibiarkan.

Status Ahmadiyah yang dianggap 'barang haram', pernah juga dirasakan Konghucu. Gara-gara rezim Orde Baru berseberangan dengan Republik Rakyat Cina, tempat kelahiran agama tersebut, seluruh aktivitas peribadatan Konghucu diberangus lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 14/ 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina. Pemeluk agama itu dapat merayakan kembali Imlek secara terbuka setelah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut Inpres Soeharto itu dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6/ 2000.

Di tengah kian menguatnya arus penyeragaman tafsir agama, dibutuhkan pemimpin negara yang konsisten menjaga keragaman bangsa, tanpa khawatir popularitasnya menurun. Apalagi negara telah menjamin dalam UUD 1945 dan UU No. 30/1999 yang melindungi hak-hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya. Jadi tinggal menjalankan amanat konstitusi itu.

"Pemerintah penakut. Isinya orang penakut semua tidak berani menegakkan UUD 45," kata mantan Presiden Gus Dur yang gusar karena penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah terjadi berulang kali tanpa ada tindakan pencegahan dari aparat.

Gus Dur layak menilai seperti itu. Karena saat menjadi presiden dia berani mengambil kebijakan tidak populer untuk menjaga keragaman bangsa ini. Salah satunya adalah mencabut Keppres No. 264/1962 yang melarang organisasi agama Baha'i melalui Keppres No. 69/2000. "Saya mencabut keputusan itu, karena menurut saya bertentangan dengan UUD," tegas mantan Ketua Umum PBNU tiga periode ini.

Harus diakui, kini sulit menemukan profil pejabat negara dan agamawan yang berani 'pasang badan' untuk menjaga keragaman, walau bukan tidak ada (lihat: *Tak Ingin Ada Anarki*). Saat ini pemerintah harus menghentikan diskriminasi dan kekerasan. Itulah bentuk perlindungan kepada warga negara. Jika tidak, jangan salahkan warga Ahmadiyah dan penganut keyakinan minoritas lainnya minta suaka politik. Bagaimana, Pak Presiden?

Ahmad Suaedy, Rumadi

IRONI BERAGAMA
DI NEGERI PANCASILA

Oleh: Ahmad Suaedy
Direktur Eksekutif The Wahid Institute

GEMURUH sorak memenuhi ruangan yang dipadati ribuan pemeluk agama Khonghucu di Plenary Hall, JCC, Senayan, dalam peringatan Imlek 2557, 4 Februari lalu. Pasalnya amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada acara itu benar-benar memberikan janji sejuk bagi sebagian besar etnis Tionghoa yang selama ini didiskriminasi.

"Di negeri kita tidak dianut istilah agama yang diakui atau tidak diakui negara. Prinsip yang dianut UUD adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya itu. Negara tidak akan pernah mencampuri ajaran agama. Tugas negara adalah memberikan perlindungan, pelayanan, serta membantu pembangunan dan pemeliharaan sarana peribadatan serta mendorong pemeluk agama yang bersangkutan menjadi pemeluk agama yang baik," kata Presiden.

Ironisnya pada hari yang sama, terjadi pengusiran dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Barat. Menurut Antara, 25 siswa anak warga Ahmadiyah tidak berani masuk sekolah karena diancam dan diolok-olok. Bahkan sampai hari keempat, tak seorang pejabat daerah, propinsi maupun pusat menjenguk mereka.

Kepada Elshinta di Jakarta, juru bicara Pemkab Lombok Barat Basirun Anwar menyatakan, tindakan terhadap pemeluk Ahmadiyah itu adalah penegakan hukum berdasarkan SK Bupati Lobar No. 35 Tahun 2001 yang melarang keberadaan Ahmadiyah. Jika ingin tinggal di sana, mereka harus pindah agama. Kebijakan ini seolah mementahkan pidato Presiden di atas.

Peristiwa itu menambah rangkaian kekerasan terhadap penganut keyakinan minoritas di negeri ini. Sejak lama, kekerasan juga menimpa aliran dan kepercayaan asli daerah tertentu yang notabene *indigenous belief* Indonesia.

Pemerintah harus mengatasi masalah ini jika masih berpijak pada konstitusi. Kepala Negara wajib menyampaikan sikapnya yang eksplisit tentang Surat Keputusan (SK) oleh beberapa kepala daerah atas pelarangan aliran tertentu dan pembiaran kekerasan, bahwa SK-SK dan kekerasan itu sungguh bertentangan dengan jiwa bangsa yang ber-Pancasila dan beragama.

Ironi lainnya, para penyerang dan kebijakan kepala daerah yang melarang keyakinan tertentu itu mendasarkan pada fatwa MUI, lembaga yang dibiayai dengan uang rakyat yang menyesatkan mereka.

Karenanya, reformasi dalam kebijakan negara tentang agama tidak cukup berhenti pada praktek pelayanan, tapi juga harus mentransformasi paradigma fungsi kelembagaan seperti MUI dan Depag sebagai pelayan rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Rencana menuntut kursi atau direktorat pemeluk Konghucu sebagaimana agama lain di Depag sebaiknya ditunda. Bahkan saya berharap mereka mencoba ikut memperjuangkan aliran-aliran dan keyakinan lain agar diperlakukan sejajar, seperti 6 keyakinan yang telah tercantum dalam UU No. 5/1969.

dok.WI/ Witjak

Zumrotin K. Soesilo

Zumrotin K. Soesilo
Wakil Ketua Komnas HAM

PENYERANGAN TERUS TERJADI
KARENA PEMERINTAH TIDAK TEGAS

KEKERASAN atas nama agama terus bermunculan. Ketidaktegasan pemerintah adalah salah satu penyebabnya. Berikut pernyataan wakil ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Zumrotin K. Soesilo kepada Nurul H. Maarif dan Widhi Cahya dari the WAHID Institute.

Bagaimana Komnas HAM memandang kekerasan atas nama agama belakangan ini, termasuk pada Ahmadiyah?

Sejak saya masuk Komnas HAM pada 2002, kita sudah menurunkan tim untuk kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah di Selong Lombok. Komnas HAM menemukan korban jiwa, luka dan harta benda termasuk rumah. Karena tidak mendapatkan rasa aman, beberapa warga Ahmadiyah memindahkan sekolah anak-anaknya ke Tasikmalaya. Kira-kira 2003, giliran Ahmadiyah Jawa Barat diserang. Sesudah itu sepi lagi. Lalu muncul kasus Parung yang cukup besar akhir 2005. Dan awal 2006 ini, terjadi lagi di Mataram.

Saat Ahmadiyah Parung diserang, saat itu juga Ahmadiyah Pontianak diserang. Cuma tidak diekspos. Karena ingin mendapat kepastian hukum, Ahmadiyah di Pontianak membawa kasus penyerangan itu ke pengadilan. Di pengadilan mereka menang. Tapi yang lainnya tidak ada yang memproses secara hukum.

Menurut pandangan Komnas HAM, hal ini bisa terus-menerus terjadi karena sikap tidak tegas pemerintah, baik itu Depag atau yang lain.

Komnas HAM sendiri sangat tegas, kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dilindungi konstitusi yang berarti dijamin negara. Agama dan keyakinan apapun dijamin hak hidupnya di Indonesia.

Apa maksud kata 'menjamin' dalam konstitusi?

Artinya, masyarakat bisa melakukan apapun dan bisa bersosialisasi di tempat tinggalnya. Bukan hanya dilindungi saat penyerangan seperti evakuasi. Evakuasi itu hanya perlindungan dalam arti fisik. Jadi masalahnya, *pertama*, *good will* pemerintah tidak ada. *Kedua,* sikap keragu-raguan dan ketidakberanian menghadapi tekanan dari kelompok yang melakukan penyerangan itu.

Apakah negara dapat menjamin?

Saya tidak yakin negara, dalam hal ini polisi, bisa melindungi. Ketidakmampuan itu terjadi karena adanya keragu-raguan. Di satu sisi dia akan melakukan perlindungan, tapi di sisi lain ada produk hukum yang belum *clear* seperti fatwa MUI, pernyataan menteri agama, SKB, putusan pengadilan di Lombok Barat yang menyatakan Ahmadiyah dilarang di daerah itu.

Bukankah polisi juga selalu menggunakan pasal penodaan agama?

Pasal itu menurut saya masih belum *clear*. Penegak hukum itu bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi mereka harus memahami pasal-pasal UUD 45 yang berkaitan dengan kebebasan beragama yang dijamin negara.

Produk hukum apalagi yang membuat polisi ragu?

Syariatisasi Peraturan Daerah (Perda) juga salah satu penyebab. Betapa runyamnya negara ini jika daerah bisa mengeluarkan larangan terhadap suatu agama. Jika tiba-tiba misalnya Jatim melarang orang Tengger beragama seperti agamanya sekarang. Desentralisasi itu hanya pada hal-hal tertentu.

Karena itu, Menteri Dalam Negeri harusnya segera menertibkan Perda seperti itu. Kalau tidak, kasus Lombok akan merembet ke tempat lain. Betapa hancurnya masyarakat minoritas.

Menteri Agama mengatakan Ahmadiyah harus menjadi agama baru?

Menurut saya, dia tidak faham UUD 45. Seseorang tidak boleh dipaksa pindah keyakinan atau mengganti agama baru karena tidak diakui. Bahkan orang yang tidak punya keyakinan juga punya hak hidup.

Apa konsekuensi pernyataan Menag itu?

Menurut saya itu (Menag, *red.*) bisa di-PTUN-kan.

Kalau Menteri Agama menggunakan acuan ajaran Islam, bukan UUD 45?

Negara kita *kan* bukan Negara Islam. Negara kita negara hukum dan bukan hukum Islam. Ini yang harus ditegakkan. Dan memang, ada pemeluk Islam yang radikal, tapi itu hanya segelintir. Saya yakin di Indonesia ini masih lebih banyak Islam toleran. Cuma saja tidak terekspos. Islam yang moderat ini tidak terorganisir. Saat ini mereka harus berbicara.

Bisakah Jamaah Ahmadiyah meminta suaka politik?

Bisa! Kalau negara tidak bisa memberikan jaminan keamanan buat mereka, meskipun itu konflik horizontal. Dan menurut saya, harusnya pemerintah hati-hati dalam hal ini. Apabila mereka serius meminta suaka, maka dalam percaturan internasional itu sangat jelek bagi Indonesia. Ini menunjukkan negara melanggar HAM *by ommission*, karena negara tidak memberikan rasa aman pada masyarakat.

Jadi, bagaimana seharusnya negara?

Ada beberapa hal. Sekarang saatnya perundang-undangan yang tidak cocok dengan konstitusi harus direvisi atau dikaji ulang Mahkamah Konstitusi. Misalnya, pengakuan hanya kepada enam agama (Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu) yang bertentangan dengan UUD 45.

Ada juga hal yang berkaitan dengan diskriminasi kewarganegaraan. Misalnya, Catatan Sipil tidak mau mencatat perkawinan pemeluk Konghucu.

Berkaitan dengan konstitusi, negara tidak cukup sebatas mengeluarkan UU Ratifikasi tentang Hak Sipil Politik dan Ekonomi Sosial Budaya, tapi harus mensosialisasikan petunjuk pelaksanaannya kepada semua aparat dari level pusat hingga desa.

TUAN Guru Haji (TGH) Muhammad Subhi As-Sasaky, dari namanya dapat diterka ia asli suku Sasak di Pulau Lombok. Di samping mengajar di pesantren miliknya, al-Madany di bilangan Peluas, Kuripan Utara, Lobar, sehari-hari pria berkacamata ini aktif berdiskusi, menjadi narasumber di berbagai forum dan media massa. Bahkan *Selaparang TV* di Lombok Timur mendapuknya sebagai narasumber dalam forum agama mingguan.

TGH Subhi juga membentuk kelompok diskusi Tafaqquh Fiddin yang anggotanya tuan guru muda, guru agama, serta aktivis. Selain itu, jika terjadi kasus kemanusiaan di Lombok, pendapatnya kerap diminta Komnas HAM di Jakarta.

Pada kasus pengusiran Jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur tahun 2002 lalu, ia bergabung dengan aktivis mahasiswa dan LSM di Lombok untuk mengadvokasi korban. Tak hanya itu, kelompok ini juga mengadvokasi berbagai kasus kekerasan di pulau itu.

"Saya belajar agama berbagai mazhab. Tidak ada yang membolehkan kekerasan kepada orang lain," kata Subhi kepada Ahmad Suaedy dari the WAHID Institute di pesantrennya.

Saat kasus pengusiran dengan kekerasan muslim Ahmadiyah dari perumahan BTN Bumi Asri, Lobar, awal Februari 2006 lalu, Subhi bersama gerakan demokrasi

dok.WI/Suaedy

TGH. Muhammad Subhi As-Sasaky

TGH. MUHAMMAD SUBHI AS-SASAKY

BERGURU TOLERANSI DI NEGERI WAHABI

di Lombok mengeluarkan Petisi Anak Bangsa. Isinya mempertanyakan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak dialog dengan Ahmadiyah dengan alasan telah sesat, dan pemerintah daerah yang melarang eksistensi organisasi itu di Lombok Barat, serta penyerang yang garang.

"Beberapa orang Ahmadiyah stres berat, bahkan gila, dan ada yang keguguran karena serangan itu," ungkap Subhi.

Kekerasan atas Ahmadiyah di Lobar didorong fatwa MUI yang menghukumi Ahmadiyah sebagai sesat dan Surat Keputusan (SK) Bupati Lobar yang melarang mereka hidup di Kabupaten itu. "Ini benar-benar di luar peri kemanusiaan," tegas staf ahli bidang kajian gender dan Islam LBH APIK di Mataram.

Pandangan toleran Subhi terkait dengan berbagai ilmu yang ditimbanya. Setelah menamatkan Aliyah di Pesantren Ishlahuddiny, Kediri, Lobar, Subhi langsung belajar di Ma'had al-Jufry, Madinah. Di samping belajar berbagai mazhab dan pemikiran Islam di pesantren itu, selama 8 tahun ia berguru kepada ulama berbagai aliran di sekitar Madinah. "Saya mendatangi lebih dari 40 guru dengan mengayuh sepeda," kenang ayah seorang putra ini.

Mulai dari guru yang bermazhab Salafiyah, Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Wahabiyah, berbagai aliran tasawwuf dan *fiqh* hingga ilmu *manthiq* dan falsafah telah dijajakinya. "Semua aliran dalam Islam ada di Arab Saudi, tetapi karena pemerintahannya Wahabi, aliran itu jadi tak tampak," lanjutnya.

Ia juga menulis berbagai makalah dan buku dalam bahasa Indonesia maupun Arab. Di antaranya *al-Mulakhkhash 'an-Nathiq fi' Ilm al-Manthiq, Nadzm al-Syajarah, Sirah Nabawiyah, Qa'idah al-Fiqhiyyah* dan banyak lagi tentang berbagai cabang ilmu dalam Islam dan masalah sosial.

Ahmad Suaedy

dok.WI/ Subhi Azhari

Herril Astapradja (tengah) saat jumpa pers di Teater Utan Kayu

DRS. HERRIL ASTAPRADJA

TAK INGIN ADA ANARKI

MARKAS Komunitas Utan Kayu di Jl. Utan Kayu No. 68 H, akan diserbu massa berlabel Islam pada Minggu (4/9/2005) malam. Kabar itu sampai ke telinga Walikota Jakarta Timur H. Kusnan A. Halim, M.Si. Ia pun mengontak Camat Matraman Drs. Herril Astapradja untuk mengantisipasi terjadinya aksi kekerasan.

"Sebagai camat, saya segera turun. Saya tidak ingin ada yang mengganggu warga saya. Itu menjadi tekad saya selama menjabat," tutur Herril kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute, Selasa (14/2/2006).

Herril segera berkoordinasi dengan anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), yaitu Kapolsek Matraman Kompol Sularno dan Danramil 02 Matraman Kapten (Inf) Soedar, untuk megantisipasi tindak anarkisme yang mengganggu wilayahnya.

Benar saja, di lokasi kejadian terlihat puluhan orang dari Forum Umat Islam (FUI) Utan Kayu. Dengan dalih mendukung Fatwa MUI yang mengharamkan liberalisme, pluralisme dan sekularisme, mereka berupaya mengusir Jaringan Islam Liberal (JIL).

Mereka membawa spanduk bertuliskan, *"JIL Haram, Darah Ulil Halal"* dan *"Kami Mendukung Fatwa MUI dan Mendesak Muspika Matraman untuk Mengusir JIL dan Antek-anteknya".*

Tuntutan itu tak serta-merta dikabulkan Herril. Alasannya sederhana tapi berarti, ia harus bertindak sesuai hukum. "Soal JIL ada yang tidak berkenan, silahkan saja! Itu urusan masing-masing. Tapi harus sesuai hukum. Saya dididik dan ditugaskan demikian," tegas alumni Institut Ilmu Pemerintahan tahun 1990 ini.

Herril menolak sikapnya diartikan sebagai pembelaan kepada JIL. "Saya hanya menjalankan tugas. Sebagai kepala wilayah, kewajiban saya menjamin setiap anggota masyarakat merasa aman dan tenteram."

Jaminan itu, menurut Herril, diperintahkan konstitusi, karena anggota JIL juga warga negara. Dengan penuh resiko, Herril memutuskan, JIL tidak dapat dilarang karena sah berdasarkan hukum. "Saat saya bilang JIL tak melanggar hukum, orang-orang itu (FUI Utan Kayu, *red.*) teriak: copot! copot.!'. Emang mereka siapa? Copot-mencopot itu *kan* urusan pimpinan yang di atas," tutur pria kelahiran Pontianak, 25 April 1957 ini.

Tak hanya di Matraman, ketegasan seperti ini dijalankan Herril saat bertugas di wilayah sebelumnya. "Saya melakukan itu bukan mentang-mentang camat. Bagi saya, jabatan adalah amanah," kata ayah tiga anak yang pernah bertugas sebagai Sekretaris Camat Senen Jakarta (1995-1998), Wakil Camat Cempaka Putih Jakarta (1998-2000), Wakil Camat Kemayoran Jakarta (2000-2003) dan Wakil Camat Makasar Jakarta Timur (2003-2004).

Kita berharap sikap Camat Matraman menjamin hak warga negara berpendapat dan berkeyakinan ini menjadi teladan para kolega dan atasannya.

Subhi Azhari

Aksi Hizbut Tahrir Indonesia di Depok

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Radikalisme Islam

Menghadang Keragaman Indonesia

Gelombang radikalisme Islam terus menguat. Gerilya syariatisasi Perda menggeliat. Keragaman di tubir jurang. Gerakan pluralisme dianggap musuh utama yang wajib dienyahkan

Matahari belum jauh beranjak dari ufuk timur. Namun ratusan massa berbaju dan berikat kepala putih yang tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), sudah terlihat berkumpul di depan Gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (5/3/06). Mereka memperingati 82 tahun keruntuhan Khilafah Islamiyah di Turki, melalui demonstrasi di berbagai wilayah Nusantara dengan tuntutan seragam.

Spanduk hitam bertulisan putih *Lâ ilâha illa Allâh* membentang kokoh sebagai latar panggung seluas 5x7 meter itu. Teriakan menghujat Amerika lantang terdengar. Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia diseru untuk menghentikan kehidupan sekuler. "Paham sekuler telah menyebabkan krisis berkepanjangan di negeri ini", kata seorang peserta dengan tangan terkepal.

Juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto menegaskan, berbagai krisis dan bencana yang menimpa kehidupan umat manusia tak lain karena ketiadaan *khilafah*. "Dunia

Islam yang semula terbentang luas dalam satu kesatuan, kini terpecah belah menjadi 50 lebih negara kecil yang dipimpin oleh penguasa yang tidak sepenuhnya mengabdi pada kepentingan Islam dan umatnya," kata alumnus S2 STIE Institut Pengembangan Wiraswasta Indonesia ini.

Itulah fenomena Islam radikal yang selalu hadir di negeri ini. Dalam pandangan mereka, ideologi Pancasila plus sistem yang ada sama sekali tak menyelesaikan masalah bangsa, malah merontokkan keluhuran moral, karena sistem itu buatan manusia.

Penegakan Syariat Islam (SI), dalam bayangan mereka, menjadi satu-satunya resep yang bisa menyelamatkan dunia. "Saatnya khilafah memimpin dunia dengan syari'ah," demikian salah satu bunyi spanduk HTI.

HTI tak sendirian. Deklarasi penegakan SI bergaung di berbagai wilayah lewat berbagai 'bendera' dan kepentingan. Mereka tak main-main. Gerilya 'mengepung' negeri ini dengan mendesakkan Peraturan Daerah (Perda) berbasis SI terus dilakukan.

"Kita ke Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, dan sekitarnya untuk mensosialisasikan *tathbiq* (penerapan, *red.*) *Syari'ah*, khususnya soal pidana Islam. Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, telah mengeluarkan peraturan kewajiban untuk menutup aurat, atau berjilbab bagi siswi SD, SMP dan SMA," kata Ketua Departemen Data dan Informasi MMI Fauzan al-Anshari kepada web *eramuslim* Juli tahun 2005 lalu.

Daerah seperti Bulukumba Sulawesi Selatan, Cirebon, Bandung dan Tasikmalaya juga tak luput. "*Insya Allah road show* ini akan berjalan terus dengan melihat kesiapan teman-teman di daerah," imbuh Fauzan.

Namun Direktur the WAHID Institute Yenny Zannuba Wahid menghimbau masyarakat agar tidak terlena tawaran pemberlakuan Perda SI.

"Tim kami menemukan, beberapa daerah membuat Perda itu dengan tujuan menutupi pelanggaran moralitas sosial pembuatnya, seperti korupsi anggaran daerah atau untuk mendapat dukungan politik dan lain-lain," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik ini di Jakarta, Rabu (15/3/2006) saat memaparkan hasil pemantauan Tim Pluralisme Watch yang dibentuknya .

Dari pemantaun yang dilakukan pada November 2005 - Februari 2006, kata peraih master dari Universitas Harvard ini, disimpulkan bahwa pemberlakuan Perda SI juga menafikan rasa kepelbagaian. "Syariatisasi kerap mengundang ketegangan di dalam masyarakat dan bahkan kekerasan, serta mengkhawatirkan terjadinya disintegrasi bangsa," tegas Yenny.

Kekhawatiran Yenny ini beralasan. Dari data tim tersebut dipaparkan sejumlah peristiwa penutupan rumah ibadah non-muslim dan aliran dalam Islam, serta intimidasi dari kelompok pengusung SI. Misalnya, Masjid at-Tauhid milik Jemaah Ahmadiyah di Dusun Ulu Tedong, Desa Garanta, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat (17/2/2006) disegel Laskar Jundullah.

Belum genap seminggu, kantor perwakilan Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) di Bulukumba, Rabu (22/2/2006) malam, disatroni puluhan anggota Pemuda Penegak Syariat Islam yang dipimpin Ketua Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam, Bulukumba, Zainal Abidin.

Alasannya, Zainal tidak puas dengan diskusi publik yang digelar LAPAR siang harinya dengan tema *Melihat Ulang Formalisasi Agama Lewat Perdaisasi Syariat Islam*. Kelompok ini juga mengancam LAPAR yang mengkritisi penerapan Perda SI di Bulukumba.

"Jangan mengutak-atik Perda. Kami sudah bersusah payah meloloskannya, kemudian Anda mau mengutak-atik. Anda perlu tahu, untuk hal-hal seperti itu kami rela masuk penjara," ancam Zainal Abidin seperti dituturkan Syamsurijal Ad'han dari LAPAR, Makassar.

Kasus-kasus itu seperti meneguhkan asumsi, bahwa kini radikalisme Islam Indonesia sedang menghadang di depan mata. Asumsi ini diperkokoh lagi oleh hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan masih tingginya angka penerimaan massa terhadap agenda-agenda Islam radikal. "Meskipun tidak mayoritas," kata Peneliti LSI Anis Baswedan di Hotel Sari Pan Pacific, Kamis (16/3/2006) saat mempublikasikan hasil survei yang dilaksanakan pada 23-27 Januari 2006 itu.

Walau minoritas, penelitian dengan sampel 1.200 orang dari 33 provinsi itu menunjukkan, 62 persen responden menilai kebudayaan Barat lebih banyak membawa keburukan bagi umat Islam Indonesia. Gagasan pluralisme adalah salah satu produk kebudayaan Barat yang dituding kelompok Islam radikal berbahaya bagi Islam.

Parahnya mereka menisbatkan pemaknaan pluralisme pada Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 7/ MUNAS VII/ MUI/ II/ 2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama. Fatwa yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional MUI VII, 26-29 Juli 2005 itu antara lain menetapkan:

"*Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relativ. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga*."

Fatwa yang menunggalkan pemaknaan pluralisme itu memunculkan problem. Sejumlah pegiat pluralisme diburu ormas Islam radikal. Sudarto, Direktur Pusat Studi Antar Komunitas (PUSAKA) di Padang, Jumat (19/8/2005) diusir Forum Tokoh Peduli Syariah Sumatera Barat dari kota itu. PUSAKA juga diultimatum agar menghentikan kegiatannya karena mengkampanyekan isu pluralisme.

"Saya bisa memahami, jika ada sebagian ulama muslim menolak istilah ini. Namun yang perlu dipahami juga, ketika kita memakai istilah pluralisme maka terdapat beragam makna," kata Guru Besar Studi Agama di Universitas Virginia Abdul Aziz Sachedina, saat berkunjung ke Jakarta, September 2005 lalu.

Mestinya, kata Sachedina, kaum muslim menggunakan istilah yang diambil dari tradisi sendiri bukan dari Barat. "Al-Qur'an sendiri mengakui pluralisme sebagai dasar relasi sosial umat manusia bersama nilai-nilai lain seperti keadilan dan kesetaraan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi hak dasar umat muslim saja, namun juga seluruh umat agama lain," imbuhnya.

Memang, banyak agamawan muslim yang tak sekedar menghargai perbedaan, bahkan melakukan pembelaan keberadaan keyakinan lain, seperti KH. Washil Sarbini di Jember Jawa Timur (lihat: *Risau Moderatisme NU Luntur*) dan KH. Abdul Muhaimin di Yogyakarta (lihat: *Kerap Shalat di Katedral*).

Di tengah arus radikalisme Islam ini, sikap dua ulama itu dapat dinilai aneh. Bagaimana tidak, seolah tak hirau fatwa MUI, tanpa banyak berdebat mereka menghidupkan nilai

pluralisme dalam masyarakat.

Selain itu, banyak komunitas muslim yang hidup bahu-membahu dengan non-muslim, misalnya di Kampung Sawah, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi. Tak pernah terjadi perseteruan diantara tiga agama besar yang eksis di perkampungan Betawi itu: Islam, Katolik, dan Protestan juga Hindu dan Buddha (Lihat: *Teladan Dari Kampung Sawah*).

Mereka seolah lebih sadar akan Indonesia yang sejak awal dibangun sebagai negara yang menghormati keragaman, seperti motto Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila.

Gamal Fedhi, Rumadi, Nurul H. Maarif

KH. WASHIL SARBINI

RISAU MODERATISME NU LUNTUR

DI antara ribuan ulama di Jember, KH. Washil Sarbini (50) adalah figur kiai kharismatik yang gigih menggawangi Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak diseret ke medan politik. Tak heran, jika di tiap acara NU yang mengusung pengembangan pemikiran, gerakan kultural, dan advokasi, sosok ini selalu terlibat penuh.

Ra Washil, sapaan akrabnya, tak canggung turun langsung mengatasi persoalan umat. Selain mengelola balai pengobatan murah untuk warga Jember, ia tak segan mengadvokasi para petani di sana yang tanahnya dikuasai negara dengan mendemo DPRD.

Menurutnya, tokoh agama harus peduli pada masalah umat terutama di lingkungan sendiri. Apalagi di Jember yang agraris ini, kiai harus membantu petani menghadapi problem pertanian. Mulai mahalnya pupuk, rendahnya harga gabah, dan sebagainya. Kiai juga harus berani tampil bersama umat untuk mengontrol kebijakan pemerintah. "Ini sesuai Hadis Nabi, *man lam yahtamma bi amr al-muslimiina falaisa min hum* (siapa yang tidak memperhatikan masalah umat Islam, maka ia tidak termasuk dari golongan mereka, *red*.)," ujarnya kepada Paring W. Utomo kontributor the WAHID Institute di Jawa Timur.

Pengasuh Ponpes Roudhatul Ulum, Sumber Wringin, Jember ini juga gemar bersilaturahim ke kelompok dan pemuka non-muslim. Ia kerap membangun dialog lintas iman. Ini membuatnya diterima semua kelompok agama. "Saya ingin menunjukkan pada semua, bahwa Islam itu agama damai, mengedepankan dialog dan silaturahim," ujarnya.

Namun, kini ia risau, karena banyak kelompok muslim yang gampang menyesatkan 'orang lain,' seperti terhadap Yusman Roy di Malang, Jawa Timur, yang mengajarkan shalat dua bahasa, Arab dan Indonesia. "Ini masalah *ijtihadiyah*, yang biasa terjadi dalam Islam. Nanti kalau kebetulan pemerintahnya orang Muhammadiyah, apa lantas mereka akan menangkapi orang yang shalat pakai qunut dengan dalih penodaan agama? *Kan* ya *enggak*," tegasnya

Dari kasus itu ia menilai, iklim moderat NU terhadap kelompok minoritas kian menurun. "Sekarang sangat sulit menemukan pribadi seperti Gus Dur di NU yang terbuka menghadapi perbedaan," kata orang kepercayaan ulama kharismatik Jawa Timur, KH. Chotib Umar.

Lulusan sebuah pondok di Arab Saudi ini yakin, kedekatan dengan siapapun, akan membuat hidup tentram. Karenanya tak heran, ia acap disowani masyarakat beragam latar belakang untuk konsultasi berbagai masalah. Pada pertengahan 2005 lalu misalnya, pondoknya dipakai untuk pertemuan lintas kelompok minoritas, antara lain, Komunitas Sedulur Sikep, Kajang, Dayak Kayau, Tengger, juga eks Tapol PKI.

Karena selama ini belum pernah mendapat sambutan hangat dari komunitas pesantren, beberapa eks Tapol PKI itu menilai Ra Washil sebagai representasi Islam yang damai dan melindungi.

Gamal Ferdhi

dok.Paring WU

KH. ABDUL MUHAIMIN

Kerap Shalat
di Katedral

dok.WI/ Witjak

KINI mulai sulit menemukan agamawan seperti KH. Abdul Muhaimin. Pengasuh PP Nurul Ummahat, Kota Gede, Yogyakarta, ini sering memfasilitasi kegiatan antar agama, baik Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu, dan sebagainya di Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) yang dipimpinnya.

Apa yang melatari sikap keterbukaannya? "Ini *hablun min al-nas* yang intinya moralitas dan humanitas. Pada aspek ini semua orang bisa ketemu," ujar alumni PP Krapyak Yogyakarta ini kepada Nurul Huda Maarif dari the WAHID Institute.

Karenanya, Kiai Muhaimin berpesan, jika bergaul dengan penganut agama lain jangan sekali-kali menyinggung masalah teologis. "Ini riskan. Nanti *urung-urung* (belum apa-apa, *red.*) dicap kafir. Teologi itu masing-masing, *lakum dinukum waliya din*," katanya.

"Yang saya lakukan ini lebih ke aspek humanisme," imbuh anggota Dewan Pembina Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) ini.

Ia pernah menjalin kerja sama dengan Yayasan Buddha Suci, sebuah organisasi sosial beranggotakan penganut Buddha, untuk program penanaman sejuta pohon Mahoni. Bentuk kerja sama itu, imbuhnya, bibit disediakan Buddha Suci dan pengelolaan lapangan ditangani dirinya dibantu Lakpesdam NU Yogyakarta. "Baru 100 ribu pohon akan ditanam di lereng Merapi, Piyungan, dan Bantul," katanya.

Pria kelahiran Kotagede 13 Maret 1953 ini aktif ceramah di desa-desa yang mayoritas penduduknya non-muslim. "Saya ceramah ke *grass root*, tidak ke elit. Tidak hanya di desa muslim, juga desa non-muslim," imbuh penerima Tasrif Award tahun 2000 dari Aliansi Jurnalis Independen.

Saking intensifnya mengikuti dialog lintas iman, tak jarang ritual shalat dijalankan Kiai Muhaimin di tempat peribadatan non-muslim. "Kalau saya *nginep* di Katedral, shalatnya *yo* di Katedral," kata mantan aktivis GP Ansor ini. "Di Yogya sudah tahu semua, kalau waktu shalat, saya akan shalat di manapun. Karena *ju'ilat al-ardhu masjidan*. Bumi seluruhnya dijadikan sebagai tempat shalat," katanya mengutip sabda Nabi SAW.

"Tapi saya tidak shalat di altar gereja," jelas anggota Dewan Kebudayaan DIY ini.

Putera KH. Marzuki ini menyilahkan non-muslim untuk menginap di pesantrennya. "Banyak suster *nginep* di pesantren saya untuk mengenal Islam. Belum lama juga ada peneliti dari Universitas Berkeley di AS, India, Amerika, Cina, Korea, Roma dan Jepang," ujarnya.

Karena keterbukaannya, Anggota MUI DIY bidang Kerukunan ini kerap dinilai kontroversial, terutama oleh banyak tokoh NU. "Beda pandangan *iku gaweane wong* NU. Saya sendiri tidak punya pretensi semua harus berpandangan sama dengan saya," tegas salah satu pemrakarsa perundingan Malino ini.

Murid kesayangan pengasuh PP al-Mutaqin Pancasila Sakti, Klaten, KH. Muslim Rifai Imampuro alias Mbah Lim, ini juga menekankan pentingnya mengusung isu kebangsaan, karena bisa menyatukan keragaman masyarakat negeri ini. "Apapun agamanya, mereka *iku bongso dewe* (bangsa kita sendiri, *red.*)," tandas anggota komisi dialog antar agama Asian Conference Religion on Peace (ACRP) ini.

Nurul H. Maarif

TELADAN DARI KAMPUNG SAWAH

Oleh: Abdul Aziz Ahmad
Ketua PBNU, Peneliti senior pada Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama

ILMUWAN Emile Durkheim menyebut agama sebagai *conscience collective*, landasan kesadaran kolektif. Dengan itulah identitas sosial dibentuk dan direkat. Lalu, bisakah kebhinekaan agama menjadi kekuatan integratif? Jawabannya mungkin tidak, jika setiap orang menegaskan identitasnya sendiri.

Merujuk pengalaman, antropolog Clifford Geertz mengingatkan, kerukunan hanya terjadi ketika setiap pemeluk agama tidak menonjolkan identitas agamanya. Itulah momen di mana syahwat untuk memaksakan identitas tunduk pada hasrat kuat untuk rukun. Jika ingin melihat momen seperti ini terwujud dalam realitas, tak perlu pergi jauh. Lihatlah Kampung Sawah di desa Jatimurni, di pinggir Kota Bekasi.

Jatimurni, yang dimekarkan dari desa Jatiranggon, tak ba nyak dikenal. Justeru Kampung Sawah, salah satu kedusunannya, amat legendaris sejak jaman penjajahan Belanda. Di kampung inilah bersembunyi para buronan VOC. Tapi, Kampung Sawah juga bersejarah. Karena menjadi salah satu perkampungan orang Betawi yang paling awal mengalami kebhinnekaan agama dan etnisitas. Pemeluk Islam, Katolik dan Protestan adalah mayoritas. Tapi di sini juga ada warga Hindu dan Budha. Dinamika hubungan sosial penduduk demikian khas penduduk asli: ramah, siapapun dipandang setara dan menghindari penonjolan identitas agama.

Seperti umumnya orang Betawi, orang Kampung Sawah tak mengenal marga. Tapi persentuhan sebagian warga dengan ke-Kristen-an mendorong mereka membangun marga dengan nama yang khas Betawi. Maka lahirlah marga Bicin, Napiun, Empi, Rikin atau Kelip. Mereka lalu menerapkan perkawinan eksogami, antar marga. Meski perkawinan preferensial yang mengutamakan satu agama tetap pilihan utama, perkawinan silang antar pemeluk agama sering terjadi. Dengan begitu, pertalian keluarga turut menyuburkan kerukunan, di atas identitas agama.

Tapi tidak berarti di sana sama sekali sepi dari konflik. Ketika sebagian warga membangun rumah ibadah yang tak prosedural, warga lain protes. Di sini pemerintah desa turun tangan. Sambil prosedur ditaati, kepala desa memfasilitasi ibadah warganya dengan memfungsikan balai desa sebagai tempat ibadah. Konflikpun teratasi. Di sini nilai-nilai kewajaran dibangun: penduduk berlainan agama bisa hidup berdampingan. Kekerabatan dan ketetanggaan berprinsip tidak saling merugikan, jadi hukum tak tertulis. Tolong-menolong dan gotong royong, jadi darah dan daging. Maka setiap masalah sensitif tidak dieksploitasi bagi keuntungan suatu golongan, di atas kerugian golongan lain.

Kesediaan berkorban demi harmoni menjadi pilar lain warga kampung. Orang Islam mau menerima, shalat maghrib mereka sedikit terganggu musik gerejawi. Protes pemuda Kristen atas kedatangan mubaligh luar yang ceramahnya keras, tidak dimaknai ajakan berseteru. Tapi dihormati sebagai aspirasi menjaga harmoni. Sebaliknya, umat Kristiani dan umat lain rela menerima, waktu istirahat terganggu suara keras ajakan shalat subuh dan shalat lain. Mereka hormati keberatan orang Islam atas pembangunan rumah ibadah yang tak prosedural. Dan campur tangan pemerintah diterima positif, karena memang dirasakan positif.

Di Kampung Sawah, menghormati agama orang lain bukan sekedar pemanis. Warga tahu, doktrin agama tak mungkin disatukan. Tapi mereka juga tahu, aspek sosial agama bisa dijadikan sarana membangun saling hormat dan persatuan umat. Itulah refleksi pengalaman rohaniah warga yang terwariskan dari satu ke lain generasi. Bahwa pluralitas adalah keniscayaan hidup, tumbuh menjadi keyakinan. Pluralisme lalu menjadi titik perjuangan membangun kohesi sosial.

Tapi, ancaman terbesar bagi kerukunan sungguh bukan dari penduduk asli. Melainkan dari pendatang permanen maupun temporal. Banyak dari mereka seolah tak tahu adat. Padahal orang luar bisa belajar dari model ini, jika dipahami dalam konteks sejarah dan budaya yang melatarinya. Toh, ketahanan orang Kampung Sawah menjaga tradisi toleran dan harmonis, amat tergantung pada kemampuan domestikasi mereka. Yakni, proses penjinakan aneka pengaruh dari luar. Jika sebaliknya yang terjadi kelak, maka Kampung Sawah tak lagi relevan.

Di saat pluralisme telah diputus haram dan orang cenderung beragama dengan bekal amarah, selayaknya Kampung Sawah diteladani. Di sini tersedia "konstruk teoretik", bahwa konflik dapat dikelola dan integrasi dapat terwujud. Dan harmoni tetap bisa dibangun di tengah dinamika kehidupan beragama masyarakat yang majemuk.

dok.WI/ Witjak

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Perempuan berdemo menolak peraturan diskriminatif

Depancasilaisasi Lewat Perda SI

Saat pemerintah berupaya mempertahankan keutuhan NKRI, pemerintah daerah justru menggerogotinya dengan menelurkan Perda-perda syariah. Itulah upaya depancasilaisasi yang dilakukan elit politik dengan cara membajak syariat Islam.

Sepucuk undangan dari Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Bulukumba untuk menghadiri pertemuan kader-kader kesehatan sekecamatan diterima Maria (nama samaran, *red.*) dengan gembira. Dengan seragam pantalon putih dipadu kemeja putih, bidan desa ini bergegas ke balai desa salah satu desa percontohan syariat Islam itu.

Pelataran balai desa telah dipadati warga. Maria bergegas menuju kerumunan itu. Namun langkahnya dihentikan panitia. Pasalnya, perempuan yang rajin kebaktian di gereja ini tak memakai jilbab (tutup kepala perempuan muslim). Meskipun petinggi desa setempat tahu Maria adalah non-muslim, sehelai jilbab tetap saja disodorkan.

Maria tak mendebat. "Daripada jadi masalah, saya pakai jilbab itu dengan terpaksa," katanya kepada peneliti dari Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR), Subair Umam dan Mukrimin Amin di Makassar.

Maria hanya puncak gunung es 'korban' pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 5/2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba.

Meski pasal 13 Perda itu menyebut: "Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja dalam wilayah Kabupaten Bulukumba."

Bahkan ayat 2 di pasal dan Perda yang sama menegaskan: "Bagi Karyawan/ Karyawati, Mahasiswa/ Mahasiswi dan Siswa/ Siswi dan pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing."

Selain Perda di atas, Bupati Bulukumba Patabai Pabokori pada 25 Agustus 2003, juga mengesahkan dua Perda lain yang bernuansa Islam. *Pertama*, Perda No. 2/2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infaq dan Shadaqah dalam Kabupaten Bulukumba. *Kedua*, Perda No. 6/2003 tentang Pandai Baca al-Qur'an bagi Siswa dan Calon Pengantin dalam Kabupaten Bulukumba.

"Perda Pandai Baca al-Qur'an berpotensi memicu konflik sosial," kata Subair Umam. Kesimpulan itu berdasarkan penelitiannya, akibat Perda tersebut beberapa perkawinan sempat tertunda karena calon pengantin tak dapat memenuhi syarat itu. Padahal pihak keluarga sudah sosialisasi perkawinan anaknya. Dalam kebudayaan Bugis Makassar, pembatalan sebuah perkawinan merupakan siri' (malu, *red*.).

Tak hanya bagi calon pengantin, Perda Pandai Baca al-Qur'an mengharuskan tiap pelajar yang akan naik kelas atau melanjutkan sekolah untuk menjalani ujian mengaji. Mereka dinyatakan lulus bila bisa membaca al-Qur'an dan mendapat sertifikat sebagai tanda kemahiran.

"Sertifikat sebagaimana disebut pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasakan rekomendasi dari sekolah yang bersangkutan dan pengawas pendidikan agama," jelas pasal 5 ayat 2 Perda itu.

Selain Perda itu, Bupati Patabai mengaku menggunakan dana taktis daerah untuk mendukung program pakaian muslim. Juga membentuk 12 desa muslim sebagai percontohan penerapan syariat Islam. Ternyata proyek-proyek yang dicanangkan bupati itu menyimpan aneka masalah.

"Penentuan antara desa percontohan muslim dan yang bukan, sangat problematik dan bisa menimbulkan kecemburuan antar warga. Mereka yang desanya tidak dianggap sebagai desa muslim juga bisa marah," tegas anggota DPRD Bulukumba dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Zainal Abidin kepada Muh. Mabrur dari LAPAR Makassar.

Jejak Bulukumba yang getol menerapkan syariat Islam ini diikuti daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Barat.

Para legislator lokal berbondong-bondong studi banding dengan kas daerah ke tempat-tempat yang telah menerapkan Perda bernuansa Islam. Padahal banyak diantara mereka yang

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Wajah perempuan Aceh saat ini

hanya menjiplak peraturan-peraturan bersifat Islami itu.

"Teknik *legal drafting* Perda-perda itu bermasalah, karena *copy paste*. Pergi ke satu daerah, balik dengan Perda dari daerah itu, diganti judulnya, bahkan ada daerah yang lupa nama kabupaten (yang dijiplak, *red.)* masih belum diganti," ungkap Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana (lihat: *Ada Unsur Melecehkan al-Qur'an dan Hadits*).

Taktik legislator daerah yang diungkap Denny itu kembali terbukti, ketika Anggota Komisi A DPRD Depok Qurtifa Wijaya mengakui, Rancangan Peraturan Daerah Anti Pelacuran dan Anti Minuman Keras Kota Depok meng-*copy paste* peraturan daerah serupa dari Kota Tangerang.

"Komisi A sudah melakukan kunjungan ke Kota Tangerang yang memiliki Perda No. 7/2005 tentang Antimiras dan No. 8/2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Kunjungan termasuk juga ke Bali dan Banjarmasin," kata anggota FPKS ini seperti ditulis *Indo Pos* (18/4/2006).

Di samping bermasalah pada teknik pembuatan, Denny menilai, Perda bernuansa Islami tidak mematuhi hirarki perundang-undangan yang dimandatkan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasar UU ini, Perda berada di bawah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah (Otda).

Disebutkan dalam Pasal 10 ayat 3 UU Otda, urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama merupakan wewenang pemerintah pusat.

"Kalau diatur Perda, keagamaan jadi masalah daerah. Maka bisa diinterpretasikan, ini kewenangan pusat yang diserobot oleh daerah," tegas Doktor Hukum Tata Negara lulusan Universitas Melbourne Australia ini.

Dari situ, Program Officer Pluralisme Watch the WAHID Institute Rumadi menyimpulkan, "Karena babonnya (tiga Perda SI Bulukumba, *red.*) sudah bermasalah, otomatis duplikatnya juga," katanya.

Tapi banyak cara menyelesaikan persoalan yang menumpuk dalam Perda itu. Menurut pasal 145 ayat 2 UU Otda menyatakan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Langkah ini disebut *executive review.*

"Keputusan pembatalan Perda itu ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda," imbuh Dosen Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengutip ayat 3 pasal yang sama di UU Otda.

Kenyataannya, Perda-perda Islami itu masih tetap diberlakukan pemerintah daerah hingga saat ini. "Menurut data yang kami dapat dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, beberapa daerah memang sengaja tidak melaporkan keberadaan Perda-perda yang dibuatnya. Hingga saat ini kami masih mencari data apakah Perda-perda Islami itu telah sampai ke tangan Departemen Dalam Negeri atau belum," ungkap Rumadi.

Seandainya *executive review* tidak dijalankan pemerintah, jalan lain yang masih terbuka yaitu mengajukan *judicial review* ke MA atau mengajukan gugatan ke MK. "Di luar itu ada proses sosiologis, politis, bagaimana masyarakat melakukan *pressure* di luar konteks hukum agar terjadi *legislative review*," jelas Denny Indrayana.

Ironis, saat pemerintah pusat dengan berbagai upaya mempertahankan keutuhan Indonesia, pemerintah daerah dan elite lokal justru menggerogoti persatuan bangsa dengan menelurkan Perda-perda dengan membajak syariat Islam.

"Syariat Islam direduksi menjadi sekedar masalah kulit semata yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mereka gagal mempromosikan susbtansi ajaran Islam (*maqashid al-syariah*) dalam konteks pelayanan publik," kata Rais Syuriyah NU Australia-New Zealand Nadirsyah Hosen (lihat*: Reformasi Syariat Birokrasi*).

Unsur *maqâshid al-syarî'ah* lainnya yang gagal dipenuhi adalah *hifdh al-dîn* (memelihara agama). Unsur ini bisa diberi konteks jaminan kebebasan beragama bagi seluruh umat manusia seperti yang dijalankan Rasulullah di Madinah.

Dengan demikian, Perda-perda SI tidak saja bisa dibatalkan demi hukum, tapi juga batal demi logika kemanusiaan, bahkan Islam.

Diperlukan ketegasan pemerintah pusat menghentikan proses depancasilaisasi lewat Perda SI ini, agar bangsa Indonesia yang beragam tidak terpecah-belah.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.WI/Acep Zamzam Noor

Spanduk sindiran bagi Syariatisasi Tasikmalaya

dok.pribadi

REFORMASI SYARIAT BIROKRASI

Oleh: Nadirsyah Hosen
Ketua Syuriah PCI-NU Australia-New Zealand

BERAKHIRNYA kekuasaan Orde Baru (1966-1998) ditandai dengan semangat melakukan reformasi. Setelah tuntasnya reformasi personal (tahap pertama) yang dicirikan dengan naiknya para pemain baru di gelanggang politik nasional, reformasi tahap kedua digelar dengan melakukan amandemen UUD 1945. Periode reformasi konstitusional ini kemudian diikuti dengan tahapan berikutnya: reformasi birokrasi.

Unsur pelayanan publik dan penataan kembali aparat pemerintah baik di pusat maupun di daerah guna menjadikan birokrasi lebih efisien dan efektif adalah unsur penting dari reformasi birokrasi. Tersendatnya reformasi pada periode ini bukan saja mempersulit amanat gerakan mahasiswa 1998 untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tapi juga membuat masyarakat luas tidak merasakan dampak positif gerakan reformasi paska Orde Baru.

Dalam konteks ini menarik dicermati respon sejumlah kelompok Islam untuk turut serta dalam proses reformasi. Mereka memaknai reformasi sebagai cara agar syariat Islam dapat diterapkan di Indonesia. Setelah gagal mendesakkan usulannya untuk mengamandemen pasal 29 UUD 1945 dengan memasukkan kembali tujuh kata dari Piagam Jakarta, sejumlah elemen di tubuh umat mempromosikan ide penerapan syariat Islam di beberapa daerah.

Bukannya turut serta menggagas dan mengisi program reformasi birokrasi, sesuai prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik, mereka malah asyik mempromosikan syariat versi mereka melalui tangan-tangan birokrasi. Ini yang saya sebut dengan "syariat birokrasi".

Topik yang diatur mulai dari masalah aturan berpakaian, pembuatan papan nama Arab Melayu, pemberlakuan "jam malam" bagi perempuan sampai dengan diadakannya program baca tulis al-Qur'an bagi calon pengantin. Bentuk perangkat hukum yang digunakan mulai dari Surat Edaran Bupati, Instruksi Walikota, Surat Gubernur sampai dengan Peraturan Daerah (Perda).

Syariat birokrasi semacam ini paling tidak mengandung tiga persoalan. *Pertama*, syariah Islam direduksi menjadi sekedar masalah kulit semata yang tidak menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Mereka gagal mempromosikan susbtansi ajaran Islam (*maqashid al-syariah*) dalam konteks pelayanan publik. Bagi masyarakat, syariat Islam dianggap berhasil diterapkan apabila pegawai di kantor bupati melayani publik dengan baik, efektif, efisien dan tidak ada unsur KKN. Bukanlah menjadi soal apakah pegawai tersebut berjilbab dan apakah papan nama kantor bertuliskan huruf Arab Melayu atau tidak.

Contoh lain adalah bagaimana para penggagas penerapan syariat Islam itu memberikan kontribusi pemikiran agar birokrasi kita di daerah lebih ramping dan tepat sasaran serta membenahi sistem penggajian dan insentif yang adil sesuai dengan *merit system*.

Indikator berikutnya adalah fasilitas publik seperti toilet umum, jalan raya, air bersih, lampu penerangan, angkutan umum, dan gedung sekolah terpelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Ini semua termasuk inti atau substansi dari syariat Islam. Dan celakanya, ini pula yang sulit kita dapati di daerah yang menerapkan atau tidak menerapkan syariat birokrasi. Lalu apa bedanya bagi masyarakat antara menerapkan syariat atau tidak?

Kedua, sebagian topik yang diatur dalam syariat birokrasi sebenarnya sudah kebablasan. Tidak ada aturan fiqh yang mengatur pasangan calon pengantin untuk pandai baca-tulis al-Qur'an. Fiqh juga tidak memberikan sanksi duniawi baik administratif ataupun pidana, bagi perempuan yang tidak menutup rambutnya. Kalaupun pemakaian jilbab dianggap kewajiban syar'i, maka ini merupakan urusan individu dengan sang Khalik. Syariat birokrasi telah mencampuradukkan mana yang tuntunan moral, mana yang berupa anjuran dan mana yang berupa kewajiban agama.

Ketiga, syariat birokrasi di sejumlah daerah juga tidak memenuhi paradigma birokrasi modern: *catalytic government* dan *community-owned government* (David Osborne dan Ted Gaebler, 1993). Birokrasi pemerintahan seharusnya lebih berfungsi sebagai katalis, yang melepaskan bidang-bidang yang seharusnya dapat dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Masalah berpakaian dan kemampuan memahami huruf Arab sejatinya merupakan urusan masyarakat bukan urusan birokrasi. Birokrasi seharusnya memberdayakan masyarakat agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Yang kita saksikan beban birokrasi kita malah menjadi semakin bertambah.

Kegairahan sejumlah daerah menerapkan syariat birokrasi justru dapat menjadi bumerang ketika masyarakat lambat laun akan menyadari bahwa hidup mereka tidak berubah menjadi lebih baik. Padahal reformasi bukan sekedar mengubah aturan. Menurut Justice Kirby, *reform is a change for the better*.

Kita pantas untuk khawatir kalau syariat birokrasi ini dapat melalaikan kita untuk fokus pada tahapan reformasi yang amat mendesak kita lakukan saat ini: reformasi birokrasi!

Denny Indrayana, SH, LLM
Ketua PUKAT FH-UGM

PERDA SI
Melecehkan al-Qur'an & Hadits

Fenomena *maraknya Perda bernuansa Syariat Islam (SI) berkaitan dengan:* ***pertama****, terbukanya peluang lewat otonomi daerah (desentralisasi).* ***Kedua****, aspirasi permanen 'sebagian' kelompok Islam untuk memasukkan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Karena upaya memasukkan tujuh kata Piagam Jakarta dalam amandemen UUD tidak kunjung berhasil, sekarang kecenderungan itu bergeser ke tingkat daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam istilah Mao Tse-tung, strategi ini disebut 'desa mengepung kota'. Jadi kalau Perda-perda sudah ada di berbagai daerah, pada akhirnya SI menjadi bagian yang tidak bisa dihilangkan lagi dari tengah-tengah masyarakat. Demikian Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D kepada Subhi Azhari dan Widhi Cahya dari the WAHID Institute.*

Siapa 'sebagian' umat Islam Indonesia yang setuju formalisasi SI?

Mengenai pastinya, agak sulit. Tapi dari proses amandemen UUD 45, jumlahnya lebih kecil dari 50 persen. Indikatornya, *pertama*, dua ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah tidak lagi getol mendorong, bahkan menolak Piagam Jakarta masuk dalam UUD. Representasi pendukung SI, biasanya kelompok-kelompok yang relatif bersemangat untuk tidak mengatakan radikal, seperti FPI atau DDII.

Kedua, partai yang mendukung adalah PPP, PBB dan PDU. Tiga partai itu kalau dijumlahkan, itu minoritas. Sudah minoritas dari konteks keormasan, dari organisasi politik lebih minoritas lagi. Apalagi tiga partai itu 'elitis' aspirasinya. Saya tidak yakin tiga partai ini dipilih semata-mata karena SI. Karena kalau ditawarkan SI yang mana, saya yakin tiga partai ini akan berdebat.

Saya melihat ada manipulasi-manipulasi untuk kepentingan politik. Pada 2004, PBB melontarkan gagasan SI, tapi tidak ada konsistensi memperjuangkannya. Ada dua indikator. *Pertama,* karena disertasi saya tentang perubahan UUD, jadi saya baca risalah rapat PBB dalam sidang DPR antara 1999-2002. Ada kata-kata, "Sudahlah, kita sama-sama tahu kalau (kita, *red*.) ini tidak akan kita teruskan perdebatan itu". Yang lain mengatakan, "Tapi jangan sekarang, malu di depan konstituen. Nanti saja di detik-detik terakhir". Ini tanda mereka tidak serius, hanya sandiwara saja di depan konstituen.

Kedua, saat pemilu. Dalam rentang waktu 1-2 bulan usai Pemilu Legislatif, saat Pemilu Presiden, PBB berkoalisi dengan Partai Demokrat, Golkar dan lain-lain yang tidak memperjuangkan SI. Mungkin itu masalah pilihan politik. Tetapi dari sisi kesetiaan memperjuangkan SI, usai mendapatkan dukungan konstituen mereka tinggalkan tanpa berfikir panjang. Dan jangan pernah bermimpi berhasil memperjuangkan SI melalui koalisi dengan partai-partai nasionalis.

Tentu ada yang menjawab secara tulus ingin ada SI itu. Kalau di DPR ada almarhum Hartono Marjono yang memang perjuangannya tulus. Tapi yang lain adalah politisi-politisi *free rider* yang hanya memanfaatkan SI sebagai kendaraan politiknya.

Apa saja permasalahan Perda-perda SI?

Dari segi teknik *legal drafting* Perda-perda itu bermasalah, yaitu *copy paste*. Pergi ke satu daerah, balik dengan Perda dari daerah itu, diganti judulnya, bahkan ada daerah yang lupa nama kabupaten (yang dijiplak, *red*.) masih belum diganti.

Dari segi moral juga bermasalah. Mereka hanya jalan-jalan menghabiskan anggaran. Itu artinya koruptif. Padahal di saat yang sama mereka meneriakkan Perda SI.

Dari segi waktu, menjelang pilkada untuk menarik simpati masyarakat. Dan dari segi substansi: *ecek-ecek* (tidak signifikan, *red*.), sangat prosedural, dan di permukaan. Seperti Kalimantan Selatan yang membuat Perda Jumat Khusu', Raperda Larangan Mandi di Sungai, dan Perda Ramadlan. Kalau Perda hidup sederhana bagi pejabat atau anti korupsi, itu menurut saya lebih SI.

Pembuatan Perda SI juga tidak sesuai dengan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karena dari segi penjaringan aspirasi, tidak maksimal. Biasanya ada manipulasi, dengan mendatangkan orang untuk membawa aspirasi. Itu kemudian diklaim sebagai aspirasi masyarakat.

Kemudian dari sisi tertib hukum, UU No. 10 itu menyebut hierarki peraturan. Berdasar UU itu, Perda ada di bawah

UU No. 32/ 2004 yang mengatakan masalah keagamaan itu adalah masalah pusat. Kalau diatur Perda, keagamaan jadi masalah daerah. Maka bisa diinterpretasikan, ini kewenangan pusat yang diserobot oleh daerah.

Beberapa Perda menyebut konsiderannya al-Qur'an dan Hadits. Bagaimana posisinya dalam sistem hukum kita?

Barangkali ingin menegaskan bahwa ini adalah aturan yang bersumber dari hukum Islam, dan agar lebih menjual kepada publik. Karena UUD atau UU tidak pernah menyebut, berarti al-Qur'an dan Hadits tingkatnya hanya di tataran konsideran Perda. Kalau orang yang mengerti *legal drafting*, di situ ada unsur melecehkan al-Qur'an dan Hadits karena Perda ada di hierarki peraturan yang paling bawah menurut UU No. 10/2004. Begitu interpretasi yang valid.

Biasanya alasan para elit lokal membuat aturan untuk masalah yang sama dengan pusat memenuhi kebutuhan daerah.

Kalau aturan itu spesialis (lebih khusus) karena ada *local content,* bisa. Misalnya, ternyata di daerah itu ada hukum adat yang dilestarikan secara turun-temurun. Misalnya, ijab kabul itu lebih *afdhol* dengan Bahasa Arab, silahkan saja. Tapi tidak menjadi aturan yang wajib, hanya fakultatif. Tapi pada saat aturan itu menjadi wajib, bisa bermasalah kalau dilihat dari segi hierarki tadi.

Syarat baca tulis al-Qur'an memang bisa diargumentasikan *lex specialist* terutama kalau ada *local content*, aspirasi lokal. Tapi dari sisi lain ini melanggar hak asasi orang yang mau menikah, tapi belum bisa baca tulis al-Qur'an. Jadi antara *local content* dengan *national content* itu bertentangan atau tidak.

Apakah diatur di sana kalau orang tidak bisa baca tulis al-Qur'an, disediakan proses belajar baca tulis sehingga tidak menghambat hak dia untuk menikah? Kalau tidak maka akan terjadi penyelundupan hukum. Orang-orang yang mau kawin pindah kabupaten.

Apa langkah-langkah yang bisa ditempuh untuk memperbaiki Perda-perda itu?

Kalau proses hukumnya, ke MA lewat *judicial review*. Dengan catatan 180 hari setelah Perda itu dikeluarkan, kalau lewat maka kadaluarsa permohonannya.

Kemudian ada mekanisme dalam UU No. 32/ 2004, yaitu *executive review*. Perda yang dibuat harus dikirim ke pusat. Jika melanggar, Perda itu bisa dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Presiden, walaupun daerah yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan ke MA. Tapi sekarang belum kelihatan ada *executive review* untuk Perda-perda SI. Padahal kalau dikaji, pasti ada pertentangan dengan UU No. 32/2004, UU No. 10/2004 bahkan UUD.

Juga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak yang merasa hak-hak konstitusinya dilanggar, misalnya di Bulukumba hak dasar menikah yang dijamin UUD dilanggar Perda itu, maka mereka bisa mengajukan keberatan ke MK. Tapi menurut aturan kita, Perda diuji ke MA, sedang MK hanya menguji UU hingga UUD. Ini hanya inovasi, *toh* Perda itu adalah undang-undang, hanya dia dibuat Pemerintah Daerah.

Di luar itu ada proses sosiologis, politis, bagaimana masyarakat melakukan *pressure* di luar konteks hukum agar terjadi *legislative review*, yaitu mendorong lagi parlemen dan kepala daerah untuk merubah, mencabut atau memperbaiki Perda-perda itu.

Siapa saja yang bisa melakukan Judicial Review?

Kelompok yang merasa Perda itu bermasalah. Diajukan ke MA dengan permohonan tertulis. *Legal standing*nya akan dilihat.

Kalau di Bulukumba misalnya para mempelai atau LSM yang mempunyai kepentingan langsung dengan masalah advokasi, masyarakat yang dirugikan, atau yang menganggap Perda itu tidak aspiratif. Bisa kelompok muslim dan non muslim, karena isi peraturan yang diskriminatif hanya berlaku untuk kelompok muslim.

Kalau Perda Prostitusi kelompok perempuan yang paling dirugikan, kalau Perda baca tulis al-Qur'an kelompok yang ingin menikah yang dirugikan. Tapi saya sendiri merasa dirugikan, karena menurut saya ada manipulasi syariat Islam di situ. Hanya saja ini ini belum tentu pendapat orang banyak.

Tiga Perda SI Bulukumba Dikaji Lewat UU

Perda	Undang-Undang	Problem
Perda No. 6 Tahun 2003	UU No. 20 tahun 2003	
Pandai baca Al-Quran Bagi Siswa dan Calon Pengantin	Tentang Sistem Pendidikan Nasional	1. Pasal 1 angka 4 dan 19, Kontradiksi terlihat ketika Perda tersebut menyatakan "pendidikan agama adalah pendidikan agama Islam." Diskriminasi terhadap pemeluk agama lain menjadi nyata karena ada pengaturan soal khatam Al-Quran yang diperdakan. Jika Perda tersebut hanya mengatur pendidikan agama bagi yang beragama Islam, bagaimana dengan peserta didik yang beragama selain Islam? 2. Pasal 4 ayat (2) dan (3), Dalam Perda tersebut dinyatakan, kemampuan baca tulis Al-Quran adalah wajib dan jika tidak mampu maka akan dikenakan sanksi seperti termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8. Ketentuan kewajiban yang disertai sanksi ini bertolak belakang dengan prinsip pendidikan yang dianut dalam UU Sisdiknas yang mengedepankan prinsip pembudayaan dan pemberdayaan serta pengembangan kemauan. 3. Pasal 11 ayat (1), Kontradiksi terlihat ketika Perda tersebut menyatakan "pendidikan agama adalah pendidikan agama Islam". Diskriminasi terhadap pemeluk agama lain menjadi nyata karena ada pengaturan soal khatam Al-Quran yang Diperdakan. Jika Perda tersebut hanya mengatur pendidikan agama bagi yang beragama Islam, bagaimana dengan peserta didik yang beragama
	UU N0. 32 tahun 2004	
	Tentang Pemerintahan Daerah	Kontradiksi terjadi ketika Pasal 10 huruff UU No. 32 tahun 2004 yang membatasi kewenangan Pemda dalam masalah agama ternyata malah dilanggar. Kewenangan atributifi ni tidak tak terbatas. Artinya tidak semua hal bisa diatur oleh Pemda, diantaranya soal agama. Dan hal yang dibahas di perda ini termasuk urusan agama yang seharusnya tidak diperdakan.
Perda N0. 02 Tahun 2003	UU N0. 32 tahun 2004	
Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah	Tentang Pemerintahan Daerah	idem
Perda No.05 Tahun 2003	UU N0. 32 tahun 2004	
Berpakaian muslim dan muslimah	***Tentang Pemerintahan Daerah***	*idem*
Sumber riset the Wahid Institute		

Peluncuran program *civic education*

dok.Muhammadiyah

Asupan Demokrasi untuk Kebangsaan

*Runtuhnya Orde Baru berefek pada pendidikan kewarganegaraan atau **civic education** di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Tidak hanya yang formal, lembaga non-formal seperti pesantren dan lembaga swadaya masyarakat tak ketinggalan. Bagaimana mata ajar itu dikembangkan?*

Warung nasi Ceuceu Inggrid di pojok selatan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung tak berubah sejak delapan tahun silam. Makanan lezat dan harga ramah untuk kantong mahasiswa. Kalaupun ada perubahan, paling fokus obrolan para pelanggannya yang mayoritas mahasiswa kampus itu.

Pemilihan Umum (Pemilu) kampus untuk memilih presiden mahasiswa, adalah topik paling seru bagi mahasiswa perguruan tinggi di kawasan Cibiru Bandung itu. Perhelatan ini digelar setahun sekali. Layaknya Pemilu dalam skala nasional, di sana juga ada undang-undang kepartaian, parpol, kampanye, azas *trias politica,* debat kandidat presiden mahasiswa dan sebagainya.

Itulah miniatur praktek demokrasi di level perguruan tinggi. Tak hanya di UIN Bandung, dinamika politik yang disebut *student governance* ini juga merebak di hampir seluruh kampus di tanah air.

Praktek demokrasi dalam bentuk pemilu di berbagai level memang disambut antusias, baik oleh mahasiswa maupun masyarakat. Namun terdapat keterputusan antara semangat itu dan sikap masyarakat saat merespon persoalan kebangsaan.

"Masyarakat kita sangat semangat berdemokrasi. Tapi artikulasi dan ekspresi sebagian mereka memperlihatkan sikap-sikap yang *uncivilized*. Dengan dalih demokrasi, mereka membakar gedung, merusak mobil dan sebagainya," tegas Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada.

Fenomena menjalani kebebasan yang cenderung anarkis dan melanggar HAM, dinilai Dede, sebagai dampak pendidikan kewarganegaraan model Orde Baru yang menerapkan sistem komando, dari atas ke bawah. "Perlu model pendidikan kewarganegaraan baru yang mengembangkan paradigma pembangunan yang berbasis masyarakat," lanjut penulis buku *Paradigma Pendidikan Demokratis* ini.

Dengan alasan itu, Dede bersama kawan-kawannya di UIN Jakarta mereformasi pendidikan kewarganegaraan saat pasca kejatuhan rezim Orba. Pembelajaran berorientasi demokratisasi Indonesia ini pun diberi nama *Civic Education* (CE).

Secara umum, pembelajaran CE meliputi kajian dan pembahasan mengenai konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam *civil society*.

Menurut Said Tuhuleley, munculnya kebutuhan atas CE didorong oleh tiga alasan utama. *Pertama*, meningkatnya gejala 'buta' politik di kalangan warga negara. *Kedua*, meningkatnya apatisme politik dengan semakin sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses politik. Dan *ketiga*, masih terjadinya pelanggaran HAM baik yang dilakukan negara maupun warga negara.

"Di sinilah urgensi *civic education*, yakni mendorong setiap orang agar menjadi warga negara yang partisipatif, kritis, taat hukum, menghormati perbedaan dan berani menyatakan pikiran dan perasaannya," jelas Said yang juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3 UMY).

Alasan lainnya, Pendidikan Kewiraan mesti direformasi seiring derasnya arus demokratisasi. "Jadi CE itu kita isi dengan tiga pilar yang saling berkait, yaitu demokrasi, HAM dan *civil society*," kata Abdul Rozak dari Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Jakarta.

Pemerintah pun menyambut baik pengembangan CE ini, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang Penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.

Sedang standar nasional pengajaran CE di sekolah dan perguruan tinggi, kini tengah diperbaiki oleh Badan Standar-isasi Nasional Pendidikan (BSNP). "Tim inilah yang menyiapkan standar isi, metode pembelajaran dan pengajarnya," jelas Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, Prof. Dr. Udin S. Winataputra (baca: *Baru Knowing, Belum Doing*).

Dengan sokongan pemerintah itu, CE berhasil masuk berbagai kampus di negeri ini, kendati dengan nama beragam. Di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta misalnya, materi ini bertitel Pendidikan Resolusi Konflik dan Perdamaian, di Universitas Trisakti bertitel Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan HAM, di Universitas Mercu Buana (UMB) bertitel Pendidikan Etika Berwarganegara, dan di Universitas Bina Nusantara (Ubinus) bertitel *Character Building*.

Perguruan Tinggi Islam Negeri atau Swasta dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah tetap menggunakan nama *civic education*. "Ini terjadi karena di dalam kurikulum, kita diberi keleluasaan oleh pemerintah dalam hal penamaan. Yang terpenting substansinya," jelas Abdul Rozak.

Ditambahkannya, saat ini tidak kurang dari 213 perguruan tinggi Islam telah mengajarkan CE, yaitu 47 Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTIN), 79 Perguruan Tinggi Islam Swasta (PTIS) di Jawa Barat dan Jakarta, dan 87 PTIS di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara. Sedang di lingkungan Muhammadiyah, CE telah diajarkan setidaknya di 20 Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Malah tak lama lagi CE akan diajarkan di 509 SMA, 249 SMK, dan 171 MA di bawah naungan Muhammadiyah. Tak hanya di jalur formal, CE pun berkembang di jalur non-formal (lihat: *Merajut Islam dan Demokrasi*).

Apakah semua itu mengindikasikan keberhasilan pengajaran CE? Ternyata tidak. Dari hasil survei terhadap pengajaran CE di UIN Jakarta saja misalnya, terungkap fakta minimnya kreativitas dosen, pembelajaran yang masih instruktif dan gaya mengajar yang masih berbau Orba, sehingga menyebabkan mahasiswa kurang kritis.

Di luar itu, masih ada kendala terbatasnya buku ajar dan harganya yang mahal. "Ini sering mengganggu proses belajar-mengajar, karena dosen akhirnya harus melakukan ceramah lagi untuk menjelaskan isi buku," tulis LP3 UMY dalam laporannya.

Karena itu, Dede Rosyada berharap, CE harus terus dikembangkan. "Juga perlu ada standard nasional yang baku semacam Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) yang membina dosen Kewiraan, dilatih, di-*training*, dan seterusnya," imbuhnya.

Hal yang sama disampaikan Udin S. Winataputra. Bahkan Udin menilai, CE yang dikembangkan di Asia baru tahap *to know democracy* (mengetahui demokrasi, *red.*). "Belum *how to build democracy* (bagaimana membangun demokrasi, *red.*)," ujarnya.

Sebab itu pula, jika ada orang yang beranggapan pengajaran CE di negeri ini telah berhasil, Udin menyanggahnya. "Itu sering bikin saya malu hati. Saya sendiri merasa, kita belum banyak beranjak secara signifikan, kecuali sebatas *knowing* (pengetahuan, *red.*)," akunya.

Karena itu Udin merasa masih banyak yang harus dilakukan para penggagas CE agar demokrasi di Indonesia benar-benar terwujud. "Seluruh komponen bangsa yang peduli dalam soal ini harus menyatukan pikiran dan terus bekerja," pesan profesor yang puluhan tahun menggeluti CE ini.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif, Subhi Azhari

Prof. Dr. Udin Saripudin Winataputra
Direktur Pascasarjana Universitas Terbuka

Baru *Knowing*, Belum *Doing*

PULUHAN tahun menggeluti Civic Education (CE), menjadikan Prof. Dr. Udin S. Winataputra sangat berkompeten berbicara soal ini. Menurutnya, CE di Indonesia baru sebatas knowing belum doing. Indikatornya, mahasiswa yang telah dibekali prinsip-prinsip CE, ketika berunjuk rasa masih ada yang tidak tertib. Malah tak jarang anarkis. Berikut penuturannya kepada Gamal Ferdhi dan Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute:

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Apa tujuan awal diciptakannya CE?

CE itu program kurikuler yang dirancang untuk sekolah di AS. Tujuannya membangun warga negara AS yang cerdas dan bertanggungjawab. Atau *smart* dan *good citizens*. Warga itu *hypothetical citizen* kata Aristoteles. Maksudnya, semua orang baru bisa menjadi warga negara yang baik kalau ada upaya khusus mendidiknya. Jadi harus ada upaya sistemik yang dilakukan pemerintah untuk membangun masa depan bangsanya. Salah satunya dengan melakukan pendidikan kewarganegaraan atau CE.

Adakah akar CE untuk konteks Indonesia?

Kita memang punya tradisi sendiri. Upaya membangun bangsa itu lahir sejak awal abad 20. Kita mencatat ada semangat berbangsa Indonesia yang oleh orang Barat ditengarai sebagai indikator bangkitnya kesadaran orang-orang Timur. Puncaknya pada 28 Oktober 1928. Saat itu sejumlah anak muda berikrar dan bersemangat untuk menjadi banga yang satu, hidup di tanah tumpah yang satu dan berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Ini kian mengkristal ketika Indonesia merdeka pada 1945.

Jadi tradisi bernegara bangsa Indonesia ada sejak dini?

Betul! Persoalannya bagaimana mewujudkan itu? Salah satu alatnya adalah pendidikan sebagai sarana membangun bangsa ini lewat generasi mudanya. Inilah latar historis dan filosofis mengapa kita harus punya program pendidikan yang dirancang khusus untuk membangkitkan kesadaran berbangsa. Maka pada era 61-an dikembangkanlah mata pelajaran *Civic*. Tahun 1968, *Civic* berubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Doktrin pemerintahnya mulai dikurangi dan muncul doktrin negara yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Ini berlangsung sampai tahun 1974. Tahun 1975 berubah jadi PMP. Tahun 1994 jadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pelajaran-pelajaran itu menjadi alat pemerintah untuk mengindoktrinasi rakyat. Lewat mata pelajaran ini kita dicekoki bagaimana seharusnya menjadi warga negara dengan memahami doktrin politik kenegaraan waktu itu. Padahal seharusnya semua pendidikan itu untuk membangun warga yang pro negara, bukan pro pemerintah. Kalau perlu kritis terhadap pemerintah. Barulah beberapa tahun silam, pasca Orde Baru, muncul wacana baru tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi.

Apa kelemahan CE yang ada sekarang?

CE di Asia baru *teaching about democracy* (pengajaran tentang demokrasi, *red.*) yang lebih ke wacana. Dengan kata lain baru *how to know democracy* (bagaimana mengetahui demokrasi, *red.*) dan belum *how to build democracy* (bagaimana membangun demokrasi, *red.*) seperti di AS, Inggris dan New Zealand. Jadi di Indonesia kita harus bergerak ke tengah dulu. Jangan langsung melompat ke *building*.

Bukankah CE sudah cukup lama diajarkan di Indonesia?

Memang. Tapi demokrasi itu tumbuh jika ada kulturnya. Sebagian besar orang mengatakan, kita tidak punya akar demokrasi. Karena sejarah kita itu sejarah kerajaan atau monarki lokal. Budaya kita bukan budaya Indonesia, tapi budaya komuniter. Saya sering dialog dengan orang DPR. Dalam benak mereka bukan Indonesia nomor satu, tapi partai. Apalagi kalau sudah menjelang Pemilu. Sebenarnya politisi harus diajarin slogan mereka sendiri: "loyalitas pada partai selesai ketika loyalitas pada bangsa dimulai".

Apa lagi tantangan yang dihadapi CE?

Tantangannya termasuk sistem multipartai dan otonomi daerah. Misalnya sejarah lahirnya UUD 1945 pasal 33 tentang bumi, air, dan kekayaan laut dipelihara oleh negara, itu yang merumuskan Hatta dan Syahrir. Mereka itu pemuda Sumatera yang tahu di bawah alam Sumatera ada kekayaan. Tapi karena Otda, ada kabupaten bertengkar soal laut. Ini menyebabkan Indonesia terkavling. Akhirnya yang terbentuk bukan orang yang punya jiwa keindonesiaan, tapi orang yang lokalis, primordial dan sangat egosentris. Itu ironis!

Bagaimana perkembangan CE saat ini?

Sekarang ini, standar isi pendidikan kewarganegaraan untuk SD, SMP, dan SMA sangat dominan kontennya. Ini berarti anak sekolah hanya diperkuat *knowing*-nya. Untuk SMP misalnya, ada bunyi kompetensi, siswa mampu menganalisis suasana kebatinan pembuatan konstitusi. Celaka! Kalau anak SMP harus dicekoki untuk menganalisis, apa *sih* suasana kebatinan itu? Padahal itu untuk mahasiswa fakultas hukum jurusan hukum tata negara.

Evaluasi CE itu sendiri seperti apa?

Sekarang, karena *knowing*, evaluasinya hanya *testing*. Kalau sudah *doing*, evaluasinya bukan lagi *testing*, tapi juga *doing*. Karena itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sekarang sedang memperbaiki standar isi, standar pembelajaran dan standar guru yang nantinya akan diterapkan dari SD sampai PT.

Bukankah banyak orang beranggapan CE telah berhasil?

Itu sering bikin saya malu hati. Saya katakan, itu hanya *lips service*. Saya sendiri merasa, kita belum banyak beranjak secara signifikan. Dalam pemikiran memang banyak berubah.

Lalu capaian apa yang telah diraih CE?

Yang paling kelihatan hanya *knowing* saja. Orang banyak tahu demokrasi. Itupun baru pada tingkat akademis. *Doing*-nya ada, tapi kalau dipersentase mungkin *knowing*-nya 75 persen. Buktinya anak-anak sekolah kalau berdemo *nggak* bisa tertib. Indikatornya itu saja. Mereka tahu demokrasi, tapi belum bisa mempraktekkannya.

Jadi, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Seluruh komponen yang konsen dalam soal ini harus menyatukan pikiran dan konsisten menyebarkan hal ini lewat media massa, sehingga terbangun kebersamaan sebagai bangsa. Misalnya kesadaran orang Aceh, Jawa, Sunda, Manado dan sebagainya. Bangunlah kesamaan itu. Jangan tonjolkan perbedaannya. Simbol-simbol Indonesia harus selalu dikedepankan.

dok.pribadi

Civic Education:
PENGALAMAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh: Azyumardi Azra
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

DI KALANGAN dunia pendidikan di Indonesia, *Civic Education* (CE) termasuk istilah baru yang semakin populer, khususnya pada sewindu reformasi. Walaupun sebenarnya, Indonesia berpengalaman cukup lama dalam bidang ini, yaitu pengajaran mata pelajaran Civics dan kemudian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan substantif dan metodologis antara CE dan PPKn.

Bagi saya, CE lebih tepat diterjemahkan sebagai 'pendidikan kewargaan', yang lebih menempatkan warga negara sebagai subyek daripada sekadar obyek *vis-à-vis* negara. Istilah 'pendidikan kewargaan' mengandung konsep 'masyarakat kewargaan', 'masyarakat madani', 'masyarakat sipil' atau *civil society*. Inilah warga yang memiliki 'budaya kewargaan' (*civic culture*) yang kemudian terejawantah ke dalam *civility* atau keadaban.

Harus diakui, CE yang semakin menemukan momentum sejak 1990-an dipahami secara berbeda-beda. Bagi sebagian ahli, pendidikan kewargaan diidentikkan dengan 'pendidikan demokrasi' (*democracy education*). Di sini pendidikan kewargaan mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi, *rule of law*, dan hak dan kewajiban warga negara. Sementara bagi sebagian ahli lain, pendidikan kewargaan disebut *citizenship education* yang muatannya menekankan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara dalam *civil society*.

Masih ada lagi sebagian ahli yang berpendapat, bahwa pendidikan kewargaan mencakup pengetahuan tentang lembaga-lembaga dan sistem yang terdapat dalam pemerintahan, sistem politik, proses-proses demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, administrasi publik dan sistem hukum. Selain itu, pendidikan kewargaan juga mencakup keahlian dan pengetahuan tentang kewarganegaraan aktif, refleksi kritis terhadap proses-proses politik dan pemerintahan, dan kerjasama di antara warganegara. Terakhir sekali, pendidikan kewargaan juga mencakup wilayah keadilan sosial, pengertian antar-budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.

Di Indonesia, pendidikan kewargaan merupakan paradigma baru Civics yang sudah diajarkan di SMA sejak 1962. Sejak 1968, mata pelajaran Civics diganti dengan Pendidikan Kewarganegaraan, yang isinya mencakup sejarah Indonesia, geografi, ekonomi, politik dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Mata pelajaran ini wajib dipelajari murid-murid sejak dari SD, SMP sampai SMA. Pada 1975, rezim Soeharto mengubah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP), yang isinya merupakan indoktrinasi Pancasila sesuai penafsiran monolitik pemerintahan Orde Baru dalam P4. Kurikulum 1984 bahkan mempertegas mata pelajaran ini sebagai indoktrinasi politik, tidak hanya untuk 'kelestarian' Pancasila, tetapi lebih penting lagi kelanggengan (*status quo*) rezim penguasa. Akhirnya, sesuai dengan UU Sisdiknas 1989, mata pelajaran ini disesuaikan menjadi PPKn.

Sedangkan pada tingkat perguruan tinggi diwajibkan mata kuliah Pancasila dan Kewiraan, yang pada dasarnya juga merupakan indoktrinasi politik. Sejak 1998, ketika reformasi terus bergulir, mulai muncul pertanyaan tentang relevansi mata kuliah Pancasila dan Kewiraan. Usaha reformasi mata kuliah ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Di perguruan tinggi, mata kuliah Pancasila akhirnya 'diubah' Depdiknas menjadi Filsafat Pancasila. Sementara, mata kuliah Kewiraan cenderung sulit diubah, karena terdapat resistensi yang kuat dari dosen-dosen Kewiraan yang memiliki *privilege* berupa sertifikat khusus dari Lemhanas untuk mengajarkan mata kuliah ini.

Inisiatif lebih drastis dilakukan IAIN (kini UIN) Jakarta yang pada 1999 menghapus mata kuliah Kewiraan dan memperkenalkan Pendidikan Kewargaan. Pilot proyek ini menjadi sebuah kisah sukses, dengan penyebaran mata kuliah ini ke seluruh lembaga pendidikan tinggi Islam, baik negeri dan swasta. Dan kisah sukses ini menarik perhatian Malaysian Citizenship Initiative (Proyek Warga) dan Center for Civic Education, Amerika Serikat untuk juga mengkajinya dalam loka karya *Educating the Young for Active Citizenship*, di USM Penang 11-13 Desember 2004. Melalui forum ini berbagai gagasan tentang perluasan pendidikan kewargaan juga menjadi agenda pokok.

Dengan demikian, dilihat dari segi ini, Indonesia dengan '*separated approach*' melalui mata pelajaran khusus Civics, Pendidikan Kewarganegaraan, PPKn, Pancasila, dan Kewiraan, dan Filsafat Pancasila, sebenarnya telah berdiri di depan dalam pengembangan CE; ditambah lagi dengan mata kuliah CE, yang kini sudah diadopsi banyak perguruan tinggi. Tetapi, harus diakui, terdapat sejumlah masalah dalam mata pelajaran atau mata kuliah tersebut; kecuali pada Pendidikan Kewargaan

yang dirumuskan setelah Indonesia berubah dari otoritarianisme menjadi demokrasi. Akibatnya, mereka gagal dalam usaha sosialisasi dan diseminasi demokrasi.

Kegagalan itu, hemat saya, bersumber setidaknya dari tiga hal. *Pertama*, secara substantif, Civics, PPKn, Pancasila, dan Kewiraan tidak secara terencana dan terarah mencakup materi dan pembahasan yang lebih terfokus pada pendidikan demokrasi dan kewargaan. Materi-materi yang ada umumnya terpusat pada pembahasan yang bersifat idealistik, legalistik dan *normative* sesuai dengan interpretasi dan hegemoni makna oleh rezim Orde Baru. *Kedua*, kalaupun materi-materi yang ada pada dasarnya potensial bagi pendidikan demokrasi dan pendidikan kewargaan, tapi potensi itu tidak berkembang karena pendekatan dalam pembelajarannya bersifat indoktrinatif, regimentatif, monologis, dan tidak partisipatif.

Ketiga, subyek-subyek mata pelajaran dan mata kuliah tersebut lebih teoritis daripada praktis. Akibatnya terdapat diskrepansi yang jelas di antara teori dan wacana yang dibahas dengan realitas sosial-politik yang ada. Bahkan pada tingkat sekolah/universitas sekalipun diskrepansi itu sering terlihat pula dalam bentuk otoritarianisme bahkan feodalisme orang-orang sekolah dan universitas itu sendiri. Akibatnya, bisa dipahami, kalau sekolah/universitas gagal membawa peserta didik untuk 'mengalami demokrasi'. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

FORUM BELAJAR BERSAMA LKiS

MERAJUT ISLAM DAN DEMOKRASI

LEMBAGA Kajian Islam dan Sosial (LKiS) di Jogjakarta adalah salah satu lembaga non-pemerintah yang menggeluti pendidikan kewarganegaraan melalui forum Belajar Bersama. Forum ini dimulai sejak 1997 dan berlangsung setiap tahun.

Kegiatan yang diselenggarakan di Jogjakarta ini, pada awalnya dimaksudkan sebagai ruang diskusi bagi para santri, mahasiswa dan aktivis sosial tentang persoalan-persoalan mendasar di sekitar agama, kekuasaan, pengetahuan, ideologi dan masyarakat.

"Dalam perkembangan selanjutnya, Belajar Bersama juga menjadi forum pertukaran pengalaman di antara peserta, yang terdiri dari para *community organizer*, seputar praksis gerakan masyarakat dan kaitan-kaitan struktural yang melingkupinya," tegas Direktur Eksekutif LKiS Jogjakarta M. Jadul Maula.

Dalam forum, yang diimajinasikan sebagai cikal bakal 'universitas' LKiS, ini terdapat tiga fakultas, yaitu Fakultas Islam dan Relasi Antar Agama, Islam dan Gerakan Perempuan di Indonesia, dan Islam dan Politik Kewarganegaraan.

"Di tahun 2005 lalu, Belajar Bersama secara khusus mengangkat dua tema. Islam dan Multikulturalisme dan Islam dan Politik Lokal yang secara khusus menelaah munculnya Perda-perda Syariat Islam di berbagai wilayah di Indonesia," ujarnya.

Menurut Jadul, materi-materi ini penting karena dua hal. *Pertama*, dari sudut kewarganegaraan. Banyak kebijakan dan perilaku negara yang justru melanggar bahkan menindas hak-hak warga negaranya sendiri.

"Seperti hak menikmati kekayaan alam, hak atas lapangan pekerjaan, hak atas keamanan, hak atas kebebasan berkeyakinan, hak atas kepastian hukum, dan lain-lain," jelas Jadul.

Kedua, dari sudut Islam. Jadul mengakui, *mainstream* pemikiran dan gerakan Islam Indonesia belum mendukung upaya penguatan dan pemenuhan hak-hak warga negara dalam menghadapi ketidakpedulian dan keangkuhan negara.

Alasan lainnya, materi CE dalam kurikulum resmi tidak menjawab masalah yang banyak terjadi di negara ini. "Bahkan menambah kekaburan masalah," kritik Jadul.

Kritik itu didasarkan pengamatannya tentang materi CE yang lebih menekankan kewajiban warga negara, bukan hak-haknya. "Ini terbalik. Mestinya penekanannya pada kewajiban negara terhadap warganya dan hak warga negara atas negara, lalu baru kewajiban warga terhadap negaranya," tegasnya.

Jadul juga melihat adanya persoalan dalam konsep kewarganegaraan *(citizenship)* yang lebih mengutamakan legalitas dan menyeragamkan warga negara, sehingga cenderung diskriminatif. "Kelompok yang mempunyai keyakinan maupun agama 'tidak legal', tidak diakui sebagai warga negara," paparnya.

Demikian juga, konsep kewarganegaraan yang dominan belum menampung perbedaan-perbedaan kultural yang ada di dalam masyarakat, seperti kultur anak jalanan, para *diffable*, perbedaan orientasi seksual, perbedaan adat, dan lain-lain.

Karena itu, dalam forum Belajar Bersama, LKiS memulai dengan identifikasi problem-problem yang dihadapi warga negara selama ini. Kemudian mengemukakan sebab-sebab struktural dalam lingkup lokal, nasional maupun global, yang melahirkan problem itu.

"Tidak lupa, kita juga membicarakan secara kritis orientasi pemikiran dan gerakan Islam dalam konteks kewarganegaraan," jelas Jadul.

Seperti LKiS, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, termasuk NGO yang gencar menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui kegiatan pendidikan kewarganegaraan atau *Civic Education* (CE) di lingkungan pesantren, baik di pesantren Jawa maupun luar Jawa.

"Pendidikan kewarganegaraan untuk kalangan pesantren, misalnya melalui program *Santri Governmen*t (SG) pada 2001 dan 2003," jelas Project Officer Santri Government P3M AS Burhan.

Kegiatan itu, imbuh Burhan, meliputi pelatihan implementasi nilai-nilai demokrasi pada lembaga/organisasi santri, pembentukan pranata kepemimpinan melalui proses rekruitmen demokratik, dan lain sebagainya.

"Kami berharap dengan kegiatan tersebut, proses demokratisasi di lingkungan pesantren dapat semakin diperkuat, bukan saja pada tataran wacana, tetapi sekaligus masuk ke tahap internalisasi," katanya.

Forum belajar bersama LKiS *dok.LKiS*

Kegiatan SG, antara lain, telah dilaksanakan di Ponpes al-Hikmah Sirampog Brebes Jawa Tengah, Ponpes al-Hamidiyah Jakarta, Ponpes al-Masthuriyah Sukabumi Jawa Barat, Ponpes Assidhiqiyah Tangerang Banten, Ponpes Sukahideng Tasikmalaya Jawa Barat, Ponpes al-Ihya' Ulumuddin Cilacap Jawa Tengah dan lain sebagainya.

Dikatakan Burhan, program ini bisa diterima dan mendapat sambutan positif dari kalangan pesantren. "Demokrasi juga memberikan tempat bagi inspirasi agama, tapi melalui proses konstitusional," pungkasnya.

Subhi Azhari, Nurul H. Maarif

Santri Ponpes al-'Ashriyyah Nurul Iman Parung di pabrik roti

dok.WI/Nurul H

Mengikis Fundamentalis dengan Berbisnis

Kemandirian ekonomi diyakini bisa mengikis fundamentalisme. Untuk tujuan itu, banyak pondok pesantren (ponpes) melakukan pemberdayaan ekonomi seraya terus meniupkan nilai-nilai Islam damai.

Lara Saade grogi saat Habib Saggaf bin Mahdi bin Syeikh Abu Bakar menyurungkan *microphone* dan memintanya memperkenalkan diri. Sebagai spesialis pengembangan masyarakat di Bank Dunia, berorasi di depan massa bukan hal baru bagi Lara. Tapi yang ini jelas pengalaman pertamanya.

"Baru kali ini saya berbicara di hadapan ribuan laki-laki di dalam masjid. Apalagi baru selesai menunaikan shalat Jum'at," kata Lara dalam Bahasa Arab, di Masjid Agung Pondok Pesantren al-'Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jum'at (23/6/2006).

Bisa diduga, kedatangan Lara ke sana untuk mengemban tugas dari bossnya, Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz yang juga pernah mengunjungi ponpes itu awal April 2006. Paul kagum pada pengelolaan ponpes itu. Ponpes yang mengasuh 8.231 santri itu mampu menghidupi dirinya sendiri, tanpa memungut bayaran sepeserpun dari para santrinya.

"Makan, tidur, sekolah, juga kesehatan, semua gratis. Yang penting kita belajar, bekerja dan berusaha," ujar pemimpin ponpes, Habib Saggaf.

Ponpes yang didirikan 17 Juli 1998 ini memadukan sistem salafi, sekolah umum dan peningkatan kualitas keahlian santri. Santri mengikuti jenjang pendidikan dari ibtidaiyah, tsanawiyah, 'aliyah sampai universitas.

"Santri di sini banyak yang miskin dan yatim piatu. Tapi kualitas ustadznya cukup baik. Mereka alumni Timur Tengah dan sejumlah universitas dalam negeri lulusan S1, S2, dan S3," jelas Habib.

Ponpes yang dibangun di atas lahan seluas 160 hektar ini, mengharuskan santrinya tinggal di asrama. "Kita tidak menerima murid yang keluar-masuk. Karena nanti tidak terkontrol," imbuh pria berdarah Yaman yang selalu mengenakan jubah namun ramah ini.

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Santri Ponpes al-'Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor

Mengoperasikan ponpes sebesar itu, tentu butuh dana besar. Namun Habib punya cara agar ponpesnya tetap mandiri. "*Alhamdulillah*, ponpes ini bisa berjalan dengan pengolahan sampah, perkebunan sawah dan pabrik roti," katanya.

Daur ulang sampah menjadi bisnis pertama yang dirintis. Sampah organik dijadikan kompos untuk kebun ponpes dan dijual. Sampah non-organik didaur ulang dan dijual ke penampung. "Sekali jual *insya'allah* dapat Rp 1 juta," ungkap Saiful, santri Fakultas Tarbiyah Universitas Habib Saggaf dari Sukabumi Jawa Barat, yang Jum'at itu bertugas mensortir sampah.

Bahkan Habib Saggaf berencana mengelola sampah Pasar Parung. "Belum ada kesepakatan. Kabupaten Bogor belum mau men*drop* sampahnya ke sini. Ini aneh. Padahal jika sampahnya kita olah, Pemda diuntungkan. Mereka bilang masih dalam proses. Beginilah birokrasi Indonesia," keluh Habib.

Selain pengolahan sampah, pertanian menjadi usaha lain ponpes. Sekarang lahan sudah mencapai 20 hektar. Ada sawah, kolam, kebun lavender dan bunga matahari. Juga ada kebun sayuran dan palawija. Hasilnya dibagi dua, antara santri dan ponpes.

Dua konsultan pertanian pun disediakannya untuk mengembangkan keahlian bertani santri. "Saya rekrut dari IPB dan Universitas Sriwijaya," ungkap Habib kelahiran Dompu, Nusa Tenggara Barat, 15 Agustus 1945 itu.

Misinya meningkatkan keahlian santri. Tak cuma itu, sebuah pabrik roti pun didirikannya di halaman ponpes. "Kalau mereka lulus dari ponpes, bisa bikin pabrik roti," terangnya. Pabrik roti dengan produksi 8.000 roti per hari itu, dijalankan kelompok santri secara bergiliran. "Kita belum jual keluar. Baru dimakan oleh santri saja," katanya.

Hasil kerja para santri selama di ponpes disimpan di koperasi santri. "Dana simpanan itu hampir mencapai Rp 1 miliar. Koperasi juga menyediakan barang dengan harga 30% lebih murah dari harga di luar," kata Cece, santri kelas 3 Tsanawiyah asal Cianjur Jawa Barat.

Ponpes tidak hanya memberi kesempatan pada santri untuk mengembangkan ekonomi di kebun milik ponpes. Pasangan suami-istri alumni juga diberi kesempatan mengelola lahan seluas 1 hektar selama dua tahun di daerah Banten. "Hasilnya, setengah buat mereka, setengah buat ponpes," kata Habib.

Lahan ponpes di Banten seluas 1.272 ha itu, terdiri dari sawah, empang dan mata air mineral. "Sisa lahan masih dikerjakan orang kampung dengan sistem pembagian yang sama. Kami juga berniat menjadikan mata air sebagai pabrik air minum kemasan di daerah itu," obsesinya.

Kemandirian serupa juga dijalankan Ponpes al-Ittifaq Babakan Jampang, Ciwidey, Bandung. Ponpes asuhan KH. Fuad Affandi yang berdiri pada 1934 dan kini diisi 300 santri salaf itu, selain dikenal dengan kajian kitab klasiknya, juga dikenal aktivitas agribisnisnya. Di samping ditanamkan kesalehan pribadi, para santri juga dibekali kesalehan sosial. "Kegiatan agribisnis dikelola santri untuk pembiayaan mereka di ponpes," kata KH. Fuad.

Di lahan kering seluas 15 ha itu, para santri diberdayakan untuk bercocok tanam, terutama sayuran, seperti tomat, wortel, jipang, dan sebagainya. Hasilnya yang sehari mencapai empat ton, disalurkan ke berbagai hipermarket besar di Bandung dan Jakarta.

"Itu semua bisa terjadi karena saya punya prinsip; jangan ada sampah yang *ngawur*, jangan ada tanah yang tidur dan jangan ada waktu yang *nganggur*," ujar alumni Ponpes al-Hidayah, Rembang Jawa Tengah ini. "Jika ada 500 ponpes seperti ini, kaum muslim di Indonesia tidak ada yang miskin," tambahnya.

Untuk menjaga kontinuitas pasokan, baik sayuran atau buah-buahan ke hipermarket-hipermarket, santri petani menerapkan pola tanam. "Kerja sama dengan kelompok tani juga digalang," jelas KH. Fuad yang menjadi generasi ketiga keluarga ponpes tersebut.

Ponpes yang dipimpinnya sejak 1974, itu juga memiliki usaha perikanan dan peternakan meliputi ternak sapi, kambing, ayam, dan kelinci untuk pemanfaatan limbah sayuran dan pupuk kandang. "Semua harus dimanfaatkan, karena tidak ada ciptaan Allah yang tak berguna," ujarnya.

Hal yang sama disampaikan Dandan, menantu KH. Fuad. Menurutnya, ponpes juga memberdayakan masyarakat sekitar di lahan seluas 300 ha. "Kita bina masyarakat baik SDM, manajemen pemasaran, maupun permodalan. Ponpes hanya sebagai fasilitator," imbuhnya.

Pemberdayaan masyarakat itu meliputi budidaya teh, garmen, pupuk organik, dan sebagainya. "Hasilnya bisa kita jadikan sumber dana bantuan untuk operasional ponpes," ujarnya.

Ponpes al-Ittifaq tak rikuh bekerjasama dengan badan pemerintah maupun non-pemerintah. Bahkan dengan pihak asing seperti Kedutaan Besar Belanda melalui *horticulture program* untuk membantu petani di sekitar ponpes. "Kita mengambil tutornya dari Belanda," jelas Dandan.

Saat ini, ujar Dandan, pihaknya sedang menjalin kerja sama dengan pemerintah Taiwan, guna mengembangkan cabe organik. "Ini karena pasar meminta. Jadi kita terus berinovasi," katanya.

Hasil usaha santri itu juga digunakan untuk membantu masyarakat miskin. Misalnya, membantu pemukiman warga yang tidak layak huni atau masyarakat miskin. "Kita juga rutin mengadakan nikah masal setiap Syawal dan khitanan masal setiap Rajab. Sejak 2002 kita juga membangun 36 masjid dengan dana sekitar Rp 6 miliar," ungkap Dandan.

Para pengasuh ponpes itu memang serius mengembangkan kemandirian ekonomi ponpes dan santri-santrinya. Mereka beralasan, jika para santri tidak mapan secara ekonomi, mereka potensial bertindak di luar etika kesantrian.

Seperti dikatakan Habib Saggaf, ekonomi rendah bisa memicu tindak terorisme. "Karena uang tidak ada, seseorang bisa terjerumus dalam terorisme," jelasnya.

Selain itu, imbuhnya, mereka juga bisa menjadi pelaku kriminal. "Termasuk jadi dukun bohong-bohongan dan bisa jadi preman, karena merasa diri punya kekebalan," terangnya. "Menurut saya ini semua terjadi karena mereka kesulitan secara ekonomi. Sebaliknya, jika agama tidak diajarkan, ya bisa jadi koruptor, pencuri atau penipu," imbuhnya.

Dr. Moeslim Abdurrahman juga meyakini kaitan fundamentalisme dengan kemiskinan. "Orang yang punya harta bisa jadi hedonis dan yang tidak punya bisa jadi fundamentalis," ujarnya kepada the WAHID Institute.

Karena itu, pendidikan multidisiplin di ponpes dinilai bisa mengikis semua ekses negatif itu. "Kita harus membuat sekolah yang selain mengajarkan pengetahuan modern *full*, juga agama *full*," tegas Habib Saggaf.

Sekaranglah waktunya para kiai menyiapkan santrinya agar mumpuni di bidang agama, teknologi, juga memiliki harta cukup. Semua itu dianjurkan Islam, bukan?

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.Nurul H. Maarif

KH. THANTOWI JAUHARI MUSADDAD

Wakafkan Hidup untuk Umat

PENGASUH Ponpes al-Wasilah Garut Jawa Barat, KH Thantowi Jauhari Musaddad, getol menyebarkan konsep Pembangunan Pedesaan Mandiri, Berbasis Amal Shaleh Sosial, Berwawasan Lingkungan. "Saya mewakafkan hidup saya untuk umat dan program ini," tegasnya.

Putra kesembilan KH. Prof. Anwar Musaddad yang kini bermukim di lereng gunung Papandayan ini, mencita-citakan dapat memberdayakan 420 desa di Garut dalam rentang waktu 4 hingga 6 tahun. "Kalau saya sukses di Garut, saya akan mencoba ke kabupaten lain," tekad Kiai Thantowi.

Pemberdayaan yang dilakukan Kiai Thantowi dan para santrinya, adalah menyediakan data detail terkait potensi yang dimiliki masyarakat. "Data statistik pemerintah hanya mencatat golongan darah dan agama. Kita lebih dari itu. Hobby olah raga, masalah kesehatan, asset, kekayaan, dan sebagainya, semua kita data," imbuh kiai yang gemar memakai blangkon khas Sunda ini.

Dicontohkannya, seumpama masyarakat desa tertentu banyak yang memiliki motor, maka merk, tahun keluaran, jumlah yang dimiliki, ke bengkel mana jika rusak, semua masuk pendataan. "Setelah itu kita analisa, mereka *service* ke mana. Ternyata ke kota semua. Lantas dengan melihat fakta itu kita rekomendasikan desa itu untuk membuka bengkel, tambal ban, toko onderdil, dan sebagainya," katanya.

Proyek percontohan pendataan ini rencananya akan dimulai Juli atau Agustus 2007. "Kita akan mematangkan modulnya dulu. Lalu kita akan bikin pelatihan untuk memasukkan data. Cukup sebulan, kemudian harus jalan sendiri," terangnya.

Ditanya soal dukungan Pemda, alumni S1 dan S2 Tafsir Hadits Ummul Qura University, Makkah ini menjawab, Pemda selalu mendahulukan kepentingan politik. "Ketika kita mengajak bersinergi dengan Pemda, mereka keberatan. Ini tidak akan jalan, karena bukan angka (uang, *red.*)," ungkapnya.

Nurul H. Maarif

Santriwati Ponpes al-'Ashriyyah Nurul Iman

dok.WI/ Witjak

HABIB SAGGAF BIN MAHDI BIN SYEIKH ABU BAKAR

HABIB RAMAH DI BALIK JUBAH

"NANTI kamu jadi ulama besar dan kaya raya. Kamu masuk pondok saja. Berangkatlah! *Tawakkaltu,*" demikian nasihat Habib Soleh bin Ahmad bin Muhammad al-Muhdhar, ulama besar dari Bondowoso, Jawa Timur usai 'menelisik' kaki Saggaf bin Mahdi yang masih berusia 14 tahun.

Namun Saggaf muda masih ragu. Pasalnya sejak kecil ia tak pernah mondok. "Kepala seperti mau pecah mendengar perintah itu. Tapi saya pergi juga ke Pesantren Darul Hadits di Malang," kenang Saggaf.

Di depan pintu ponpes, Saggaf diterima pendiri Darul Hadits, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih al-Alawy. "Kamu musti belajar baca al-Qur'an," kata Habib Abdul Qadir seraya memegang kuping Saggaf. Sontak, sakit kepala dan keraguan Saggaf hilang. "Hati saya terbuka. Ini guru saya. Apapun yang terjadi, saya harus belajar di sini," tekad Saggaf muda.

Saggaf pun menempuh pendidikan di sana dengan cemerlang. "Saya menjadi santri hanya 2 tahun 7 bulan dan langsung *ngajar fiqh* dan *nahwu*. Saya di sana 13 tahun," kenangnya.

Usai dari Malang, Saggaf berguru ke Masjid Sayyidina Abbas di Aljazair selama 5 tahun dan *i'tikaf* di Makkah selama 5 tahun. Saggaf juga memperdalam tarekat di Irak. Namun ia harus kembali ke tanah air. Guru tarekatnya yang beraliran Syadziliyah, merekomendasikannya belajar tarekat di Mranggen, Demak.

“Karena tarekat Syadziliyah agak sulit di Indonesia, maka saya disuruh ke Mranggen yang beraliran Qadiriyyah. Syekh Muslich Mranggen itu guru tareqat saya,” ungkap Habib Saggaf kepada Gamal Ferdhi dan Ahmad Suaedy dari the WAHID Institute.

Dia pun lantas kembali ke Dompu mendirikan Ponpes Ar-Rahman. Tak lama berselang, Habib pindah ke Parung Bogor mendirikan Ponpes al-'Ashriyyah Nurul Iman. Sebelum ke Parung, Habib mendirikan Ponpes Nurul Ulum di Kalimas Madya, Surabaya, yang banyak menerima murid dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam dan Afrika.

Mulai dari situ, undangan ceramah banyak datang dari negara tetangga. Ratusan ribu massa selalu memadati majelisnya di Singapura. “Bukan hanya orang Melayu dan Islam, orang Cina, India, Budha, Hindu dan lain-lain, telah memenuhi stadion Singapura sejak sore,” ujarnya.

Kepandaian Saggaf menguasai *Qiraah Sab'ah* (bacaan al-Qur'an dengan riwayat tujuh imam, *red*.) membuatnya ditunggu majelisnya di Singapura. Namun kepandaian itu juga yang mengakibatkan salah seorang Mufti Singapura menuduhnya mengutak-atik bacaan al-Qur'an.

“Saya dituduh merusak al-Qur'an. Akibatnya ponpes saya di Surabaya disegel Depag dengan alasan takut bentrok antara Indonesia dengan Singapura. Tanah seluas 5 ha di Sekupang Batam yang diberi pemerintah juga ditarik kembali,” ungkapnya mengenang peristiwa di awal 1980-an itu.

Dia pun pindah ke Jakarta. Di ibu kota Habib Saggaf pun menghidupi majelis di Masjid Agung Bintaro. Krisis sosial-politik pasca jatuhnya Soeharto, tepatnya 19 Juni 1998, membuat Habib Saggaf memutuskan pindah ke Desa Warujaya, Parung, Bogor yang lebih tenang dibanding Jakarta.

Ternyata, krisis ekonomi turut menghancurkan masyarakat Desa Warujaya. Hal itu memicu Habib Saggaf mengumpulkan anak-anak sekolah di rumahnya. “Sebelum sekolah mereka makan nasi ketan di rumah. Tiap anak saya kasih uang jajan Rp 250. Dan tiap keluarga kita bagi beras 5 kg,” katanya.

Pada 1999, datanglah seorang santri asal Wonogiri, Solo, bernama Prawoto Suwito. Kedatangannya memberi spirit bagi Habib ini untuk mendirikan Ponpes al-'Ashriyyah Nurul Iman. Kian lama ponpesnya kian besar, hingga kini memiliki 8.231 santri. Selain beribadah dan belajar, ponpes itu juga melatih santrinya bertani,

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Habib Saggaf di lokasi daur ulang sampah pesantrennya

daur ulang sampah dan membuat roti.

Diakui Saggaf, ikhtiar ekonomi para santrinya belum cukup untuk menghidupi ponpes terbesar di Bogor itu. Karena itulah, dia menerima beberapa dermawan menyedekahkan hartanya untuk kepentingan ponpes.

“Dua masjid itu sumbangan dari orang yang sama,” ungkap Habib Saggaf menjelaskan asal-usul dua masjid besar di dalam ponpes. Satunya berkapasitas 5.000 orang untuk santri laki-laki dan sebuah lagi berkapasitas 300 orang untuk santri perempuan.

Tak hanya itu, beberapa perkumpulan agama non-Islam turut menyumbang konsumsi, tenaga pengajar, gedung olah raga dan asrama. Jadi, jangan heran jika di depan masjid agung ponpes berdiri *dojo* Taekwondo seluas 200 m2, sumbangan dari pengusaha Korea Selatan, Park Young Soo.

“Guru Taekwondonya dari Korea. Kita juga memadukan seni *zafin* (tarian arab, *red*.) dengan Taekwondo. Sekarang sedang dipatenkan di Korea Selatan,” jelasnya.

Ponpes itu juga memiliki gedung dua lantai, dengan 24 ruang kelas, 2 ruang guru, 32 kamar mandi dan 20 toilet. Pendidikan tsanawiyah, aliyah dan Universitas Habib Saggaf diselenggarakan di situ. “Ini sumbangan dari Yayasan Buddha Tzu Chi,” katanya.

Puluhan tempat bermukim para santri, banyak yang berasal dari infaq orang tua santri. Diantaranya sebuah asrama sumbangan dari organisasi keturunan India di Indonesia, Gandhi Sevaloka.

Hadirnya beberapa bangunan dari sumbangan komunitas non-muslim itu, menurut Saggaf, karena dirinya tak segan bergaul dengan siapa pun. “Kadang beberapa pendeta tidur di sini untuk mempelajari sistem ponpes ini,” akunya.

Ia juga terus menanamkan toleransi antar pemeluk agama di negeri ini. Karenanya, ia menyayangkan aksi kekerasan sekelompok orang dengan mencatut Islam. “Akibatnya Islam dipandang salah. Orang Islam dianggap tukang makan orang,” katanya lugas.

Menurut Saggaf, rusaknya citra Islam juga karena ajaran Islam disalahpahami. “Itu, orang-orang yang *ngaku* mujahid. Mujahid apa itu, berontak di negara orang. Mereka bikin kacau Indonesia. Kalau saya presiden, saya usir mereka. Saya tangkap dan saya suruh tinggal di Arab. Jadi, jika kita ingin memperbaiki, jangan yang sudah rusak dirusak lagi. Itu baru mujahid,” himbaunya.

Untuk itu, ia menghimbau kelompok yang mengusung nama Islam agar menyelesaikan segala persoalan melalui mekanisme hukum. “Ini Indonesia. Ada pemerintah, ada hukum, dan ada polisi. Mereka yang menjaga keamanan. Jika tidak melalui jalur hukum, berarti ingin mendirikan negara dalam negara. Tapi pemerintah juga salah, *kok* orang-orang *kayak* begitu (anarkis, *red*.) dibiarkan. Mereka itu bisa merusak Indonesia,” tandasnya.

Gamal Ferdhi

KITA DAN PRAGMATISME KIAI DUL

Oleh: Nur Khalik Ridwan
Anak Buruh Tani NU, Tinggal di Jogjakarta.

dok.WI/ Witjak

DUA puluh tahun lalu, Kiai Dul masih menjadi guru kami. Banyak orang berkunjung ke pesantrennya. Dia mengajari kami bagaimana membangun pesantren dari nol: gotong-royong mengangkut pasir dari kali, bersama-sama *ro'an* memecah batu-batu besar, dan mengorganisir masyarakat untuk terlibat dalam pendirian pesantren. Sang Kiai juga mengajari kami ilmu-ilmu di pesantren, mulai dari *Safinah al-Najah, `Awamil al-Jurjani, `Imrithi, Syarh Ibnu `Aqil,* dan banyak lagi.

Telah dua puluh tahun kami meninggalkan pesantren. Perubahan telah banyak terjadi. Kiai Dul sedikit-sedikit terlibat dalam politik dan akses-akses ekonomi di tingkat lokal. Jadilah Kiai Dul sosok yang tak bisa dibayangkan untuk dua puluh tahun lalu, banyak *riyadhah*, menyatu dengan masyarakat, dan mengajari kami arti penting sebuah keikhlasan berjuang untuk umat.

Kiai Dul memang bukan sosok terkenal. Tapi pergaulan dengan politik dan orang-orang politik menjadikannya memiliki akses ke sumber ekonomi lokal. Suatu ketika Kiai Dul dipercaya oleh birokrasi lokal untuk menjadi korlap pengentasan kemiskinan di daerah kami. Konsep pengentasan kemiskinan yang diberikan adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk bisa kreatif dalam membangun ekonomi.

Seorang kawan kami di satu *gothakan* pesantren memberi keterangan: "Kiai kita sudah beda. Dana-dana untuk masyarakat dimakan sendiri dan dibagi-bagikan ke keluarganya. Pertanggungjawabannya tak jelas. Ini pun belum cukup. Murid-murid masih disuruh untuk mencari uang di jalan-jalan dengan kotak. Alasannya pembangunan pesantren, tapi lagi-lagi tak pernah jelas. Murid-murid juga dihimbau untuk ikut partai tertentu. Ini yang membuat murid-murid meninggalkan pesantren kita," jelasnya.

Tak beberapa lama, pesantren kami menjadi ambruk dan pecah. Murid-murid yang asalnya ada 600 orang tinggal 30 orang. Masyarakat di sekitar pesantren merasa tak perlu menghormati Kiai Dul. Akhirnya Kiai Dul menjadi topik obrolan orang-orang kampung, di sawah dan di pasar. Keluarlah kata-kata dari masyarakat yang membuat kami menangis: "Dasar Kiai bajingan. Kiai *kok ndak* beda dengan preman," dan banyak lagi.

Yang menarik di sini, fenomena Kiai Dul bukan asing di lingkungan praksis kekiaian. Ternyata memang ada kecenderungan kiai-kiai kita: *Pertama*, mereka yang tak memiliki pekerjaan mapan ketika mengenal dunia politik dan akses ekonomi telah menjadikan nilai-nilai kekiaian seperti air yang menguap. Gantinya adalah praksis-praksis pragmatisme yang luar biasa, jauh mengalahkan mereka yang selama ini pragmatis dan preman. Kiai-kiai seperti ini anehnya tak mau menggunakan *resources* akses publik untuk pemberdayaan ekonomi umat yang berkesinambungan, tapi malah senang menjadi calo semata.

Seorang kawan kami yang punya cita-cita besar untuk memberdayakan masyarakat desa dan NU, dan telah kenyang dengan pengalaman berinteraksi dengan mereka, bahkan mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. "Pemberdayaan justru mentok di kiai, karena ia tak mau berbagi, ia menjadi elit lagi dengan baju lain, dan selalu modal sosial pemberdayaan dipotong di tingkat kiai, tidak diobsesikan untuk berkesinambungan bagi umat. Kiai-kiai kita sekarang ini lebih paham tentang angka dari pada huruf," katanya.

Kedua, mereka yang memiliki pekerjaan mapan, dan dengan mengenal akses publik ataupun politik, kemudian menjadi lebih mapan dan kaya, selalu beralih cantolannya ke atas. Kiai-kiai seperti ini cepat melupakan umat di bawah, yang dulu bersama-sama membangun pesantren dari nol, dan yang bersama-sama bahu-membahu membuatnya berkharisma.

Kecenderungan ini telah menjadikan kiai sebagai sosok selebritis dan individualistis, tak mau berbagi, dan dalam hal tertentu menjadi kanibalis sosial, menjadikan umat sebagai sapi perah. Selalu saja kalau sudah mendapat akses dana-dana publik tak mau berbagi dengan umat, dibajak untuk dirinya sendiri. Jadilah tabungannya berlipat-lipat, tapi umatnya menjadi kelaparan.

Seorang kawan muda pernah menelpon kiai seperti ini untuk membantu relawan-relawan gempa di lapangan. Jawabannya sederhana: "Aku bangga kalian telah bergerak. Bawa selalu bendera NU." Mendengar jawaban kiai besar ini, kawan muda kami ini jadi paham bahwa secuil pun kiai besar ini tak mau tahu, apalagi memikirkan umatnya, dan sedikit meneteskan pemberdayaan untuk warga di bawah adalah nol.

Dua kecenderungan kekiaian yang terlibat dalam dunia sosial ini memang tak mewakili seluruh pola kekiaian. Tapi kalau Anda dengan telisik dalam, sebetulnya dua pola ini sudah cukup besar dan menjadi penyakit kronis kekiaian. Meski begitu, ketika bertemu dengan Kiai Saleh kami masih memiliki sedikit harapan. Katanya: "Dik, kiai itu pewaris sang nabi, bukan hanya yang bisa mendaras kitab suci. Praksis nabi kita adalah berjuang untuk umat, memberdayakan kaum miskin, kaum budak, anak-anak yatim, dan kelompok-kelompok marjinal untuk memiliki hak."

Kiai Saleh menambahkan: "Jadi, kalau sang kiai tak seperti itu, ya bukan kiai. Dan sekarang ini tampaknya kita sedang dipimpin oleh mereka." Dalam hati kami bergelora: "Kaum muda harus tahu apa yang mesti dilakukan."

Berebut Massa Lewat Media

Berbagai kelompok Islam menerbitkan buletin dengan harapan dapat mempengaruhi cara berfikir keberagamaan umat. Ada etika yang harus dipenuhi dalam menerbitkan sebuah media massa.

dok.WI/ Witjak

Prof. Dr. KH. Salim Bajri hadir lebih awal di Masjid Pertamina Cirebon, Jawa Barat. Pasalnya, Jum'at itu ia bertugas sebagai khatib. Di sela waktu sebelum naik mimbar, Guru Besar Tafsir al-Qur'an Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sunan Gunung Jati Cirebon itu mendapati buletin *Warkah al-Basyar* di masjid itu.

Sejurus kemudian, Sekretaris Umum Forum Ulama Indonesia (FUI) Jawa Barat yang juga penasihat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) itu mendatangi Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Pertamina untuk menegurnya. Intinya, ia tidak setuju jika *Warkah al-Basyar* 'menyusup' ke masjid-majid di wilayah Cirebon, termasuk Masjid Pertamina.

"Melihat ada *Warkah al-Basyar* di Masjid Pertamina itu, Salim Bajri langsung minta ke DKM agar tidak membagikannya ke jamaah," tutur Pemimpin Redaksi *Warkah al-Basyar*, Rosidin kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute.

Rosidin menceritakan, ketidaksetujuan Salim Bajri itu lantaran *Warkah al-Basyar* diterbitkan oleh Fahmina Institute. Lembaga itu dinilai Salim menyiarkan pikiran-pikiran yang 'bertentangan' dengan Islam, melecehkan ayat-ayat al-Qur'an dan bahkan didanai Yahudi. "Ketika berkhutbah di atas mimbar, Salim Bajri menyampaikan semua ini ke jamaah," ungkap Rosidin.

Salim juga mengutip fatwa MUI soal keharaman pluralisme, sekularisme dan liberalisme. Intinya, jamaah diminta untuk berhati-hati pada keberadaan *Warkah al-Basyar*. Bahkan Sang Profesor menganjurkan, jika menemukan buletin ini supaya dibuang saja ke tempat sampah atau dibakar.

Kejadian di Masjid Pertamina itu hanya satu dari banyak kasus serupa di beberapa masjid Cirebon. "DKM-DKM sebetulnya tidak mempermasalahkan. Hanya saja, ada kelompok Islam tertentu yang secara serius mengampanyekan pelarangan membaca *Warkah al-Basyar*," keluh Rosidin.

Walaupun banyak tentangan dari para 'pesaing' nya, buletin tersebut terus beredar tiap dwi-Jum'atan, bahkan kini mencapai oplah 14.000.

Kelahiran buletin ini, bermula dari kajian keislaman yang dilakukan Fahmina Institute akhir 2001. "Supaya kajian itu tidak hilang dan dapat dibaca orang, kita bikin buletin yang disebarkan ke masjid-masjid, pesantren-pesantren, majelis taklim, forum lintas agama, dan sebagainya. Pada 2003 kita sebar ke Kuningan, Indramayu, Majalengka, dan Cirebon sendiri," katanya.

Melalui buletin ini, Fahmina berambisi mensosialisasikan ajaran kemanusiaan Islam. "Ajaran itu tidak hanya sampai di ruang diskusi. Kita ingin menyampaikannya langsung pada masyarakat. Dan respon masyarakat bagus. Mereka bilang buletin ini sebagai bacaan alternatif," imbuhnya.

Selain *Warkah al-Basyar,* buletin *Ikhtilaf* (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), *al-Tasamuh* (Lingkar Studi dan Aksi), *al-Tanwir* (Center for Moderate Muslim), *Islam Damai* (Pengurus Besar Nahdhatul Ulama), juga menawarkan keislaman yang *rahmatan lil 'alamin.*

Demikian pula dengan Buletin Jum'at *al-Nadhar*. Buletin yang diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) ini bertujuan mensosialisasikan gagasan Islam emansipatoris di pesantren, masjid, perguruan tinggi dan majelis taklim.

dok.WI/ Witjak

Buletin-buletin Jum'at yang berebut umat

"Buletin ini menyajikan tema-tema yang berkaitan dengan penguatan demokrasi, pluralisme, egalitarianisme, HAM dan toleransi. Setiap dua minggu dicetak sebanyak 30.000 eksemplar," jelas divisi buletin Ali Sobirin seperti dimuat situs P3M.

Sedang, Pemimpin Redaksi buletin *Islam Damai*, Ahmad Baso menjelaskan, buletin ini diniatkan untuk menawarkan Islam jalan tengah antara Islam fundamental dan Islam liberal. "Kita ingin men-*support* kalangan masjid dengan menengahi dua kelompok keislaman, fundamental dan liberal," ujarnya.

Dikatakan Baso, sambutan masyarakat sangat baik terhadap buletin yang baru beredar di wilayah Jakarta. "Kita menyebarkannya baru ke 40 masjid di Jakarta. Melalui buletin ini, diharapkan anak-anak muda NU mau kembali ke masjid setelah lama dikuasai Wahabi," katanya.

Buletin yang terbit setiap Jum'at ini berambisi mengusung keislaman Nusantara, seperti yang diusung para ulama dulu. "Kita tidak mengusung keislaman model AS atau keislaman keras," terangnya.

Buletin-buletin tersebut memang terus 'berebut' massa dengan buletin yang diterbitkan kelompok-kelompok Islam dari gerbong berbeda, seperti HTI dengan buletin *al-Islam*-nya, juga buletin lain yang serupa antara lain *Khilafah, al-Aqsha* atau *al-Mukhlisin*. "Positifnya, melalui 'perang' media seperti ini, angka kekerasan fisik atas nama agama bisa dikurangi," kata Rosidin.

Menurut amatan Rosidin, buletin *al-Islam* terbitan HTI yang gencar mengampanyekan penegakan Syariah Islam ini, termasuk yang peredarannya cukup luas di masyarakat. "Harus diakui, *al-Islam* milik HTI banyak berpengaruh terhadap perkembangan keagamaan masyarakat. Karenanya, melalui *Warkah al-Basyar* kita berusaha mengimbanginya," akunya.

Hal serupa dinyatakan mantan aktivis HTI yang juga mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Syamsul Fuad. "Buletin *al-Islam* ini sifatnya nasional dan disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia," ujarnya.

Terkait pengaruh buletin terhadap keberagamaan masyarakat, Pakar Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Dr. Jalaluddin Rakhmat tidak begitu saja meyakininya. Menurut Kang Jalal, demikian sapaan karib Jalaluddin, Buletin tidak cukup efektif membentuk sikap keberagamaan umat Islam (lihat: *Media Bisa Memprovokasi Kekerasan Fisik)*.

"Saya kira tidak terlalu efektif. Tapi kalau satu masjid hanya buletin itu-itu saja yang diterima, dari kelompok tertentu saja, mungkin ada dampaknya. Kalau yang mereka terima hanya buletin-buletin radikal misalnya, mereka bisa jadi radikal," kata Kang Jalal.

Buletin-buletin yang diterbitkan kelompok Islam radikal, diakui Kang Jalal justru lebih diminati masyarakat muslim. Penyebabnya adalah cara penyajian yang hitam putih, benar salah, dapat petunjuk dan sesat, kafir dan mukmin.

"Untuk masyarakat Indonesia yang sedang kelelahan menghadapi persoalan hidup, mereka ingin mengambil agama secara lebih sederhana," jelas Direktur Yayasan Muthahari ini.

Kang Jalal berharap, buletin atau media apapun lebih menampilkan Islam dari sisi universal. "Temanya universal seperti menolong orang dan sebagainya. Buletin itu bukan saja bisa dibaca oleh orang muslim, orang muslim yang Islamnya tidak seberapa mendalam, tapi juga non-muslim akan menerimanya," sarannya.

Universalisme ini penting ditekankan, imbuhnya, karena buletin sektarian tak jarang justru menyebabkan kekerasan. "Keberadaan buletin ini bagus juga! Tapi bagaimana kalau buletin itu juga memprovokasi kekerasan fisik? Itu bisa menjadi pengantar untuk tindakan kekerasan. Apalagi kalau dibina terus-menerus," Jalal mengingatkan.

Hal sama diakui pengamat komunikasi dan media dari Institut Studi Arus Informasi, Agus Sudibyo. Menurutnya, selain etika jurnalistiknya lemah, media sektarian tak jarang justru menampilkan provokasi yang bisa memicu terjadinya kekerasan fisik. "Kita bisa mulai dari sisi judul. Biasanya, judulnya sangat provokatif, tidak etis, dan tak jarang langsung menghakimi," jelasnya.

Media seperti itu, imbuh Agus, sangat sering tidak memperhatikan fakta masyarakat Indonesia yang plural dan mudah terprovokasi konflik. "Mestinya, setiap media sensitif akan fakta itu dan punya tanggung jawab sosial dan moral untuk menghindarkan terjadinya konflik," katanya.

Untuk itulah, perlu diupayakan media Islam yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, bukan media yang justru turut memicu terjadinya aksi anarkisme, apalagi atas nama agama.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.WI/ Witjak

Dr. Jalaluddin Rakhmat
Guru Besar Ilmu Komunikasi Unpad

"Media Bisa Memprovokasi Kekerasan Fisik"

SELAIN meredakan kekerasan fisik atas nama agama, ternyata beredarnya buletin juga dapat menjadi pengobar kekerasan. Pernyataan ini disampaikan Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) Dr. Jalaluddin Rakhmat kepada M. Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Bagaiman Anda melihat perkembangan media Islam?

Menurut saya, media itu ada yang sektarian dan non-sektarian. Bisa jadi, media dapat meningkatkan spiritualitas sektarian dan juga nonsektarian. Asal-usul media Islam itu umumnya sektarian. Muhammadiyah menerbitkan *Panji Masyarakat*. NU menerbitkan *Duta Masyarakat*. Tapi kemudian berkembang. NU sudah mulai menerbitkan media-media nonsektarian karena ada Gus Dur-nya.

Saya lihat, media sektarian memperoleh pasar lebih banyak dari non-sektarian. Buletin Jum'at yang sektarian saya kira lebih banyak memperoleh pasar. Buletin Jum'at dari DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, *red.*) bertahan cukup lama.

Mengapa begitu?

Karakteristik dari media yang fundamentalis, yang sektarian, adalah simplifikasi. Mereka memandang agama secara sederhana, hitam putih, benar salah, dapat petunjuk dan sesat, kafir dan mukmin. Dan untuk masyarakat Indonesia yang sedang kelelahan menghadapi persoalan hidup, mereka lebih mengambil agama yang lebih sederhana. Itu kalau pembagian berdasarkan sektarian dan non-sektarian.

Cukup efektifkah media seperti buletin Jum'at membangun cara berfikir umat?

Tidak saya kira. Tidak terlalu efektif. Tapi kalau satu masjid hanya itu-itu saja yang diterima, dari kelompok tertentu saja, mungkin ada dampaknya. Itupun khusus untuk jamaah masjid itu. Padahal jamaah masjid itu sebagian datang karena masalah geografis saja, bukan karena masalah ideologis.

Berarti, proses radikalisasi juga bisa muncul dari sana?

Mungkin saja! Kalau yang mereka terima buletin-buletin radikal, mereka bisa jadi radikal. Dan dalam penelitian mutakhir, kelompok radikal ini sekarang makin banyak pengikutnya.

Ini ada kaitanya dengan perebutan massa di masjid?

Mungkin saja! Saya lihat dalam konteks *lips speaking*, kelompok-kelompok PKS (Partai Keadilan Sejahtera, *red.*), yang garis fundamentalis itu, banyak menguasai masjid di Jakarta. Karena di Jakarta yang dijadikan masjid itu *kan* bukan hanya yang tradisional, tapi juga kantor-kantor yang jumlahnya bisa lebih banyak dari masjid-masjid tradisional.

Bagaimana seharusnya isi buletin ditampilkan?

Karena ciri media massa itu universalisme, maka media harus ditujukan kepada massa secara luas. Kalau itu media Islam, salah satu syaratnya harus nonsektarian. Dia harus berbicara tema-tema yang diterima secara *universal*. Bahkan kalau temanya *universal* seperti menolong orang dan sebagainya. Buletin itu bukan saja bisa dibaca oleh orang Islam, orang muslim yang Islamnya tidak seberapa mendalam, tapi juga orang nonmuslim akan menerimanya. Cuma belum pernah dicoba saja.

Anda setuju, maraknya buletin-buletin seperti ini lebih bagus sebagai ekspresi daripada menggunakan kekerasan fisik?

Ya bagus juga! Tapi bagaimana kalau buletin itu juga memprovokasi kekerasan fisik? Mungkin dia bisa menjadi penyebab kekerasan fisik yang datang sesudahnya. Bahkan itu bisa menjadi pengantar untuk tindakan kekerasan. Apalagi kalau dibina terus-menerus.

EGOSENTRISME MEDIA ISLAM

Oleh: Agus Sudibyo
Deputi Direktur Yayasan SET

dok.pribadi

BERANGKAT dari perspektif tindakan komunikasi Habermas, media massa perlu dibayangkan sebagai ruang antara politik tempat berlangsungnya praksis emansipatoris: dialog-dialog interaktif dan tindakan-tindakan komunikasi untuk mencapai pencerahan bersama. Sebuah ruang antara di mana berbagai unsur sosial saling berinteraksi, bertukar gagasan dalam suasana bebas penguasaan dan paksaan. Ruang antara politik ini bukan hanya relevan ketika saluran komunikasi politik formal macet atau tersendat, namun juga ketika konsensus bersama dibutuhkan dalam relasi-relasi horisontal antar unsur masyarakat.

Perspektif Habermas ini sangat relevan untuk melihat fenomena media Islam yang tumbuh berkembang di Indonesia pasca 1998. Melihat fenomena media Islam ini, kita seperti menyaksikan pembentukan "ruang antara politik" yang baru mencapai fase "bebas penguasaan dan paksaan". Hampir tidak ada restriksi politik apapun kepada media-media Islam, seperti yang lazim terjadi di masa lalu. Semua kelompok Islam bebas mendirikan media sendiri, bebas menyampaikan pandangan politiknya.

Namun media-media Islam kita belum sampai pada tahap mencerahkan dan membebaskan masyarakat dari berbagai belenggu yang membatasi ekspresi-ekspresi individu atau kelompok. Media-media Islam baru berhasil mengatasi masalah-masalah *freedom from*, namun belum menjawab masalah-masalah *freedom for* : untuk apa kebebasan media itu digunakan dalam konteks kemaslahatan umat.

Kita bisa melihatnya dengan terlebih dahulu mencermati kiprah media-media Islam garis keras yang banyak berkembang dewasa ini. Persoalan utama media pada gugus ini bukan sekedar tidak menaati kaedah-kaedah baku jurnalistik : netralitas, imparsialitas, *cover bothside* dan etika berbahasa. Namun terutama karena para pengelolanya menggunakan media sebagai sarana untuk tindakan rasional-bertujuan. Tindakan untuk mencapai tujuan yang telah lebih dahulu ditentukan secara sepihak, sehingga mengondisikan obyektifikasi dan manipulasi satu pihak kepada pihak lain.

Tujuan di sini tampaknya adalah penyeragaman pandangan umat Islam tentang dirinya sendiri dan orang lain, melalui tindakan pemaksaan mazhab, aliran dan ajaran. Dalam egosentrisme media-media Islam garis keras ini, tak ada tempat buat dialog rasional dan interaksi pemikiran. Proses komunikasi berjalan secara monologal. Pada gilirannya, menjadi kabur batas antara mencerahkan umat lewat pemahaman Islam yang "murni", dengan menjerumuskan umat ke dalam dogmatisme metafisis.

Pada sisi lain, kita dihadapkan pada media-media Islam bercorak progresif-liberal yang mungkin lebih baik dalam memperlakukan media sebagai sarana bagi tindakan-tindakan komunikasi. Yakni tindakan-tindakan yang lebih berorientasi kepada pencapaian pemahaman bersama, di mana proses sama pentingnya dengan hasil. Media-media Islam progresif-liberal lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat dan lebih apresiatif terhadap posisi atau sikap yang bertentangan dengan mereka.

Namun mereka juga dihadapkan pada "egosentrisme" dalam bentuk yang lain. Para pengelola dan simpatisan media Islam progresif secara tak sadar sering sibuk dengan perbincangan antar mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya.

Mereka kerap mengabaikan dua unsur penting dalam jurnalisme: *relevance* dan *proximity*. Apakah masalah yang diangkat relevan dengan problem umat Islam umumnya? Apakah pilihan kasus, bahasa dan simbol yang digunakan cukup familiar bagi kaum awam?

Para pengelola media Islam harus benar-benar mempertimbangkan untuk siapa media-media itu didirikan. Hanya untuk internal kelompok mereka sendiri atau untuk menjangkau kelompok lain? Egosentrisme media-media Islam garis keras jelas menjadi hambatan untuk mempengaruhi dan menarik simpati kalangan yang lebih luas. Sebaliknya, hanya karena masalah kemasan dan pemilihan isu, gagasan-gagasan maju yang dikembangkan media-media Islam progresif tidak kunjung diserap oleh umat, alih-alih dipersepsi sebagai penyimpangan atas Islam.

Di antara kelompok Islam garis keras dan Islam progresif-liberal di Indonesia, sesungguhnya ada kelompok yang lebih besar. Mereka cenderung apolitis, tidak ideologis, dan acuh tak acuh atas perdebatan pemikiran yang terjadi. Mereka ini yang seharusnya disasar media-media Islam. Namun yang cocok bagi mereka adalah media yang membumi, mencerahkan, tidak menyerang dan tidak berpretensi untuk menggurui.

Yang tak kalah penting, dibutuhkan kompromi dan moderasi jika media-media Islam memproyeksikan diri untuk masuk ke dalam bisnis media profesional. Sikap yang ekstrim, agresif, kontroversial menimbulkan sentimen negatif dari kalangan pengiklan, sebagaimana mereka juga *reluctant* terhadap media-media yang sangat oposan terhadap pemerintah. Padahal untuk menjadi media yang profesional, hampir tak mungkin media hanya menyandarkan diri pada oplah, tanpa menggarap pendapatan dari iklan.

Penggunaan kesenian sebagai media penyebar gagasan keberagamaan bukanlah hal baru. Strategi ini diyakini menjadi umat sadar akan keragaman dan toleran terhadap perbedaan.

MENGGUGAH TOLERANSI LEWAT SENI

Yolanda terkejut ketika seorang pendekar berpakaian hitam-hitam menunjuknya. Awalnya ia ragu, tapi jabatan tangan si pendekar membuat perempuan itu tegar melewati pecahan kaca tajam yang menghampar di tengah arena.

Walau telah berlalu, namun Yolanda terus merenungi atraksi menegangkan itu. "*Kok* tidak luka ya?" gumam calon pendeta itu ketika menjadi bintang tamu pagelaran debus santri Ponpes al-Mizan.

Atraksi yang digelar akhir Juli 2006 silam itu, adalah salah satu mata acara menyambut kedatangan pendeta dan calon pendeta ke Ponpes al-Mizan Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Bekerjasama dengan the WAHID Institute, Crisis Center Gereja Kristen Indonesia (CC-GKI) menginapkan dua puluh pendeta dan calon pendetanya selama dua hari di ponpes yang diasuh KH. Maman Imanul Haq Faqih itu.

Selain disambut hangat keluarga kiai dan para santri, tokoh-tokoh lintas agama, seperti Hindu, Budha, Jemaah Ahmadiyah, Aliran Kepercayaan, Konghucu dan sebagainya, itu juga disuguhi tontonan kesenian, seperti pagelaran musik modern Qi Buyut, tari Adzab, tari kontemporer, bahkan debus.

"Sekarang kami punya gambaran berbeda tentang pesantren. Sebelumnya kami membayangkan, pesantren itu angker, serem, dan *ngaji* terus. Ternyata pesantren ini sangat terbuka. Dan malam ini kami justru disuguhi kesenian yang luar biasa," perwakilan CC-GKI, Pendeta David Jonazh menyampaikan kekagumannya.

KH. Maman Imanul Haq Faqih memiliki filosofi mendalam tentang kesenian yang disuguhkan santrinya. Pertunjukan debus, menurut Kang Maman panggilan akrab kiai muda itu, bukan bertujuan memamerkan atau menyombongkan kekuatan si pendekar.

"Kekerasan hanya cukup kita jadikan tontonan menghibur dan sebagai *ibrah (*teladan, *red*.) moral, seperti pertunjukan debus itu. Tidak ada korban. Tidak ada yang disakiti. Ini justru membuat kita berfikir supaya tidak melakukan kekerasan yang sebenarnya pada orang lain," kata kiai muda karismatik ini (lihat: *Ibadah Ritual Tak Cukup Membangkitkan Kemanusiaan*).

Diakui Kang Maman, ada saja kelompok Islam yang menuduh kesenian yang dikembangkannya, seperti tarian kontemporer, sebagai bagian dari proses penyebaran pornografi atau pornoaksi, sehingga dirinya diminta segera bertaubat.

"Ketika ada yang menuduh tari kontemporer itu mengajarkan pornografi atau pornoaksi, saya tanya para santri; kalian melihat tarian atau dadanya? Sembilan puluh sembilan persen menjawab, kami melihat daun dan lumpur yang menempel di tubuh manusia, itu ternyata bisa menyatu. Mengapa kita hari ini menjauhkan diri dengan alam?" tanyanya.

Karena itu, Kang Maman yakin, apa yang dilakukannya selama ini, yakni menyandingkan Islam dengan aspek kesenian atau budaya lokal, itu bukanlah penyimpangan atau *bid'ah*.

Performance art di Ponpes API Tegalrejo, Magelang

dok.WI/ Witjak

"Ada 700 santri di sini dan ada 10 ribu jamaah yang hadir setiap malam Rabu. Kalau saya mencampuradukkan ajaran Islam, mereka semua sudah lari. Dari awal saya sudah bilang, Islam kami adalah Islam *rahmatan lil 'alamin*, Islam yang mencintai sesama walau berbeda. Islam kami adalah Islam yang selalu mengajak tersenyum pada semua hamba Allah. Islam kami adalah Islam yang menyembah *Allah Rabb al-'alamin*.Tuhan yang disembah semua umat manusia. Inilah yang diajarkan guru-guru kami, Islam tanpa kebencian," ujarnya.

Demikian pula kiprah Acep Zamzam Noor. Putra sulung Ajengan M. Ilyas Ruhiat, Pengasuh Ponpes Cipasung, Tasikmalaya, ini membangun Komunitas Azan untuk menyebarkan gagasannya melalui seni lukis, sastra, maupun drama.

Karya Acep dan komunitasnya menampilkan persoalan yang dihadapi masyarakat Ponpes Cipasung dan sekitarnya. Jika tersosialisasikan dengan baik, karya-karya yang berakar dari pesantren itu tak hanya memperkaya khazanah kesusastraan yang telah ada, bahkan turut membantu membentuk karakter keberagamaan bangsa.

"Ada semacam 'kegilaan' berfikir dari para santri ini yang justru memberikan wacana baru," ujarnya suatu ketika pada pembukaan Silaturahmi Sastrawan Santri bertema *Pluralisme Budaya Dalam Sastra*, di Hotel Surya, Tasikmalaya Jawa Barat.

"Di tengah moral bangsa yang sudah sangat carut-marut dan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, legislatif, maupun parpol, maka seniman santri seperti inilah yang akan menjadi tumpuan untuk dapat menegakkan kembali karakter bangsa yang berbudaya dan beradab," tegasnya (lihat: *Kado Liberalisme Bagi Seorang Tradisionalis*).

Sebagaimana komunitas seni lainnya, Komunitas Azan juga sudah dianggap menyimpang. "Padahal di masyarakat sendiri tidak, karena mereka menyukai hiburan. Resistensi itu justru datang dari kelompok Islam radikal," ujarnya.

KH. Adib Masruchan dari Ponpes al-Hikmah, Sirampog, Brebes, Jawa Tengah, juga berdakwah melalui jalur kesenian, yakni kesenian Calung. Kiai Adib beralasan, berdakwah dapat dilakukan melalui peralatan apapun, termasuk kesenian.

"Kita mencoba dengan seni Calung. Kita isi dengan shalawat, pujian-pujian dan sebagainya. Rasulullah SAW sendiri berdakwah dengan segala peralatan, termasuk memakai tarian Arab," katanya beralasan. "Asal dalam tarian itu tidak buka aurat," ujarnya.

Seperti juga Acep, Kiai Adib mengatakan masyarakat setempat tidak mempermasalahkan kesenian yang ditampilkan para santrinya itu, karena mereka memang membutuhkan hiburan. "Namun efektifitas dakwah lewat kesenian yang kami tampilkan belum bisa diukur, karena masih dalam tahap rintisan," akunya.

Masih banyak ponpes lain yang getol mengembangkan kegiatan budaya. "Ada juga beberapa kiai yang secara personal turut mengembangkan dan apresiatif terhadap budaya lokal," kata peneliti Desantara Jakarta, Miftahus Surur.

Model budaya yang dikembangkan oleh ponpes pada umumnya tidak seragam. Ponpes KH. Masrur di Jogjakarta, mengembangkan seni Jathilan. KH. Muharrar di Garut juga sama. Sedangkan Ponpes Asrama Pendidikan Islam (API) di Tegalrejo, Magelang Jawa Tengah yang dikelola KH. Yusuf Chudlori, lebih berkonsentrasi pada sastra.

Demikian juga Gurutta Imran Muin Yusuf di Sulawesi Selatan, yang mengembangkan tradisi pembacaan lontar *La Galigo*. KH. Hasnan di Singodimayan, Banyuwangi mengembangkan Gandrung. "Sedangkan Kiai Humam di Guyangan Pati terbuka pada bentuk-bentuk kesenian tradisi di Jawa Tengah," ungkap Surur.

Penghargaan para ulama terhadap kesenian ini berdampak positif pada umat, karena mereka menjadi lebih toleran terhadap perbedaan. Selain itu, menggunakan seni sebagai media penyebar gagasan bukan tanpa teladan. Wali Songo merintisnya saat menyampaikan Islam di tanah Jawa melalui media kesenian yang disukai masyarakat. Dari pendekatan kebudayaan ini, terbangun kesadaran bahwa perbedaan itu patut dihargai sebagai bentuk kehidupan manusia.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Penampilan penari Topeng Ireng di Ponpes API Tegalrejo, Magelang

dok.Subhi

KH. MAMAN IMANUL HAQ FAQIH

IBADAH RITUAL TAK CUKUP MEMBANGKITKAN KEMANUSIAAN

PENGASUH Ponpes al-Mizan, Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat, KH. Maman Imanul Haq Faqih tak canggung untuk mendakwahkan gagasan keberagamaan melalui kesenian.

"Padahal ada pesantren yang memusuhi kesenian. Katanya seniman itu setan, sedangkan pesantren itu surga," tutur Kang Maman, panggilan akrab kiai berusia 34 tahun ini.

Oleh sebab itu, di pesantren yang didirikannya pada 1998 itu, selain mengajarkan kitab kuning dan tradisi khas pesantren lainnya, ia juga mengembangkan berbagai kesenian, baik kesenian tradisional maupun modern. Kepada 700-an santrinya, misalnya, ia mengajarkan tari kontemporer, musik, gamelan shalawat bahkan debus.

Kekerasan hanya cukup kita jadikan tontonan menghibur dan sebagai *ibrah* (teladan, *red.*) moral, seperti pertunjukan debus itu. Tidak ada korban. Tidak ada yang disakiti," ujarnya mengomentari kesenian debus.

"Ini membuat kita berfikir supaya tidak melakukan kekerasan yang sebenarnya pada orang lain," imbuhnya.

Melalui pertunjukan seni, kata Kang Maman, dirinya dan para santri ingin melakukan kritik terhadap ibadah ritual banyak kaum muslim di negeri ini. Menurutnya, ibadah ritual seolah tidak cukup untuk membangkitkan rasa kemanusiaan.

"Kalau tadi dipertontonkan pecahan beling atau kaca yang dibasuhkan ke muka, itu sebagai peringatan. Bangsa kita kalau wudhu sudah tidak cukup dengan air, tapi harus dengan beling atau kaca, karena hari ini air sudah tidak bisa masuk ke pori-pori ruhani kita. Banyak orang yang berwudhu, tapi tidak punya rasa malu. Banyak orang yang berwudhu, tapi wajahnya masih terlihat kelam dan karatan. Mari kita berwudhu untuk membersihkan muka-muka kemanusiaan kita, menguatkan tangan-tangan kemanusiaan kita, dan itu semua demi kita," ajaknya.

Bahkan kiai muda kelahiran Sumedang, 8 Desember 1972 ini menyatakan, pesantren harus mampu mempertemukan tradisi keilmuan dan transformasi budaya. Kalau bisa, imbuhnya, pesantren harus menyusun strategi kebudayaan.

"Ini sebagai ikhtiar menerobos ide-ide untuk mempertemukan sejumlah pemikiran yang emansipatif, eksploratif, dan membumikan nilai keberagamaan dalam konteks kemanusiaan," katanya suatu ketika dalam acara *Halaqoh Budaya Pesantren dan Seni Tradisi: antara Relasi dan Hegemoni,* di Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat.

Tentang group gamelan shalawatnya yang dinamai Qi Buyut misalnya, alumni Ponpes Bantar Gedang, Tasikmalaya, Jawa Barat, Ponpes Raudlotul Mubtadi'in Pekalongan Jawa Tengah, dan Ponpes ar-Raudloh Tambak Beras Jombang Jawa Timur ini mengungkapkan, nama itu diambilnya dari kosa kata Arab.

"Qi Buyut itu dari bahasa Arab. Qi terambil dari kata *waqa- yaqi* yang artinya jaga. Dan *buyut* artinya rumah. Jadi maksudnya, jagalah rumah hati, rumah kemanusiaan, rumah agama dan sebagainya," katanya. "Qi Buyut ini personilnya adalah santri seniman," tambahnya.

Yang menarik, melalui seni ini, ia mampu menghadirkan tokoh-tokoh lintas agama, baik Islam, Kristen, Hindu, Budha, Penghayat Kepercayaan, Jemaah Ahmadiyah dan sebagainya, tanpa ada sekat apapun. Ini tak lain karena seni atau budaya mampu melembutkan kekakuan sikap dan menampilkan penghargaan terhadap perbedaan.

Nurul H. Maarif

ACEP ZAMZAM NOOR

KADO LIBERALISME BAGI SEORANG TRADISIONALIS

ACEP Zamzam Noor sejak di bangku SMP mengikrarkan diri tidak mau menjadi bayang-bayang ayahnya dan tidak mau menjadi kiai pesantren. Karenanya, sulung kelahiran 28 Februari 1960 ini, saat kelas 2 SMU hijrah ke Ponpes as-Syafi'iyyah Jakarta. Di sinilah suami Euis Nurhayati ini mulai menggeluti sastra.

Dan saat kuliah, pria yang hingga usia empat tahun bernama Abdul Wahid Ramadlan ini, 'nekad' masuk Fakultas Seni Rupa Institut Teknologi Bandung (ITB) yang diselesaikannya pada 1988. "Asal kamu yakin bahwa seni yang akan kamu geluti itu bermanfaat bagi masyarakat," demikian pesan Apih (Ayah, *red.*)-nya, pemimpin Ponpes Cipasung KH. M. Ilyas Ruhiat.

Kecintaannya pada sastra berbuah puisi fenomenal berjudul *Cipasung* di tahun 1989. Puisi ini mengantarkan Cipasung dalam dunia sastra Indonesia, bahkan internasional. Puisi ini menunjukkan, Acep bisa membantu Apihnya mengembangkan pesantren dengan cara yang tak pernah terpikirkan oleh orang-orang di kampungnya, Cipasung, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Apihnya bangga saat Acep mendapat penghargaan *South East Asian Write Award* dari kerajaan Thailand pada 2005, atas kumpulan puisinya *Jalan Menuju Rumahmu*. Puisi ini dianggap sebagai kreasi dari kegelisahan dunia santri yang jujur dalam mencari Tuhannya.

Sebagai bukti kecintaannya pada seni, Acep membentuk Komunitas Azan. "Di sana ada diskusi kebudayaan, agama, politik, dan sebagainya. Juga ada pementasan teater, puisi, tari, musik dan kesenian tradisional yang hampir punah. Termasuk juga ada wayang kreasi baru," ujar Acep kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Komunitas yang dibentuk pria berkaca mata ini, beranggotakan seniman dari Cipasung dan simpatisan dari berbagai daerah di Jawa Barat. "Kita punya relasi dengan banyak seniman. Dari Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, dan sebagainya. Kita sering tampil bersama," tuturnya. "Di sini saya juga mempertemukan seniman tradisional dengan kiai. Inilah kebebasan berekspresi," imbuhnya.

Ayah empat putera ini juga menaruh harapan yang tinggi pada sastrawan santri. "Di tengah moral bangsa yang sudah sangat carut-marut dan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, legislatif, maupun parpol, maka sastrawan santrilah yang akan menjadi tumpuan untuk dapat menegakkan kembali karakter bangsa yang berbudaya dan beradab," katanya pada pembukaan Silaturahmi Sastrawan Santri bertema *Pluralisme Budaya dalam Sastra*, di Hotel Surya, Tasikmalaya Jawa Barat.

Dan tentu saja, pilihan pria yang telah memublikasikan puisinya sejak usia 16 tahun ini bukan tanpa resiko. "Masyarakat tidak resisten, karena mereka menyukai hiburan. Resistensi itu datang dari kelompok-kelompok tertentu, misalnya kalangan NU politik. Mereka agak tersinggung. Ada juga kelompok Islam radikal," ungkapnya.

Menurut Iip D. Yahya dalam buku Ajengan Cipasung: *Biografi KH Mohammad Ilyas Ruhiat*, bagi KH Ilyas Ruhiat pilihan hidup Acep itu adalah kado liberalisme buat seorang tradisionalis.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.pribadi

dok.pribadi

Sastra, Pesantren dan Radikalisme Islam

Oleh: Jamal D. Rahman
Penyair, Pemimpin Redaksi Majalah Sastra Horison

ANTARA sastra Indonesia dan sosiologi Islam Indonesia, di manakah posisi pesantren kini? Perhatian terhadap pesantren sebagai potensi atau bagian dari khazanah sastra Indonesia modern tampak meningkat belakangan ini. Pada saat yang sama, dalam sosiologi Islam Indonesia, pesantren seringkali dikaitkan dengan fenomena munculnya, bahkan menguatnya radikalisme Islam. Adakah hubungan antara sastra, pesantren, dan radikalisme Islam?

Salah satu khazanah pesantren yang sangat hidup hingga sekarang adalah sastra, khususnya puisi. Di pesantren, santri membaca atau menyanyikan puisi setiap hari. Tak ada hari tanpa santri membaca puisi, sendiri-sendiri atau bersama-sama. Mereka membaca atau menyanyikan puisi Abu Nuwas, Sayyidina Ali R.A., Imam Syafi'i, al-Bushiri, prosa al-Barzanji, dan lain-lain. Mereka membaca doa-doa, yang hampir semuanya berbentuk puisi. Bahkan tauhid dan tata bahasa Arab pun mereka pelajari melalui puisi, sambil menyanyikannya pula.

Untuk beberapa mata pelajaran, yang sama sekali bukan pelajaran sastra, jam pelajaran seringkali diawali dengan bersama-sama menyanyikan puisi, dan ditutup dengan bersama-sama menyanyikan puisi pula. Maka, setiap santri membaca puisi lebih dari sekali setiap hari. Pagi membaca puisi Ibnu Malik, siang puisi Imam Syafi'i, sore puisi Abu Nuwas, malam doa-doa anonim yang sangat puitis.

Tentu saja, hubungan sastra dengan pesantren adalah hubungan sastra dengan Islam. Dan itu bisa ditarik jauh ke wahyu pertama. Kita tahu, wahyu pertama adalah perintah untuk membaca dan menulis. Adalah menarik bahwa perintah membaca disampaikan dalam bentuk kalimat perintah (*iqra'*, 'bacalah'), sedangkan perintah menulis disampaikan dalam bentuk metafor, yaitu pena (*qalam*, 'pena'). Yang tak kalah menarik adalah rima ayat demi ayat, yang terdengar merdu dan sangat musikal, sebagaimana juga terdapat dalam pantun kita misalnya.

Metafor dan rima merupakan dua unsur sangat penting dalam puisi. Maka, jika wahyu pertama menggunakan metafor dan rima, pesan wahyu itu jelas: hendaklah engkau membaca dan menulis dengan cita rasa sastra yang tinggi! Dengan kata lain, wahyu pertama itu tidak hanya mengandung dua hal, yaitu perintah membaca dan menulis, melainkan juga perintah untuk menumbuhkan dan memanfaatkan cita rasa (seni) sastra dalam membaca dan menulis itu sendiri. Dan, al-Qur'an memberikan contoh bagaimana cita rasa sastra memperindah dirinya di hampir sepanjang ayat-ayatnya. Inilah kiranya latar historis dan normatif tumbuhnya sastra di dunia Islam, yang kemudian ditransmisi ke Indonesia melalui pesantren.

Tidaklah mengherankan kalau belakangan ini istilah "sastra pesantren" kian sering digunakan. Istilah itu sendiri menunjuk pada setidaknya tiga pengertian: (1) sastra yang hidup di pesantren, seperti antara lain disebutkan di atas; (2) sastra yang ditulis oleh orang-orang (kiai, santri, alumni) pesantren; (3) sastra yang bertemakan pesantren, seperti *Umi Kalsum* (Djamil Suherman), *Geni Jora* (Abidah El-Khalieqy), dan *Maria & Maryam* (Parahdiba). Dengan tiga pengertian itu, khazanah sastra pesantren mengalami perluasan dan pengayaan, baik dalam bentuk, isi, maupun lingkungan pergaulannya.

Dalam batas tertentu, mengakarnya sastra di lingkungan pesantren pastilah membawa serta watak dan cita rasa sastra itu sendiri di dunia pesantren. Watak atau cita rasa sastra adalah menyentuh sesuatu dengan hati terbuka. Sebagaimana seni pada umumnya, sastra membebaskan manusia dari kejumudan dan kecupetan perasaan. Ia menghidupkan biru api hati, perasaan, dan jiwa seseorang. Ia menghidupkan keriangan hati, memberikan kepuasan menyala-nyala pada perasaan untuk hal-hal yang sulit diungkapkan melalui bahasa formal atau diskursif. Di sisi lain, sastra mempertajam kepekaan hati dan perasaan dalam bersentuhan dengan hal-hal yang seringkali dipandang sebagai sesuatu yang biasa.

Semua suasana hati, jiwa, dan perasaan seperti itu merupakan prasyarat penting dalam menghayati agama. Dan, semua kondisi kejiwaan itu akan mengontrol kecenderungan destruktif, yang mungkin muncul dari amarah akibat perasaan tertekan, psikologi kekalahan dan ketakberdayaan menghadapi hal-hal yang sangat tak diinginkan. Radikalisme Islam tampaknya muncul dari psikologisme tak terkontrol seperti itu. Oleh karenanya, suasana hati, jiwa, dan perasaan yang turut dibangun oleh watak atau cita rasa sastra, sejatinya dapat menekan radikalisme Islam.

Melihat sastra demikian mengakar di dunia pesantren, maka, jika benar radikalisme Islam Indonesia berhubungan dengan dunia pesantren, fenomena itu bagaimanapun merupakan deviasi belaka. Namun, jika cita rasa sastra redup dari dunia pesantren, dan Islam secara makro terus-menerus diperlakukan secara tidak adil, bukan tidak mungkin dalam jangka panjang pesantren akan menjadi lahan bagi tumbuhnya radikalisme Islam.

dok.WI/Witjak

Pentas Komunitas Azan Pesantren Cipasung Tasikmalaya

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Pengelolaan dana bergulir Kelompok Perempuan Aceh

Menjaga Pijar Semangat Nanggroe

Tsunami yang meluluhlantakkan Nanggroe Aceh Darussalam seolah rahmat tersembunyi. Aceh menjadi terbuka. Konflik menahun pupus. Masyarakat sipil berperan membangun Serambi Mekkah. Perubahan besar terus bergulir.

Hujan terus mengguyur jalan semalaman. Di luar gelap pekat. Sebuah mobil menyusuri lintas Banda Aceh - Idi Rayeuk, Aceh Timur. Di dalamnya, sang sopir berdendang riang diiringi lagu rock yang sedang populer. "Dulu tak ada yang berani begini," ujar Iwan, sang supir, saat menembus perbukitan menjelang wilayah Sigli.

Usia Iwan hanya dua tahun lebih muda dari usia konflik militer di Aceh yang meletus tahun 1976. Menyebut kata 'dulu' sangat jelas batasnya, yaitu ketika Aceh masih dicekam konflik dan rakyat tak bisa berkutik. Semua mafhum, keadaan kini telah benar-benar berubah.

Bencana tsunami di akhir 2004 dapat dinilai sebagai awalnya. Ribuan jasad yang terkubur menjadi pondasi yang kokoh untuk terbangunnya Aceh yang damai dan terbuka. Seperti Iwan, kebanyakan rakyat Aceh sedang menikmati suasana baru itu. Laksana masa Kesultanan Samudera Pasai, Aceh kini begitu sibuk.

Perdagangan antar kota nyaris tak putus. Siang malam mobil niaga berlalu lalang dari Medan ke Banda Aceh atau sebaliknya. Di tiap-tiap kota kabupaten, lampu terus berpijar. Di kota Banda Aceh lebih terasa lagi. Perempatan jalan tak pernah lengang. Warung-warung kopi khas Aceh terus mengepul. Pelbagai transaksi bisnis terjadi. Tak cuma itu, ibu-ibu dengan anak-anak mereka pun tenang bercengkrama, bahkan hingga larut malam. Kini, lazim menemukan perempuan mengendarai motor melintas di jalan raya luar kota.

"Meski dibayang-bayangi penegakan Syariat Islam yang dianggap bisa membatasi gerak kaum perempuan, kini perempuan Aceh saat ini lebih menikmati kebebasannya ketimbang di masa konflik," ujar aktivis perempuan Aceh yang juga Direktur Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MISPI) Syarifah Rahmatillah.

Aceh kini lebih kondusif untuk menerima perubahan-perubahan. "Itu karena datangnya orang luar Aceh dan bantuannya, atau ini konsekuensi dari perdamaian yang telah dicapai. Tinggal bagaimana kini masyarakat Aceh menyikapinya," ungkap Marini, salah satu Koordinator Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) (lihat: *Generasi Damai dari Masa Konflik).*

Denyut keterbukaan Aceh juga bisa dirasakan di desa-desa. Sebelumnya beberapa kampung di desa Idi Tunong, Aceh Timur, adalah daerah yang cukup parah terimbas konflik. Saat melintas daerah itu, masih terlihat rumah-rumah bekas terbakar di pinggiran desa. "Itu sisa-sisa konflik Aceh," ujar Iwan.

Kini luka konflik seolah lenyap dari kampung Paya Awi di Idi Tunong yang subur itu. Jalan ke tempat itu yang berubah jadi kubangan lumpur di musim hujan, seakan tak menghalangi aktivitas warga. Kecemasan telah pupus dari mata mereka. Pun terhadap orang luar yang datang berkunjung.

Bahkan perempuan di desa ini telah mulai mengorganisasikan diri. Atas dampingan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW), kelompok-kelompok perempuan ini membentuk dana bergulir untuk modal usaha mereka.

"Di desa ini ada sepuluh kelompok. Sekarang PPSW bekerja di lebih 70 desa di 7 kabupaten," ujar Ratih Saparlina, koordinator program PPSW yang berkantor pusat di Jakarta.

PPSW hanyalah satu dari sejumlah LSM luar Aceh yang bekerja jauh sampai ke pedalaman. Seperti banyak organisasi lain, PPSW kembali meningkatkan intensitas hubungan antara masyarakat sipil Aceh dengan yang di luar Aceh. Mereka mengawalinya dengan tukar-menukar gagasan dan ide antar keduanya terhambat konflik yang panjang.

Agar berjalan lancar, PPSW pun melakukan pendekatan dengan merekrut masyarakat setempat sebagai staf lapangan.

"Selain agar diterima, juga agar bisa memahami kebutuhan masyarakat setempat. Kami juga ingin belajar," ujar Ratih.

Proses saling belajar seperti itu, merupakan penanda dari bangkitnya kelompok-kelompok masyarakat sipil di Aceh yang telah membuka diri atas perubahan-perubahan. Demikian halnya dengan pemerintah lokal dan perguruan tinggi.

Di sisi lain, dana dan bantuan teknis pun kini tersedia. Program PPSW, seperti juga beberapa program yang dijalankan di NAD, adalah buah kerjasama LSM tingkat nasional dan lokal dengan the Asia Foundation yang didukung oleh United States Agency for International Development (USAID).

Bahkan organisasi pendidikan masyarakat Aceh, yaitu *dayah*, juga tak enggan bekerjasama dengan pihak luar Aceh. Lembaga Kajian islam dan Sosial (LKiS) yang bermarkas di Yogyakarta, telah lima tahun mendampingi dayah.

"Bedanya, dulu kami hanya bisa bekerja di *dayah-dayah* di perkotaan. Kini kami bisa sampai ke pelosok," imbuh Direktur LKiS, M. Jadul Maula. Untuk kegiatannya, LKiS bekerja dengan organisasi santri *dayah* yang populer disebut Rabithah Thaliban Aceh (RTA).

Sebagaimana LKiS, Indonesia Institute for the Empowerment of Society (INSEP) masuk ke pelosok Aceh untuk mendorong mutu pendidikan di *dayah*. Lebih khusus lagi, program mereka menyasar santri perempuan. Karena mereka adalah kelompok yang paling rentan dalam situasi krisis maupun damai.

Banyak orang tua menitipkan anak perempuan mereka ke *dayah-dayah*, utamanya di masa krisis. Namun fasilitas di sebagian besar *dayah* tak memadai. "Ada lebih dari 30 *dayah* di seluruh NAD yang bekerjasama dengan INSEP berupa pengembangan perpustakaan, penyediaan komputer dan permodalan," jelas Direktur INSEP Fuad Fachruddin.

Dengan kerja sama itu, Fuad berharap santri perempuan lulusan *dayah* memiliki kepandaian dan keahlian. Hasilnya, para santri perempuan itu terhindar dari himpitan ekonomi yang kerap bermuara pada bahaya perdagangan manusia.

Bangkitnya masyarakat sipil di Aceh tak dapat dipisahkan dari kehendak masyarakat untuk menentukan visi pemerintahan Aceh ke depan. Melalui perdebatan yang panjang, melelahkan sekaligus menegangkan, rakyat Aceh dan Jakarta telah mencapai titik kesepakatan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA).

"Ini memang belum sempurna dan belum memuaskan semua pihak. Tapi akhirnya, semua yang terlibat mengerti bahwa produk legislasi adalah hasil negosiasi politik. Keberhasilan para pihak mencapai kesepakatan menunjukkan kedewasaan kita berdemokrasi," ujar Direktur Aceh Program the Asia Foundation Sandra Hamid, mengomentari lahirnya UU PA ini.

Kehidupan yang lebih demokratis memang kini terasa di Aceh. Bagian dari keterbukaan itu bisa dilihat di media massa, di mana para ahli dan penulis bebas memaparkan pandangan mereka. Wartawan pun bebas mengutip pandangan masyarakat; dan tak selamanya pendapat mereka menyanjung tinggi para pihak yang bekerja di Aceh.

Media massa, baik koran maupun radio, tak pernah lengang dari kritik masyarakat soal rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami. Salah satunya datang dari seorang aktivis Gerakan Anti Korupsi (GeRAK), Akhiruddin. Komentarnya dapat dibaca bukan saja di media lokal, tapi juga koran nasional, bahkan internasional. GeRAK menengarai, setidaknya 18 kasus korupsi telah dilakukan oleh pengelola negara (lihat: *Masa Darurat Bukan Alasan Menilap Uang Rakyat*).

Kritik yang disampaikan organisasi seperti GeRAK dan masyarakat Aceh umumnya adalah buah dari keterbukaan di Aceh. Mereka sadar, bila diam maka rakyat Aceh hanya akan menjadi obyek pembangunan.

Dan pada akhir tahun 2006, mereka akan bicara lantang tentang siapa pemimpin yang mereka anggap paling layak diberi kepercayaan. Lewat Pilkada yang rencananya digelar pada 11 Desember, rakyat Aceh akan menentukan 19 bupati dan wali kota serta gubernur.

"Orang tak lagi acuh dengan apa yang akan mereka pilih. Mereka mengerti bahwa keputusan mereka sangat menentukan masa depan mereka," demikian pandangan Marini atas sikap rakyat Aceh yang begitu antusias menyambut Pilkada.

Masalahnya kini, bagaimana keterbukaan bisa membawa kemaslahatan bagi rakyat Aceh. Masyarakat sipil memang sepatutnya mengambil kesempatan untuk berkata lantang, tapi mesti juga bertanggung jawab. Artinya, semua yang diteriakkan bisa dicari kebenarannya. Dengan kata lain, bekerja dengan data.

Di sisi lain, pemerintah harus cepat menanggapi masukan masyarakat. Di era yang terbuka ini, masyarakat butuh pemerintahan yang bisa memenuhi rasa keadilan.

Namun, memenuhi kehendak rakyat Aceh bukanlah perkara gampang. "Rakyat Aceh perlu bukti bahwa para pemimpin sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Artinya, pemerintah benar-benar melakukan penegakan hukum, membangun kepentingan umum yang terencana, jelas dan transparan," papar Akhiruddin.

Ini tak berlebihan. Bagi GeRAK, percuma bicara tentang demokrasi di Aceh jika persoalan korupsi tak diurus. "Sebab borok dari pelanggaran HAM di Aceh karena adanya tindakan korupsi," kata Akhiruddin.

Memang, pada akhirnya, Aceh yang lebih demokratis menuntut para pihak untuk cepat tanggap, transparan, dan akuntabel. Dalam bahasa yang sering digunakan di Serambi Mekkah, rakyat Aceh membutuhkan pemimpin yang amanah. *Insya Allah,* mereka akan lahir dari proses Pilkada yang telah lama tertunda itu.

Lies Marcoes-Natsir, Gamal Ferdhi

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Pagelaran Tari Saman pada malam Dokaim di Banda Aceh

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Pilkada NAD

MARINI

GENERASI DAMAI DARI MASA KONFLIK

"**DI KAMPUS** saat mengajar, saya harus fokus pada bidang pangan. Sementara di luar *ngurusin* politik warga," papar Marini, Koordinator Provinsi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR).

Namun sejatinya, muara perhatian perempuan muda yang kini tengah menyelesaikan jenjang masternya ini selalu sama. Ia peduli pada masalah sosial dan politik, khususnya perempuan. Ia kini tengah mempertimbangkan untuk mengubah fokus tesisnya ke politik pangan dan gizi perempuan pasca tsunami.

Lahir dari keluarga bertradisi nahdliyin, Rini (panggilan akrab Marini) telah akrab dengan Nahdlatul Ulama (NU), utamanya di bidang pendidikan. Perkenalannya dengan dunia aktivisme pun tak jauh dari tradisi di keluarganya.

"Kakek saya aktivis Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) di Aceh. Sejak kuliah saya sudah aktif di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), bahkan menjadi pengurus sampai tahun ini," katanya. Tak hanya di tingkat provinsi, untuk peride 2006-2009, ia terpilih sebagai salah satu ketua IPPNU pusat.

Wara-wiri Jakarta-Aceh sejak sebelum tsunami, membuat Rini semakin dikenal oleh lingkungan NU di pusat. Maka Lembaga Kesejahteraan Keluarga (LKK) NU pusat pun menunjuknya sebagai perwakilan lembaga itu di JPPR.

JPPR adalah lembaga non-partisan yang beranggotakan NU, Muhammadiyah, LSM, lembaga pendidikan, lembaga antar iman, lembaga kemahasiswaan dan radio. Mengandalkan relawan di tingkat akar rumput, jaringan ini secara rutin melakukan kegiatan pendidikan pemilih dan pemantauan Pemilu sejak Pemilu pasca Soeharto tahun 1999.

dok.TAF

Marini

Mereka juga melakukan program yang sama untuk Pilkada di seluruh negeri. Maka, saat jadwal pilkada Aceh telah jelas, JPPR juga bersiap menggelar program di Serambi Mekkah itu.

Kesungguhan Rini mengelola JPPR telah membawanya menjadi salah satu koordinator provinsi. Ia tak canggung bekerja dengan Muhammadiyah, tak juga kaku berhadapan dengan para pejabat. Ia cepat beradaptasi dengan berbagai calon yang akan berlaga di Pilkada.

Dari interaksinya dengan berbagai kalangan, Rini optimis menyikapi Pilkada. "Tapi Pilkada NAD ini cukup rawan karena banyaknya calon," katanya.

Ditambah lagi ada pasangan calon yang secara laten saling berlawanan di masa lalu. "Ini sangat potensial memunculkan intimidasi terhadap masyarakat," imbuhnya.

Namun Rini yakin, masyarakat memiliki kearifannya sendiri. "Mereka kini lebih antusias ikut Pilkada, karena mereka tahu suara mereka tidak sia-sia," terangnya.

Rini buru-buru mengingatkan pada para calon yang hendak maju, untuk tidak mengintimidasi pemilih. Ia juga menegaskan, percuma saja mengiming-imingi masyarakat dengan uang. "Karena mereka telah punya pilihan sendiri," katanya.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Rini akan ambil andil besar dalam perhelatan demokrasi di Aceh, Desember 2006. Kata kunci di hatinya dan JPPR, adalah ketidakberpihakan. "Benar, saya dan teman-teman lain datang dari ormas Islam yang mungkin ada hubungannya dengan partai atau calon yang maju. Tapi netralitas JPPR adalah kekuatan kita. Biarkan rakyat memilih," himbaunya.

Itulah yang dijanjikannya untuk pemilih di Aceh. Bersama JPPR, Rini akan memberi informasi tentang para calon gubernur dan bupati. Masyarakat pun bisa bebas memilih. Dan gadis yang lahir di masa konflik ini ingin memastikan bahwa proses pemilihan berjalan damai, bebas dan adil. Sudah saatnya!

Lies Marcoes-Natsir

GERAKAN RAKYAT ANTI KORUPSI (GeRAK) :

MASA DARURAT BUKAN ALASAN MENILAP UANG RAKYAT

TELEPON genggam Akhiruddin berulang kali berdering. Di ujung sana beberapa wartawan Ibu Kota mengonfirmasikan temuan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) soal dugaan penguapan dana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dalam proyek buku *Membangun Tanah Harapan*.

Koordinator GeRAK Aceh ini memang piawai mengurai angka-angka. Tak heran, karena ia memang menggondol ijazah ilmu akuntansi dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Dari notes kecilnya, Akhiruddin memaparkan data-data temuan GeRAK. Seperti tak hendak berkesimpulan sendiri, ia pun mengajak sang wartawan berhitung selisih biaya produksi untuk jenis bahan baku yang persis sama. Dari sana GeRAK mengindikasikan terjadinya korupsi itu.

Melayani informasi seputar korupsi di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), mereka maknai sebagai mandat kerja. Namun mengajak orang untuk berfikir, berhitung dan kemudian mempertanyakan keganjilan dari setiap sen uang yang berlalu-lalang, baik di lembaga negara maupun badan usaha non-negara, mereka maknai sebagai jihad. Jihad, karena pekerjaan itu menyangkut hak hidup rakyat Aceh. Jihad, karena melawan kezaliman ini bukan tanpa resiko.

Akhiruddin (kiri) saat menerima Bungong Jaroe *dok.WI/ TAF*

Berdiri Agustus 2004, pada mulanya GeRAK hanya *numpang* di kantor Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh. Ketika tsunami menerjang, mereka kehilangan segalanya, termasuk dua orang pendirinya; Koordinator Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) H. Keucik Jailani dan Direktur WALHI Muhammad Ibrahim.

Bersama para pendiri seperti Bambang Antariksa dan Hemma Marlaeny, staf yang tersisa kembali bergerak. Pasca tsunami, ketika bantuan untuk rekonstruksi Aceh mengalir deras dan masyarakat tak lagi bisa dibungkam, GeRAK semakin menggelegak.

Tak gampang bekerja sebagai pengawas korupsi di saat serba darurat pasca tsunami. "Namun bagi GeRAK, kedaruratan tak boleh jadi alasan untuk menilap uang rakyat. Bagimanapun, telunjuk harus berani diarahkan tatkala terjadi penyelewengan," tegas Akhiruddin.

Dari Oktober 2005 hingga Agustus 2006, setidaknya ada 18 kasus yang mereka tengarai sebagai praktik korupsi di NAD. Kasusnya beraneka; dari pengadaan kapal ikan fiktif bagi nelayan di Sabang, penyimpangan penggunaan dana Children Center pada Kementrian Pemberdayaan Perempuan, sampai kasus penyimpangan pengelolaan APBD NAD. "Ini menyakitkan," katanya lirih.

Untuk menghindari salah tunjuk dan laporan fiktif, mereka benar-benar menjalankan prosedur penyelidikan dan pencarian bukti. Beberapa kasus meraih sukses. Sekelompok buruh bangunan di desa Ruyung menghadiahi mereka *Bungong Jaroe* untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka pada pembelaan GeRAK.

Karena bekerja dalam isu korupsi, Akhiruddin pun menekankan kepada seluruh stafnya agar memahami seluk-beluk anggaran serta konteks dan praktik korupsi. "Tentu saja di atas semua itu dibutuhkan komitmen kepemimpinan yang benar-benar anti berbagai bentuk korupsi," tegasnya.

GeRAK lahir ketika lembaga lain bersikukuh dengan pentingnya penegakan HAM. Namun bagi GeRAK, penegakan HAM bisa berdiri tatkala ada keadilan ekonomi. Dan borok paling parah dari hilangnya keadilan ekonomi adalah praktik korupsi. Terlebih dalam situasi darurat militer yang mereka curigai sebagai masa merajalelanya praktik korupsi.

Kini masyarakat semakin terbuka. Mereka berkeras untuk memelihara Aceh yang damai. Bagi GeRAK, ini sebuah isyarat untuk pemerintah dan penguasa Aceh supaya tak main-main atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan. Sebab, perdamaian hanya mungkin tergapai tatkala korupsi sirna.

Lies Marcoes-Natsir, Gamal Ferdhi

HIKAYAT DARI KEDAI KOPI

Oleh: Reza Idria
Penulis dan Aktivis Liga Kebudayaan Tikar Pandan Aceh

dok.pribadi

Ini zaman buruk bagi pikiran dan imajinasi,
maka kami membangun cerita sendiri.
[Dokarim]

KALI ini saya akan bercerita tentang kawan saya Murtadha. Akrab dipanggil Todhak. Yakinlah, ketika saya menulis ini ia sedang duduk menyesap kopi di sebuah kedai depan mesjid raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Seperti kedai-kedai kopi lain yang memenuhi peta Aceh, kedai kopi tersebut ramai. Keramaian yang wajar. Bagi saya (saya merasa Todhak juga beranggapan sama) tak banyak yang berubah dengan keriuhan dalam kedai itu, baik sebelum maupun sesudah badai. Mungkin yang berubah adalah banyak orang-orang yang tak akrab di mata yang kini ikut membangun keriuhan. Memang kini orang-orang telah kembali memenuhkan kota. Memenuhkan kedai kopi. Lelaki dan perempuan. Yang terakhir ini juga sesuatu yang berbeda. Tapi ternyata kopi tetap nikmat seperti biasa. Jadi apa yang ditakutkan selama ini?

Percayalah, setelah pembakaran oleh oknum terkenal maupun setelah hempasan gelombang tsunami belakangan, tempat yang paling mula berdiri dan paling awal didatangi orang di sini adalah kedai kopi. Asal tak berhutang, pemilik kedai tak akan masam walau Anda berdiam dari pagi hingga petang. Kalau dulu melihat truk-truk tentara lalu lalang dengan dada berdebar kencang, kini kami mengagumi mobil-mobil mewah yang pajaknya dibayar ke provinsi seberang.

Ada ragam alasan mengenai lama waktu berdiam di kedai kopi. Kadang percakapan terlalu menarik untuk dilewatkan. Atau menunggu giliran membaca koran. Hampir semua kedai kopi kampung kami menyediakan koran gratis. Mungkin karena orang-orang malas membeli dan membaca sendiri. Membaca koran gratis dan mengomentari bersama-sama adalah kenikmatan tiada tara di kedai kopi. Bergilir dari meja ke meja. Saking banyak yang merasa perlu membaca, kadang ketika koran sampai ke tangan kita beberapa judulnya sudah tak terbaca.

Kenapa saya menyertakan Todhak dalam tulisan ini? Karena Todhak tidak seperti lazimnya orang lain dalam membaca koran. Sudah lama Todhak tak sudi membaca halaman depan koran. Ia meyakini tak ada kebenaran di sana. Terlebih berita-berita tentang lembaga dana bencana bentukan pemerintah, yang sibuk membela diri atas kinerja yang menyedihkan. Mendengar jumlah gaji yang diterima pegawai lembaga tersebut (sebagai imbalan kelambanan kerja mereka) pernah membuat Todhak harus menambah bersendok-sendok gula ke gelas kopinya. Pahit. Makanya Todhak hanya suka membaca halaman belakang yang berisi *job vacancy*, tawaran kerja dari lembaga-lembaga donor, berharap ada peluang kerja untuk dia. Kadang-kadang ia membaca juga berita olah raga. Karena surat kabar tidak mungkin berbohong tentang skor sebuah pertandingan sepakbola.

dok. Gamal Ferdhi

Salah satu sudut Banda Aceh

Todhak pernah bercerita pada saya bahwa ia menyesal dulu tak punya cukup biaya hingga tak bersekolah tinggi. Bahasa Inggrisnya yang payah membuat ia belum diterima kerja di NGO. Ia tak mau bekerja di LSM. Saya sempat mengomentari bahwa NGO dan LSM itu sinonim. Tapi saat itu Todhak membantah, NGO itu untuk menyebut lembaga luar negeri, sedang LSM adalah organisasi lokal. Menurut dia kerja di NGO, gaji besar dan bisa menyenangkan ibunya di rumah.

Tapi entah karena iri belum dapat bekerja di NGO, Todhak juga punya pikiran tak menyenangkan. Dia menyoal bagaimana dua tiga tahun ke depan, ketika NGO-NGO itu hengkang dari Aceh, apalagi yang akan terjadi dengan daerah yang memiliki banyak pengangguran "kelas tinggi". Yang pernah nyaman menerima fasilitas dan gaji besar. Katanya semoga itu tak jadi bakal "penyakit sosial" baru. Semoga.

Ketika membicarakan hal-hal seperti ini, kami biasanya cepat-cepat meneguk kopi.

Todhak (dan saya juga), mungkin bagian dari orang-orang yang kesulitan terhadap kecepatan serta jamaknya perubahan di sini. Terlalu lama melewati hidup di tengah waktu yang berhenti. Tak bisa turut merayakan kenduri setelah bencana. Hingga berkali-kali harus menggigil dan mencari ruang-ruang membangun cerita sendiri.

Kontes Pildacil *Best of The Best*

BERKAH MELIMPAH Bisnis Tausiyah

Stasiun televisi berlomba menayangkan program keagamaan. Para dai dan calon dai, dari cilik hingga dewasa gencar dihadirkan tiap hari. Dakwah pun dikemas menjadi paket-paket yang mendatangkan uang.

Nurul terisak ketika tahu dirinya tersingkir dari kontes Pemilihan Dai Cilik (Pildacil) *Best of the Best* di stasiun televisi Lativi. Pasalnya, gadis berusia 12 tahun itu menduduki ranking terendah dalam perolehan pesan singkat (SMS) dibanding lima pesaingnya di kelompok Makkah.

Empat juri penilai kontes calon pendakwah agama itu tak kalah kecewa. Pasalnya Ustadz Syachrulsyah, artis Neno Warisman, Ustadz Aswan Faisal dan pelawak Akri Patrio mengganjar Nurul dengan nilai tertinggi, yaitu 350. Para juri yakin wakil dari Ngawi, Jawa Timur, itu bakal duduk di peringkat pertama atau minimal lolos dari perangkap eliminasi.

Kenyataan berkata sebaliknya dalam episode Sabtu (14/10/2006) itu. Walau dewan juri mendaulat Ali Musa Daud di posisi juru kunci dengan nilai 330, tapi dai cilik asal Bandung itu justru sukses melenggang ke babak selanjutnya, karena perolehan SMS-nya lebih tinggi dari kontestan lain.

Kualitas isi atau teknik penyampaian dakwah seperti diabaikan. Penilaian hanya berdasarkan perolehan SMS. Apalagi satu nomor telepon seluler bisa mengirim hingga ratusan suara. "Kontes ini tak lebih sebuah kontes popularitas, bukan kontes

yang menampilkan otak," kata cendekiawan Muhammadiyah, Moeslim Abdurahman (baca: *Semua Tergantung Pemilik Modal*).

Pendapat Moeslim dikuatkan pengalaman Yani Hamdani. Pengetahuan agama memadai dan latar belakang pendidikan di Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Jakarta, tak jadi jaminan baginya dapat melenggang ke babak 20 besar kontes *Dai-Daiyah* di stasiun televisi TPI. Kembali SMS yang berkuasa.

Padahal saat Yani dan kontestan lain beraudiensi dengan TPI, mereka mendapat penjelasan bahwa kontes ini menggunakan sistem penilaian 60 persen dari *mualim* (juri, *red.*) dan 40 persen dari SMS. "Untuk *grand final* 80 persen mualim dan 20 persen SMS," kata Produser *Dai-Daiyah* TPI Hasan Bisri kepada Nurul Huda Maarif dari the WAHID Institute.

"Saya heran, dari hasil penilaian mualim saya peringkat kedua. Tapi karena SMS saya rendah, saya jadi peringkat keenam. Karena 40 kontestan dibagi dalam empat kelompok dan masing-masing diambil lima orang untuk masuk 20 besar, maka saya gagal," ungkap Yani.

Santri Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus-Sunnah Jakarta ini menyadari, kekalahan itu akibat dirinya tidak menggerakkan keluarga atau kerabatnya untuk mengirim SMS dukungan.

"Waktu di karantina, ada kontestan yang mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk SMS sekali tampil. Jadi biar ilmunya bagus, tapi uang tidak ada, ya jangan harap menang," imbuhnya getir.

Diakui Yani, teman-temannya banyak yang termotivasi ikut kontes itu karena hadiah yang ditawarkan atau karir sebagai dai yang dapat dijadikan nafkah. "Banyak kawan *nanya* kepada TPI soal kontrak kalau mereka lolos," terangnya.

Pertanyaan itu boleh jadi jamak diajukan, karena siapapun bakal tergiur melihat taburan uang yang akan didapat pihak televisi, atau dai yang dipekerjakan televisi itu. Pendapatan itu bisa dilihat dari antrian iklan dalam acara-acara keagamaan yang menampilkan dai yang sudah jadi pesohor, atau kontes calon pesohor dakwah.

Menurut sumber the WAHID Institute, iklan acara Pildacil (Lativi) dan *Dai-Daiyah* (TPI) tarifnya Rp 10-15 juta per 30 detik. Mari kita hitung berapa pemasukan program *Pildacil Best of the Best*, yang diputar dari pukul 16.00-19.00 WIB. Jika dalam satu episode minimal menayangkan iklan selama 30 menit, maka pendapatan yang masuk ke kantong pengelola televisi sekitar Rp 600 juta.

Selama Ramadhan 2006, acara ini tayang Rabu-Minggu tiap pekan. Sepekan Rp 3 miliar terbayang di pelupuk mata. Total jenderal Rp 12 miliar didapat dalam empat pekan Ramadhan. Itu baru pemasukan iklan, belum lagi SMS atau sponsor yang produknya terpampang di panggung. Wow! Benar-benar menguntungkan.

Stasiun televisi memang tengah berbulan madu dengan para dai. Para pemilik usaha pun tak segan merogoh kocek lebih untuk beriklan dalam acara yang diisi para dai kondang, seperti KH. Abdulah Gymnastiar (Aa Gym), Ustadz Jefry al-Buchory, Ustadz M. Arifin Ilham dan Ustadz Yusuf Mansur.

"Tarif iklannya Rp 20-25 juta per 30 detik," kata sumber the WAHID Institute yang pernah menangani kontrak acara Ramadhan antara stasiun televisi *SCTV* dengan KH. Zainuddin MZ.

"Kita simbiosis mutualisme lah. Karena televisi dapat untung atas penampilan mereka, wajar kalau mereka pasang harga untuk retailnya (per episode) sekitar Rp 20-25 juta. Tapi biasanya para dai itu dikontrak per paket selama Ramadhan yang kisarannya Rp 2-4 miliar," ungkapnya.

dok.WI/Witjak

Salah satu kontestan Pildacil

Tentu saja sang dai tidak langsung menangani tawar-menawar harga dengan pihak pengundang.

Biasanya 'pekerjaan tabu' itu ditangani *khadam* atau istilah kerennya asisten atau manajemen para dai itu. Namun tetap tak mudah mengetahui angka pasti, berapa tarif para dai itu sekali manggung di luar *job* televisi.

Seperti besaran honor Ustadz M. Arifin Ilham. "Dengan surga. Ini dakwah, Mas!" kata Asep Saefullah asisten pemimpin Majelis Azzikra itu saat dihubungi Gamal Ferdhi dari the WAHID Institute.

Demikian halnya dengan Aa' Gym. Seorang pengurus Management Qolbu *(MQ)* di Bandung, Yudi Ginanjar, mengatakan, "Nggak pakai tarif. Aa' bukan artis." Tapi layaknya manajemen figur publik nan-profesional, Yudi menganjurkan agar menghubungi pengurus MQ cabang di daerah pengundang.

Di MQ cabang Jakarta, prosedur mengundang Aa' Gym dijelaskan dengan rinci. Yang paling utama, adalah menyesuaikan jadwal kosong Aa' Gym dan membuat surat undangan kepada pengurus MQ cabang di daerah pengundang. Teknis acara lantas ditentukan. Pengundang juga harus menandatangani kontrak kesepakatan yang disebut akad.

Selanjutnya, pengurus MQ meminta agar honor, yang mereka isitilahkan 'tali asih', ditujukan untuk dua pihak. "Untuk Aa' Gym dan untuk MQ. Besarnya tali asih diserahkan pada kemampuan pengundang," kata seorang pengurus MQ cabang Jakarta yang enggan disebut namanya.

Sampai di sini, nominal honor tetap terselimuti misteri. Namun, seperti ada kesepakatan tak tertulis diantara calon pengguna jasa, seberapa sering sang dai tampil di media massa, terutama televisi, menjadi patokan besar honor yang layak

dibayarkan.

"Karena Ustadz M. Arifin Ilham lebih sering tampil di televisi, *bisyarah* (honor, *red.*) nya Rp 5 juta. Kalau Ustadz Yusuf Mansur Rp 2 juta," kata seorang pengurus masjid di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Najmuddin, yang pernah mengundang dua dai itu.

Tingginya frekuensi tampil di televisi, jelas mendongkrak popularitas para dai. Hal itu akan mengimbas pada harga tausiyah. Menurut Gus Dur, honor yang didapat dari sebuah majelis memang bukan barang haram. Tapi berapapun besarnya, honor adalah penghargaan yang terlalu mewah untuk sebuah upaya mendidik umat. "Apalagi kalau pakai tarif, itu keterlaluan namanya," tegas mantan Presiden RI ini (baca: *Sering Dibayar "2 M"*).

Uang jelas diperlukan untuk membangun citra seorang dai. Kini layaknya artis, mereka juga harus membayar gaji para manajernya. Belum lagi biaya-biaya perlengkapan pendukung agar penampilan mereka tetap necis dan wangi.

Atas peran televisi yang terus mengekspose citra pendakwah agama, kini muncul anggapan dai atau daiyah adalah profesi yang banyak menghasilkan materi berlimpah di masa depan. Bahkan dalam waktu yang tak terlalu lama.

Simaklah komentar Ustadz Syachrulsyah yang takjub atas tausiyah Eno, seorang kontestan Pildacil. "Kamu terbaik saat ini. Ini yang diinginkan juri. Beberapa tahun ke depan, rumah dan mobil kamu akan mewah. Kamu juga akan bisa membangun masjid," katanya saat menjadi juri pada Pildacil episode Rabu (11/10/2006).

Bahkan sebelum bergelimang materi, para juara calon dai cilik itu diganjar sejumlah hadiah yang lumayan. Untuk juara I, II, III dan IV masing-masing memperoleh Rp 25 juta, Rp 15 juta, Rp 10 dan Rp 5 juta. Mereka juga akan diumrahkan oleh salah satu sponsor.

Hadiah melimpah tak hanya diperuntukkan bagi para calon dai. Program *Grebek Sahur Ustadz-Ustadzah Favorit* di *Lativi* juga menjanjikan kontestannya dengan gelimang hadiah. Pemenang I, II dan III berhak mengantongi uang sejumlah Rp 50 juta, Rp 30 juta dan Rp 20 juta. Tapi ada syaratnya, para ustadz atau ustadzah yang sudah berkhidmat ini diharuskan meraup dukungan SMS sebanyak-banyaknya.

Dahulu para dai dengan tulus ikhlas mendakwahkan agama tanpa pamrih apapun. Namun kini media, dakwah, dan kapitalisme menjadi tiga serangkai yang makin tak bisa dipisahkan. Siapa yang diuntungkan?

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.WI/Gamal Ferdhi

GUS DUR

SERING DIBAYAR "2M"

RAMADHAN 1427 H ini merupakan kali pertama mantan Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebulan penuh berceramah di televisi. Gus Dur hadir di Indosiar dalam program *Buka Qalbu* yang ditayangkan 30 menit menjelang buka puasa.

"Kang Sobary dan saya akan tampil 30 hari di *Indosiar* sebelum buka puasa," ungkap Gus Dur saat rekaman acara televisi itu di Gedung PBNU Jakarta belum lama ini.

Seluruh stasiun televisi memang sedang berlomba menampilkan penceramah agama kesohor, guna menarik penonton. Tak ketinggalan, tentu saja untuk mendongkrak perolehan iklan.

Seorang penceramah yang lagi kondang baru saja menandatangani kontrak eksklusif di SCTV untuk sebulan penuh. Berapa dia dibayar? "Kontraknya mencapai milyaran rupiah," kata sumber the WAHID Institute.

Lalu, berapa nilai kontrak penceramah agama sekaliber Gus Dur yang juga mantan presiden itu? "Saya *nggak* pernah ngomongin kontrak. Apa itu memang perlu?" kata Gus Dur kepada Ahmad Suaedy dari the WAHID Institute.

Sebab itu, Ketua Dewan Syura DPP PKB ini juga tidak tahu berapa honor yang akan diterimanya dari stasiun televisi berlogo ikan terbang itu. "*Ngapain* repot mikirin," katanya santai.

Apakah tampilnya Gus Dur di televisi untuk mendongkrak tarif agar dapat menyamai dai-dai muda yang tersohor? Gus Dur tertawa. Cucu pendiri Nahdlatul Ulama ini mengaku tidak *ngoyo* dalam soal rejeki. "Kalau buat *ninggalin* nafkah di rumah, ada saja lah. Saya punya uang pensiun," kata Gus Dur.

Gus Dur memang sering tak ambil pusing soal honor bagi produk-produk intelektualnya. Ambil contoh untuk setiap kolom yang dimuat, redaksi majalah dan surat kabar akan mengirimkan jerih payah menulisnya itu ke rekening LSM Puan Amal Hayati yang dipimpin istrinya, Sinta Nuriyah.

"Kalau ceramah Gus Dur sering dibayar 2 M!" kata asisten Gus Dur, Sulaiman, seraya tertawa. Orang bakal mengira "2 M" itu singkatan dua miliar. Namun Sulaiman buru-buru meluruskan. "2 M itu artinya: Makasih Mas!" katanya terbahak.

Gus Dur menilai, honor yang didapat dari sebuah majelis memang bukan barang haram. Tapi berapapun jumlah uangnya, itu merupakan penghargaan yang terlalu mewah untuk sebuah upaya mendidik umat. "Apalagi kalau pakai tarif, itu keterlaluan namanya," kata Gus Dur.

Gamal Ferdhi

KIAT-KIAT PEMASARAN DAKWAH

Oleh: Jalaluddin Rakhmat
Pakar Ilmu Komunikasi, Pendiri Yayasan Muthahari, Bandung

dok.WI/Witjak

SETIAP kali pulang haji atau umrah, aku singgah di toko kitab al-Ma'mun di Jeddah. Seorang haji mendekati aku dan memperkenalkan dirinya sebagai seorang pimpinan pesantren di Banten. Aku yakin ia memang kiai; karena seperti biasa ia dikawal beberapa orang santrinya. Karena aku merasa terhormat dikenal kiai, aku hadiahkan kepadanya kitab *Washiyat al-Nabi*.

Sambil tersenyum dan berterima kasih, ia berkata: "Kitab ini memang penting bagi mubaligh sebagai bahan utama tablig. Tapi itu dulu. Untuk menjadi mubaligh kontemporer buku ini sama sekali tidak ada gunanya. Kini kiai tidak perlu bisa baca kitab kuning. Pesantren harus mengganti pelajaran kitab kuning dengan pelajaran akting, termasuk pelajaran bernyanyi dan menari"

Kiai Banten itu benar. *Advanced capitalism* telah membawa ruang tablig dari masjid dan majlis taklim ke pasar. Agama telah berubah dari hubungan sakral dengan Yang Mahakasih menjadi hubungan produsen dengan konsumen. Agama bukan lagi nilai-nilai agung yang mencerahkan secara ruhaniah. Agama hanyalah salah satu komoditas yang dijualbelikan di pasar kapitalis. Menurut Fredric Jameson, *advanced capitalism* telah mereduksi semua tindakan manusia menjadi sejenis bentuk konsumsi. Inilah komodifikasi agama.

Sebagai komoditas yang dijual bebas di pasar kapitalis, agama harus dikemas untuk memenuhi selera pasar. Mubaligh, sebagai produsen komoditas Islam, harus memenuhi Empat P dalam pemasaran, a.k.a *marketing mix*. Anda mau menjadi mubaligh populer? Anda mau menjadi kiai yang dikejar oleh jutaan umat? Inilah saran ahli pemasaran.

*Pertama, product***.** Rancang pesan dakwah Anda untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Apa yang dibutuhkan oleh bangsa yang tidak henti-hentinya dirundung kemalangan? Apa yang diinginkan rakyat yang menanggung beban kehidupan yang makin lama makin berat? Jawabannya: pelipur lara. Karena itu, jangan mempersiapkan dakwah dengan membaca kitab kuning. Rujuklah buku-buku humor. Kumpulkan cerita-cerita yang ringan dan lucu. Kalau tidak sempat, kreatiflah. Anda ciptakan dongeng-dongeng. Jadikanlah imaginasi Anda sebagai sumber bahan dakwah Anda.

Tentu saja Anda juga harus memperhatikan *packaging* (pengemasan). Setelah pesan dakwah yang sederhana sudah Anda definisikan, rencanakan teknik membungkus barang yang menarik perhatian. Yang unik dari pemasaran dakwah ialah kenyataan bahwa produsen, yakni mubaligh, bisa sekaligus juga produk. Maka mubaligh perlu dibungkus dengan sejumlah aksesori. Kostum yang khas, prop yang istimewa, *jingle* yang "bergairah". Ketika berdakwah, Anda harus memusatkan perhatian pada upaya menyenangkan konsumen, menghibur mereka. Jika dakwah Anda disebut infotainment, perbesarlah proporsi hiburan di atas informasi, tainment di atas info.

Kedua, pricing. Dalam dakwah kontemporer, ini namanya memasang tarif. Anda harus punya berbagai manajer; manajer pemasaran, manajer produksi, dan manajer keuangan. Tugas manajer yang terakhir tidak boleh mencampuri apalagi mengaudit penerimaan Anda. Ia terutama sekali harus melakukan nego dengan pihak pengguna berkenaan dengan tarif Anda. Jangan pikirkan apakah menetapkan tarif untuk dakwah dibenarkan al-Qur'an dan hadis. Aku *kan* sudah bilang: rujukan Anda bukan lagi al-Qur'an dan Hadis. Rujukan Anda yang utama sekarang ini khusus untuk tarif adalah hasil rating para pemirsa televisi. Sebagai catatan tambahan, makin tinggi tarif Anda makin bermutu dakwah Anda, dan makin banyak penggemar Anda. Aneh tapi nyata.

Ketiga, promotion. Anda harus mengeluarkan biaya khusus untuk *advertising, sales promotion, personal selling, publicity* dan metode-metode lainnya untuk mempopularkan produk Anda. Yang sangat penting dalam promosi ialah membangun citra, *branding*. Supaya tidak terbentuk citra bahwa Anda mubaligh karbitan yang tidak mengerti agama, kisahkan bahwa Anda memperoleh ilmu *laduni* karena berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi.

Keempat, placement. Ini masalah distribusi produk. Anda harus bisa sampai kepada sasaran dakwah. Tidak ada tempat penjualan dakwah Anda yang lebih efektif dari media massa. Jalin kerjasama yang baik dengan media massa, terutama televisi. Kalau dahulu Anda berkata di depan jemaah tidak mau berdakwah di televisi, usahakan sekarang agar semua dakwah Anda disiarkan televisi.

Selamat berdakwah.

Semoga sukses.

Dr. H. Moeslim Abdurrahman
Direktur al-Maun Foundation.

Semua Tergantung PEMILIK MODAL

dok.WI/Witjak

TAYANGAN Islami yang marak di televisi, bukan semata-mata kepentingan syiar agama, tapi juga bisnis. Untuk mengetahui lebih dalam berikut wawancara M. Subhi Azhari dari the WAHID Institute dengan cendekiawan Muhammadiyah Dr. H. Moeslim Abdurrahman Direktur al-Maun Foundation.

Penilaian Anda mengenai tayangan-tayangan Islami di televisi?

Sedang terjadi pembentukan *pop culture* Islam. Bentuknya yang paling menarik adalah seperti di TV itu. Ada sinetron yang sangat *simple* dalam pengertian dan ide ceritanya. Misalnya, hantu, orang mati, dan orang kayak pelawak jadi ustadz dan sebagainya. Cerita seperti itu *kan* tidak baru, tapi sekarang cerita itu diangkat lagi. Ini semua kerjaan media untuk memenuhi selera budaya pop itu.

Bagaimana tanggapan Anda tentang tingginya minat pemirsa televisi akan program kontes dakwah?

Di sisi ini juga sedang terjadi pembentukan *pop culture* Islam. Pesan yang disampaikan bercorak sangat pop. Sebetulnya, dai-dai kecil itu suguhan tidak serius. Mungkin daripada mendengarkan ceramah Dr. M. Quraish Shihab yang *njlimet* dalam menggunakan *reference*. Ini menurut saya wilayah popnya. Wilayah yang disenangi dan gampang dipahami.

Orang mungkin jenuh, sehingga senang kalau ada anak kecil menasihati *audience*. Jadi selain mau dengerin apa tuntunannya juga tontonan anak kecil ceramah. Mungkin ada yang mengesankan, anak umur segitu *kok* bisa begini dan begitu.

Bagaimana materi yang disampaikan para dai kecil?

Anak-anak itu *kan niruin* omongan yang *ngajarin*. Yang *ngajarin* juga mengambil bagian-bagian atau episode-episode dakwah Islam yang biasanya ditampilkan dai-dai kondang.

Mereka hanya menjadi alat?

Kalau dilihat praktiknya, mereka itu seperti *video* rekaman atau kaset dari orang lain, atau gurunya. Itu bukan sesuatu yang dipikirkan atau yang ingin disampaikan anak itu dari pergulatan keberagamaannya. Itu lebih *performance* dari pada motivasi dakwahnya. *Performance* kan bisa menarik orang. Ini yang ditonjolkan.

Jadi anak-anak itu dijual kemasannya. Mereka itu seperti selebritis. Itu karena faktor *packaging* media. Dari segi kostum, *image* dan omongan, itu dipertimbangkan mana yang menarik dan bisa mendongkrak rating.

Dampaknya bagi mereka?

Menurut saya, anak umur segitu jangan dipaksa menjadi kaset, yang isi sebetulnya dari orang lain. Anak *kan* harus diberi hak untuk tumbuh sesuai umurnya. Kecuali kalau anaknya sangat jenius. Tapi jenius ini *kan* pembawaan, bukan dibikin-bikin. Sedang dai-dai kecil ini *kan* kayak pabrik. Sengaja didesain untuk memproduksi kaset-kaset. Saya *nggak* tega *ndengerin* mereka, walaupun kadang agak lucu. Mereka terlalu kecil untuk "diperalat."

Bagaimana penilaian Anda tentang kontes pendakwah agama?

Sekarang ini, jadinya dai itu bukan panggilan jiwa, tapi karir sebagai ladang nafkah. Itu yang saya kuatir. Padahal motivasi dai di dalam masyarakat Islam sebenarnya *ghirah*, bukan karir. Kalau karir begini, apa bedanya dengan penyanyi? Ini hanya kontes popularitas, bukan kontes yang menampilkan otak.

Apa penyebabnya?

Ini pengaruh perkembangan media. Media ini mengubah banyak hal. Di media Barat juga ada *evangelis* atau pendakwah agama yang mengemas agama secara komersial.

Jadi ada unsur komersilnya?

Tentu saja! Media itu bagian dari kapitalisme. Tidak mungkin media menggunakan seseorang atau sesuatu tanpa ada motif komersialisasi.

Kenapa agama yang dipakai?

Karena permintaan pasar begitu. Media melihat, prospek agama ini menarik. Lalu terjadilah *capitalizing* agama. Mereka mengemas agama menjadi paket-paket yang mendatangkan uang. Zaman kita berubah karena berubahnya media.

Program-program agama seperti ini sering disebut siraman ruhani. Sekarang lebih dari siraman ruhani, karena harus ada iklannya.

Adakah pengaruhnya terhadap peningkatan spiritualitas masyarakat?

Mungkin saja ada. Tapi itu tidak akan mencerahkan, karena semua dikemas tergantung kepentingan pemilik modal.

Teladan Toleransi Khazanah Klasik

Kitab kuning, sebutan bagi pustaka pemikiran ulama klasik, banyak menganjurkan toleransi. Kelompok pengusung kekerasan dalam Islam lahir diantaranya karena mengabaikan khazanah klasik ini.

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Kalimat demi kalimat kitab *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* dibacakan para santri yang bersila mengelilinginya. Ia menyimak dengan *khusyu'*. Kadang menyela untuk meluruskan bacaan atau memberi penjabaran terhadap kitab tafsir Abu Said al-Baidhawi (w. 691 H/1191 M) tersebut.

"Simaklah, karya al-Baidhawi ini. Dalam kitab kuning memang ada penjelasan mengenai batasan pembalasan yang boleh dilakukan apabila kekerasan menimpa seseorang. Saya sendiri menghindari terjadinya kekerasan, apalagi sampai pertumpahan darah," jelas KH. Abdurrahman Wahid di Masjid al-Munawwarah, Ciganjur, 01 Ramadhan 1427 H lalu.

Sebulan Ramadhan penuh, Gus Dur, begitu cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. M. Hasyim Asy'ari ini biasa dipanggil, *ngaji pasanan* (mengaji di bulan puasa, *red*.) kitab kuning bersama para santrinya di Pesantren Ciganjur, Jakarta Selatan.

Kitab kuning, adalah sebutan khusus untuk karya-karya ulama abad pertengahan yang biasa dikaji di pesantren-pesantren NU. Kitab ini membahas berbagai bidang, diantaranya tafsir, fiqh, aqidah, hadits, akhlak dan tasawuf.

Sebut saja *Tafsir al-Jalalain*, kitab tafsir paling terkenal di pesantren. Kitab ini menghargai kebebasan berkeyakinan. Misalnya, saat mengulas QS. Yunus ayat 99, tafsir yang ditulis Jalaluddin al-Mahalli (w. 864 H/1459 M) dan Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H/1505 M) menyebutkan, "Jangan (kau paksa) dengan apa yang Allah SWT sendiri tidak ingin melakukannya terhadap mereka!" Begitu juga dengan al-Baidhawi yang menafsirkan, "Sesungguhnya perbedaan keinginan/kehendak mustahil disamakan dengan jalan paksa."

Ketika menafsirkan ayat yang sama, Ibn Katsir (w. 774 H/1373 M) dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Adhim* menyatakan, "(Hidayah) itu bukan urusanmu, melainkan urusan Allah Swt." Nawawi al-Bantani dalam *al-Tafsir al-Munir* menyata-kan, "Kamu tidak punya kuasa merubah (keyakinan) seseorang. Iman tidak akan hadir pada jiwa seseorang, kecuali atas *iradah* (kemauan) dan *qudrah* (kekuasaan) Tuhan."

Contoh lain yaitu QS. al-Nahl ayat 125, "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk."

Al-Baidhawi menafsiri ayat ini dengan; "Tugasmu hanya menyampaikan (*al-balagh*) dan mendakwahkan (*al-da'wah*). Sedang petunjuk (*al-hidayah*) dan kesesatan (*al-dhalal*) itu bukan urusanmu. Allah Swt lebih tahu siapa yang tersesat dan siapa yang mendapat petunjuk. Allah SWT-lah yang (berhak) membalas mereka."

Ibn Katsir sendiri menyatakan, "Kamu jangan berhasrat mengarahkan orang yang tersesat (dari jalan-Nya). Itu bukan urusanmu. Tugasmu hanya menyampaikan dan *hisab* itu urusan Kami (Allah Swt)."

Kitab-kitab tafsir terlihat banyak mengapresiasi perbedaan dan toleran pada keyakinan kelompok lain. Bagaiman halnya dengan kitab fiqh, yang menurut Martin van Bruinessen dalam *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, sebagai acuan "primadona" dalam pesantren?

Menurut Pengasuh Ma'had Aly Sukorejo Situbondo Jawa Timur, KH. Afifuddin Muhajir, kitab fiqh juga sarat ajaran toleransi. "Berdasarkan bacaan saya, ajaran toleransi sering dijumpai di dalam fiqh," paparnya.

Kiai Afif lantas mencontohkan uraian *fardhu kifayah* dalam kitab *Fath al-Mu'in* karya Zain al-Din al-Malibari (w. 975 H/1567 M) dari Mazhab Syafii. Al-Malibari menguraikan, di antara *fardhu kifayah* adalah *kiswatu 'arin*, memberi pakaian pada orang yang telanjang, termasuk *kafir dzimmi*. "Jadi, kalau ada *kafir dzimmi* telanjang, *fardhu kifayah* bagi umat Islam untuk memberi mereka pakaian," ungkap ahli fiqh ini.

Dia pun menyontohkan, jika umat muslim dan *kafir dzimmi* bersama dalam sebuah perahu yang keberatan beban, sehingga terancam tenggelam, maka harus ada barang-barang di atas perahu yang dikorbankan. Ini demi keselamatan manusia, termasuk keselamatan *kafir dzimmi* itu. "Kitab fiqh banyak sekali bicara seperti itu," kata kiai kharismatik ini.

"Bahkan Umar bin Abd al-Aziz sendiri mengatakan, *ma yasurruni lau anna ummata muhammadin lam yakhtalifu*. Aku senang kalau umat Muhammad berbeda. Ada perbedaan, maka ada toleransi," jelas Kiai Afif.

Pengasuh Ponpes Nurul Islam Jember Jawa Timur, KH. Muhyiddin Abdus Shomad punya pendapat serupa. Menurutnya, di dalam kitab *Tanbigh al-Ghafilin* karya Abu al-Laits al-Samarkandi (w. 373 H/983 M) dijelaskan, umat Islam harus bersikap santun baik kepada orang muslim, Yahudi, Nashrani, maupun yang berkeyakinan lain.

Dijelaskan Kiai Muhyiddin, saat menafsirkan QS. Thaha ayat 44 yang artinya, "namun begitu, ucapkanlah dengan lemah lembut kepadanya (Fir'aun); mudah-mudahan dia mengingati, atau dia takut", al-Samarkandi menulis bahwa berkata pada Fir'aun saja harus santun dan lemah lembut, apalagi pada selainnya.

"Fir'aun itu tidak hanya kafir, tapi zalim. Kepada orang kafir dan zalim kita harus sopan dan santun, apalagi pada orang yang tidak sama agama dan mereka berbaikan dengan kita. Tentunya kita salah besar jika bersifat congkak dan tidak menghormati mereka," imbuh Kiai Muhyiddin.

Ulama klasik lainnya yang menghargai perbedaan keyakinan adalah Imam Yahya bin Sharaf al-Dimasyqi (w. 676 H/1278 M)." Menurut al-Dimasyqi dalam *Raudhah al-Thalibin* orang kafir tidak boleh diperangi, kecuali kalau mereka melakukan *hirabah* (pemberontakan) pada pemerintah Islam," jelas Pengasuh Pesantren An-Nur, Surabaya KH. Imam Ghazali Said.

Itu dari Mazhab Syafii. Dari Mazhab Hanafi, kata Kiai Imam Ghazali, ada kitab *al-Radd al-Mukhtar* yang terkenal dengan *Hasyiyah Ibn Abidin* karya Muhammad Amin ibn Abidin (w. 1252 H/1836 M). "Ibn Abidin sangat toleran dalam mengapresiasi hukum-hukum non-muslim, seperti asuransi," jelas Wakil Syuriah PCNU Surabaya ini.

Karena itu, Kiai Ghazali meyakinkan, kitab kuning secara keseluruhan lebih didominasi ajaran yang toleran. "Yang keras sangat sedikit. Jadi, bisa kita ambil kesimpul-an, pada umumnya fiqh klasik itu sangat toleran," papar master bidang metodologi pengajaran bahasa Arab dari Khourtoum International University, Sudan ini.

Pandangan-pandangan fiqh itu menjadi tata nilai *tawassuth* (moderat), *i'tidal* (keadilan), *tawazun* (berimbang) dan *tasamuh* (toleran) yang kemudian dianut mayoritas ulama Indonesia. "Tujuan para ulama kita dulu itu untuk melindungi semua warga negara yang tidak hanya muslim, tapi terdiri dari berbagai etnis dan agama," jelas KH. Imam Ghazali Said.

Kenyataan di atas seperti menepis temuan *Survey Nasional: Sikap dan Perilaku Kekerasan Keagamaan di Indonesia*, yang dilakukan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Juli 2006 silam. Salah satu pusat penelitian UIN Jakarta itu menemukan, ajaran kitab kuning berpotensi mendorong terjadinya kekerasan antar agama.

"Dalam kitab kuning ada istilah *heretic* atau sesat. Itu ada *kan*? Itu jelas mendorong kekerasan terhadap pemeluk agama lain," tegas Peneliti PPIM Jajang Jahroni.

Tapi Jajang buru-buru menampik anggapan, bahwa survey lembaganya itu menyimpulkan mayoritas kitab kuning mendorong kekerasan. "Sebetulnya kita tidak sedang meneliti kitab kuning, melainkan kekerasan atas nama agama," jelas Jajang.

Adanya tema fiqh yang agak kaku dalam merespon perbedaan keyakinan ini diakui KH. Muhyiddin Abdus Shomad. "Karena fiqh itu doktrinnya ke dalam. Jadi prinsipnya agak kaku. Dalam hal ini toleran, tapi dalam hal lain tidak toleran. Tapi saya kira tergantung siapa yang memahaminya. Gus Dur dan Gus Mus itu berpandangan toleran, karena menguasai kitab kuning. Mereka perlu kita teladani," jelas Ketua PCNU Jember ini.

Masih segudang teladan toleransi dari kalangan ulama tradisional. Menurut Pengasuh Wisma Santri Edi Mancoro Gedangan, Salatiga KH. Mahfudz Ridwan hal ini karena pengaruh kitab kuning yang sering dibaca di pesantren.

"Kitab semisal *Fath al-Mu'in*, *Fath al-Qarib* dan yang lain, kebanyakan ajarannya *kan tasamuh* (toleran, *red.*)" kata mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ini (Lihat: *Guru Tasamuh Pengayom Semesta*).

Dari sebab itu, Kiai Afif menilai kebodohan adalah penyebab utama kaum muslim mengumbar kekerasan terhadap orang yang berbeda keyakinan. "Itu karena *ngaji*-nya *nggak* tuntas. Semakin dalam ilmu agama seseorang, saya kira akan semakin toleran," tegasnya.

Pandangan Kiai Afif itu seperti diamini David Dakake, Peneliti Islam pada Universitas George Washington, Amerika Serikat. Dalam buku *Islam, Fundamentalism and the Betrayal of Tradition (2004)*. Dakake menulis, berkembangnya kekerasan dan fundamentalisme Islam justru lahir dari modernisme Islam yang mengabaikan *khazanah* intelektual klasik dan tradisi.

Nurul H. Maarif, Abd Moqsith Ghazali

dok.pribadi

TOLERANSI DALAM KITAB KUNING

Oleh: Dr. Abd A'la
Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya

SALAH satu karakteristik kitab keilmuan Islam klasik, sering disebut kitab kuning, terletak pada kemampuannya berdialog dengan zaman yang sangat panjang dan lokal beragam. *Literary works* ini hingga sekarang tetap menjadi salah satu rujukan utama pesantren, bukan hanya dalam keilmuan, tapi juga dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sosial dan lain sebagainya. Kenyataan membuktikan, terlepas dari kelemahan yang ada, *bahtsul masail* yang dikembangkan pesantren dan lembaga lain sealiran yang menjadikan kitab kuning sebagai pijakannya sampai derajat tertentu mampu memberikan tawaran cukup mencerahkan bagi kehidupan dan kenyataan konkret hingga saat ini.

Kemampuan kitab kuning berdialog dengan beragam tempat dan rentangan zaman panjang yang dilalui, tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai intrinsik yang dikandungnya, yang merepresentasikan moralitas luhur yang menjadi kebutuhan perennial kehidupan umat manusia, termasuk umat Islam, dari zaman ke zaman. Di antara nilai-nilai kental yang mewarnai kitab kuning adalah toleransi, inklusivitas, dan sejenisnya.

Core values tersebut memang tidak eksplisit menggunakan kata toleransi dan sejenisnya. Untuk melacak toleransi dan moralitas luhur lainnya, kita perlu membacanya secara utuh dari berbagai dimensi, dari keragaman yang melingkupi kesejarahan kitab kuning hingga interdependensi satu disiplin keilmuan dengan disiplin lain. Aspek pertama dapat dilacak dari pluralitas pandangan ulama, bukan hanya antar mazhab, tapi juga dalam satu mazhab. Dalam mazhab fiqh Syafiiyah dan teologi Asy'ariyah sebagai anutan umumnya pesantren, misalnya, perbedaan pendapat antara satu ulama dan ulama lain mengenai satu persoalan merupakan hal sangat lumrah. Bahkan bagi ulama kitab kuning (nantinya diikuti ulama pesantren), perubahan pendapat sama sekali bukan hal tabu.

Sedangkan interdependensi antar disiplin keilmuan direpresentasikan dalam bentuk fiqh sufistik yang nyaris menjadi satu kesatuan entitas yang sulit dipisahkan. Fiqh yang bernuansa legal formalistik di satu pihak, dan tasawuf dengan watak inklusif dan toleran pada pihak lain, merupakan dua sisi dari satu mata uang yang tidak bisa diambil salah satunya, dan ditinggalkan yang lain. Dalam tataran itu, *Ihya' Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazali bisa dijadikan satu contoh keberkelindanan dua disiplin keilmuan dasar Islam tersebut. Karena itu, pembacaan kitab kuning perlu didekati dalam pola dan semangat seperti itu. Artinya, membaca kitab-kitab fiqh semata tanpa dibarengi pengkayaan bacaan tasawuf, akan membiaskan semangat dan makna kitab kuning.

Lebih jauh lagi, kesejarahan kitab kuning menunjukkan, keberadaan khazanah intelektual ini merupakan hasil dialog dengan (dan produk) zamannya. Kitab kuning merupakan upaya kontektualisasi nilai dan ajaran Islam ke dalam kehidupan konkret yang prosesnya penuh tawar-menawar dengan realitas yang mengitarinya. Adanya pendapat baru Imam al-Syafii yang berbeda dengan pendapatnya yang lama, merupakan secuil contoh yang sama sekali tidak dapat diabaikan. Semua itu muncul karena nilai-nilai utama yang terus membayanginya adalah toleransi, kerendah-hatian dan nilai-nilai luhur lain.

Keberkelindanan fiqh dengan tasawuf serta pengembangan suasana dialogis dan kontekstualisasinya dengan realitas, berimplikasi pada pengukuhan dan komitmen kitab kuning atas signifikansi pengembangan toleransi dalam hampir aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antar umat beragama. Konsep *dzimmi* di tengah zaman dan kondisi yang saat itu didominasi pandangan prejudistik dan bahkan kekerasan dari penganut suatu agama terhadap penganut agama lain, seutuhnya berada dalam kerangka nilai toleransi dan inklusif yang untuk ukuran zamannya benar-benar bervisi pencerahan. Dari waktu ke waktu, pesantren dan lembaga lain yang sealiran mengembangkan dunia keilmuan dan praksis konkret untuk merespons kehidupan dalam kerangka pembacaan semacam itu. Pesantren membaca teks-teks kitab kuning dengan pendekatan yang jauh dari literalisme, dan memaknainya secara kontekstual sesuai perkembangan zaman. Pada gilirannya, toleransi, moderasi, dan inklusivitas merupakan watak kental yang bukan hanya mewarnai, tapi sekaligus intrinsik dengan keberagamaan dunia pesantren.

dok.WI/Witjak

dok.WI/Riyansyah

KH. Sholeh Bahruddin KH. Mahfudz Ridwan

KH. SHOLEH BAHRUDDIN DAN KH. MAHFUDZ RIDWAN

GURU TASAMUH PENGAYOM SEMESTA

LEKAT dalam ingatan KH. Sholeh Bahruddin ketika gurunya, KH. Munawwir dari Tegalarum, Kertosono, Nganjuk, menasehatinya. Dia meminta Sholeh muda mengalah pada adik-adiknya dengan mendirikan pesantren sendiri. *"Ngalah iku barokah* (mengalah itu dapat barokah, *red.*)!" pesan Kiai Munawwir.

Istilah *ngalah* oleh Kiai Sholeh dijadikan nama pesantren yang didirikannya pada 1985 M. Pondok Ngalah, pesantren salaf yang terletak di Dusun Pandean, Desa Sengonagung, Purwosari, Pasuruan, kini telah berkembang menjadi Yayasan Daarut Taqwa PP Ngalah yang memiliki berbagai lembaga pendidikan.

Pendidikan non-formal mulai *shifr* (setingkat TK, *red.*) hingga *mu'allimin* (setingkat sekolah guru, *red.*). Sedang pendidikan formal, mulai Ibtidaiyah sampai Perguruan Tinggi, yaitu Universitas Yudharta yang berdiri pada 2002. Santrinya lebih dari 10.000 orang.

"Banyak non-muslim belajar di Universitas Yudharta, meski kampus ini di bawah naungan pesantren. Bahkan, ada dosen non-muslim masuk dalam naungan Yayasan Daarut Taqwa," kata Kiai Sholeh kepada Riyansyah, kontributor the WAHID Institute di Jawa Timur.

Mustasyar Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan ini berangan-angan, kampusnya menjadi pusat pengembangan komunitas dari latar belakang muslim dan non-muslim. "Ini sesuai dengan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*," katanya.

Kebesaran Kiai Sholeh dan pesantrennya tak lepas dari teladan ayah yang juga gurunya, KH. Mohammad Bahruddin Kalam, pengasuh PP Darut Taqwa Carat, Gempol, Pasuruan. Satu kisah keteladanan yang diajarkan kepadanya, adalah bagaimana Kiai Bahruddin melindungi kelompok minoritas.

Sikap ayahnya itu diteruskan Kiai Sholeh, melalui dialog dengan pemuka-pemuka agama non-muslim. Namun itikad baiknya tak luput dari kritik, bahkan kecaman yang dilancarkan kelompok Islam garis keras.

Menanggapi hal itu, pria kelahiran Pasuruan 09 Mei 1953 ini, mengiaskan, "Kiai *kok* kumpul kiai. Ya sama dengan mur ketemu mur. Yang baik itu *kan* mur ketemu baut. Buat apa? Ya, buat mengikat NKRI, biar tidak *coplok* (bercerai berai, *red.*)."

Murid KH. Muslih, mursyid Tarekat Naqsabandiyyah dari Pesantren Mranggen, Jawa Tengah ini punya pandangan menarik tentang hukum berkawan dengan kaum muslim dan non-muslim, termasuk doa bersama.

Padahal yang membolehkan juga banyak, kata Kiai Sholeh seraya membacakan QS. al-Mumtahanah ayat 8: *"La yanhakum Allah 'an alladzina lam yuqaatilukum fi al-din wa lam yukhrijukum min diyarikum 'an tabarruhum wa tuqsithu ilaihim. Inna Allah yuhibb al-muqsithin."* (Allah tiada melarang kamu untuk berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil).

Kiai Sholeh juga memaparkan beberapa referensi kitab kuning. Syaikh Zakaria al Anshori (926H/ 1520M) dalam *Hasyiyah al-Jamal* disebutkan, *jawaz al-ta'min bal nadabahu idzaa da'a linafsihi bi al-hidayah walana bi al-nashr matsalan* (diperbolehkan mengamini doa, bahkan dianjurkan berdoa semisal untuk memohon hidayah dan pertolongan). Ia juga merujuk kepada *al-Tafsir al-Munir* karya Muhammad Nawawi al-Bantani (1314H/ 1879M); berhubungan baik di dunia sebatas urusan yang nyata, maka hal itu tidak dilarang.

"Istilahnya, walaupun mobil itu diciptakan orang Jepang, kalau bisa dipakai untuk jamaah manakiban, ya tetep mendapatkan manfaat, *kan*?" seloroh Kiai Sholeh.

Seperti juga Kiai Sholeh, berkawan dengan non-muslim bagi KH. Mahfudz Ridwan adalah tuntunan Rasulullah SAW. "Itu ada dalam *sirah nabawiyyah* (sejarah hidup Nabi Muhammad Saw). Beliau hidup di tengah orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Beliau mengemban amanat sebagai pelindung," kata pengasuh Wisma Santri Edi Mancoro Gedangan, Salatiga, Jawa Tengah itu kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Sebab itu, Kiai Mahfudz mendirikan Forum Lintas Iman Gedangan. Forum yang didirikan bersama pihak gereja dan Universitas Satya Wacana Salatiga ini, adalah *crisis center* bagi korban tragedi kekerasan Mei '98 di Jawa Tengah.

Kini, untuk mengatasi problem di tengah masyarakat yang terkait hubungan antar agama, forum itu kerap menggelar dialog lintas iman di pesantrennya. "Ini seperti tugas yang dijalankan Rasulullah SAW. Terhadap agama apapun kita harus di tengah-tengahnya," sambungnya.

Dikatakan Kiai Mahfudz, sikap toleran itu juga terlihat pada ulama-ulama tradisional di Indonesia. "Salah satu yang mendorong sikap ini, karena mereka sering membaca kitab kuning. Kitab semisal *Fath al-Mu'in*, *Fath al-Qarib* dan yang lain, semua itu kebanyakan ajarannya *kan tasamuh* (toleran, *red.*)," tegas mantan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (NU) Surakarta Jawa Tengah ini.

Atas dasar itu, ia menolak jika pesantren dikaitkan dengan terorisme. "Tidak ada satupun pesantren NU yang menjadi sarang teroris. Kalau, di luar NU saya tidak tahu," terangnya.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

Tasawuf Tenda Besar Kedamaian

Konflik dan kekerasan akibat mengutamakan simbol agama makin kerap terjadi. Ajaran tasawuf diyakini dapat menjadi solusi.

Syahdan, menjelang pemakaman Jalaluddin Rumi, tampak seorang Kristen menangis tersedu. Dia mencurahkan perihal kesedihannya, "Kami menghormati Rumi seperti Musa, Daud, dan Yesus zaman ini. Kami semua adalah para pengikut dan muridnya."

Semasa hidup, Rumi begitu mengasihi banyak orang dari berbagai latar belakang, sehingga siapapun berduka atas kematiannya pada 1273 M.

Kehidupan tokoh besar tasawuf ini, kini diteladani banyak pemimpin tarekat. Salah satunya adalah Syeikh Hisyam Kabbani. Wakil mursyid Tarekat Naqsyabandi Haqqani ini, sebagaimana Rumi, mengutamakan kedamaian bagi umat manusia.

"Tasawuf menganjurkan agar antar umat manusia saling bekerja sama. Kami menjembatani semua kebudayaan. Dan kami tidak pernah berjuang untuk kekuasaan," tegas Syeikh Hisyam di depan peserta *Konferensi Program Keamanan Internasional* yang dihelat the Nixon Center di Washington akhir Oktober 2003.

Kedamaian dan kasih sayang yang diajarkan para pengikut tasawuf adalah buah dari ketundukan mereka kepada Allah. "Apa yang setiap manusia sandang sudah dituliskan Allah. Karenanya kita tidak boleh menyakiti orang lain," jelas Syeikh Hisyam, seperti ditulis lembaga besutan mantan Presiden AS Richard Nixon itu dalam laporan berjudul *Understanding Sufism and its Potential Role in US Policy*.

Tasawuf laksana tenda besar yang bisa memayungi para musafir yang datang dari berbagai penjuru dunia dan berbagai latar belakang. Karenanya, pengamal tasawuf bisa berdampingan mesra dengan siapapun.

"Di sini ada dari Kristen, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Dengan tasawuf, Tuhan selalu hadir bersama kita," kata Ketua PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, saat memberi sambutan dalam peluncuran bukunya, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial;*

Syeikh Hisyam Kabbani Membaiat Calon Jamaah Tarekat Naqsyabandi Haqqani Indonesia
dok. Yayasan Haqqani Indonesia

Mengedepankan Islam sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi, di Jakarta, awal Desember 2006 lalu.

Melalui tasawuf ini, ajaran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* tampak nyata. "Islam itu mengajarkan keterbukaan," kata Mursyid Tarekat Naqsyabandiyyah-Khalidiyyah dari Pesantren Giri Kusumo Semarang KH. Munif Muhammad Zuhri, saat dihubungi the WAHID Institute.

Pada perkembangannya, ajaran tasawuf ini terlembagakan dalam bentuk tarekat. Makanya tidak aneh jika banyak tarekat bisa menerima keanggotaan dari non-muslim. Sebut saja, misalnya, Tarekat al-Ahadiyyah, yang mengajarkan pemikiran-pemikiran Syeikh al-Akbar Muhyiddin Ibn 'Araby.

"Kita mengajak mereka pada tauhid, pengesaan Tuhan. Dan dari awal, tarekat ini tidak bermaksud menjadikan orang lain pindah agama, tapi bagaimana mereka mengenal Tuhan dan mempersilahkan mereka menjalankan agamanya masing-masing," jelas Mursyid Tarekat al-Ahadiyyah, KH. Shohibul Faroji (lihat: *Tauhid untuk Perdamaian Dunia*).

KH. Faroji berharap, tarekat yang dipimpinnya bisa menjadi solusi konflik antar agama dan aliran. "Saya ingin al-Ahadiyyah menjadi salah satu rumah ruhani, tempat semua umat beragama berteduh dan butuh kenyamanan," ujar penghafal al-Qur'an ini.

Mursyid Tarekat Naqsyabandiyyah yang bermarkas di bilangan Jakarta Timur, KH. Ali Abdurrahman Nabawi, juga terbuka menerima murid non-muslim.

"Yang saya tahu, ada murid Kristen dan Konghucu. Itu *no problem*. Mereka yang datang sendiri *kok*," kata AS Damanhuri, salah seorang murid tarekat ini.

Di lain waktu, tambahnya, sang mursyid diminta berdoa di rumah seorang non-muslim. "Setelah minta petunjuk Allah SWT, beliau pun bersedia memenuhi permintaan itu," imbuhnya.

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Abdul Munir Mulkhan menjelaskan keterbukaan itu karena tarekat yang merupakan alat menyampaikan ajaran tasawuf, banyak bersumber pada pandangan yang *haqiqiyyah* (substantif, *red*.).

"Tarekat yang dikembangkan melalui perspektif substantif itu toleran. Jadi isi seluruh ajaran tasawuf itu toleran," ujar penulis buku-buku tasawuf yang sedang mengampanyekan slogan 'bersufi tanpa tarekat' ini.

Sederet nama pengamal tarekat diungkap Munir. "Gus Dur dan AR Fakhruddin, walaupun saya tidak tahu tarekatnya apa, mereka itu sufi dan toleran. Pendiri Muhammadiyah, KH. Ahmad

Tarekat al-Ahadiyyah

TAUHID UNTUK PERDAMAIAN DUNIA

SALAH satu tarekat yang berkembang di Indonesia adalah Tarekat al-Ahadiyyah. Tarekat yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Syeikh al-Akbar Muhyiddin Ibn Araby ini, terbuka bagi murid non-muslim.

"Kita mengajak mereka pada tauhid, pengesaan Tuhan. Dan dari awal, tarekat ini tidak bermaksud menjadikan orang lain pindah agama, tapi bagaimana mereka mengenal Tuhan dan mempersilahkan mereka menjalankan agamanya masing-masing," jelas Mursyid Tarekat al-Ahadiyyah, KH. Shohibul Faroji saat ditemui Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute di rumah sederhananya.

Dikatakannya, Allah SWT menyuruh kita untuk toleran pada agama lain. "Kafir dalam paradigma Ibn 'Araby, itu ketika hati seseorang menutup diri dari kebenaran Tuhan," terang mahasiswa program master di ICAS Paramadina ini.

Di dalam tarekat ini, ujar KH. Faroji, para murid memang diajari pemikiran Ibn Araby, melalui karya-karyanya; *al-Futuhat al-Makkiyyah, Fushush al-Hikam*, juga *Tarjuman al-Asywaq*.

Kegiatan tarekat ini berpusat di bilangan Kebayoran Jakarta dan Pesantren Mabdaul Ma'arif Jember Jawa Timur, hingga merambah ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Selain di Indonesia, tarekat ini berkembang di Libya, Mesir, Turki, Spanyol dan Australia.

Semua aspek tasawuf, yaitu keilmuan, ritual, dan akhlak dipadukan sang mursyid. Tarekat yang namanya diambil oleh Shadr al-Din al-Qunawi dari muqaddimah kitab *Fushush al-Hikam*, ini juga mengkaji semua kitab suci. "Kami melihatnya dalam perspektif tauhid, bukan untuk mencari kelemahannya," kata pria yang mendapat ijazah kemursyidan dari kakeknya, Syeikh Bahruddin al-Robbani ini.

Para muridnya dibebaskan untuk belajar di manapun dan beraktifitas sesuai profesi masing-masing. "Masalah duniawi, kita boleh memilikinya, tapi jangan sampai ada kemelekatan," pesannya.

Yang juga menarik, pengangkatan mursyid tarekat ini melalui perpaduan metode *imamah* (penunjukan, *red*.) dan *khilafah* (musyawarah, *red*.), dengan prinsip utama calon mursyid harus *shiddiq* (jujur dan membenarkan Allah), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (bisa menyampaikan kebenaran) dan *fathonah* (cerdas ruhani).

"Saat ini kita mengalami krisis tauhid dan akhlak. Maka, peran al-Ahadiyyah adalah memperbaiki umat ini agar memiliki tauhid yang benar dan akhlak yang mulia," ujar KH. Faroji.

Tarekat ini memiliki kurikulum sangat rapi. Bahkan ada target yang harus dicapai. Misalnya, untuk 2007-2010, tarekat ini mengusung visi *Menebarkan Pencerahan Ruhani Menuju Tauhid dan Ridha Allah, Menebarkan Kasih Sayang dan Perdamaian Dunia*.

"Tauhid itu universal. Dengan visi tauhid ini, kita ingin mencari benang merah berbagai macam agama dan aliran. Karenanya, kita tidak dibenarkan membicarakan masalah *khilafiyyah* (perbedaan, *red*.), kecuali sebatas sebagai wacana," katanya beralasan.

Ia berharap, tarekat yang dipimpinnya bisa menjadi solusi konflik antar agama dan aliran. "Saya ingin al-Ahadiyyah menjadi salah satu rumah ruhani, tempat semua umat beragama berteduh dan butuh kenyamanan. Dan untuk jangka panjang, kita ingin mempersiapkan para pemimpin yang bertakwa, punya wawasan luas, dan menghargai perbedaan," ujar penghafal al-Qur'an ini.

Nurul H. Maarif

Dahlan, itu sufi. Itu tolerannya luar biasa. Beliau bekerja di lingkungan pusat kejawen dan bergaul dengan orang Kristen," imbuh cendekiawan Muhammadiyah ini.

Penilaian sama dinyatakan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kautsar Azhari Noer, bahwa umumnya tarekat itu toleran pada agama lain. "Tapi kita tidak bisa menggeneralisir, karena aliran tarekat itu bermacam-macam. Itupun sangat tergantung gurunya. Ada guru yang sangat toleran dan ada yang kurang," katanya. (lihat: *Isi Lebih Toleran Ketimbang Kulit*).

Tarekat yang toleran, biasanya karena menganut doktrin *wahdat al-wujud* Ibn 'Araby, yang sangat menekankan aspek esoterik. "Naqsyabandiyyah, Syatariyyah, atau yang lain penganut paham ini, mereka toleran, sehingga non-muslim pun bisa masuk ke sana," kata penulis buku *Ibn 'Araby; Wahdat al-Wujud dalam Perdebatan* ini.

"Tarekat Maulawiyyah anggotanya juga banyak dari non-muslim. Malah saya punya kawan dari Jerman. Dia mengaku ikut Tarekat Naqsyabandiyyah di Eropa. Menariknya, dia agamanya Katolik dan dia tidak masuk Islam," imbuh Kautsar.

Kearifan seperti ini, ujar sufi India Hazrat Inayat Khan, tidak hanya dimiliki oleh agama atau ras tertentu, melainkan oleh semua agama dan ras. "Siapapun yang memperoleh kearifan adalah seorang sufi, karena tasawuf itu berarti kearifan," ujarnya.

Karenanya benar apa yang dikatakan sufi dari Sri Lanka MR Bawa Muhayyaddin. Menurutnya, semua orang yang beriman pada Tuhan harus bersatu. Dan, mereka yang mempunyai kesadaran, keadilan, kebijakan dan kasih sayang di dalam hati, harus membawa perdamaian dan persamaan untuk masyarakat dunia.

"Jika kita benar-benar orang yang beriman, maka kita tidak akan memandang perbedaan orang lain dari diri kita sendiri. Kita akan memandangnya sebagai satu kesatuan. Kita akan memandang Allah, satu ras manusia, dan satu keadilan untuk semua orang," kata Muhayyaddin dalam buku *Islam & World Peace; Explanation of A Sufi*.

Atas dasar ini, Abdul Munir Mulkhan yakin, paradigma sufistik bisa menjadi solusi konflik, minimal di negeri ini. "Orang Islam bisa lebih cair atau lebih toleran, ketika mereka menaruh perhatian terhadap pandangan sufistik," yakinnya.

Sisi batiniah ini menjadi titik temu agama-agama, yang berujung pada solusi bagi terciptanya perdamaian dunia.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok. Majalah Al-Kisah

Habib Muhammad Luthfi bin Ali dan alat musiknya

HABIB MUHAMMAD LUTHFI BIN ALI

MURSYID MUSISI PENGAWAL TAREKAT

TEPAT pukul 02.30 dini hari, sebuah mobil memasuki pelataran rumah dua tingkat itu. Seorang pria dengan surban, peci dan kaos oblong serba putih turun dari mobil. Melihat kehadirannya, ratusan jamaah dari berbagai daerah yang telah menunggu berjam-jam, sontak berkerubut mencium tangannya.

Tak lama berselang, santri-santrinya terlihat sibuk menurunkan barang bawaan dari bagasi mobil itu. Empat keyboard dan sebuah gitar pun berpindah ke dalam rumah. Itulah gambaran kecil kehidupan Habib Muhammad Luthfi bin Ali bin Hisyam bin Yahya, yang karib disapa Habib Luthfi.

Ketua Umum Jam'iyyah Ahli ath-Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah - organisasi tarekat-tarekat yang diakui NU ini, menerangkan saat ini di Indonesia ada 41 tarekat *mu'tabarah* (diakui, *red*.). "Tapi cabangnya banyak," jelas Habib Luthfi dalam bukunya *Nasihat Spiritual, Mengenal Tarekat Ala Habib Luthfi*.

Penegasan *mu'tabarah* atau tidaknya sebuah tarekat, jelasnya, *pertama*, dilihat dari ajarannya. "Semua yang ada di dalamnya itu, tidak melanggar isi al-Qur'an dan Hadits," kata Habib Luthfi.

Kedua, dari ketentuan wiridnya. "Tergolong *ma'tsur* (dari Rasulullah, *red*.) atau tidak," jelasnya. *Ketiga*, memiliki jalur sanad yang jelas. "Mulai dari ulama, para wali, sahabat, Nabi SAW, hingga bermuara pada Allah SWT," jelas Habib Luthfi.

Walau sebagai pemimpin tarekat, ia tak segan mendengarkan dan memainkan musik. Ke manapun pergi, ayah lima putera ini selalu menyertakan alat-alat musik. Bahkan ia telah menciptakan puluhan lagu instrumentalia.

Mursyid Tarekat Syadziliyyah asal Pekalongan Jawa Tengah ini, memang mencintai musik sejak belia. Dari musik klasik hingga kontemporer. Orkestra gambus Umi Kulsum, sang diva Mesir hingga karya instrumentalis kontemporer asal Yunani, Yanni, akrab di telinganya. "Musik adalah musik. Keindahan adalah keindahan," ujarnya suatu ketika.

Karenanya, ia fasih berbicara musik, bahkan hingga filosofinya. "Bagi saya, apa pun di dunia ini yang menimbulkan bunyi, misalnya desau angin yang menerpa pepohonan atau gemerisik daun-daun yang rontok dari rantingnya, adalah suatu keindahan," katanya.

Mungkin dengan musik, ia ingin mengajak umatnya kian dekat pada Allah SWT.

Nurul H. Maarif

dok.WI/Witjak

Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ISI LEBIH TOLERAN KETIMBANG KULIT

AJARAN yang menekankan isi akan lebih toleran, ketimbang yang mengedepankan kulit atau formalitas. Berikut pernyataan Guru Besar UIN Jakarta Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer kepada Nurul H. Maarif dan Widhi Cahya dari the WAHID Institute.

Bagaimana pandangan tarekat di Indonesia terhadap perbedaan agama?

Umumnya toleran. Tapi kita tidak bisa menggeneralisir, karena aliran tarekat itu bermacam-macam. Itupun sangat tergantung gurunya. Ada guru yang sangat toleran dan ada yang kurang.

Mengapa tarekat bisa toleran?

Umumnya yang toleran itu menganut doktrin *wahdat al-wujud* Ibn 'Araby. Doktrin ini sangat menekankan aspek *esoteric* dan tidak peduli bentuk. Bukan berarti bentuk itu tidak ada. Bentuk itu otomatis. Naqsyabandiyyah, Syatariyyah atau yang lain, yang menganut paham ini, mereka toleran.

Mereka tidak pernah mempersoalkan agama formal?

Saya tidak berani mengatakan seperti itu. Yang jelas, mereka toleran pada non-muslim. Sehingga non-muslim pun bisa masuk kesana. Ini banyak terjadi di Barat, kendati tidak semua. Di sana, ada beberapa tarekat yang mempersilahkan non-muslim ikut berzikir atau berdoa bersama, tanpa menanyakan agamanya. Misalnya tarekat Maulawiyyah. Tarekat ini anggotanya banyak dari non-muslim.

Alasannya kenapa?

Saya kira karena kelompok itu lebih menekankan esensi atau *esoteric*. Bentuk apa saja, Yahudi, Islam, Kristen, dan sebagainya, tapi *toh* esensinya sama. Orang bertauhid, itu tunduk pada Tuhan dan selalu merasakan kehadiran-Nya. Ini esensi yang perlu ditekankan.

Dengan tasawuf Anda yakin konflik antar agama bisa diredam?

Bisa! Bisa! Cuma tidak semua orang bisa belajar tasawuf. Dan umumnya, orang berantem itu karena simbol. Abdul Karim Soroush menyatakan, Islam itu ada dua. Islam kebenaran dan Islam identitas. Islam kebenaran itu yang didakwahkan para nabi. Itu membawa kebenaran, bukan identitas. Kalau kita membawa Islam sebagai identitas, itu akan lebih mudah menyulut konflik antara sesama muslim atau dengan non-muslim. Masing-masing akan menonjolkan identitas.

Siapa tokoh tarekat di Indonesia yang toleran?

Kalau zaman dulu, itu banyak. Ada Abdus Shamad al-Palimbangi, Syamsuddin al-Sumatrani, dan banyak lagi. Pokoknya kalau yang diutamakan isi, itu lebih toleran ketimbang yang kulit. Hanya saja, biasanya orang lebih setia pada kulit ketimbang isi. Akibatnya, mudah membunuh orang atas nama agama.

Bagaimana dengan banyak munculnya lembaga spiritual modern?

Tasawuf itu tidak harus punya lembaga. Intinya *kan* mendekatkan diri sedekatnya pada Allah. Tapi memang, orang akan lebih mudah melalui guru atau organisasi ketimbang belajar sendiri. Ibn 'Araby sendri punya guru sampai 70 orang lebih. Bahkan gurunya ada yang perempuan. Orang yang bisa menjalaninya tanpa guru itu punya bakat yang luar biasa.

Anda pernah menulis, lembaga spiritual modern cenderung seperti lembaga bisnis.

Memang bisnis itu *nggak* haram. Itu terhormat. Sufi itu banyak yang pedagang. Tapi saya mengritik itu karena ada kecenderungan pembisnisan tasawuf. Tapi saya tidak pernah menuding lembaga atau orang yang membisniskan tasawuf. Itu kritik untuk hati-hati saja.

Anda pernah belajar tasawuf di Beshara, Skotlandia. Bagaimana lembaga ini?

Beshara ini tidak ada silsilahnya. Ini pendidikan *esoteric* saja. Di situ bentuk tidak diutamakan. Pendidikan spiritual yang tidak ada bai'at dan tidak ada mursyid. Ini universal untuk siapa saja. Yahudi, Islam, Kristen, sekuler, atau apa saja yang penting intinya. Jadi arahnya *man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah*. Di sana, saya punya kawan dari Jerman. Dia mengaku ikut Tarekat Naqsyabandiyyah di Eropa. Menariknya, dia agamanya Katolik dan dia tidak masuk Islam.

Amalannya sama dengan yang muslim?

Sama saja!

Kitab apa yang diajarkan di sana?

Fushush al Hikam karya Syeikh al-Akbar Muhyiddin Ibn 'Araby. Disamping itu juga dipelajari karya Jalaluddin Rumi, *Tao* dan *Bhagavad-Gita*. Orang kalau memahami Ibn 'Araby akan mudah memahami *Upanishad* dan *Tao*. Itu ketemu!

Harapan Anda?

Yang terpenting menghormati perbedaan. Kadang kita lupa, bahwa kita harus menghormati perbedaan.

Suplemen the WAHID Institute Edisi III / Majalah Tempo / 25 Desember 2006

Hotel J.W Mariot dibom teroris 05 Agustus 2003

HIJRAH DARI JALUR KEKERASAN

Kekerasan atas nama agama tak kunjung reda. Namun banyak fakta, pelaku kekerasan itu kini hijrah menjadi penyeru perdamaian dan Islam toleran. Bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia Arab.

Sepuluh menit lagi hari memasuki 02 Oktober 1990. Tapi Fauzi, penghuni sel nomor 11 LP Cipinang, masih tak dapat mengatupkan mata. Gara-gara Maghrib tadi ada pengumuman, salah seorang narapidana politik (napol) eks PKI akan dieksekusi. Fauzi bukan napol PKI. Ia terbelit kasus Jamaah Warsidi Lampung yang hendak mendirikan Darul Islam Indonesia (DII) atau Negara Islam Indonesia (NII). Tapi ia merasa malaikat maut sedang mengintai di bloknya.

Tepat di tengah malam buta Fauzi terkejut. Sesosok dari kegelapan datang menghampiri selnya. Dia, Asep Suryaman penghuni sel nomor 4 anggota Biro Chusus (BC) PKI yang akan menghadapi regu tembak. Padahal dia sudah mendekam 27 tahun di penjara.

Sejurus kemudian Asep berpamitan. Diulurkan tangannya melalui sela-sela jeruji besi. "Bung, kalau saya ada kesalahan dalam pergaulan, saya minta maaf," kata Asep dengan suara tercekat. Fauzi menyambut dengan perasan tak menentu.

"Saya sudah siap menghadapi kematian," sambung Asep. "Kenapa Anda begitu tegar, Pak?" tanya Fauzi . "Saya membawa ini," jawab Asep sambil menunjukan buku Surat Yasin kecil di kantongnya.

Fauzi terhenyak. Ia mengaku salah menilai orang-orang ini sebelumnya. Bagi aktivis DII/ NII, napol eks PKI tidak hanya kafir, bahkan *mulhid* (atheis). Tapi di penjara itu, Tuhan membukakan mata Fauzi. Mereka tidak seperti yang digambarkan oleh kelompoknya selama ini. Ternyata napol-napol eks PKI itu rajin shalat. Sejak peristiwa itu, Fauzi mulai menguliti doktrin-doktrin DII/NII, terutama ideologi pengafiran dan cara kekerasan.

Fauzi mengungkapkan salah satu ayat suci al-Qur'an yang sering didengungkan dalam doktrin jihad kelompok NII atau al-Jamaah al-Islamiyah (JI) adalah Surat al-Taubah ayat 23-24.

"Mereka juga mengambil pembenaran dari kisah pengkhianatan putera Nabi Nuh, dan istri Nabi Luth," kata Fauzi kepada M. Guntur Romli, kontributor the WAHID Institute.

Dalil-dalil itu, kata Fauzi, dijadikan dasar agar aktivis jamaah NII dan JI lebih mengutamakan jamaah dan Amir atau Imamnya ketimbang orang tua, istri, anak dan kerabatnya.

"Kalau kerabatnya itu bukan NII, maka mereka dianggap sebagai *laisa minna* bukan golongan kami. Ringkasnya, orang tua, isteri, anak dan kerabat juga berpotensi sebagai 'musuh' sampai mereka bergabung ke dalam jamaah," ungkapnya.

Jamaah Warsidi adalah faksi DII/NII yang paling keras dan mampu bertahan. Sementara faksi-faksi lain berguguran akibat represi rejim Orde Baru. Fauzi bertugas menghimpun pengikut dan menyiapkan kamp militer. Tanah milik Warsidi di Lampung dijadikan *Islamic village*, cikal-bakal NII.

"Saat memutuskan untuk 'berjihad' pada awal tahun 1989, saya membentuk camp militer di Talang Sari Lampung untuk melatih para mujahid yang disiapkan untuk melawan Pemerintahan *Darul Kuffar (*negara orang-orang kafir) Republik Indonesia," kenang Fauzi.

Akhirnya perjalanan kelompok ini diberangus militer. Menurut penuturan Fauzi, lebih dari 200 orang pengikut jamaah Warsidi tewas, sisanya ditangkap, dan disiksa di tahanan. Fauzi diganjar 20 tahun penjara yang dijalaninya 10 tahun. Dia menyadari, istri, anak dan orang tuanya lah yang paling menderita akibat jalan kekerasan yang dipilihnya.

"Padahal mereka yang paling setia dan *istiqomah* mengunjungi dan menunggui saya yang menjalani hukuman. Sedang teman satu jamaah entah kemana, meninggalkan saya sendirian dalam lembabnya sel penjara," ungkap Fauzi.

dok.WI/Witjak

Fauzi Isman

Namun dia mengambil hikmah dari hukuman itu. "Penjara seperti padang pengembaraan pemikiran saya. Di sana saya banyak bertemu dengan para napol kasus lain. Sejak disatukan dengan napol yang berbeda agama, ideologi dan aliran, saya tak lagi berpikir hitam-putih."

Tumbangnya Rejim Soeharto yang represif dan militeristik, juga menjadi penyebab. Reformasi membuat masyarakat berani mengekspresikan ideologi dan aspirasi politiknya tanpa takut intimidasi, apalagi penjara.

"Memang perubahan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Tapi menurut saya, saat ini tidak ada lagi alasan pembenar untuk melakukan teror dan kekerasan dalam memperjuangkan ideologi politik Islam," tegas Fauzi.

Fauzi telah mengubur masa lalunya. Sejak menghirup udara bebas, dia bekerja sebagai terapis akupuntur dan aktif di Garda Kemerdekaan, organisasi yang membela kebebasan, hak-hak sipil, dan demokrasi.

Demikian pula Habib Husein al-Habsyi yang dikenal dalam kasus bom Borobudur tahun 1985. Ia mendekam di penjara selama 9 tahun 4 bulan. Jalan kekerasan yang ditempuhnya waktu itu, adalah untuk melawan rejim Orde Baru yang dzalim.

Tapi saat ini, Habib Husein menampik aksi-aksi kekerasan. Layaknya Fauzi, Habib menilai keadaan sosial dan politik Indonesia sudah berubah sejak era Reformasi. Semuanya memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya.

Dia menilai kekerasan akan menghilangkan simpati orang. "Bahkan merugikan Islam itu sendiri. Juga, korban dari tindakan kekerasan itu orang-orang kecil yang tak berdosa. Lihat itu, korban bom Kuningan justru satpam, tukang ojek, sopir taksi," Habib yang selalu lantang menentang kemunkaran ini memberi contoh.

Bom yang diledakkan di kafe, kata Habib, juga tidak bisa dikategorikan tepat sasaran. "Bagaimana dengan orang-orang yang datang untuk duduk-duduk, makan-makan, dengar lagu, atau berunding soal bisnis, tiba-tiba diledakin."

Habib berkesimpulan akar kekerasan kelompok itu ada hubungannya dengan ideologi Salafi Wahabi yang berkembang di Arab Saudi. "Mereka mudah mengafirkan kelompok lain dan mengklaim punya kavling di sorga," katanya seraya mengutip pendapat Imam Ali, "pengafiran adalah kekafiran itu sendiri."

Ideologi yang disebarkan oleh Osama bin Laden itu, diakui Nasir Abas, memang mempengaruhi sebagian besar aktivis muslim di Asia dan anggota Jamaah Islamiyah (JI). "Karena ajakan Osama mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan atas warga sipil. Yang lebih jelas lagi adalah kasus mutilasi 3 orang siswi di Poso," kata mantan ketua Mantiqi III JI ini kepada Gamal Ferdhi dari the WAHID Institute.

Para bekas koleganya itu, ungkap Nasir, membunuh orang yang tidak bersenjata dan bukan di tempat perang. "Saya mempelajari *Sirah Rasulillah*, tidak pernah sekalipun Rasulullah menyerang warga sipil dalam peperangan. Jadi mereka telah melanggar syariat," tegas alumnus Akademi Militer Mujahidin Afghanistan 1987 ini (lihat: *Mereka Bukan Mengikuti Islam*).

Ulama, penceramah, pendakwah atau pun media massa, kata Nasir, harus berperan menjelaskan bahwa pernyataan Osama bin Laden itu menyalahi syariat Islam dan tidak benar. "Ini yang penting!" tegas perintis Kamp Militer Hudaibiyah bagi pejuang Bangsa Moro Filipina ini.

Peran yang diusulkan Nasir itu kini mulai digencarkan di Mesir dan negara-negara Arab. Melalui buku, ceramah, kurikulum sekolah maupun keterangan pers, para pelaku terorisme yang insaf, para ulama dan pemerintah menyebarkan ajaran Islam yang damai. (lihat: *Tobat Berjamaah Merambah Jazirah*).

"Akibat aksi-aksi teror tersebut citra Islam rusak, dan menyulitkan dakwah Islam itu sendiri," kata tokoh JI Mesir Karam Zuhdi dalam *Nahr al-Dzikriyât* (Sungai Memori).

Kesadaran dan kampanye anti terorisme para tokoh JI Mesir itu menginspirasi sejumlah ulama Wahabi negara-negara Arab tentang kekerasan. Mereka beramai-ramai mencabut fatwa yang dapat membakar orang melakukan kekerasan.

Bagaimana dengan Indonesia? Tampaknya, pemerintah perlu melibatkan para agawaman lebih intensif.

Gamal Ferdhi, M. Guntur Romli, Ahmad Suaedy

TOBAT BERJAMAAH MERAMBAH JAZIRAH

"IBARAT melempar batu ke air tenang," kata Najih Ibrahim mengibaratkan peristiwa *Mubâdarah Waqf al-'Unf* (Inisiatif Penghentian Kekerasan) tokoh dan pengikut Jamaah Islamiyah (JI) Mesir pada 05 Juli 1997.

"Tak diduga, peristiwa tersebut menciptakan gelombang perubahan yang dahsyat bagi kelompok-kelompok Islam yang lain," tulis Najih dalam pengantar buku yang ditulisnya bersama tokoh-tokoh JI yang lain berjudul *Nahr al-Dzikriyât* (Sungai Memori).

Inisiatif tersebut diumumkan tokoh-tokoh JI Mesir dari dalam penjara setelah 16 tahun pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat pada 06 Oktober 1981. Bersama Tandzim Jihad pimpinan Abd Salam Farag, JI Mesir punya andil dalam tragedi itu. Dua kelompok ini berniat menggulingkan pemeritahan Mesir. Tandzim Jihad sebagai pencabut nyawa Sadat, sedang JI Mesir menyiapkan dana dengan merampok toko-toko emas milik penduduk Kristen Koptik Mesir di Provinsi Qina dan kawasan Subra, Cairo. Menurut mereka penganut Koptik adalah kafir yang hartanya bisa diambil sebagai *fai'* (harta rampasan perang).

Walau berhasil membunuh Sadat, mereka gagal menggulingkan pemerintah. Justru jaringan kelompok ini digulung pemerintah Mesir. Tokoh-tokoh Tandzim Jihad dihukum mati. Sedangkan tokoh-tokoh JI Mesir seperti Karam Zuhdi, Najih Ibrahim, Ashim Abd Majid, Isham Darbalah, bersama ribuan pengikutnya disiksa dan dijebloskan ke penjara. Rata-rata mereka divonis seumur hidup.

dok.rontburg.com/islamonline.net

Penembakan Presiden Mesir Anwar Sadat. (Insert) Karam Zuhdi

Tapi sisa-sisa pengikut JI Mesir di luar penjara tetap melancarkan aksi-aksi terorisme menuntut pemimpin-pemimpin mereka dibebaskan. Sejak tahun 1992-1996 Mesir tak sepi dari serangan teroris. Target mereka umumnya wisatawan asing dan pemeluk Kristen Koptik Mesir.

Berbeda dengan yang di luar, tokoh-tokoh JI yang di dalam penjara justru tergugah. "Aksi-aksi terorisme itu menjadi legitimasi bagi rejim pemerintah Mesir untuk terus melakukan represi," kata Karam Zuhdi, pimpinan Majelis Syura JI Mesir. "Lebih dari itu, aksi-aksi teror tersebut merusak citra Islam, dan menyulitkan dakwah Islam itu sendiri," tambah Zuhdi.

Awalnya inisiatif ini disikapi dingin pemerintah Mesir. Karena pada tahun itu juga, terjadi aksi terorisme terbesar. Teroris menyerang lokasi Piramid, menewaskan 58 wisatawan pada 17 November 1997.

Inisiatif itu seakan hilang tertimpa tragedi itu. Namun seorang pengacara bernama Muntasar al-Zayyat berjuang agar keinginan baik mereka diliput pers dan didengar oleh dunia internasional.

Muntasar adalah mantan JI Mesir yang insaf lebih dulu. Kungkungan penjara selama 3 tahun, membuatnya tercerahkan. Sejak dibebaskan, selama 10 bulan ia aktif mendekati tokoh-tokoh JI baik di dalam maupun di luar penjara untuk meninggalkan kekerasan.

Pekerjaan itu tidak mudah. "Baik JI ataupun pemerintah mencurigai saya ," ungkap Muntasar dalam buku *al-Jamâ'âh al-Islamiyah, Ru'yah Min al-Dâkhil* (Jamaah Islamiyah, Pandangan dari Dalam).

Hasilnya pada 2001, para tokoh JI mengeluarkan buku-buku tentang perubahan pandangan dan strategi kelompok ini. Salah satunya adalah *Mubâdarah Waqf al-'Unf Ru'yah Syar'iyah wa Nadlrah Wâqi'iyah* (Inisiatif Penghentian Kekerasan, Pandangan Syariah dan Realitas). Buku ini berisi argumentasi-argumentasi syariah bahwa kekerasan tidak memiliki akarnya dalam Islam. Selain itu, ada pertimbangan konteks bahwa kekerasan justru membunuh saudara mereka sendiri dan memecah belah umat Islam.

Pemerintah Mesir merespon perubahan itu. Pada 2003, Karam Zuhdi dibebaskan. Dua tahun kemudian giliran Najih Ibrahim. Selepas dari penjara mereka aktif menulis dan berdakwah menentang kekerasan. Mereka menerbitkan buku-buku yang menentang pandangan dan strategi al-Qaedah besutan Bin Laden dan Ayman al-Dawahiri. Bahkan mereka kerap melakukan kampanye anti terorisme dalam situs *www.egyptianislamicgroup.com*.

Perubahan serupa juga terjadi di Saudi Arabia. Sebelum peristiwa Bom Riyadh tahun 2003, pemerintah Saudi merestui doktrin Salafi Wahabi yang dianut kelompok-kelompok teroris. Namun sejak negara itu diserang 22 aksi teror antara 2003 sampai 2004, pemerintah Saudi tampak mulai berubah.

"Ada tiga ulama Saudi yang bertobat dari fatwa-fatwa kekerasan dan pengafiran. Mereka itu Syekh Ali bin Khidlir al-Khidlir, Syekh Nasir bin Muhammad al-Fahd, dan Syekh Ahmad bin Fahd al-Khalidi," tulis *www.murajaat.com*.

Mereka mencabut fatwa-fatwa itu dalam dialog di seluruh saluran televisi Saudi, yang dipandu oleh ulama Saudi terkenal Syekh Aidl al-Qarni. Menurut pengakuan tiga ulama itu, pertobatan tersebut terinspirasi oleh buku-buku yang dikarang oleh mantan tokoh-tokoh JI Mesir.

Kini sejumlah ulama dan pemerintah di Jazirah Arab bergiat meluruskan pandangan ideologi Salafi Wahabi yang acap dijadikan latar oleh aktor-aktor teror, baik melalui fatwa, khutbah ataupun buku-buku.
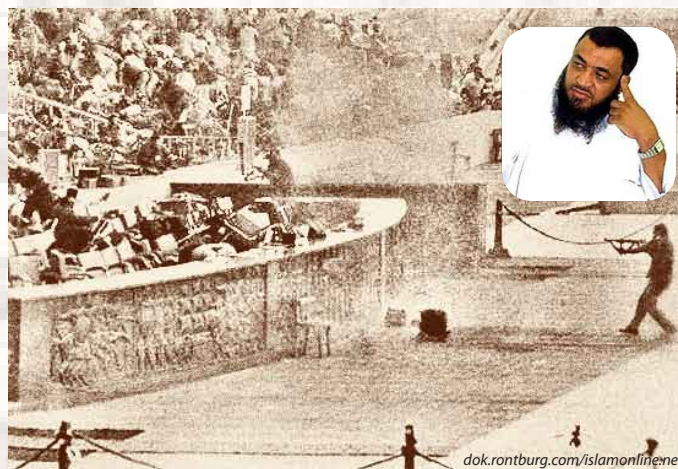
M. Guntur Romli, Gamal Ferdhi

Nasir Abas

Mantan Ketua Mantiqi III JI

"MEREKA BUKAN MENGIKUTI ISLAM"

dok.WI/Witjak

Nasir Abas
Lahir : Singapura, 06 Mei 1969
1987-1990 Kadet Akademi Militer Mujahidin Afghanistan.
1990-1993 Instruktur Akademi Militer Mujahidin Afghanistan.
1994-1996 Perintis dan Instruktur Kamp Hudaybiyah Filipina untuk Bangsa Moro dan JI.
1997 Staff Wakalah Johor JI. Ketua Wakalah Sabah di bawah Mantiqi III JI.
2001 Ketua Mantiqi III JI.
2003 Keluar dari JI.
(sumber: Membongkar Jamaah Islamiyah, 2006)

KEKERASAN dan pembunuhan atas warga sipil oleh beberapa kelompok Islam bukan berdasarkan syariat, tapi karena termakan ajakan Osama bin Laden. Demikian mantan Ketua Mantiqi III Jamaah Islamiyah (JI) Nasir Abas kepada Gamal Ferdhi dari the WAHID Institute. Berikut petikannya.

Bagaimana awal Anda ikut Jamaah Islamiyah (JI)?

Selain saya, ada kerabat yang juga ikut JI. Pada awalnya, saya dan JI tidak pernah berniat untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Saya berfikir bahwa apa yang saya miliki sebagai umat Islam (UI) khususnya anggota JI, bisa bermanfaat untuk membela dan membantu UI yang ditindas dan diserang di tanah airnya sendiri. Untuk itulah kami berperang ke Afghanistan dan Filipina, beberapa anggota JI juga ada yang ke Ambon dan Poso untuk membantu UI di sana. Tapi kemudian terjadi hal yang tidak sepatutnya. Beberapa anggota JI dengan niat yang jelas membunuh warga sipil.

Mengapa mereka melakukan itu?

Menurut mereka itu Jihad. Padahal jihad harus dilandaskan dua hal, yaitu niat yang ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah. Mereka membunuh orang yang tidak bersenjata dan bukan di tempat perang. Saya mempelajari Sirah Rasulillah, tidak pernah sekalipun Rasulullah menyerang warga sipil dalam peperangan. Jadi sebenarnya mereka telah melanggar syariat.

Terhadap non-muslim pun demikian. Haram hukumnya menyerang non-muslim. Selama mereka tidak menyerang kaum muslimin, maka kita harus ber*muamalah* dengan baik. Itu ditunjukkan Rasulullah. Akhlak Rasulullah ini dipuji oleh banyak non-muslim. Banyak buku yang menyatakan beliau adalah pemimpin yang baik. Jadi walaupun berniat untuk menentang kemunkaran tapi tidak mencontoh Rasul, itu adalah dosa besar!

Apa penyebabnya?

Saya menyadari sejak tahun 2000, para aktivis muslim termasuk JI, banyak yang terpengaruh *statement* Osama bin Laden yang mengatakan: "AS dan sekutunya telah membunuh warga sipil Islam, maka sekarang waktunya bagi umat Islam untuk membalas dendam dengan membunuh warga sipil AS dan sekutunya di mana saja!" Karena ajakan Osama, mereka melakukan kekerasan dan membunuh warga sipil. Yang lebih jelas lagi adalah kasus mutilasi 3 orang siswi di Poso. Padahal anak-anak perempuan itu tidak ikut berperang. Ini jelas dosa besar!

Kasarnya, mereka bukan mengikuti Islam tapi mengikuti Arab!

Saya sempat menyampaikan ini kepada Hasanuddin (pelaku mutilasi 3 siswi di Poso, *red.*). Dan Alhamdulillah, Hasanuddin menyadari kekhilafannya. Sekarang dia menyesal dan meminta maaf serta menyadari bahwa aksinya bertentangan dengan syariat.

Bagaimana dengan pendirian Negara Islam?

Ada dalam QS. al-Maidah: 44. Dari ayat tersebut, dulu saya memahami bahwa umat Islam harus menegakkan SI dengan mendirikan negara Islam (NI). Selain itu, pemerintah bukan NI adalah pemerintahan kafir, begitu juga dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk presiden, menteri dan aparat-aparatnya.

Ini juga diyakini Kartosuwiryo dengan DI/TII nya, dilanjutkan oleh JI yang dipimpin Abdullah Sungkar, kemudian Abu Bakar Ba'asyir. Ustadz Abu hingga kini menarik pernyataan saya itu. Saya mengakui RI dan Malaysia sebagai NI walaupun belum mampu melaksanakan SI secara sempurna.

Apakah pandangan itu telah disadari sebagian besar eks anggota JI, sehingga tahun 2006 serangan teroris ke Indonesia menurun?

Selama ada orang yang masih meyakini *statement* Osama bin Laden itu benar, selama itu pula ada kemungkinan serangan bom terjadi lagi. Oleh karena itu, tidak boleh merasa aman dan meninggalkan kewaspadaan dengan tidak adanya serangan bom yang besar pada tahun 2006 ini.

Himbauan Anda?

Ulama, penceramah, pendakwah ataupun media massa harus tetap terus menjelaskan bahwa *statement* Osama bin Laden itu menyalahi syariat Islam dan tidak benar. Ini yang penting!

Saya sendiri heran dengan Abu Bakar Ba'asyir. Kalau ia tidak setuju dengan aksi pemboman di Indonesia, mengapa ia tidak menolak *statement* Osama. Padahal itu adalah akar permasalahannya. Kelompok muslim yang melakukan kekerasan, pemboman dan mutilasi itu tergerak karena *statement* Osama.

Saya telah bertemu beberapa pelaku terorisme. Kalau ingin bicara kepada mereka, saya bisa membantu minta izin agar bisa bertemu. Ini terbuka untuk siapa saja, termasuk pendakwah, ustadz yang ingin mengetahui apa yang mendorong dan memotivasi para pelaku terorisme. Mereka bukan korban. Mereka melakukan itu dengan keyakinan.

Ini agar ulama, aktivis muslim dan para ustadz tahu, bahwa ini bukan rekayasa atau konspirasi. Jadi saya menghimbau kepada para pendakwah, penceramah dan ulama supaya kita meluruskan dan mengembalikan mereka bertindak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Penggrebekan markas FPI
dok.AP

Teenlit dari Bilik Pesantren

Novel-novel pop marak diproduksi para santri. Tabir pesantren diungkap dengan gaul.

Cinta kemuliaan, membuat Dahlia rela banting tulang menjadi penari untuk menghidupi keluarganya yang miskin. Cinta kebaikan membuatnya selalu ingin belajar untuk lebih baik. Dahlia memang perempuan yang dipenuhi cinta. Tak heran jika putra dua pengasuh pesantren, Aiman dan Bilal jatuh hati padanya.

Jalinan cerita juga memunculkan konflik. Mbah Jalaluddin Rumi, ayah Aiman, membela Dahlia ketika Kiai Umar dan ormas Islam lainnya menyudutkan Dahlia dengan tariannya yang dianggap haram.

Ada kisah lain lagi. Seuntai mawar dan surat berisi puisi tanpa nama pengirim tiba-tiba muncul di asrama pesantren putri tiap akhir pekan. Mawar dan puisi itu ditujukan kepada Zahra. Pesantren puteri itu pun jadi geger.

Zahra tak tahu siapa pengirimnya. Karena itu ia bungkam ketika ditanya oleh petugas keamanan pondok. Gosip pun beredar. Ada lesbi di asrama itu yang diam-diam mencintai Zahra. Sahna, santriwati senior yang selama ini dikenal dekat dengan Zahra, jadi tertuduh.

Isu ini khas pesantren, karena memang tak boleh seorang lelaki pun memiliki akses ke pesantren puteri, kecuali keluarga kiai.

Dua cerita di atas adalah cuplikan novel *Tarian Cinta* dan *Gus Yahya Bukan Cinta Biasa*, dua dari banyak novel bergaya *teenlit* (*teen literature*) yang lahir dari pesantren, sekolah yang selama ini dianggap tidak gaul.

Kehadiran *teenlit* pesantren adalah buah dari maraknya novel *teenlit* impor yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. *Teenlit* terjemahan itu menampilkan tokoh dan gaya hidup remaja kota yang relatif liberal. Remaja belasan tahun sudah terbiasa berciuman dengan lawan jenis dan pergi ke pesta-pesta.

Novel remaja karya anak muda yang hidup dalam dunia yang berkecukupan ini, kerap menampilkan tokohnya yang mempunyai mobil pribadi, kerap berlibur ke seantero dunia, nongkrong di kafe, memuja bintang pop, dan berbelanja di pertokoan terkenal.

Dengan mengadaptasi gaya dan teknik penceritaan seperti itu, sejumlah pengarang muda di Indonesia menulis *teenlit* ala Indonesia. Jumlahnya sangat fenomenal. Bahkan, beberapa diantaranya telah diangkat ke layar perak dan layar gelas.

Kini hadir pula novel pop gubahan para santri belia yang telah memberi warna tersendiri dalam dunia buku sastra remaja.

Teenlit pesantren berbicara tentang remaja dan ditulis oleh remaja. Fina Af'idatussofa, penulis *Gus Yahya Bukan Cinta Biasa*, misalnya tahun 2007 ini baru menjelang 17 tahun. Sementara Maia Rosyida, penulis *Tarian Cinta*, belum lagi 20 tahun.

"Gaya bahasa yang digunakannya pun sama, yakni bahasa gaul remaja yang sedang tren: penuh dengan istilah Inggris, banyak akronim dan *style* Jakarta," jelas Redaktur Majalah Seni *Gong* Hairus Salim.

Tapi jika ditelesik, kata Manajer Divisi Matapena Nur Ismah, tetap ada sesuatu yang berbeda dalam *teenlit* pesantren. "Ada semacam pandangan khas pesantren, yang membuat ia tidak sekadar jadi cerita cinta remaja saja," jelas Ismah (baca: *Menelusuri Lokalitas Pesantren*).

Ia lalu mencontohkan karyanya, *Jerawat Santri*. Ada tokoh Mahsa yang memberikan semacam kuliah mengenai reproduksi berdasarkan kaca mata fiqh dan psikologi sosial kepada yuniornya, Una. Dalam *Coz Loving U Gus* karya Pijer Sri Laswiji (2006), ada tokoh Rara yang menolak poligami. Untuk itu, Rara yang berjilbab modis mesti membantah dan berdebat dengan para seniornya di kampus.

Sedang dalam *Tarian Cinta* karya Maia Rosyida dikisahkan kearifan dari Kiai Rumi. Sang kiai tak serampangan memberi fatwa haram tarian Dahlia yang meniru gaya *Toxic*-nya Britney

montase Witjak

Spears. "Nah, itu *kan* bukan sekadar cerita cinta remaja *toh*?" tegas Nur Ismah.

Ciri khas *teenlit* pesantren juga dipaparkan Hairus Salim. "Ada istilah-istilah fiqh, referensi kitab dan buku pesantren, humor ala pesantren, bahasa prokem pesantren, dan lain-lain," kata Salim yang sering meneliti sastra pesantren.

Tengok polah Hadziq, santri Mbah Jalal dalam *Tarian Cinta*, yang bersemangat membahas kitab *Qurratul 'Uyun*. "Sengaja milih kitab yang agak menghibur. Maksudnya yang agak 'porno' biar *nggak* terlalu pusing dengan rumus *nahwu*nya," tulis Maia Rosyida dalam *Tarian Cinta*.

Ana FM dalam *Cinta Lora* menggunakan istilah ilmu hadis, serta panggilan khas untuk putera kiai di Madura yaitu Lora disingkat dengan Ra juga ditampilkan. "Menurut cerita yang dapat dipertanggungjawabkan alias mutawatir, Ra Faris dikenal sebagai aktivis yang superaktif dan tidak pernah ada kata cewek dalam kamus hidupnya."

Karya Fina, Maia, Ismah, Ana dan banyak penulis muda lainnya itu dipublikasikan oleh penerbit Matapena yang berbasis di Yogyakarta. Lembaga ini memang paling giat membidani kelahiran *teenlit* pesantren. Kehadiran novel-novel itu dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dari novel remaja yang sudah terbit. "Matapena ingin memperkenalkan sosok remaja pesantren yang selama ini luput dari perhatian, bahkan sering dianggap tidak gaul," kata Nur Ismah.

Untuk kepentingan ini, dibentuklah Komunitas Matapena. Ini adalah komunitas penulis muda pesantren. Mereka berkeliling ke sejumlah pesantren, menggelar diskusi buku dan membuat workshop penulisan. Kini sudah ada 45 rayon yang berbasis di pesantren-pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk Jakarta dan Banten sedang dirintis. "Jumlah penulis yang telah direkrut sekitar 300-an," ujar Ismah.

Sejak berdiri pada akhir 2005, Matapena berhasil meluncurkan 20 buku. Beberapa di antaranya telah dicetak ulang, bahkan *Santri Semelekete* karya Ma'rifatun Baroroh dan *Pangeran Bersarung* yang ditulis Mahbub Jamaluddin, sudah dibeli sebuah rumah produksi untuk diangkat ke layar sinetron.

Sedangkan Forum Lingkar Pena (FLP) yang juga giat mengembangkan kemampuan menulis di kalangan remaja Islam mengakui tidak mempunyai lini khusus yang menangani sastra pesantren. "Walaupun begitu, ada juga novel dari komunitas kami yang mengambil latar cerita kehidupan pesantren," kata Ketua FLP Yogyakarta I. R. Wulandari.

Menurut Salim, pertumbuhan generasi baru penulis novel dari pesantren saat ini bagai cendawan di musim hujan. Unik, memang. Mengingat umumnya pesantren masih melarang santrinya membaca buku-buku 'putih', yaitu buku karya penulis anyar apalagi yang dianggap pop. "Mereka hanya diwajibkan untuk membaca dan mempelajari kitab kuning, yakni buku-buku keagamaan yang ditulis dalam bahasa Arab," ungkap Salim.

Pandangan 'kaku' seperti itulah yang menyulitkan Ismah masuk ke pesantren. Tetapi setelah melakukan pendekatan kepada kalangan pimpinan pondok bahwa gerakan ini untuk kepentingan santri, barulah kehadiran mereka disambut baik.

"Kini bukan lagi kami yang menawarkan, sejumlah pesantren juga telah meminta para penulis Matapena untuk memberikan workshop penulisan di pesantren-pesantren mereka," jelas Ismah.

Jika diperkirakan ada sekitar 3 juta santri di seluruh Indonesia, maka hadirnya karya-karya remaja pesantren jelas cukup rasional dari segi pasar. Tapi bukan soal pasar yang paling penting. Komunitas Matapena, dengan caranya sendiri telah mengembangkan kegiatan menulis. Mendorong minat baca, kini mereka jadikan sebagai suatu gerakan. Sebuah tindakan terpuji yang patut didukung, bukan dipasung.

Gamal Ferdhi

dok.WI/Witjak

Wabah teenlit pesantren

NUR ISMAH

MENELUSURI LOKALITAS PESANTREN

KIPRAH perempuan mungil itu memang tidak bisa dipisahkan dari *teenlit* (*teen literature*) pesantren atau yang kadang disebut novel pop pesantren. Nur Ismah, nama perempuan kelahiran Pekalongan, Jawa Tengah, 23 Desember 1978 ini, adalah manajer Matapena, sebuah divisi di penerbit Lembaga Kajian islam dan Sosial (LKiS), Yogyakarta.

Matapena khusus menerbitkan karya-karya sastra remaja dari kalangan pesantren dan bercerita tentang remaja pesantren. Namun Ismah bukan sekadar manajer. Penulis dengan nama pena Isma Kazee ini, telah membesut dua *teenlit* pesantren yaitu *Jerawat Santri* (2006) dan *Ja'a Jutek* (2007).

Pesantren memang bukan dunia asing bagi Ismah. Pahit manisnya masih membekas hingga sekarang. Maklum, ia menghabiskan tujuh tahun masa remajanya di Pesantren Putri al-Fathimiyyah, Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.

Selepas dari pesantren, Ismah hengkang ke Yogyakarta dan mengambil kuliah di Jurusan Sastra Arab, Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Kalijaga. Kegiatan menulis yang ia pupuk sejak *nyantri* dan keterlibatannya dalam dunia pers mahasiswa, mengantar Ismah ke dunianya kini.

Ismah punya alasan kenapa harus membesarkan *teenlit* pesantren. "Selain ingin menandingi gaya hidup remaja perkotaan yang ditawarkan *teenlit* pada umumnya, juga ingin menunjukkan Islam pesantren yang membumi."

Hal itu Ia tunjukkan dalam karyanya. Tengok saja *Jerawat Santri*. Di situ ada tokoh Mahsa yang memberikan semacam kuliah mengenai reproduksi berdasarkan kaca mata fiqh dan psikologi sosial kepada yuniornya, Una.

Contoh lain bisa disimak dalam *Coz Loving U Gus* karya Pijer Sri Laswiji (2006). Di sana, ada episode ketika tokoh Rara menyatakan tak setuju pada poligami. Untuk itu, Rara yang berjilbab modis, mesti membantah dan mendebat para seniornya di kampus yang disebutnya sebagai kalangan "*jilbaber gedombor-dombor*". "Nah, itu kan bukan sekadar cerita cinta remaja *toh*?" kilah Nur Ismah.

Ismah menambahkan, ada kisah tentang kearifan Kiai Rumi, dalam T*arian Cinta* karya Maia Rosyida. Pesan pokoknya: tak serta-merta memfatwa haram tarian Dahlia yang mirip *Toxic*-nya penyanyi tenar Britney Spears. "Kalau di novel lain, hal itu pasti sudah jelas haram," kata Ismah.

Namun dalam cara berbicara, hobi, pakaian, selera musik dan film, jelas Ismah, *teenlit* pesantren tetap mengikuti pakem zamannya. "Remaja di mana pun, kini memiliki kultur gaul yang pada dasarnya adalah kultur global atau kultur *MTV*. Televisi jelas menjadi 'imam' dari kultur ini," kata Ismah.

Karena itu, ujar Ismah, banyak orang menilai *teenlit* pesantren tak beda dengan *teenlit* pada umumnya. Bahkan dituding tak punya ciri khas. "Penilaian ini kalau semata melihat kemasannya," kata mantan reporter Majalah perempuan dan anak *MITRA* YKF-LKPSM Yogyakarta ini.

Tapi jika ditelesik, kata Ismah, ada ciri khas dalam *teenlit* pesantren. "Ada semacam pandangan khas pesantren, yang membuat ia tidak sekadar jadi cerita cinta remaja saja," jelasnya.

Banyak tradisi pesantren yang belum diolah jadi cerita. Sebab itu, Ismah yakin bahwa tema-tema pesantren tidak akan pernah habis digali. "Pesantren seperti juga etnik, memiliki lokalitasnya sendiri. Nah, lokalitas-lokalitas itulah yang akan terus kita telusuri."

dok.pribadi

dok.WI/Witjak

SASTRA POP KAUM SARUNGAN

Oleh: Ahmad Suaedy
Direktur Eksekutif the WAHID Institute Jakarta

TEENLIT (*teen literature*) pesantren atau sastra pop remaja pesantren boleh jadi merupakan kelanjutan perubahan dunia pesantren yang telanjur terbuka atas informasi dan tak bisa lagi menolak perubahan. Namun, dunia dan bakat alam mereka seperti luput dari pengamatan banyak pihak. Para santri remaja itu begitu tekun dengan dunia mereka sendiri, tak peduli hiruk-pikuk para 'orang tua' mereka.

Meskipun kini pesantren sedang digempur dari berbagai arah dan ditarik kanan kiri, para santriwan dan santriwati belia itu rela berjam-jam nongkrong di depan komputer.

Mereka menulis, merefleksi dan menggugat lingkungan dan pemikiran dunia mereka sendiri yang selama ini dianggap menyesakkan. Hasilnya adalah novel, cerpen, kumpulan puisi dan karangan lainnya.

Dahsyatnya arus informasi melalui berbagai saluran, tidak mungkin dicegah dengan cara apapun. Internet dengan seluruh situsnya dan TV dengan semua kanal yang ada dengan mudah bisa diakses oleh segala umur. Hanya kesadaran pribadi dan lingkungan yang bisa membimbing mereka. Para penulis remaja itu, adalah di antara mereka yang mampu memanfaatkan arus informasi tersebut dengan maksimal untuk memproduksi gagasan.

Dilihat dari bahasa, jalan cerita, istilah yang digunakan, tak ada bedanya karya para penulis pesantren ini dengan sastra pop remaja atau *teenlit* umumnya. Bedanya, novel-novel itu banyak mengambil *setting* pesantren. Tak sedikit yang memakai *term-term* kitab kuning, menyinggung kehidupan agama, terkadang berupa kritik dengan sangat tajam.

Para santriwati muda nan kreatif ini tentu harus terus didorong. Mereka sedang mencari dunia mereka sendiri dengan menggunakan referensi yang mereka pelajari di pesantren. Hal ini lalu mereka kaitkan dengan realitas yang mereka serap dari dunia nyata.

Dalam konteks pergeseran peran pesantren, fenomena *teenlit* sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Ia merupakan buah dari proses perubahan dan terbangunnya sistem baru dari dunia yang pernah dianggap paling kolot itu. Sejak digagas oleh Gus Dur dan kawan-kawan atas dunia pesantren dan Nahdlatul Ulama, gerakan pembaharuan itu bergulir terus hingga kini, melampaui apa yang dipikirkan ketika itu.

Di pelbagai daerah, dari tingkat kecamatan hingga desa, di kawasan basis pesantren, para santri umumnya punya komunitas tersendiri. Terbentuklah berbagai kelompok, seperti kelompok remaja, pelajar dan mahasiswa yang berlatar belakang pesantren. Ada kelompok diskusi, kajian kitab kuning, bahtsul masail sampai kelompok advokasi serta tulis-menulis hingga pendidikan alternatif.

Tengok saja di 'sekolah alternatif' SMP dan SMU Qaryah Thayyibah, di Desa Kalibening, Salatiga, Jawa Tengah. Di sekolah yang baru empat tahun berdiri itu, lahir tiga penulis berbakat, yaitu Maia Rosyida, Fina Af'idatussofa dan Upik. Sekolah ini dikelola dengan pendekatan semacam komunitas riset untuk anak-anak seusia pelajar. Mereka diberi fasilitas internet 24 jam sehari dan perpustakaan, serta dipersilakan untuk memilih topik kajian secara orang per orang dan kelompok. Tetapi setiap dzuhur dan ashar mereka wajib berjamaah bersama dan di malam hari harus mengikuti sekolah diniyah di pesantren desa itu. Dan guru hanya berfungsi sebagai pembimbing.

Komunitas Azan di desa Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat lain lagi. Kelompok yang dipimpin Acep Zamzam Noor, yang bergerak di wilayah kajian sastra, telah melahirkan puluhan seniman dan penulis. Bersama seniman di Tasikmalaya lainnya, mereka berhasil meyakinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Gedung Kesenian, sejak 6 tahun lalu. Konon, ini adalah Gedung Kesenian pertama di kabupaten di Indonesia.

Lambat laun terbangun pula sistem penerbitan, percetakan dan pemasaran. Penghargaan untuk para penulis, pemantauan bakat dan mobilisasi karya-karya mereka makin digalakkan. Saya jadi ingat kata-kata Gus Dur suatu saat pada tahun 70-an di Institut Teknologi Bandung (ITB), bahwa kebangkitan Islam hanya akan terjadi jika telah ada kebebasan berkreasi dan kebebasan berekspresi di dunia Islam.

Nyai Pesantren Melawan Kekerasan

Makin banyak aktivis perempuan yang lahir dari pesantren. Mereka mengadvokasi, mendampingi, melakukan konseling sampai membangun rumah singgah untuk menampung korban kekerasan.

Sebuah klinik kandungan di Bondowoso tiba-tiba gaduh. Seorang anak perempuan berusia 11 tahun, sebut saja Wardah, yang hamil satu bulan akibat ulah bejat kakeknya berteriak histeris saat akan dikuret.

Awalnya tak ada yang tahu. Saat muntah-muntah, Wardah dikira sakit. Ternyata bidan puskesmas mendiagnosa Wardah hamil. Sang nenek pun menceritakan nasib tragis cucunya itu kepada guru mengajinya, Nyai Hj. Siti Ruqayyah Ma'shum. Pimpinan Pondok Pesantren Putri al-Maksumiyyah, Prajekan, Bondowoso itu segera turun tangan.

Nyai Ruqayyah mendampingi korban dan keluarganya, termasuk turut memutuskan aborsi. Tapi sang bidan tak berani. Dia pun menjelaskan tujuan tindakan itu kepada sang bidan, ditambah dengan berbagai sandaran teologis. "Saya memilih aborsi karena si anak adalah muhrim pelaku. Jadi tidak bisa dinikahi," ujar alumni Pesantren Zainul Ishlah, Probolinggo ini.

Alasan lainnya, usia janin Wardah baru satu bulan. "Mazhab Hanbali membolehkan aborsi jika usia kandungan kurang dari empat bulan. Juga, jika kehamilannya tidak diinginkan seperti akibat perkosaan," Nyai Ruqayyah menjelaskan. Selain itu Ruqayyah menilai masa depan Wardah masih panjang, karena ia belum lulus SD. Pendampingannya tak berhenti di situ. Perkembangan psikis Wardah terus dipantau olehnya, hingga kini gadis cilik itu menginjak remaja.

Usaha Nyai Ruqayyah di Bondowoso itu merupakan salah satu potret advokasinya terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan ketidakadilan yang menimpa perempuan. Ia melakukan pendampingan melalui konseling secara sukarela di rumahnya. Majelis Ta'lim al-Ma'shumiy yang dipimpinnya, bukan sekedar menjadi tempat belajar agama, tapi sekaligus menjadi sarana pendampingan bagi korban kekerasan. Karena selain dikenal sebagai pemimpin pesantren perempuan, pendidik ataupun istri pemilik pesantren, seorang nyai juga harus peduli terhadap setiap permasalahan umatnya.

Demikian halnya dengan Nyai Lilik Nihayah Fuady dari Pesantren Dar al-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon. Ia memimpin Mawar Balqis Crisis Center yang bekerja mendampingi perempuan di seputar wilayah Cirebon. Sejak berdiri pada 2001, Balqis sudah menangani 315 kasus KDRT, perkosaan 88 kasus, pelecehan seksual 46 kasus, kekerasan terhadap perempuan 20 kasus, kekerasan dalam pacaran 7 kasus. "Sekarang kita sedang menangani kasus kekerasan terhadap anak, dan *trafficking*," jelas alumni pesantren Darul Muta'allimin Ciwaringin ini.

Baiq Elly Mahmudah

Nyai Hj. Siti Ruqayyah Ma'shum

Nyai Enung Nur Saidah

Nyai Lilik Nihayah Fuady

Balqis pun tak segan menempuh jalur hukum dalam membela korban. "Kami mendampingi litigasi hukum pidana dan perdata," tambah Nyai Lilik Nihayah. Lembaga ini, misalnya, pernah mendampingi korban KDRT yang bersuamikan warga Brunei Darussalam. Istrinya berhasil dipulangkan ke Indonesia. Namun karena si anak masih disandera sang bapak, kasusnya terus diurus Balqis hingga kini.

Di Tasikmalaya, terdapat Pusat Perlindungan Wanita (Puspita) di Pesantren Cipasung. Puspita itu dikelola oleh Nyai Enung Nur Saidah Rahayu. "Kami sudah menangani 66 kasus sejak didirikan 13 September 2004," putri mantan Rais 'Am Syuriyah PBNU Ajengan KH. Ilyas Ruhiat itu menerangkan.

Pendirian Puspita semula ditentang banyak orang, apalagi ia merupakan bagian dari pesantren. "Tapi apih (KH. Ilyas Ruhiat, *red*.) orang yang terbuka. Beliau menanyakan dulu maksud pendirian lembaga itu," tambah Nyai Enung. Karena bertujuan menolong perempuan yang membutuhkan bantuan, maka KH. Ilyas memersilahkannya.

Puspita Cipasung melakukan berbagai layanan, antara lain advokasi korban, konsultasi, pendampingan medis, dan penyediaan *shelter* atau rumah singgah. "Juga konseling, dengan tambahan dari sisi spiritual," tambah perempuan yang lahir dan besar di Pesantren Cipasung ini.

Bahkan *shelter*-nya terintegrasi dengan pesantren. "Korban

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Kantor Puspita Cipasung

dilibatkan dengan kehidupan para santri," ungkap Nyai Enung. Puluhan kasus yang dihadapi Puspita Cipasung pun beragam. Berkat kerja keras para aktivisnya, seorang pelaku yang memerkosa anaknya sendiri sudah diganjar 15 tahun penjara.

Penghentian KDRT juga giat dilakukan para perempuan di Nangroe Aceh Darussalam. Hj. Erma Suryani Faisal, istri ketua Rabithah Thaliban Aceh, organisasi santri di Serambi Mekkah itu. Atas pendampingan dari Rifka Anissa Yogyakarta, ia mendirikan Women Crisis Center (WCC). Inisiatif Erma ini muncul karena temannya yang menjadi aktivis perempuan ormas Islam mengalami percobaan perkosaan.

Lain lagi cerita Yayasan Putroe Kandee di Banda Aceh, pimpinan Rosmawardani. Ia menggelar pelatihan sensitivitas jender bagi 68 hakim Mahkamah Syariah NAD. Salah seorang peserta pelatihan itu, Drs. Zakian seorang hakim dari Takengon mengatakan asumsi ketidakadilan jender yaitu lelaki lebih kuat dari perempuan, menyebabkan tingginya angka perceraian di daerahnya. "Dari 167 perkara yang masuk, 65 di antaranya merupakan gugat cerai yang disebabkan KDRT," kata Zakian.

Demikian pula dengan Baiq Elly Mahmudah di Mataram, NTB. Ia bersama aktifis alumni pesantren di Pulau Lombok membentuk Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2). Wilayah kerjanya di Mataram, Bima, Sumbawa, dan Dompu. Lembaga yang berdiri sejak tahun 2002 ini hanya melakukan pendampingan psikologi bagi perempuan korban KDRT. Sedangkan urusan hukumnya diserahkan kepada LBH APIK Mataram. "Dua puluh dua kasus sudah ditangani. Kami juga menggelar pelatihan kesetaraan jender bagi para guru madrasah dan tuan guru serta melibatkan mereka dalam advokasi," kata Baiq Elly.

Berbekal pengalaman tersebut, Baiq Elly dan para tuan guru akan membuat rumah singgah untuk para korban kekerasan. Namanya serupa dengan lembaga kepunyaan Nyai Enung di Cipasung, yaitu Puspita. "Tempatnya di Pesantren Darun Nadwah asuhan Tuan Guru Muzhar," imbuh alumnus Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Situbondo ini.

Puspita Mataram juga menangani korban *trafficking*. Para Tuan Guru dilibatkan dalam kerja ini, karena mereka membina banyak majelis ta'lim yang anggotanya mayoritas perempuan. "Ini sangat strategis," kata Baiq Elly.

Dua Puspita tadi memang menginduk kepada Pesantren Untuk Pemberdayaan Perempuan (PUAN) Amal Hayati di Jakarta, pimpinan Sinta Nuriyah Abdurrahman. PUAN mendirikan Puspita di lingkungan kediaman istri mantan Presiden Gus Dur di komplek Pesantren al-Munawwarah, Ciganjur, Jakarta Selatan.

Untuk pendirian Puspita itu pula, PUAN giat menjalin kerja sama dengan pesantren lain. Alasan Sinta, karena pengaruh kiai sangat besar. "Jadi kalau ngomong pasti dianut," kata Sinta Nuriyah kepada Nurun Nisa dari the WAHID Institute.

Pesantren juga tidak perlu lagi membuat penampungan. Korban yang meninggalkan rumah karena kekerasan dapat ditampung di bilik-bilik santri.

Selain itu, di pesantren para korban akan banyak mendengar orang dzikir dan membaca al-Qur'an. "Itu bisa meredam kegelisahan dirinya," tambah peraih master bidang Kajian Wanita UI ini.

Bagi korban yang punya anak, kata Sinta, anaknya tidak perlu putus sekolah karena pesantren menyelenggarakan pendidikan usia sekolah. "Kemudian, SDM pesantren amat banyak. Santri-santri senior bisa direkrut untuk menjadi relawan-relawan di Puspita tersebut," papar Sinta.

Bahkan, Sinta menilai pengaruh pesantren yang cukup besar di masyarakat membuat instansi-instansi seperti rumah sakit, poliklinik, pengadilan agama, dan pengadilan negeri mudah diajak kerja sama.

Dulu persoalan KDRT dianggap wilayah pribadi yang tabu diutak-atik. Kini, banyak kiai sepuh mempersilahkan pesantrennya dijadikan Puspita. "Kalau kiai-kiai sepuh umumnya mereka tidak akan menentang selama kita bisa memberikan argumentasi ayat-ayat dan hadits," ungkap Sinta.

Oleh sebab itu, enam pesantren tertarik menjadi mitra kerja PUAN. "Mereka adalah Pesantren Nurul Islam (Jember), Pesantren Aqidah Usymuni (Sumenep, Madura), Pesantren al-Islahiyah (Malang), Pesantren Cipasung (Tasikmalaya), Pesantren Syaikh Abdul Qadir Jailani (Probolinggo), dan Pesantren As-Sakienah (Indramayu)," jelas Sinta.

Tak hanya di situ. Sinta dan timnya yaitu Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) menafsir ulang kitab *'Uqud al-Lujjayn* karya Syeikh Nawawi al-Bantani (1230-1316 H/1813-1898 M). Karena kitab ini dinilai banyak mengandung unsur ketidakadilan, utamanya terkait kedudukan perempuan di hadapan laki-laki. Buku hasil telaahan FK3, yang berjudul *Wajah Baru Relasi Suami Isteri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, itu menjadi acuan banyak aktivis perempuan dari pesantren (baca: *Polemik 'Uqud al-Lujjayn: Kritik Dijawab Kritik*) .

Penerimaan kalangan pesantren atas isu kesetaraan jender ini juga dapat dilihat hasil penelitian Pusat Perdamaian LP3ES dan Forum Sebangsa tahun 2004. Lembaga ini meneliti sepuluh pesantren dari lima wilayah yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

"Hasilnya isu jender tidak ditolak dan sudah menjadi wacana publik. Dan sering tanpa disadari, para pengasuh pesantren sebenarnya bahkan telah pula melakukan pemberdayaan perempuan jauh sebelum gagasan tentang jender populer seperti sekarang ini," tulis Taftazani mengenai hasil penelitian itu dalam *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (2007).

Tak mudah mengubah tradisi yang turun temurun, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, bukan?

Nurun Nisa', Lies Marcoes-Natsir

Djudju Zubaidah
Ketua Nahdina, Tasikmalaya

PEMBEBASAN ITU MISI RASULULLAH

dok.WI/Nurul H. Maarif

KESETARAAN *perempuan di pesantren tidak terbatas pada perdebatan wacana dalam buku dan pidato, melainkan advokasi dan konseling secara berkesinambungan. Salah satunya dilakukan Forum Kajian dan Sosialisasi Hak-hak Perempuan Nahdina yang didirikan 21 April 2002 di Cipasung, Tasikmalaya. Ketua Nahdina Cipasung Djudju Zubaidah menyampaikan kiprah lembaganya kepada Nurul Huda Maarif dari the WAHID Institute.*

Apa ragam kegiatan Nahdina?

Kita mengadakan pelatihan untuk guru-guru yang ada di lingkungan Pesantren Cipasung, Tasikmalaya yang diasuh Ajengan KH. Ilyas Ruhiat, mantan Rais 'Am Syuriyah PBNU. Kita juga menyertakan guru-guru di sekitar pesantren. Ini ajang untuk berkomunikasi, advokasi, dan sosialisasi gagasan kita tentang isu Islam dan hak-hak perempuan. Kita juga memberikan pengertian bagaimana membangun paradigma baru tentang relasi lelaki dan perempuan, kesehatan reproduksi dan sebagainya. Pada tahap selanjutnya, karena ada masalah dan ada korban akibat relasi tidak seimbang yang selama ini berjalan, maka kita mengambil bentuk advokasi.

Advokasinya seperti apa?

Ada dua pola. *Pertama,* menyoroti kebijakan pemerintah daerah. *Kedua*, penanganan langsung korban. Jika ada peraturan daerah yang tidak berpihak pada perempuan atau diskriminatif, maka kita mengadakan dialog dan dengar pendapat dengan DPRD Tasikmalaya. Tujuannya supaya mereka melihat kembali bahwa sebenarnya aturan itu tidak boleh dilaksanakan begitu saja, tapi harus menampung aspirasi masyarakat yang akan diatur. Sedang untuk advokasi korban, kita bikin *crisis center* di pesantren, bekerja sama dengan Puan Amal Hayati cabang Cipasung.

Bagaimana respon DPRD?

Ketika dialog, umumnya mereka paham. Tapi untuk mengimplementasikannya dalam bentuk peraturan daerah yang adil, mereka mikir-mikir. Ada juga yang selama ini merasa telah diuntungkan, sehingga enggan untuk berubah.

Apa penyebab lainnya?

Paradigma lama masih tetap dipakai. Apa yang kita sampaikan, tampaknya hanya untuk konsumsi pemikiran. Karena di belakang mereka tetap sama saja. Jadi, banyak tokoh masyarakat yang terbuka pikirannya, tapi tindakan tetap saja.

Bagaimana dengan keluarga pemimpin Pesantren Cipasung?

Mereka justru lebih terbuka. Tapi kalau di tingkat ustadz kampung, itu masih banyak yang memakai paradigma lama. Walau mereka muda, tapi pemikiran tetap lama.

Respon Nahdina terhadap sikap mereka?

Memang untuk konsisten pada perjuangan itu banyak tantangannya. Namun kita akan terus mensosialisasikan bahwa perempuan itu bukan ladang diskriminasi. Kita, melalui Nahdina yang berdiri pada 21 April 2002, juga akan mensosialisasikan buku-buku baru yang mengkritisi isi kitab kuning yang mendeskriditkan perempuan, seperti '*Uqud al-Lujjayn*.

Apa rencana Nahdina lainnya?

Nampaknya Nahdina harus bekerja keras. Karena faktor yang mendukung timbulnya kekerasan semakin kuat. Sedang kerja kita masih sangat minim. Keadaan ekonomi yang terpuruk, misalnya, menjadikan perempuan sebagai korban. Kadang harus *nanggung* biaya hidup sendiri, ada yang ditinggalkan suami sementara anak sudah ada, dan banyak lagi. Jadi, karena masalah ekonomi nasib perempuan semakin terpuruk.

Apa dasar Anda dan Nahdina sehingga begitu gigih berjuang?

Islam yang dibawa Rasulullah SAW, itu agama pembebasan. Karena itu, saya harus melakukan pembebasan semampu saya, apapun resiko yang saya hadapi. Mengapa? Karena misi Rasulullah SAW diutus ke dunia itu untuk menegakkan keadilan.

dok.WI/Witjak

POLEMIK '*UQUD AL-LUJJAYN*: KRITIK DIJAWAB KRITIK

BERAWAL dari realitas kehidupan yang terus berubah, kitab *Syarh 'Uqud al-Lujjayn fi Huquq al-Zaujayn*, yang masih menjadi 'buku wajib' pesantren bagi istri dalam membina hubungan dengan suami, itu menyisakan banyak pertanyaan. Kitab karya Muhammad bin 'Umar Nawawi al-Bantani (1813-1898 M) banyak mengandung unsur ketidakadilan, utamanya terkait kedudukan perempuan di hadapan laki-laki. Penilaian seperti ini, antara lain, dinyatakan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).

Forum itu diketuai Ny. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, dan beranggotakan cendekiawan dan feminis muslim. Seperti KH. Husein Muhammad, Lies Marcoes-Natsir, Badriyah Fayumi, Syafiq Hasyim, Farcha Cicik, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Djudju Zubaidah.

Kitab yang menurut KH. Bisri Mustofa, ayah KH. Mustofa Bisri Rembang, membuat laki-laki besar kepala, itu ditelaah ulang FK3 secara kritis dan akademis. Telaah ini berupa *takhrij* (penelusuran terhadap riwayat-riwayat hadis yang menjadi sandaran buku ini) dan *ta'liq* (pemberian komentar atas beberapa pandangan penulisnya).

"Kitab-kitab kuning kerap menjadi pegangan hidup kami para santri. Jadi kitab yang masih bias jender kita reinterpretasi termasuk '*Uqud al-Lujjayn*," kata Sinta Nuriyah kepada Nurun Nisa' dari the WAHID Institute.

Setelah bekerja selama tiga tahun, Sinta dan timnya berhasil membuat buku telaahan atas kitab klasik ini. Buku itu terbit pada 2001 dengan judul *Wajah Baru Relasi Suami Isteri; Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*. Buku itu, kini menjadi acuan banyak aktivis perempuan dari pesantren, salah satunya Djuju Zubaedah dari Pesantren Cipasung (lihat: *Pembebasan Itu Misi Rasulullah*).

Terbitnya buku itu menuai kritik dari sejumlah 'kiai muda' dari Pasuruan Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT). Mereka membuat buku bantahan yang terbit pada 2004. Judulnya, *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3 dalam Buku Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*.

Forum ini dibentuk oleh Rabithah Ma'ahid Islamiyyah (RMI) Kabupaten Pasuruan. Dalam kata pengantarnya, Ketua RMI Kabupaten Pasuruan, KH. Abdul Halim Mutamakkin menyatakan, FKIT merasa terpanggil untuk meluruskan hasil telaah FK3.

Di bukunya masing-masing, dua kelompok ini selalu berseberangan. Misalnya perihal kebolehan suami memukul istrinya yang *nusyuz* -(membangkang). Menurut FK3, Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya dan bahkan melarang melakukannya.

"Bagaimanapun juga, pemukulan itu akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik. Lebih-lebih bila sampai diketahui anak-anak, maka dampaknya akan kian tidak baik lagi. Karena itu, pemukulan harus dihindarkan," tulis FK3 (hal. 52).

Mengomentari kesimpulan di atas, FKIT menyatakan, QS. al-Nisa' ayat 34 dengan jelas menolerir pemukulan untuk tujuan mendidik. "Yang jelas, dalam al-Qur'an perintah memukul sebatas pada hukum mubah, bukan wajib. Bahkan yang terbaik menurut para ulama, tidak melakukannya," balas FKIT (hal. 51).

Inilah ciri khas tradisi pesantren. Kritik selalu dijawab dengan pembelaan atau kritik balik, namun tetap dalam koridor saling menghormati satu sama lain, tanpa mengumbar kekerasan.

Nurul H. Maarif
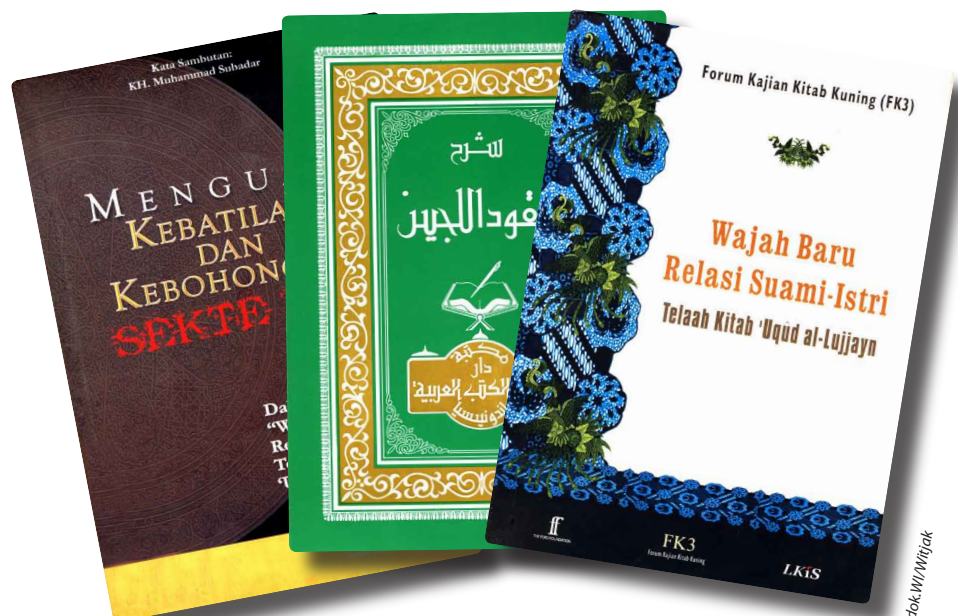
dok.WI/Witjak

'Uqud al-Lujjayn fi Huquq al-Zaujayn dan berbagai versi tafsirnya

dok.WI/QT

Suasana kelas SMP Qaryah Thayyibah

Pendidikan Alternatif yang Membebaskan

Jaringan SMP Qaryah Thayyibah menyediakan pendidikan murah, membebaskan dan kaya prestasi. Hakekat pendidikan pesantren ada di sini.

Sujono Samba (46) tersenyum ketika seorang murid menyodorinya selembar surat dari Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kota Salatiga, Jawa Tengah. "Dilarang menggunakan istilah-istilah yang ada di perguruan tinggi," bunyi salah satu butir surat itu. Pengajar Sekolah Menengah Pertama Qaryah Thayyibah (SMP QT) ini langsung teringat beberapa istilah yang kerap digunakan murid-muridnya seperti riset, disertasi, *report*, dan lainnya. Perkara itu rupanya dianggap para pejabat dinas pendidikan setempat menyalahi aturan dan harus diberi peringatan.

Tapi Sujono beserta para pendamping kelas dan seluruh siswa di SMP yang terletak di Desa Kalibening Kecamatan Tingkir, sebelah timur Kota Salatiga, ini tak terusik dengan surat teguran tersebut. Aktivitas belajar tetap berjalan seperti biasa. "Kalau keberatan istilahnya dipakai anak SMP, mestinya perguruan tinggi cari istilah lain," gurau Mudjab, pendamping kelas lainnya.

Menurut Mudjab, istilah-istilah tersebut adalah bentuk ekspresi dari misi pembebasan dan kemandirian sekolah yang berdiri sejak Juli 2003 itu. Pembebasan berarti keluar dari belenggu aturan formal yang membuat murid tidak kritis dan tidak kreatif. Sedang kemandirian berarti belajar tanpa bergantung apapun dan siapapun.

"Selama ini lembaga pendidikan formal membelenggu anak dengan sederet aturan yang tidak jelas kepentingannya buat si anak. Seperti baju dan sepatu seragam, dan masuk harus jam tujuh pagi," tambah Mudjab yang juga salah satu penggagas berdirinya sekolah ini.

Pendapat Mudjab ini diamini Ketua Komnas Perlindungan Anak Seto Mulyadi. Kak Seto, panggilan akrab pria berkacamata ini, mengakui sistem pendidikan di Indonesia belum membebaskan. "Sekarang anak-anak lebih banyak diperlakukan seperti robot; harus *nurut*, anak untuk kurikulum, sarat kekerasan, dan kadang sekedar mengejar nilai bukan proses, " kata Kak Seto (baca: *Karena Sekolah Kita Laksana Penjara*).

Maka para pengelola SMP QT membebaskan peserta didiknya belajar menurut keinginan. "Sumber pembelajaran telah tersedia tanpa batas. Bahkan pada persoalan hidup yang muncul setiap hari," kata Kepala Sekolah SMP QT Bahruddin.

Perlengkapan sekolah mahal, SPP sekolah mahal dan gedung sekolah mentereng, tidak berlaku bagi murid sekolah yang semula hanya menempati teras dan garasi sang kepala sekolah. Bahkan untuk menyiasati kekurangan ruang belajar, bilik-bilik milik rumah di sekitar kediaman Bahruddin disulap menjadi kelas yang dipakai bergiliran. Sekolah ini bagai terinspirasi sistem pesantren klasik yang tidak bergantung pada tempat dan aturan formal. "Mestinya seperti beginilah sistem pesantren kita," ujar Bahruddin.

Kebersahajaan itu dirancang sebagai perlawanan terhadap komersialisasi lembaga pendidikan formal. "Kalau orang berduit yang dicari adalah kualitas, persoalan biaya tidak masalah. Tapi kalau murah dan berkualitas *kan* alternatif bagi semua," jelas Bahruddin.

Pada tahun pertama berdiri sekolah ini diikuti 12 anak. Kini memasuki tahun keempat, SMP QT telah memiliki delapan pendamping (guru) dan 99 siswa dari kelas I sampai kelas IV. Sebagian besar muridnya adalah anak buruh tani dan pedagang pasar dengan penghasilan 15 sampai 20 ribu rupiah sehari.

"Bisa dibayangkan jika mereka harus membayar uang pangkal hingga 700 ribu, untuk SPP perbulan 35 sampai 40 ribu rupiah, belum lagi uang buku, uang saku dan macam-macam, tentu bagi mereka sekolah adalah barang yang sangat mahal," urai Mudjab.

Kini peminat sekolah ini mem*beludak*, tidak hanya dari Salatiga tetapi juga daerah lain, hingga Jakarta. Namun, kata Bahruddin, tidak ada pembedaan terhadap murid. "Kaya miskin akan diperlakukan sama di sini," ujarnya.

Jadi semua murid sekolah yang dilengkapi fasilitas internet 24 jam ini, tidak dikutip uang pangkal, uang seragam, uang buku dan sebagainya. Biaya operasional sekolah diambilkan dari APBD yang kecil untuk pendidikan SMP terbuka dan kocek wali murid. "Setiap anak yang mau masuk, wali murid dan pengelola ketemu untuk menentukan besar kontribusi yang disanggupi. Tidak harus sama satu anak dengan yang lainnya," jelas Mudjab.

Sekolah yang terdaftar di Diknas Kota Salatiga sebagai Pendidikan Luar Sekolah (PLS), ini juga membebaskan muridnya untuk mengikuti atau tidak Ujian Akhir Nasional (UAN). Tapi prestasi kerap diraih sekolah yang lahir dari Serikat Paguyuban Petani (SPP) Qaryah Thayyibah (QT) itu. Murid kelas 3 SMP QT, telah melahirkan karya ilmiah yang mereka sebut disertasi. "Disertasi itu sebagai tugas akhir karena dulu kita sepakat tidak ikut UAN," kenang Mariatul Ulfah (15), murid kelas IV SMP QT atau mereka kerap menyebut kelas 1 SMU singkatan dari Sekolah Menengah Universal.

Tengoklah disertasi Amri (15) dan Zulfi (15) yang mencoba membuat briket dari sampah dan bambu kering. Hilmy (15) meneliti *bio-urine* sebagai pengganti pupuk urea. Fina (15), Izza (14) dan Kana (15) melahirkan disertasi berjudul "Lebih Asyik Tanpa UAN". Untuk membuat karya itu, Fina rela mengikuti UAN kelas 3 di SMP 1 Salatiga. Hasilnya, dia meraih peringkat kedua dari seluruh peserta UAN di sekolah itu. Disertasi itu pun dijadikan buku dan menerima Indonesian Creative Award 2006 dari Yayasan Cerdas Kreatif Indonesia pimpinan Seto Mulyadi.

Tak sampai di situ, sejumlah novel pop dan kumpulan puisi yang diproduksi murid sekolah ini sudah diterbitkan Penerbit Matapena, Yogyakarta. Menyusul kemudian kumpulan puisi, katalog lukisan, serta presentasi tertulis dan vcd berbagai mata pelajaran. Kini murid-murid sekolah itu, sedang mempersiapkan sebuah album musik dan film hasil ciptaan mereka.

Atas berbagai prestasi itu, Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta mengganjar SMP QT dengan Sanata Dharma Award 2005. Ini adalah kali pertama USD memberikannya kepada pihak luar. "Sekolah ini mencoba menawarkan pendidikan bermutu dan murah. Bermutu bukan sekedar peringkat tinggi, tapi yang lebih penting mereka memberdayakan peserta didik dalam menghadapi realitas kehidupan sekitar," kata Dr. Budiawan, koordinator tim award USD.

Budiawan melihat metode pembelajaran SMP QT terfokus kepada anak didik, bukan guru. Dalam pendekatan seperti ini, anak-anak diberi kebebasan untuk belajar dari mana saja, belajar apa saja, tidak harus di kelas, semuanya diserahkan kepada anak.

Seperti saat berkunjung ke SMP QT, the WAHID Institute mendapati sebagian besar tempat belajar kosong pada jam pelajaran. Ternyata murid-muridnya sedang asyik belajar di sawah, ladang atau sungai.

Di dalam kelas maupun di luar, guru yang biasa dipanggil pendamping atau fasilitator dilarang mengarahkan proses pembelajaran. Pendamping hanya boleh mendengar dan menjaga agar kegiatan kelas tetap kondusif.

"Kita sebagai pendamping hanya berfungsi sebagai teman belajar yang juga harus belajar. Di sini tidak ada istilah guru-murid, yang ada adalah sekumpulan orang-orang yang ingin belajar," kata Mudjab.

Justru karena fungsi guru yang setara, anak-anak SMP QT terlatih membuat perencanaan kelas, menentukan materi, menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan hingga evaluasi belajar. "Semuanya dilakukan sendiri. Kelas I peran pendamping 50 persen, kelas II 25 persen, kelas III dan IV sudah *nggak* ada campur tangan pendamping , mandiri total," jelas Ahmad pendamping kelas IV.

Jadi jangan heran, kalau anak-anak kelas IV yang menamai kelasnya dengan Creative Kids merancang sendiri metode pembelajaran kelasnya setiap hari. Waktu sekolah dari jam 06.00 sampai jam 13.30, mereka bagi menjadi lima fase pembelajaran. Fase 1 (6.00 – 07.00) : mendampingi kelas I dalam *English Morning*. Fase 2 (07.00 – 09.30): *Knowledge* yang berisi penggalian pengetahuan umum yang diambil dari standar kompetensi kurikulum nasional. Fase 3 (10.00-2.00): Forum, waktu berkumpul anak-anak yang memiliki minat sama. Fase 4 jam 12.00-3.30: *Private*, di waktu ini biasanya para murid membuat kesepakatan. "Setiap dzuhur shalat berjamaah bersama, dan terkadang ashar-nya juga. Mereka juga mencari guru agama sendiri untuk belajar agama. Kalau malam sebagian mereka belajar agama di pesantren," ujar Ahmad. Dan terakhir fase ke-5 dari jam 13.30-15.00: Refleksi Bersama yang berisi evaluasi yang informal.

Memang belajar dan riset dijalankan menurut rencana masing-masing murid atau kelompok. Keuangan juga diatur mereka sendiri. "Singkatnya dari A sampai Z diatur anak-anak sendiri," papar Bahruddin.

Selain mengundang kekaguman, gaya belajar ala Kalibening ini bagai virus yang menulari daerah sekitarnya. Dalam kurun waktu empat tahun telah berdiri 10 sekolah sejenis.

dok.QT
Aktivitas siswa

dok.QT
Membuat film

"Tidak menutup kemungkinan akan bertambah terus," kata Bahruddin.

Di Kabupaten Boyolali didirikan SMP Terbuka Otek Makmur di Dusun Glinggang, Desa Kendel, Kecamatan Kemusu dan SMP Alternatif Setyo Tunggal di Dusun Tompak, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo. Di Magelang ada SMP Terbuka Mandiri di Dusun Belgi, Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan. Sedang di Kota Salatiga yaitu SMP Terbuka Bumi Madania di Dusun Tingkir, Desa Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir.

Di Kabupaten Semarang berdiri tiga sekolah, yaitu Kejar Paket B SMP Alternatif al-Barokah di Dusun Ketapang, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan; SMP Candi Laras Merbabu di Dusun Nglelo, Desa Batur, Kecamatan Getasan dan SMP QT Dusun Plantungan Desa Krandon Lor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

Sekolah-sekolah alternatif di atas didirikan oleh cabang Serikat Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT). "Tapi pengelolaan sekolah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat," jelas Bahruddin yang bersama KH. Mahfudz Ridwan merintis berdirinya SPPQT. Kini organisasi petani itu telah memiliki 80 cabang di Kabupaten Grobogan, Sragen, Magelang, Semarang, Salatiga, Surakarta, Boyolali (baca: *Pionir Dari Kalibening*).

Selain aktivis SPPQT, murid SMP QT pun tergugah untuk membangun sekolah sejenis di daerah asalnya. Na'im, murid kelas IV, anak seorang penilik sekolah tingkat Propinsi Jateng yang asal Cilacap, misalnya, sudah mulai merintis sekolah sejenis di daerahnya. Sehingga ia harus bolak-balik Cilacap-Salatiga.

Kesamaan nilai yang diyakini juga menjadi pencetus berdirinya sekolah-sekolah itu. "Nilai-nilai universal yang menjadi landasan bersama, misalnya, kemanusiaan, keadilan, pelestarian lingkungan dan kesetaraan gender," kata Mudjab yang juga merangkap Kepala Sekolah di SMP QT Harapan Makmur, Dusun Plantungan yang berdiri sejak 2005.

Menurut Mudjab sekolah yang dipimpinnya itu, didirikan karena alasan yang sama seperti di Kalibening. "Kemiskinan penyebab banyak anak putus sekolah. Kita ingin anak-anak petani bisa mendapat pendidikan bermutu tapi terjangkau. Selain itu, bagaimana menerapkan sistem pendidikan yang memberdayakan, tidak malah menindas," jelas alumnus Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta ini.

Sekolahnya, kata Mujab, yang menempati ruangan bekas TPA itu memiliki delapan siswa. Di kelas satu, tiga orang dan sisanya di kelas II, dengan jumlah pengajar delapan orang. "Jadi masing-masing anak didampingi satu orang teman atau guru," ujar Lina, salah seorang pengajar.

Murid SMP Alternatif al-Barokah Ketapang lebih banyak. Berdiri sejak 24 Mei 2005, sekolah ini sekarang menampung 36 siswa yang terbagi dalam dua kelas. Metode pembelajaran diserahkan kepada anak-anak, dengan ditunjang fasilitas internet dan laboratorium alam.

"Karena sistem yang dipakai adalah kejar paket B, anak-anak lebih menekankan diri pada *life skill* di bidang pertanian dan perikanan," papar Sumarno pengajar SMP Al Barokah.

Lagi-lagi mahalnya biaya pendidikan menjadi alasan berdirinya sekolah ini. "Alasan lainnya, membangkitkan kembali budaya lokal yang makin dipinggirkan modernitas," kata Sumarno.

Dengan berbekal kemauan dan kerja keras, Sumarno bersama delapan guru dan lima pengelola mampu membuktikan, bahwa model pendidikan ini justru diterima masyarakat dengan antusias. "Salah satu murid di sini pindahan dari SMP negeri. Bahkan dia anak kepala sekolah itu," tutur Sumarno bangga.

Kebanggaan juga tampak di wajah pengajar di SMP Candi Laras Merbabu Ely Nurhayati. Sekolah yang dirintis oleh SPP QT sejak 2004 itu telah berhasil memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

"Bukan hanya karena sekolah kami mampu menerapkan metode belajar yang disukai murid, juga komitmen para pengajar yang tidak kenal lelah," kata Ely.

Setiap kali mengajar, Ely dan beberapa pengajar harus menempuh perjalanan 8 kilometer. "Kami sering menginap di sekolah karena satu-satunya *transport* yaitu ojek sudah habis," tambah mahasiswa tingkat akhir STAIN Magelang ini.

Dua puluh satu anak tercatat sebagai siswa SMP yang berada di lereng Gunung Merbabu ini. Dengan menempati salah satu rumah penduduk, sekolah yang terbagi dalam tiga kelas ini dilengkapi akses internet, bantuan seorang pengusaha internet dari Salatiga.

Menurut Ely saat ini anak-anak sedang membuat film dokumenter tentang sekolah mereka. "Memang belum seberapa," kata Ely, "tapi sebagai anak yang hidup di gunung, pencapaian seperti ini luar biasa."

Meski dengan fasilitas seadanya orang-orang miskin juga mampu mengukir prestasi. Tapi sepatutnya pemerintah tak hanya berpangku tangan.

Gamal Ferdhi, Subhi Azhari, Ahmad Suaedy

dok.pribadi

BAHRUDDIN

Pionir dari Kalibening

SEBUAH sepeda dengan sarat beban terparkir di depan sebuah warung kelontong di Salatiga, Jawa Tengah. Si empunya sedang menemui pemilik warung guna menitipkan barang dagangan, sekaligus mengambil uang penjualan dari barang yang dititipkan hari sebelumnya. Meski letih, pemuda 17 tahun itu tetap semangat menjalankan rutinitas sehari-harinya itu.

Bahruddin, nama pemuda itu, adalah salah satu tulang punggung di keluarganya. Di tengah beratnya beban ekonomi ia harus menyisihkan waktu sepulang sekolah untuk menjajakan makanan dan minuman ke warung-warung.

“Saya hidup bersama ibu dan adik saya, Jadi saya harus belajar bagaimana menjawab persoalan kehidupan ini,” kata Bahruddin, mengenang masa mudanya dulu. Kini pria yang lahir pada 09 Februari 1965 itu dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMP Qaryah Thayyibah Kalibening, Salatiga.

Pak Din, begitu ia akrab disapa muridnya, merasa bahagia jika mengenang perjuangan hidup di masa remajanya itu. Diakuinya, masa sekolah membentuk karakter dan kepeduliannya terhadap masyarakat miskin di desanya. Pria berambut sepunggung ini kerap *terenyuh* melihat anak-anak tetangganya yang umumnya petani, harus putus sekolah karena biaya yang semakin melangit. “Sementara negara semakin tidak peduli,” tegas pengagum Ivan Illich, penulis *Masyarakat Tanpa Sekolah*.

Pak Din tak bisa tinggal diam. Terinspirasi Paulo Freire, dalam karyanya *Pendidikan Kaum Tertindas*, pada 2003 ia memelopori berdirinya SMP Alternatif Qaryah Thayyibah di Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga, tempat ia dilahirkan dan menetap. Pak Din meyakinkan para tetangganya bahwa keterbatasan ekonomi bukan alasan menghambat anak-anak mereka melanjutkan belajar. “Sekolah boleh saja berhenti tetapi belajar harus terus berjalan,” kata Pak Din kala itu.

Setamat dari Pendidikan Guru Agama Negeri Salatiga pada 1984 dan nyantri selama dua tahun di Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien di Tulung Agung, Jawa Timur, ia melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo cabang Salatiga dan tamat tahun 1993.

Latar keluarga yang sangat ketat menerapkan tradisi agama membuat anak keempat dari lima bersaudara ini ikut merasakan pendidikan ala pesantren yang diasuh ayahnya. Meskipun hal itu tidak lama dirasakannya, karena sejak kelas 1 SMP ayahandanya, KH. Abdul Halim pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien di Kalibening wafat.

dok.WI/Witjak

Suami Miskiyah, ini selalu melihat kehidupan yang dilaluinya sebagai proses belajar yang terus-menerus. Semasa muda, Bahruddin aktif dalam kegiatan organisasi naungan Nahdlatul Ulama seperti Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Aktivitas semacam ini membentuk bakat kepemimpinan Bahruddin.

Namun kesibukannya di atas tidak membuat lupa bapak, dari Rasikh Mustagits Hilmy, Teovany Zahra dan Yudatama, ini akan nasib petani di desanya. Bahruddin berempati dengan nasib para petani yang setiap hari dihadapkan pada persoalan biaya produksi yang semakin mahal, sementara hasil pertanian semakin murah.

“Kita semua tahu bagaimana nasib petani yang kerja dari pagi sampai sore tetapi selalu tak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Juga perlindungan negara terhadap petani yang nyaris tidak ada sama sekali,” keluh Bahruddin.

Dia pun menemukan akar masalahnya yaitu terpecahnya kekuatan kaum petani. Karenanya pada tahun 1989 bersama kelompok-kelompok petani di desanya dan atas dukungan pengasuh Pesantren Edy Mancoro KH. Mahfudz Ridwan, Bahruddin mendirikan Serikat Paguyuban Petani Qaryah Thayyibah (SPPQT) sebagai alat untuk membangun kekuatan bersama. “Dengan persoalan-persoalan yang dihadapi petani, kita perlu berorganisasi,” ujarnya.

Meskipun pada awalnya SPPQT hanya diniatkan sebagai wadah para petani di Kalibening, kenyataannya ratusan kelompok petani di luar desa itu secara sukarela menjadi bagian dari SPPQT di daerahnya.

Dalam kurun 17 tahun terakhir, SPPQT telah menjadi salah satu jaringan petani terbesar di Jawa Tengah. Delapan puluh cabang SPPQT telah berdiri di 11 kabupaten yakni Semarang, Magelang, Salatiga, Purwodadi, Sragen, Boyolali, Jepara, Temanggung, Kendal, Batang dan Wonosobo. Dari sana jugalah SMP Qaryah Thayyibah digagas.

Subhi Azhari

dok.WI/Witjak

Dr. Seto Mulyadi
Ketua Komnas Perlindungan Anak

"KARENA SEKOLAH KITA LAKSANA PENJARA"

SISTEM *pendidikan di Indonesia belum membebaskan. Peserta didik menjalani proses belajar laksana dalam penjara. Sekolah alternatif bisa menjadi solusi. Demikian disampaikan Ketua Komnas Perlindungan Anak Dr. Seto Mulyadi kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.*

Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang membebaskan?

Membebaskan anak untuk berkreasi, mengekspresikan perasaannya, dan sebagainya. Intinya tidak membebani anak dan tidak menjadikan sekolah itu seperti penjara. Ketika anak mendengar "Hari ini boleh pulang, kerena ibu guru mau rapat," mereka bilang "Horeee, bebas!". Ini karena sekolah kita laksana penjara. Seharusnya sekolah itu membebaskan ide-ide kreatif mereka.

Sistem pendidikan kita sudah membebaskan?

Belum. Kesadaran bahwa pendidikan itu untuk anak, belajar itu hak bukan kewajiban, itu masih minim. Sekarang anak-anak lebih banyak diperlakukan seperti robot; harus *nurut*, anak untuk kurikulum, sarat kekerasan, dan kadang sekedar mengejar nilai bukan proses. Ini sangat merugikan bagi pengembangan kreativitas dan kemandirian anak.

Seperti apa sekolah yang membebaskan?

Seperti *home schooling*, sekolah alternatif, juga sekolah alam yang memungkinkan anak belajar dengan cara masing-masing. Kalau ada delapan standar pendidikan nasional yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), maka yang harus diikuti hanya tiga; yaitu standar isi kurikulum, standar kompetensi lulusan dan standar evaluasi. Sedangkan standar proses, standar guru, standar biaya, standar sarana prasarana, itu bebas.

Bagaimana cara mengevaluasinya?

Sama saja, pakai pertanyaan-pertanyaan standar kompetensi yang diharuskan. Bahkan kami sedang mendesak mereka tidak saja bisa ikut ujian kesetaraan, tapi juga ujian nasional sama seperti sekolah formal. Di sini akan dilihat anak-anak yang sekolah lewat jalur formal dan informal itu kualitasnya sama apa tidak. Penelitian di AS menunjukkan, mereka yang *home schooling*, secara akademik maupun psiko sosial-nya banyak yang lebih tinggi dari anak-anak yang sekolah biasa.

Peran guru dalam model sekolah ini?

Sebagai fasilitator proses belajar. Guru juga bisa belajar bersama-sama dengan murid.

Lokasi belajarnya di mana?

Bisa di mana saja. Di tenda, rumah, atau pasar. Sesekali mereka diajak keluar. Misalnya ke kantor polisi, pemadam kebakaran atau apa saja.

Bagaimana pendekatan belajarnya?

Tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Bukan anak untuk kurikulum, tetapi kurikulum untuk anak. Jadi, kurikulum didesain untuk anak dalam kondisi yang berbeda. Misalnya, untuk anak-anak di Pasar Induk Kramat Jati, kalau ditanya kenapa tidak sekolah? Mereka jawab, "Sekolahnya terlalu ketat, kami tidak bisa kerja". Maka pilihannya pendidikan alternatif. Kita jemput bola. Modelnya kelas berjalan; kita *datengin* dan kita sediakan fasilitas. Setelah belajar di hari Sabtu, mereka bisa kembali menjual koran, menyemir sepatu, mengupas kerang atau apapun. Jadinya, mereka belajar sangat semangat dan gembira.

dok.istimewa

Seni Islam Nuansa Lokal

Karya seni Islam yang bernuansa lokal kian terdesak. Kiai-kiai lokal kini mengkreasinya untuk syiar Islam dan reinvensi budaya. Ada yang dibuat dengan ritual khusus.

dok.WI/Witjak

Kaligrafi "Selalu Baik" karya Jauhari AR

Lukisan itu menampilkan wayang Batara Krishna. Ia berdiri gagah diantara dua gunungan dengan latar empat baris tulisan. Sekilas, tulisan itu seperti aksara Jawa, *hanacaraka*.

Namun jika ditelisik, aksara dalam lukisan berjudul *Selalu Baik* itu ternyata QS. al-Qashash: 77, yang berisi perintah Allah untuk menemukan keseimbangan dunia dan akhirat.

Demikian pula kaligrafi *Allah, Muhammad*. Penikmat lukisan yang melihat selintas, akan menyangka itu huruf kanji, aksara dari Jepang. Padahal itu kaligrafi Arab dari QS. al-Ikhlas: 1-4 dan QS. al-Ahzab: 40.

Nuansa lukisan China yang kerap menampilkan alam sebagai obyek, juga tampak dalam lukisan berjudul *Asma'ul Husna*. Lukisan yang terdiri dari tiga *frame* ini menampilkan QS. al-A'raf: 180.

Itulah keunikan kaligrafi multikultural karya Jauhari Abd. Rosyad. Alumni Ponpes Lirboyo Jawa Timur itu menampilkan lukisan dipadu kaligrafi dengan mengadopsi berbagai aksara.

"Jenis tulisannya dari beragam kultur. Ada kaligrafi Arab, Mandarin atau Cina, Jawa, Jepang, bahkan Hirogliph," ujar ayah dua putera ini.

Melalui karyanya, Jauhari mendekonstruksi kaligrafi yang selalu diidentikkan dengan aksara Arab. "Kultur non-Arab juga bisa dijadikan alat memahami al-Qur'an," jelasnya (baca: *Wajah Islam Damai di Dinding Kanvas*).

Budaya Islam nusantara memang berbeda dari budaya Arab. Dari pemahaman itu, Pengasuh Ponpes al-Falah Tinggarjaya Mangunsari Jatilawang Banyumas, KH. Ahmad Sobri membuat bedug-bedug raksasa. Ia khawatir, tradisi luhur warisan Wali Songo itu hilang.

"Saya takut dengan syiar Islam yang hampir hilang. Makanya, ini yang saya lakukan," ujarnya.

Di perkotaan, bedug banyak hilang, kata KH. Sobri, karena ada kelompok yang menganggapnya sebagai *bid'ah* (menyimpang, *red*.). "Kalau hal ini dibiarkan, tradisi NU atau Wali Songo akan hilang," imbuhnya (baca: *Mengawal Tradisi dengan Bedug*).

Pelestarian tradisi lokal ke dalam khazanah Islam, juga ditempuh para pembuat al-Qur'an raksasa dari Ponpes Al-Asy'ariyyah, Kalibeber, Wonosobo.

Abdul Malik, salah satu anggota tim pembuat al-Qur'an berukuran 1,5 x 2 m itu, menyatakan terjadi perdebatan saat menentukan motif ornamen. "Ada yang ingin sama dengan al-Qur'an pada umumnya. Akhirnya, ornamen khas Indonesia dengan motif tumbuh-tumbuhan bertuliskan al-Asy'ariyyah yang disetujui. Ini agar nama pesantren kami terukir di sana," ungkap Malik yang kebagian menggambar ornamen mushaf besar itu.

Khath atau tulisan Arab dalam mushaf ini ditulis Hayatuddin. Ia menggunakan perlatan tradisonal. Karena kertasnya besar, huruf dan ornamennya juga harus lebih lebar. "Jadi bambu wuluh kami raut menjadi mata pena yang besarnya sesuai kebutuhan," jelas Malik.

Penggagas al-Qur'an raksasa itu adalah Pengasuh Ponpes al-Asy'ariyyah (alm) KH. Muntaha al-Hafidz yang akrab disapa Mbah Mun. Mbah Mun ingin al-Qur'an langgeng di seluruh Indonesia.

dok.WI/GamalFerdhi

KH. Ahmad Faqih & Abdul Malik di depan mushaf raksasa

dok.WI/GamalFerdhi

Al-Qur'an terberat di dunia karya Ponpes al-'Ashriyyah Nurul Iman, Parung

"Biar kita terpacu untuk menghafalnya. Lebih baik lagi kalau mengamalkannya," kata Mbah Mun ditirukan putra tertuanya KH. Ahmad Faqih Muntaha.

Ada alasan lainnya. Mbah Mun bermaksud menjaga warisan kakeknya, KH. Abdurrohim, seorang ahli menulis mushaf al-Qur'an. Karya KH. Abdurrohim itu hilang saat al-Asy'ariyyah diserbu tentara Belanda pada agresi militer II tahun 1948.

Keberadaan mushaf itu terus ditelusuri. Hingga di tahun 1990, Mbah Mun menemukan al-Qur'an tulisan KH. Abdurrohim yang terbakar di sebuah lemari tua. "Dari situ timbul ide menulis al-Qur'an dalam bentuk yang besar," ungkap Malik kepada Gamal Ferdhi dari the WAHID Institute.

Awalnya al-Qur'an raksasa itu ditulis di atas kertas berukuran 1 x 1,2 m. Kebetulan saat mereka telah merampungkan dua juz, Harmoko, Menteri Penerangan kala itu, berkunjung ke Ponpes al-Asy'ariyyah.

Mbah Mun pun mengungkap proyek besarnya kepada orang dekat Presiden Soeharto itu. "Lalu dikirimlah 1000 lembar kertas berukuran 1,5 x 2 m," kenang Malik yang nyantri kepada Mbah Mun sejak 1988.

Dikatakan Malik, mushaf raksasa yang dikerjakan mulai Oktober 1991-Desember 1992, itu ditulis dalam kondisi suci. "Sebelum menulis harus berwudhu. Jika batal, wudhu lagi. Juga puasa dan tahajud," kata lelaki asli Sleman, Jogjakarta itu.

Pembuatannya pun dalam ruangan khusus yang tertutup. Orang yang datang ke ruang kerja mereka tak diperkenankan menyentuh mushaf. Hasilnya, tercipta al-Qur'an terbesar pertama buatan Ponpes al-Asy'ariyyah. Karya adiluhung, berukuran 2 m x 1,5 m, itu lalu diserahkan kepada Presiden Soeharto dan ditempatkan di Bina Graha.

Sisa kertas besar dari proyek pertama itu, mendorong Mbah Mun mengajak para santrinya berkarya lagi. Lahirlah mushaf raksasa kedua dan ketiga yang kini disimpan di Masjid at-Tin TMII dan Islamic Center Jakarta.

Menurut KH. Ahmad Faqih, pesantren yang kini dipimpinnya tidak lagi membuat mushaf raksasa. Karena mulai mushaf keempat, pembuatannya ditangani Universitas Sains al-Qur'an (Unsiq) Kalibeber, Wonosobo. Ini perguruan tinggi yang berada dalam satu yayasan dengan Ponpes al-Asy'ariyyah.

"Penulisan mulai keempat hingga keenam, ornamennya sudah cetak dengan komputer walau khath-nya dengan tangan," ungkap KH. Ahmad.

Kini, Unsiq sukses membuat mushaf raksasa yang ditempatkan di Masjid Agung Jawa Tengah. Mereka sudah memenuhi pesanan Sultan Brunei Darussalam yang ditempatkan di Istana Nurul Iman Brunei. Bahkan pesanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan hampir rampung.

Kreasi unik lainnya adalah mushaf terberat di dunia. Karya ini digagas oleh Pimpinan Ponpes al-'Ashriyyah Nurul Iman Parung Bogor Habib Saggaf bin Mahdi bersama sembilan ulama lainnya. Ketika menulis, mereka harus suci dan berpuasa.

Mushaf seberat 1,3 ton yang terbuat dari lempengan alumunium, itu dibuat selama 5 tahun sejak 1985. "Mushaf ini dibuat sebelum adanya Ponpes al-'Ashriyyah Nurul Iman," ujar Habib kepada Nurul Huda Maarif dari the WAHID Institute.

Mushaf berukuran 120 cm x 100 cm itu, setiap juznya membutuhkan 10 lempengan. Total 300 lempengan untuk 30 juz. "Kita membuat al-Qur'an ini, intinya ingin mencontoh Rasullah dengan mengumpulkan naskah al-Qur'an yang berserakan," kata Habib .

Walau menggunakan medium berbeda, kreasi-kreasi unik itu dibuat dengan alasan hampir sama. Para pembuatnya ingin menyebarkan Islam secara kultural, damai dan tanpa kekerasan.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.WI/Witjak

JAUHARI ABDUL RASYAD

Wajah Islam
Damai di Dinding Kanvas

MENAMPILKAN wajah Islam yang damai tak mesti lewat orasi atau karya ilmiah. Kanvaspun bisa dijadikan media. Itulah yang dilakukan kaligrafer Jauhari Abdul Rasyad.

”Saya hanya bisa menulis kaligrafi. *Ngajar* atau pidato *nggak* bisa. Yang penting saya memberikan sesuatu untuk perdamaian dunia ini,” ujar alumni 1996 Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur kelahiran Jakarta 1973 ini.

Peraih juara pertama lomba kaligrafi se-Jawa Timur pada 1992 ini adalah pelukis otodidak. Ia sengaja memilih isu pluralisme agama, keadilan sosial, juga multikulturalisme, sebagai tema karyanya.

Kaligrafi “Hati yang Selamat” karya Jauhari Abdul Rasyad

”Saya prihatin! Sekarang banyak muncul kelompok Islam radikal yang mengusung isu syariatisasi dan menafikan toleransi atau pluralisme,” ujar ayah dua putera ini beralasan.

Melukis kaligrafi dengan tema-tema tersebut, diakui Jauhari memakan banyak tenaga dan pikiran. ”Karena menabrak teks lama, kadang ini membuat pergulatan pikiran dan batin,” katanya.

Karena itulah, sebagian orang Islam setelah melihat lukisannya malah meragukan keislaman Jauhari. ”Pernah dibilang murtad, bahkan teman baik jadi menjauh. Ini resiko dari kebebasan pikiran saya,” imbuhnya.

Melalui lukisan-lukisannya, lulusan Madrasah Aliyah (MA) Lirboyo ini ingin mengingatkan pentingnya menghargai sesama manusia, apalagi sesama muslim. ”Kita harus saling menghargai. *Wong* kita masih sama-sama sembahyang *madep ngulon* (menghadap ke barat, *red.*) kok,” katanya.

Jauhari mengaku pandangannya banyak dipengaruhi Gus Dur. ”Saya baca karya-karya Gus Dur dan *ngaji* bulan puasa pada beliau di Pesantren Ciganjur,” aku pria yang pernah melukis kaligrafi di beberapa masjid besar di Jawa ini.

Untuk menyampaikan gagasan multikulturalisme dan toleransinya, Jauhari menggelar pameran tunggal di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta, pada 26 Mei hingga 03 Juni 2007.

”Untuk mencapai tujuan itu, penikmat lukisan saya harus melihatnya secara runtun. Makanya, itu saya susun sedemikian rupa; kita tahu Allah dulu, di mana posisi kita, baru masuk wilayah itu,” jelasnya.

Pada pameran perdananya yang bertema *Kaligrafi Multikultural* ini, ia menampilkan kaligrafi dengan latar tulisan dari beragam kultur. Ada kaligrafi Arab, Mandarin atau China, Jawa, Jepang, bahkan Hirogliph. Pameran itu menampilkan 41 buah karyanya, yang dilukis tiga tahun terakhir.

Bukankah kaligrafi Islam itu identik dengan tulisan Arab? ”Itulah masalahnya. Islam diidentikkan dengan Arab. Padahal Islam ya Islam! Arab ya Arab! Keduanya beda. Karena itu, kultur non-Arab saya jadikan media memahami al-Qur’an,” pungkasnya.

Nurul H. Maarif

dok.WI/Nurul H Maarif

KH. Ahmad Sobri
Pengasuh Ponpes al-Falah, Banyumas

Mengawal Tradisi dengan Bedug

BEDUG *di masjid-masjid kota besar banyak disingkirkan, lantaran dinilai* ***bid'ah*** *(menyimpang,* ***red.****). Sebagai perlawanan, KH. Ahmad Sobri membuat beberapa bedug berukuran besar. Berikut petikan wawancara Pengasuh Ponpes al-Falah Tinggarjaya Mangunsari Jatilawang Banyumas itu dengan Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute:*

Apa latar belakang pembuatan bedug-bedug raksasa ini?

Saya melihat, sepertinya bedug di masjid-masjid kota besar sudah pada punah atau hilang. Saya takut sekali dengan syiar Islam Indonesia yang hampir hilang. Makanya, inilah yang saya lakukan.

Hilang karena faktor apa?

Karena ada yang menganggap bedug itu *bid'ah*. Kalau hal ini dibiarkan, tradisi NU dan Wali Songo akan hilang.

Bagaimana dampak dibuatnya bedug ini bagi masyarakat?

Saya melihat, masyarakat menjadi semangat ke masjid, karena ada suara bedug sebelum Jum'at misalnya. Orang yang sedang bekerja tahu, oh bedugnya sudah berbunyi. Dan kalau *nggak* ada rumah-rumah, bunyinya bisa terdengar sampai 5 km. Itu tanpa pengeras suara.

Ada ritual khusus dalam proses pembuatannya?

Setiap membuat kita mulai di hari Rabu (menurut tradisi Islam, Rabu adalah hari yang paling baik, *red*.). Kita mengerjakannya malam hari dengan didahului tahajjud. Yang kerja *nggak* boleh batal wudhu' sebelum pasang *welulang* (kulit). Kalau kentut wudhu lagi.

Kenapa?

Karena ini bukan untuk pameran, melainkan untuk memanggil umat menghadap Allah SWT. Jadi bukan sekedar bikin. Kita juga berdoa agar bedug ini bermanfaat dan menggugah semangat umat untuk beribadah, karena ini salah satu alat memanggil atau syiar untuk mereka.

Berapa besar bedug yang pernah Anda buat?

Beduk terbesar buatan saya diameter mukanya 315 cm. Ada juga Bedug Wulung Mangunsari yang diameter muka dan belakangnya 203 cm. Namanya khas Banyumas. Nama yang agak angker. Kalau Mangunsari itu dari bahasa Arab *ma'unatu al-sari*, yang artinya pemberian Allah SWT kepada orang yang suka berjalan malam. Bukan jalan kaki, melainkan banyak memohon di waktu malam. Karena orang Jawa *kangelan* (kesulitan, *red*) *nyebut* Arabnya, jadinya Mangunsari.

Berapa bedug yang akan Anda buat?

Saya merencanakan bikin sembilan buah. Itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil kita bikin banyak.

Bedug ini dipakai untuk acara apa saja?

Hari raya, Jum'at, muktamar, juga MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an). Dan sudah dibawa ke banyak tempat, ke Langitan, Kediri, dan sebagainya.

Ada pesan untuk generasi NU?

NU itu juga punya jutaan orang ortodok. Juga ada banyak *thariqah* (lembaga spiritual Islam, *red.*). Ini kekayaan NU yang belum tersentuh. Saya berharap, kita tidak meninggalkan tradisi yang sudah digarap sejak zaman Rasulullah SAW.

Kaligrafi "Ulama" karya Jauhari Abdul Rasyad

Aksi tolak PLTN masyarakat Jepara

dok.WI/Nurul H. Maarif

PEWARIS NABI

Pelestari Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang kian parah membangkitkan kepedulian para pemimpin agama. Mereka bersatu dengan aktivis dan rakyat melawan dan memperbaiki kerusakan.

Semangat ribuan orang yang hadir di Lapangan Ngabul Tahunan, Jepara tak luluh disengat terik matahari. Mereka, adalah tokoh agama, aktivis parpol, aktivis LSM, petani, buruh, nelayan, masyarakat, bahkan santri pondok pesantren.

Berbagai poster diacungkan tinggi-tinggi; *Nuklir Bikin Kere*, *PLTN Ora Sudi*, *Ngurus Lapindo Wae Ora Becus Arep Ngurus PLTN*. Satu tekad mereka; menolak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)!

Itulah suasana Aksi Akbar dan Doa Bareng Tolak PLTN Muria yang dihelat Forum Masyarakat Muria (FMM). Aksi ini berlangsung bertepatan peringatan Hari Lingkungan Hidup, 05 Juni silam.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Jepara KH. Nuruddin Amin saat didaulat menyampaikan sambutan mengajak hadirin membaca Shalawat Anti PLTN. "Kita semua baca shalawat ini minta syafaat Rasulullah SAW. Semoga kita dijauhkan dari bencana PLTN," ujar Gus Nung, sapaan akrab Nuruddin.

Syair shalawat itu digubah Zakariyya el-Anshori pada 1997. "Shalawat ini saya buat dalam tulisan latin maupun Arab *pegon (*aksara Arab berbahasa Jawa*,* red.*)*. Asumsi saya, 80 persen rakyat Jepara 'beragama' NU. Jadi ini cukup efektif untuk menggerakkan massa," kata Iyank, sapaan akrab Zakariyya (baca: *Melawan Nuklir dengan Shalawat*).

Menurut Iyank, tujuan shalawat itu untuk mengingatkan rakyat akan bahaya PLTN. Bahaya proyek itu juga disampaikan Gus Nung. Menurutnya, manfaat PLTN sebatas pengetahuan tentang teknologi nuklir. Tapi dampak negatifnya lebih besar.

"PLTN rentan radiasi. Ini akan menghancurkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kudus dan Jepara," jelas Gus Nung.

Gus Nung menilai, PLTN lebih banyak *mudharat* ketimbang manfaatnya. "Apapun yang diharamkan, itu karena *mudharat*nya lebih besar dari manfaatnya," jelasnya kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute.

Ketua Jamaah Hubburrasul Habib Abdullah al-Hinduwan punya pandangan unik. Sembari mengutip QS. al-Baqarah ayat 219, ia mengiaskan PLTN dengan *maysir* (judi, *red*).

"Kita semua yang jadi korban. Yang dapat untung siapa? Ini namanya *maysir* (judi, *red*). Kita harus tolak!," tegasnya disambut persetujuan hadirin.

Penolakan masyarakat itu dituangkan dalam Petisi 13 untuk Penolakan PLTN. Petisi itu ditandatangani 13 organisasi terdiri dari aktivis lingkungan, politisi, perkumpulan agama dan masyarakat. Dan segera dilayangkan ke DPR.

Dua pekan sebelum aksi itu, sekitar 150 tokoh masyarakat kawasan Muria menggelar dialog publik. "PLTN itu makhluk. Makhluk pasti rusak. Jika PLTN rusak, yang jadi korban rakyat. PLTN itu malapetaka yang tertunda," tegas mantan Ketua PCNU Jepara H. Muhammady Kosim saat *Dialog Penjaringan Aspirasi Warga Jepara terhadap Rencana Pembangunan PLTN di Kawasan Muria*, di Jepara.

Usulan membangun PLTN di Semenanjung Muria muncul sejak 1978, ketika Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) melakukan kajian awal bersama Pemerintah Italia. Pembangunannya direncanakan pada 1997. Tapi batal karena krisis moneter.

Rencana diubah. Pelaksanaan tender dan penetapan pembangunan PLTN ditargetkan mulai 2007-2008 dan konstruksinya selesai pada 2010. Rencana inipun tak terwujud. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) mencanangkan pembangunan pada 2010 dan beroperasi pada 2016.

Rencana ini pun tak mudah diwujudkan. Gelombang penolakan masyarakat kian terbuka. Apalagi banyak tokoh yang peduli lingkungan turut bersuara. Bahkan mantan Presiden Gus Dur juga melontarkan penolakan atas rencana ini.

"Keinginan SBY-JK membangun pembangkit nuklir di wilayah Gunung Muria, Jepara, itu tidak disertai pertimbangan matang," kritiknya saat memberi sambutan pada *Konferensi Internasional Antaragama* di Bali dua pekan silam.

Penolakan Gus Dur ini bukan baru sekarang. Pada 1995, Gus Dur niat berpuasa di tempat bakal PLTN sebagai protes. Alasannya sangat NU. Karena di sana ada makam wali. Pembangunan PLTN akan merusak lingkungan dan makhluk Tuhan.

Para ulama yang dalam hadis disebut pewaris para nabi ini, lalu terpanggil. Mereka tak tinggal diam menghadapi problem umatnya. Gerakan para kiai ini tak hanya terlihat pada penolakan rencana pembangunan PLTN Muria, tapi juga membantu menangani korban lumpur Lapindo. Gerakan ini digagas Pengasuh Pesantren al-Islamiyah, Tanggulangin, Sidoarjo KH. Hasyim Ahmad dan 18 kiai lainnya.

Mereka mendirikan Posko Independen untuk Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo. "Kini banyak rakyat di sini sengsara akibat lumpur Lapindo," tegas Kiai Hasyim. (baca: *Posko Kiai untuk Korban Lapindo*).

Tragedi ini, kata Kiai Hasyim, karena alam dieksploitasi dan dirusak. "*Mbok*, orang yang mau menggali potensi alam yang sudah diizinkan Allah SWT ini juga menghormati alam, termasuk manusia," kata alumni santri Sayyid Alawi al-Maliki di Mekah ini.

"Pandangan senada datang dari KH. Nasruddin Anshori. Bagi yang masih tinggal di atas bumi, sudah menjadi kewajiban kita untuk *eling* (ingat) dan mawas diri, sehingga hanya pikiran, ucapan dan tindakan kebaikanlah yang kita lakukan," kata Pengasuh Pesan Trend Ilmu Giri Bantul, Yogyakarta ini saat peringatan Hari Bumi di pesantrennya akhir April silam.

Pesan Trend bervisi membebaskan masyarakat setempat dari keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan, juga melestarikan lingkungan dan memelihara alam. Oleh sebab itu, KH. Nasruddin yang pernah menjadi aktivis LP3ES ini, mencanangkan penanaman ribuan pohon jati dan cendana di lahan seluas 200 hektar. Hasilnya dimanfaatkan 400 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kawasan itu.

Bahkan Ilmu Giri menawarkan konsep baru pelestarian lingkungan. Ketika seorang remaja hendak menikah, saksinya bukan hanya manusia, juga pohon. Pada saat akad nikah, pihak lelaki dan perempuan masing-masing menyediakan 20 pohon sebagai saksi.

"Setelah akad nikah selesai, ada prosesi kecil menanam 40 pohon itu," ujar Kiai Nasruddin kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Kiai Nasruddin punya penilaian sinis kepada para perusak lingkungan. "Betapa culas dan tidak bermoralnya manusia jika menjadikan bumi hanya sebatas objek eksploitasi, pemuasan diri, keserakahan dan ketamakan yang tak habis-habis," katanya.

Para pemegang kekuasaan dan pemodal harus hati-hati mengeksplorasi alam. Karena ketika ketamakan yang diutamakan, maka rakyat akan bangkit melawan.

Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi, Rumadi

فونيكا : صلوات انتي ڤ.ل.ت.ن (PLTN)

صلاة الله سلام الله * على طه رسول الله

صلاة الله سلام الله * على يس حبيب الله

١) ابليغ - ابليغ سيرا منوڠسا * ڤ.ل.ت.ن (PLTN) اكاوي سڠسارا

مومڤوڠ دوروڠ ديڤتوسنا * مولا سيرا كودو ميكيرا

٢) ابليغ - ابليغ سيرا منوڠسا * ڤ.ل.ت.ن. اكاوي چيلاكا

مومڤوڠ دوروڠ ديڤتروسنا * مولا سيرا كودو نولاكا

٣) نوكلير اورا كيا متوليلوكير * نوكلير بيدا كارو لامڤو تنبير

نوكلير اوكا دودو اونتير - اونتير * ثروبيك نوكلير مارا ايكي تقير

(ثروبيك نوكلير مارا ايكي تقطير)

بخط : زكريا الانصاري

Shalawat Anti Nuklir versi Arab Pegon

Melawan Nuklir dengan Shalawat

Eling-eling sira manungsa, PLTN gawe sengsara.
Mumpung durung diputusna, Mula sira padha mikira.

(Ingat-ingatlah wahai manusia, PLTN membuat sengsara.
Mumpung belum diputuskan, maka hendaknya kalian berpikir)

Eling-eling sira manungsa, PLTN bisa cilaka.
Mumpung durung ditutugna, Mula sira padha nolak'a.

(Ingat-ingatlah wahai manusia, PLTN bisa celaka,
Mumpung belum dilanjutkan, maka hendaknya kalian menolak)

Nuklir ora kaya mebel ukir, Nuklir beda karo lampu senthir,
Nuklir uga dudu untir-untir, Proyek Nuklir mara'ake fekir.
Proyek Nuklir mara'ake kenthir

(Nuklir tidak seperti meubel ukir, Nuklir beda dengan lampu teplok,
Nuklir juga bukan kue tambang, Proyek Nuklir membuat jadi fakir.
Proyek Nuklir membuat gila)

(Zakariyya el-Anshori)

dok.WI/Witjak

ZAKARIYYA EL-ANSHORI

Melawan Nuklir dengan Shalawat

MELAWAN rencana pembangunan PLTN di Muria, Jepara, Jawa Tengah tidak mesti dengan fisik. Shalawat pun bisa menjadi kekuatan yang tak kalah ampuh. Cara ini ditempuh aktivis muda dari Jepara, Zakariyya el-Anshori. Dia menggubah Shalawat Anti-PLTN pada 1997.

"Shalawat ini saya buat dalam tulisan latin maupun Arab *pegon* (aksara Arab berbahasa Jawa, *red*.). Asumsi saya, 80 persen rakyat Jepara 'beragama' NU (Nahdhatul Ulama). Jadi ini cukup efektif untuk menggerakkan massa," kata Zakariyya kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute.

Alhasil, pembangunan PLTN yang direncanakan sejak masa Orde Baru pada 1978 itu belum juga terlaksana. Penolakan dari berbagai lapisan masyarakat datang bergelombang.

Menurut Iyank, sapaan akrab Zakariyya, shalawat yang tujuannya mengingatkan rakyat akan bahaya PLTN itu, awalnya untuk ibu-ibu majelis taklim. "Mereka *kan* sulit memahami istilah-istilah PLTN. Makanya harus disampaikan dengan istilah lokal yang sederhana," kata ayah seorang putera ini.

Kini, shalawat itu dibaca berulang-ulang sebagai puji-pujian (syair keagamaan yang dilantunkan di masjid atau mushalla menjelang shalat, *red*.). Juga di forum diskusi anti PLTN, acara keagamaan dan pentas budaya, termasuk pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 05 Juni 2007 lalu.

Selain itu, Iyank juga aktif menyosialisasikan dampak negatif PLTN di lembaga-lembaga pelajar NU. "Setelah ini *kan* pesantren dipegang kiai-kiai muda. Makanya '*ma'syaral gawagis*' (para anak kiai, *red*.) ini perlu diberi informasi soal dampak PLTN. Kita juga mengorganisir mereka," kata pria kelahiran Jepara 1970 ini.

Iyank tidak pernah lelah menolak PLTN. Dua pekan sekali aktivis Lakpesdam NU Jepara, yang kini menetap di Jakarta, ini menyempatkan pulang ke kampungnya guna memantau perkembangan isu PLTN.

Dari hasil pengkajiannya, banyak sarana pembangkit listrik ramah lingkungan di wilayah Jepara yang bisa dimanfaatkan. "Kenapa bukan mengembangkan pembangkit listrik tenaga bayu, surya, air atau ombak?," tanya Iyank.

Kekuatirannya kian bertambah. Ternyata di negeri ini belum tersedia ahli nuklir khusus untuk PLTN. "Sekedar ahli atau teoritisi nuklir dalam kapasitas laborat, itu banyak. Tapi bukan dalam skala PLTN," ungkapnya.

Belum lagi, kata Iyank, PLTN memerlukan biaya besar. "Ini pasti dari uang rakyat. Karena mengorbankan rakyat, saya yakin 100 persen ini hanya untuk kepentingan ekonomi," tegasnya.

Diapun berkesimpulan, PLTN lebih banyak *mudharat* ketimbang manfaatnya, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. "Islam *kan* selalu *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (mendahulukan menolak kerusakan ketimbang mengambil kemanfaatan, *red*.). Dampak PLTN ini sangat mengerikan. Makanya kita lawan," ujarnya.

Iyank mengakui, penolakannya diinspirasi oleh Gus Dur. Mantan Presiden RI itu, sekitar 1995 menolak rencana ini. Bahkan hendak berpuasa di tapak PLTN Muria.

"Alasannya sangat NU. Di sana ada makam wali. Setelah saya cek, ternyata memang ada. Sikap Gus Dur ini menginspirasi saya menolak PLTN," ungkapnya.

Iyank bertekad menolak PLTN hingga akhir hayat. "Walaupun seluruh masyarakat Jepara menerima PLTN, bahkan Gus Dur yang saya panuti sekalipun menerimanya, saya tetap akan menolaknya. Saya tidak ingin anak cucu saya diberi warisan utang dan kerusakan lingkungan. Inilah ideologi saya," tandasnya.

Nurul H. Maarif

dok.pribadi

KH. Hasyim Ahmad
Pengasuh Ponpes al-Islamiyah Sidoarjo

Posko Kiai untuk Korban Lapindo

PENGASUH Ponpes al-Islamiyah Kludan, Tanggulangin, Jawa Timur KH. Hasyim Ahmad, termasuk sosok yang peduli pada lingkungan dan nasib korban Lumpur Lapindo. Bersama 18 kiai di Sidoarjo, pria kelahiran 11 Januari 1951 yang pernah nyantri pada Sayyid Alawi al-Maliki di Mekah ini mendirikan Posko Independen yang lebih dikenal sebagai Posko Kiai. Berikut petikan wawancaranya dengan kontributor the WAHID Institute di Jawa Timur, L. Riansyah.

Bagaimana kiai bisa terlibat mendampingi korban Lapindo?

Saya baru merintis pembangunan Pesantren Islamiyah III di Kedung Bendo. Datang bencana. Kini banyak rakyat di sini sengsara akibat lumpur Lapindo. Semua rusak. Tanah *ndak* mungkin bisa dipakai, ditanami atau dihuni. Sekarang wassalam. Saya lalu diminta KH. Manaf dan KH. Ghofar untuk membantu menangani dampak lumpur. Akhirnya kita fokus terlibat memberikan bantuan pada korban, dengan mendirikan Posko Independen. Posko ini didirikan 18 kiai di Sidoarjo.

Kenapa namanya Posko Independen?

Sesuai namanya, posko ini tidak ikut siapa-siapa. Hanya berpihak pada masyarakat korban. Tapi masyarakat lebih senang menyebutnya "posko kiai".

Apa aktifitas posko ini?

Fokus kita melakukan tiga hal. *Pertama,* mencarikan bantuan makan. *Alhamdulillah*, banyak sekali yang *care* memberi bantuan. Termasuk dari Yaman dan Abu Dhabi. *Kedua*, membantu di bidang kesehatan. Kita bekerja sama dengan RS Siti Hajar, IDI (Ikatan Dokter Indonesia, red.), dan sebagainya. Kita melibatkan dokter untuk membuka pelayanan kesehatan hingga jam 19.00. *Ketiga*, memberikan keamanan ruhani. Karena keamanan fisik telah banyak yang menangani. Kita sering kumpul dengan para korban untuk *sharing* masalah dan doa bersama atau *istighatsah*. Ini rutin setiap Kamis. Saya yakin, dalam kondisi 'sepanas' ini, gejolak bisa diredam dengan *istighatsah*. Jika ukurannya matematika, mungkin sudah bacok-bacokan.

Bagaimana penanganan bencana lumpur selama ini?

Penanganannya tidak menentu dan sangat lambat. Sejak awal mestinya dibuang ke sungai. Tapi itu baru dilakukan setelah Desa Siring tenggelam. Gubernur mengijinkan lumpur dibuang ke laut. Pemerintah pusat tidak menyetujui. Ini bukti tidak ada koordinasi. Apa harus *nunggu* orang Sidoarjo mati semua? Akhirnya, dengan koordinasi KH. Abdi Manaf, kita mengadu ke pemerintah pusat, karena gubernur dan bupati tidak berani.

Apa yang Kiai sampaikan kepada pemerintah?

Masalah sudah seperti ini. Pemerintah tidak mungkin lepas tangan. Di luar negeri, kalau swasta tidak mampu menangani, maka harus diambil alih pemerintah. Kita desakkan ini pada mereka. Sehingga dibentuklah Timnas (Tim Nasional, *red.*).

Bagaimana kerja Timnas?

Masyarakat agak tenang karena sudah memiliki payung hukum secara formal. Sejak itu posko-posko membubarkan diri. *Ndak* tahunya, payungnya *kok* kayak gitu kerjanya. Maka kita membentuk Forum Peduli, dengan melibatkan komunitas lintas agama. Kita akhirnya menghadap pemerintah lagi agar mengambil alih langsung. Waktu itu yang menemui Bu Yenny Wahid. Dia bertanya, "Apa Timnas gagal?" Dulu sebelum ada Timnas, areal lumpur 360-380 hektar. Setelah ditangani Timnas jadi 850 hektar. Kami hanya menginformasikan, agar ibu mengambil sikap bijaksana.

Apa himbauan Kiai?

Kita harus berbuat yang bermanfaat. Mengambil manfaat dari alam, secara agama itu sah-sah saja. Himbauan saya, *mbok* orang yang mau menggali potensi alam yang sudah diizinkan Allah SWT ini juga menghormati alam, termasuk manusia. Allah SWT berfirman, *wala tufsidu fi al-ardhi* (janganlah kalian melakukan kerusakan di bumi, *red*.).

Juga sosialisasi dululah, terutama pada ahlinya. Perlu juga ke kiai. Dan prinsip kiai itu cuma satu; selama bermanfaat kenapa tidak? Yang penting jangan sampai membawa mudarat. Mudarat kepada lingkungan atau manusia, itu dilarang. Hadis Nabi SAW *la dharara wala dhirara* (tidak boleh membahayakan diri dan pihak lain, *red*.).

Harus ada pengawasan dari pemerintah dan masyarakat. Saya juga menghimbau para birokrat supaya mereka berfungsi sebagai pelindung masyarakat. Jadi pemerintah harus bertindak adil dan bijaksana.

dok.WI/Nurul H Maarif

Unjuk rasa korban lumpur LAPINDO

dok.WI/Witjak
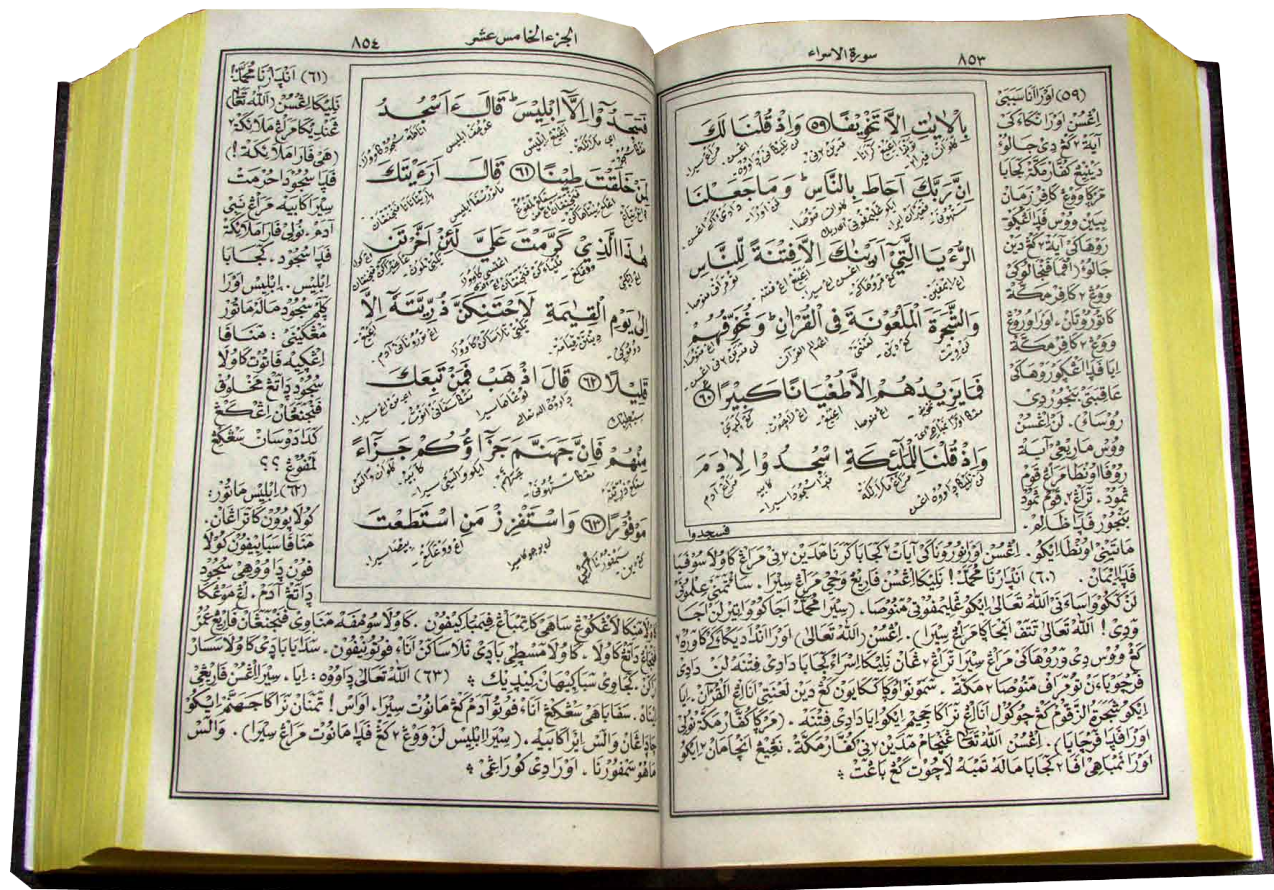
Ajaran Universal Penafsiran Lokal

Tafsir lokal dibuat agar makna al-Qur'an lebih dipahami umat. Namun ada yang menganggap sesat.

Sekitar 15 ribu nahdliyin datang menyemut dari seluruh penjuru Jawa. Mereka rela duduk berdesakan sejak pukul 05.00 pagi hingga tengah hari. Tiga kiai besar dihadirkan. KH. Ahmad Mustofa Bisri dari Ponpes Raudhatul Thalibin Rembang, KH. Abdullah Kafabihi dari Ponpes Lirboyo Kediri dan KH. Maimun Zubair dari Ponpes al-Anwar Sarang Lasem.

Begitulah suasana khataman pembacaan kitab *al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa, Rembang (1915-1977), di Ponpes al-Itqon, Tlogosari Wetan, Semarang pertengahan 2006 lalu.

Menurut pengasuh Ponpes al-Itqon, KH. Ahmad Kharis Shodaqoh, *Tafsir al-Ibriz* bisa dikhatamkan 12 tahun, 10 tahun, 5 tahun, bahkan setahun. "Kami sengaja membacanya ayat demi ayat selama 12 tahun, supaya jamaah memahami," katanya.

Kiai Kharis punya alasan memilih kitab ini. "Jamaahnya orang kampung. Mereka butuh tafsir dengan bahasa apa adanya, bukan bahasa yang tidak bisa mereka pahami," tuturnya.

Dalam ceramahnya, putera penulis tafsir ini, KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) menyatakan, *al-Ibriz* tidak hanya dibaca masyarakat Indonesia. Tapi juga Malaysia, Singapura, bahkan Suriname.

"Suatu hari saya kedatangan tamu dari Johor Malaysia. Dia penceramah yang biasa ngaji di masjid-masjid. Setiap *ngaji*, dia selalu membawa tafsir *al-Ibriz*. Dia minta tafsir ini di-Indonesia-kan atau di-Melayu-kan bahasanya," terang Gus Mus.

Bahkan tafsir ini sudah tersedia di Perpustakaan Widener Universitas Harvard, berkat promosi menantu Gus Mus, Ulil Abshar Abdalla yang berguru di sana.

"Saya merasa sedikit berjasa pada perpustakaan ini, sebab usulan saya agar pihak perpustakaan membeli sebuah tafsir berbahasa Jawa berjudul *al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa, ayahanda Gus Mus, dikabulkan," kata Ulil dalam surat elektroniknya kepada the WAHID Institute.

Itulah *al-Ibriz*. Tafsir al-Qur'an 30 juz berhuruf *pegon* (aksara Arab berbahasa Jawa, *red*.) ini, sangat dikenal, terutama di pesantren Jawa.

Diakui penulisnya, KH. Bisri, terjemah al-Qur'an telah banyak beredar dalam ragam bahasa. Bahasa Belanda, Inggris, Jerman, pun Indonesia. "Yang menggunakan bahasa daerah, seperti Jawa, Sunda, dan yang lain, juga banyak," tulisnya.

Dengan cara ini, ujarnya, umat Islam dari seluruh bangsa dan suku akan memahami makna al-Qur'an. "Untuk membantu mereka, saya suguhkan tafsir al-Qur'an yang ringan dan mudah dipahami," sambungnya.

Karena menggunakan bahasa lokal, tafsir ini penuh sopan-santun atau *unggah-ungguh* ala adat Jawa. Iblis, misalnya, yang menjadi simbol kejahatan, dalam tafsir ini diposisikan santun di hadapan Allah. Inilah nuansa lokal yang tidak dimiliki tafsir lainnya.

Berdasarkan aksaranya, tafsir bahasa Jawa sebetulnya terdiri dua jenis; Arab *pegon* dan latin. Jenis yang kedua misalnya *al-Huda*, *Tafsir Qur'an Bahasa Jawi*, karya Brigadir Jenderal Purnawirawan Drs. H. Bakri Syahid (baca: *Tafsir Lokal Beraroma Orba*).

Selain berbahasa Jawa-Latin, tafsir bergaya militer karya Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1972-1976), ini berani 'melampaui' *pakem* penafsiran pada umumnya. Di dalamnya, penulisnya banyak memasukkan unsur-unsur negara: MPR, UUD 45, Demokrasi Pancasila, BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara, *red.*), dan sebagainya.

dok.istimewa

HB Jassin

"Diharapkan, dengan tafsir ini, pembaca bisa lebih mengerti, memahami dan juga prihatin atas nasib bangsa," tulis Bakri.

Ada juga tafsir al-Qur'an berbahasa Bugis, karya ulama kharismatik dari Sidrap Sulawesi Selatan Gurutta H. Abdul Muin Yusuf (1920-2004). Beliau pendiri Ponpes al-Urwatul Wutsqaa dan Ketua MUI Sulsel 1985-1995.

"Karya tafsir utuh dalam Bahasa Bugis tergolong langka. Ini yang menjadi obsesi Gurutta Muin. Pada 1985, beliau didesak masyarakat yang membutuhkan referensi tafsir dalam Bahasa Bugis. Tahun berikutnya, penulisan tafsir dimulai," tutur cucu Gurutta Muin, H. Imran Muin Yusuf kepada the WAHID Institute.

Dikatakan kandidat doktor UIN Alauddin Makasssar ini, ciri khas tafsir ini menggunakan bahasa dan aksara Lontara Bugis. "Ini bahasa utama masyarakat Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Tafsir ini mendapat dukungan para ulama sepuh di Sulawesi Selatan," jelas Imran.

Lain lagi terjemah al-Qur'an karya Hans Bague (HB) Jassin (1917-2000). Dengan titel *al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia*, pria kelahiran Gorontalo ini ingin menghadirkan terjemahan al-Qur'an bergaya puisi.

Selama dua tahun, 1972-1974, terjemahan ini digarap Jassin, di sela kesibukannya menjalin kerja sama kebudayaan Indonesia-Belanda.

Belum apa-apa, reaksi bermunculan dari penjuru negeri. Dukungan dan cercaan hadir silih berganti. Kapabilitas Jassin disoal. Ia dianggap tidak layak menerjemah al-Qur'an.

Jassin dinilai mempuisikan al-Qur'an. Beberapa orang mengharamkan membacanya. Tapi Jassin berkilah, hanya baris kalimatnya yang seperti puisi namun tidak dengan inti terjemahannya. "Tidak baris demi baris yang pan-jangnya memenuhi lebar halaman. Akan tetapi baris demi baris yang panjangnya hanya memenuhi sebagian lebar halaman saja," katanya waktu itu.

Empat tahun dalam kontroversi, pada 1978 karya pengagum Schopenhauer dan Nietzche ini diterbitkan dengan perbaikan di sana sini.

"Karya Jassin harus diberi penghargaan yang layak. Kesalahan di dalamnya adalah bagian yang wajar dari proses ijtihad," tulis penulis *Tafsir al-Azhar* H. Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) dalam pengantar terjemahan itu.

Mengapa berwajah puisi? "Firman Tuhan menjadi nafas saya, menjadi darah yang beredar dalam tubuh saya, dan menjadi daging saya," terang Paus Sastra Indonesia ini.

Tak hanya Jassin, Nazwar Syamsu (1921-1983) pun dipersoalkan. Melalui *al-Qur'an Dasar Tanya Jawab Ilmiah*, pria kelahiran Bukittinggi, Sumbar, ini juga dinilai menyalahi *pakem* penafsiran umumnya.

Mantan Pemimpin Jamaah Islam Qur'ani, yang gemar menggunakan teori ilmiah dalam terjemahnya, ini dinilai memiliki pandangan yang menyempal dari keyakinan umat Islam kebanyakan. Tahun 1980-an pun menjadi hari kelabu bagi Nazwar. Ia dianggap menolak Sunnah.

Mantan anggota polisi bagian reserse di Polsek Talawi, Sawah Lunto, Sijunjung, ini menuturkan, karyanya dirancang hanya untuk membantu pembaca mengetahui informasi sains dan prinsip-prinsipnya dalam al-Qur'an.

Sebelumnya hal yang sama menimpa Mahmud Yunus (1899-1982). Upayanya menerjemahkan al-Qur'an dengan bahasa Arab-Melayu pada 1922, dinyatakan haram oleh para ulama waktu itu. Ia dituding menyalahi pakem. Padahal ia hanya ingin membantu umat Islam di negeri ini memahami kandungan al-Qur'an.

Dengan alasan melanjutkan studi di al-Azhar Kairo, Mahmud menghentikan penerjemahan yang telah berjalan 3 juz, pada 1924. Pria kelahiran Batusangkar Sumbar ini, pada 1935 melanjutkan kembali upayanya, hingga selesai 30 juz pada 1938. Pada 1953, karya berjudul *Tafsir Quran Karim* ini dicetak Penerbit al-Maarif Bandung. Ia dikenal sebagai "pelopor" karya tafsir di Indonesia yang diterpa badai kontroversi.

Apa yang diupayakan KH. Bisri Mustofa, Drs. H. Bakri Syahid, Gurutta H. Abdul Muin Yusuf, HB Jassin, Nazwar Syamsu, atau Mahmud Yunus, hanyalah cara mereka membuat al-Qur'an lebih dipahami umat.

"Tafsir itu *kan* dalam konteks untuk kepentingan masyarakat. Terlalu jauh kalau mau mempermasalahkan tafsir ini," kata penulis buku *Khazanah Tafsir Indonesia; dari Hermeunetika hingga Ideologi,* Islah Gusmian (lihat: *Umat Diuntungkan Tafsir Lokal*).

Jadi, siapapun tidak berhak untuk menuding para penafsir itu menyalahi pakem. Kreatifitas lokal perlu digalakkan agar pesan universal Islam bisa lebih dipahami umat.

Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi, Ahmad Suaedy

Juz XVI MARYAM Surah 19

416

Juz XVI MARYAM Surah 19

417

dok.WI/Witjak

al-Qur'anul Karim Bacaan Mulia karya HB. Yasin

Surat 49 AL HUJURAT (KAMAR-KAMAR) Juz 26

Innalladziina yaghudhdhuuna ashwaatahum 'inda rasuulillaahi ulaa-ikal ladziinamtahanallaahu quluubahum littaqwaa, lahum maghfiratuw wa ajrun 'azhiim.

4. Sanyata wong kang undang-undang sira Muhammad, saka sajabane kamarira akeh-akehe padha ora duwe akal.

٤ - إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥

Innalladziina yunaaduunaka miw waraa-il hujuraati aktsaruhum laa ya'qiluun

5. Lan saupama wong-wong mau padha sabar nganti sira ngrawuhi, sayekti becik tumrap dheweke, Allah iku rena paring pangapura tur Maha Asih.

٥ - وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

Walau annahum shabaruu hattaa takhruja ilaihim lakaana khairal lahum, wallaahu ghafuurur rahiim.

Intelijen Negara lan stabilisasi kamanan iku kang kawogan Pamarintah kabantu masyarakat.

6. He para wong Mu'min! manawa ana wong fasek teka ing sira anggawa pawarta, sira banjur ngupayaa katerangan pawarta iku mau, aja nganti sira marang atine sawijining golongan, saka ora ngerti, satemah sira padha tumrap tindakira kang sira lakoni.[927)]

٦ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٥

Yaa ayyuhal ladziina aamanuu in jaa-akum faasiqum binaba-in fatabayyanuu an tushiibuu qaumam bijahaalatin fatushbihuu 'alaa maa fa'altum naadimiin.

927) Intelijen Negara lan Stabilitas Kaamanan punika kuwajibanipun Pamarentah kabantu masyarakat: Suraosipun ayat: 6—7 punika manawi ing jaman modern kawastanan BAKIN utawi Badan Koordinasi Intelijen Negara wonten ing Tata Bina Pamarentahan Republik Indonesia. Wonten ing Negari Demokrasi, kados Negari kita, Negari Pancasila, hakekatipun Intelijen Negari lan stabilisasi kaamanan punika rumagangipun Rakyat ingkang kapimpin dening Pamarentah, lan intinipun kakiyatan ABRI. Sabab, UUD 1945 pasal 30 anyebataken bilih saben Warga-Negara wajib lan hak ambelani Negara, sarta caranipun dipun tata dening Aturan Negari. Miturut katerangan Jumhur Mufassirin, 14 abad kapengker, Sekabat Walid bin 'Utbah kautus dening Kanjeng Nabi s.a.w. dhateng dhusun Bani al-Mushthalik, perlu nampi Zakat kangge Baitulmaal. Saderengipun lumebet Islam, ing jaman Jahiliyah, piyambakipun nate incim-inciman kaliyan warga-dhusun wau. Walid bin 'Utbah dipun kurmati rame-rame dening sadaya warga-dhusun sarana tabuhan rebana sarta uba rampe ingkang nggembirakaken. Dumadakan ingkang kadadosan lucu lan nguciwakaken. Sekabat wau mlajar lan ajrih dipun perjaya, mbok manawi kraos rumaos badhe dipun keroyok! Laporanipun dhateng Kanjeng s.a.w. ing Madinah dipun aturaken bilih warga dhusun wau brontak, lajeng ngutus utusan sanes perlu anyetitekaken lan tumindak intelijen ingkang setiti lan waspada, dening Sekabat Khalid bin Walid. Ringkesipun sintena kemawon Utusanipun Rasulullah tamtu dipun tampi sarana bingah, lan pancen sampun kasedhiyakaken Zakat ingkang dados kuwajibanipun, malah sampun sami dipun tengga! Pramila Nabi s.a.w. langkah tumindakipun wekdal samanten: 1. pasukan dipun siap siagakaken, 2. tumindak intelijen dipun setitekaken lan tambah waspada, 3. langkah salajengipun ugi dipun tata.

1033

dok.WI/Witjak

Tafsir al-Huda: Tafsir al-Qur'an bahasa Jawa

Tafsir Lokal Beraroma Orba

BAGAIMANA jika seorang jenderal menulis tafsir al-Qur'an? Tentu semangat patriotisme begitu kental di dalamnya. Itulah tafsir karya Brigadir Jenderal (Pur.) Drs. H. Bakri Syahid dengan titel al-Huda: Tafsir Qur'an Bahasa Jawi, berbahasa Jawa berhuruf latin.

TAFSIR utuh 30 juz ini diperiksa ulang oleh penghulu Keraton Yogyakarta KRTH Wardanipaningrat dan Ustadz Rahmat Qasim sebelum naik cetak di Bagus Arafah, Yogyakarta 1979.

Bakri Syahid banyak memasukkan penafsiran bernada mendukung pemerintah Orde Baru Soeharto dan segala program-programnya.

Umpamanya, ketika menafsirkan QS. al-Nisa' ayat 83 perihal *Ulu al-Amri*. Menurut Bakri, "untuk kontek sekarang, *Ulu al-Amri* itu pemerintah yang menjalankan sistem demokrasi, seperti pemerintah Indonesia yang menerapkan sistem Demokrasi Pancasila."

Terkait QS. Yunus ayat 7, dia menilai, "paham sekularisasi itu berlawanan dengan ajaran Agama Islam dan juga tidak bisa diterapkan di negeri Pancasila Indonesia. Sebab, falsafah dan ideologi Pancasila itu menetapkan di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bab IX Pasal 29, bahwa 'Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.'"

Artinya, tulis Bakri Syahid, masyarakat atau negara yang dicita-citakan pemerintah Indonesia adalah sosialis-relijius. Yaitu masyarakat adil makmur yang mencakup materiil dan spirituil, lahiriah dan batiniah, dan dunia dan akhirat. Inilah masyarakat yang diridlai Allah SWT.

"Negara Republik Indonesia itu Negara Kesatuan, Negara Hukum, serta Negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Bukan negara ateis, negara sekuler, atau negara Islam," kata Bakri di dalam karya setebal 1411 halaman ini.

"Bangsa Indonesia tidak memiliki cita-cita membangun masyarakat sekuler (*masyarakat tanpo agami*), melainkan masyarakat Pancasila," tulis rektor pertama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini ketika menafsiri QS. al-Nur ayat 28.

Bakri Syahid juga mengulas Sumpah Pemuda ketika menafsirkan QS. al-Ra'd ayat 21. Menurutnya, Sumpah Pemuda berawal dari perjumpaan atau silaturahim anak-anak muda waktu itu, yang peduli nasib bangsa.

"Lalu menjadi ikrar: Satu Nusa, Satu Bahasa, dan Satu Bangsa. Jujur saja, ini syarat mutlak kekuatan Ketahanan Nasional," jelas pria kelahiran Yogyakarta, 16 Desember 1918 ini.

Yang menarik, dia menghubungkan QS. al-Hujurat ayat 6 dan 7 dengan peran intelijen negara. "Di jaman modern ini disebut Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) dalam Tata Bina Pemerintahan Republik Indonesia."

Masih dalam ayat yang sama, Bakri mengatakan dalam negara Indonesia intelejen negara dan stabilitas keamanan itu kewajiban pemerintah yang dibantu masyarakat.

"Ini inti kekuatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (kini Tentara Nasional Indonesia, *red*.). Sebab UUD 1945 Pasal 30 menyebutkan, setiap warga negara wajib dan berhak membela negara," tulis Bakri yang pernah menjabat Kepala Staf Batalion STM-Yogyakarta, Kepala Pendidikan Pusat Rawatan Ruhani Islam Angkatan Darat, Wakil Kepala PUSROH Islam AD, dan Asisten Sekretaris Negara RI ini.

Inilah kontektualisasi tafsir karya Bakri Syahid. Melalui gaya dan caranya, Bakri Syahid ingin masyarakat lebih memikirkan nasib bangsa ke depan.

"Diharapkan, dengan tafsir ini, pembaca bisa lebih mengerti, memahami dan juga prihatin atas nasib bangsa," demikian harapan Rektor IAIN Sunan Kalijaga masa bakti 1972-1976 ini dalam pengantar tafsir itu.

Nurul H. Maarif

Islah Gusmian, MA
Peneliti Tafsir Lokal

dok.pribadi

"Umat Diuntungkan Tafsir Lokal"

DIBANDING *tafsir berbahasa dan bertulisan Arab, tafsir lokal bahasa Jawa, misalnya, punya keunggulan. Pembaca bisa tahu makna perkata dan tahu posisi kalimat. Sayang, tafsir ini kini tak banyak diproduksi lagi. Berikut wawancara M. Subhi Azhari dari the WAHID Institute dengan dosen dan peneliti tafsir lokal dari STAIN Surakarta Islah Gusmian.*

Dari penelitian Anda, kapan tafsir lokal mulai dibuat?

Di mulai pada abad ke-17. Yaitu *Tarjuman al-Mustafid* karya Abdurrauf al-Sinkili. Tafsir utuh 30 juz ini berbahasa Melayu-Arab atau *pegon*. Para sejarawan menyebut karya ini sebagai tafsir lokal pertama di Nusantara. Pada abad yang sama ada juga *Tafsir Surah al-Kahfi*. Tapi karya ini tidak diketahui penulisnya.

Bagaimana perkembangannya?

Pada abad ke-18, setelah Imam Nawawi al-Bantani menulis *Tafsir al-Nur* di Makkah, di Jawa dan Sunda mulai muncul tafsir-tafsir berbahasa daerah. Ada *Tafsir wal Ngasri* yang tersimpan di Museum Sono Budoyo Jogjakarta. Ini tafsir berbahasa Jawa.

Apa maksud pembuatan tafsir berbahasa lokal?

Agar bisa diakses dengan mudah oleh para pembaca. Misalnya di Jawa, kenapa yang dipilih bahasa Jawa? Itu karena kepentingan pembaca. Kalau di Jawa pedalaman, Jogja atau kraton, itu menggunakan bahasa dan tulisan Jawa. Tapi kalau di pesantren, itu menggunakan tulisan Arab berbahasa Jawa atau *pegon*. Itu karena segmennya. Kalau di pesantren, *kan* tidak ada masalah membaca tulisan Arab. Makanya kita mengenal *al-Ibriz* karya KH. Bisri Mustofa. Ada juga tafsir berbahasa Jawa dengan huruf latin. Misalnya *al-Huda* karya Bakri Syahid tahun 1972.

Apa keistimewaan tafsir lokal?

Kalau kita bandingkan dengan tafsir yang menggunakan bahasa dan tulisan Arab, tafsir lokal bahasa Jawa misalnya, punya keunggulan. Misalnya, pembaca bisa tahu makna per kata dan tahu posisi atau kedudukan kalimat. Ini kelihatan sekali pada *al-Ibriz*. Dengan demikian, umat diuntungkan dengan adanya tafsir lokal. Berbeda dengan tafsir yang ditulis bukan dengan bahasa dan cara seperti tafsir bahasa Jawa. Taruhlah tafsir berbahasa latin. Itu *nggak* bisa. Karena biasanya, model penafsirannya langsung satu paragraf.

Adakah resistensi dari kelompok Islam tertentu terhadap tafsir lokal ini?

Belum ada. Sejauh saya melihat, tafsir itu *kan* dalam konteks untuk kepentingan masyarakat. Terlalu jauh kalau mau mempermasalahkan tafsir ini. Kini yang terjadi adalah orang memandang bahasa Arab itu penting, sehingga membaca tulisan latin menjadi agak phobi. Padahal aksara latin tidak perlu dipermasalahkan, karena tidak semua buku yang ditulis dengan aksara latin itu jelek.

Bagaimana perkembangan tafsir lokal?

Sekarang ada tafsir berbahasa dan beraksara Bugis (karya Gurutta Abdul Muin Yusuf, *red.*). Ada lagi *Tafsir Pase* (karya H. Teuku Hasan Thalhas dkk., *red.*), tahun 2000, menggunakan bahasa Aceh dengan aksara latin. Tapi sayang hal ini tidak terjadi di Jawa. Bukan hanya dalam konteks kajian keislaman, di dalam tradisi Jawa sendiri tulisan Jawa telah kehilangan ruh. Terjadi kematian bahasa, yaitu bahasa lokal menjadi tidak penting digunakan.

Karena apa?

Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang umum digunakan, sehingga bahasa Jawa atau bahasa lokal lainnya jarang digunakan. Bahkan majalah yang dulu menggunakan bahasa Jawa, kini sudah tidak mempunyai penggemar. Bahasa akhirnya mati. Aksara juga mati.
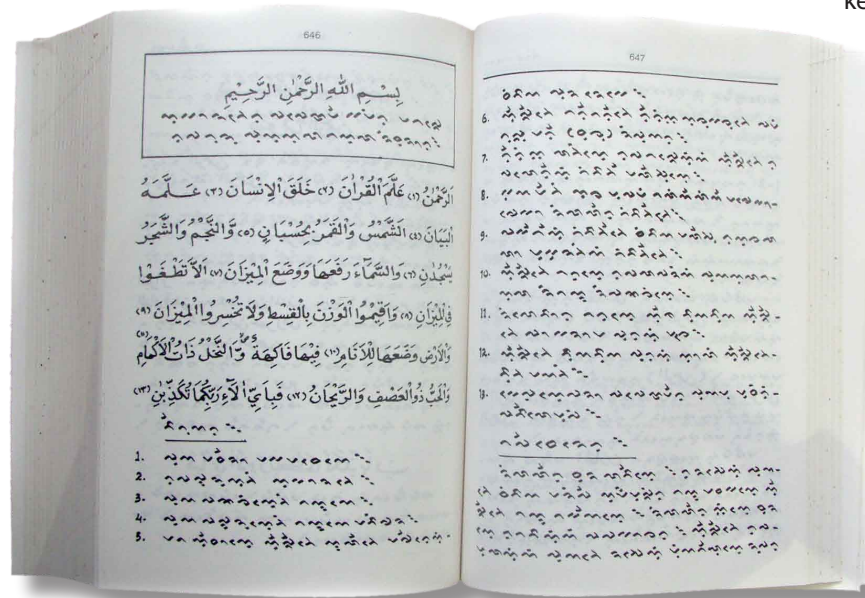
Tafsir al-Quran berbahasa Bugis karya Gurutta H. Abdul Muin Yusuf

dok.WI/Witjak

Sedikit orang yang mumpuni mebaca pustaka beraksara Arab. Tak cukup hanya prihatin, beberapa ulama Indonesia merancang metode cepat memahami jendela keilmuan Islam itu.

Belajar membaca al-Qur'an

Metode Cepat

Juara pertama Lomba Baca al-Qur'an tingkat Taman Pendidikan al-Qur'an se-Kabupaten Batang, akhirnya digondol Muslihin Rozi. Padahal pada saat mengikuti lomba, yang digelar dalam rangka Hari Amal Bhakti Departemen Agama ke-45 pada 15 Desember 1990, itu umur Muslihin belum genap 10 tahun. Dia masih duduk di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah.

Namun kemampuan siswa Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) Darus-Salam Kemiri Subah, Batang, dalam membaca al-Qur'an tidak diragukan. Di bawah gemblengan Ustadz Mudha'af Adam, Muslihin kecil kala itu, begitu lancar dan fasih melafalkan ayat-ayat al-Qur'an.

"Itu berkat metode Qira'ati yang kita ajarkan," kenang pengurus Ponpes Darussalam Syamsul Maarif Syahid, yang kala itu turut mendampingi Muslihin kecil.

Metode baca al-Qur'an Qira'ati ditemukan KH. Dachlan Salim Zarkasyi (w. 2001 M) dari Semarang, Jawa Tengah. Metode yang disebarkan sejak awal 1970-an, ini memungkinkan anak-anak mempelajari al-Qur'an secara cepat dan mudah.

Hal ini diakui pengajar metode Qira'ati, yang juga asisten Ketua Dewan Masjid Indonesia, Abdullah Syafii Damanhuri. Menurutnya, ini lantaran *Qira'ati* menawarkan pengajaran yang sistematis dan mendetail.

"Misalnya, metode ini mengajarkan bacaan *gharib* (bacaan langka, *red*.) dalam al-Qur'an, yang tidak diajarkan metode lain," ujar peraih *syahadah* (sertifikat) *Qira'ati* dari Ustadz Abu Bakar Zarkasyi, putera KH. Dachlan Salim Zarkasyi.

Kiai Dachlan yang mulai mengajar al-Qur'an pada 1963, merasa metode baca al-Qur'an yang ada belum memadai. Misalnya metode Qa'idah Baghdadiyah dari Baghdad Irak, yang dianggap metode tertua, terlalu mengandalkan hafalan dan tidak mengenalkan cara baca *tartil* (jelas dan tepat, *red*.).

Saat itu juga, terbetik di benak Kiai Dachlan keinginan menyusun metode yang mudah dan digemari anak-anak, dengan orientasi bacaan *tartil*. Bertahun-tahun dengan penuh ketekunan dan kesabaran, Kiai Dachlan mengamati dan meneliti majlis pengajaran al-Qur'an di banyak mushalla, masjid, dan majelis tadarus al-Qur'an.

Ia pun kecewa. Karena dari hasil pengamatannya, murid-murid pengajian tidak mengindahkan *mad* (bacaan panjang pendek, *red*.). Itu membuatnya lebih serius untuk menemukan metode yang *mujawwad murattal* (mengajarkan tajwid dan cara baca tartil, *red*.).

Kiai Dachlan kemudian menerbitkan enam jilid buku *Pelajaran Membaca al-Qur'an untuk TK al-Qur'an* bagi anak usia 4-6 tahun, pada 01 Juli 1986.

Usai merampungkan penyusunannya, KH. Dachlan berwasiat, supaya tidak sembarang orang mengajarkan metode Qira'ati. Tapi semua orang boleh diajarkan Qira'ati.

"Dalam 100 siswa/santri hanya satu orang yang kurang pandai. Jika ada lebih dari satu orang yang kurang pandai, maka yang perlu dipertanyakan gurunya," pesan pendiri TPA Roudhatul Mujawwidin Semarang ini.

Untuk mengajarkan buku jilid 1-2 metode ini, guru diharuskan telaten mengajari murid seorang demi seorang. Ini supaya guru mengerti kemampuan anak-anak didiknya. Untuk jilid 3-6 dilakukan secara klasikal, yaitu beberapa murid membaca dan menyimak bersama dalam satu ruangan.

Dalam perkembangannya, sasaran metode Qira'ati kian diper-luas. Kini ada Qira'ati untuk anak usia 4-6 tahun, untuk 6-12 tahun, dan untuk mahasiswa.

Setelah metode Qira'ati, lahir metode-metode lainnya. Sebut saja metode Iqra' temuan KH. As'ad Humam dari Yogyakarta, yang terdiri enam jilid. Dengan hanya belajar 6 bulan, siswa sudah mampu membaca al-Qur'an dengan lancar.

Iqra' menjadi populer, lantaran diwajibkan dalam TK al-Qur'an yang dicanangkan menjadi program nasional pada Musyawarah Nasional V Badan Komunikasi Pemuda Remaja

dok.WI/Witjak

Membaca Kitab

Masjid Indonesia (BKPRMI), pada 27-30 Juni 1989 di Surabaya.

Tiga model pengajaran metode ini, adalah; *pertama*, Cara Belajar Santri Aktif (CBSA). Guru tak lebih sebagai penyimak, bukan penuntun bacaan. *Kedua*, privat, yaitu guru menyimak seorang demi seorang. *Ketiga*, asistensi. Jika tenaga guru tidak mencukupi, murid yang mahir bisa turut membantu mengajar murid-murid lainnya.

Keprihatinan akan banyaknya masyarakat yang buta huruf Arab, menggugah Otong Surasman menemukan metode al-Bayan. Al-Bayan, yang hanya satu jilid dengan 71 halaman, ini disusun sejak 1994.

Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) akarta ini mulai menuangkan penelitiannya dalam tulisan tangan pada 1995. Awalnya, penemuan itu dinamai metode Insani. Setelah dievaluasi, metodenya dipadatkan, dan namanya diubah menjadi al-Bayan. Dengan belajar enam bulan, murid mampu melafalkan ayat al-Qur'an secara baik.

Hattaiyyah adalah metode baca al-Qur'an yang paling fantastis. Dengan metode penemuan Muhammad Hatta Usman, ini anak didik mampu membaca al-Qur'an dalam waktu 4,5 jam. Metode ini akan lebih mudah diterapkan bagi anak didik yang telah mampu baca tulis huruf latin, karena metode ini menggunakan pendekatan Bahasa Indonesia.

Caranya, 28 huruf Arab dicari padanannya dalam aksara Indonesia. Tanda baca pun diperkenalkan dalam rumus-rumus bahasa Indonesia. Sehingga, hanya dengan enam kali pertemuan, masing-masing 45 menit, anak didik bisa membaca al-Qur'an.

Walau kurang dikenal, metode al-Barqy adalah metode cepat membaca al-Qur'an yang diperkenalkan paling awal. Metode ini ditemukan dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, Muhadjir Sulthon pada 1965. Awalnya, al-Barqy diperuntukkan bagi siswa SD Islam at-Tarbiyah, Surabaya. Siswa yang belajar metode ini lebih cepat mampu membaca al-Qur'an. Muhadjir lantas membukukan metodenya pada 1978, dengan judul *Cara Cepat Mempelajari Bacaan al-Qur'an al-Barqy.*

Uniknya, metode ini memadukan *ha na ca ra ka* (aksara Jawa) dan huruf Arab. Hanya saja, untuk alasan efektifitas, aksara Jawa yang tersusun dari lima suku kata dipadatkan menjadi empat suku kata.

Terinspirasi Qira'ati, Pengasuh Ponpes Darul Falah Jepara Jawa Tengah, KH. Taufiqul Hakim membuat Amtsilati pada 2001. Bedanya, Qira'ati untuk memudahkan membaca al-Qur'an, Amtsilati untuk memudahkan membaca kitab gundul (kitab tanpa harakat, *red*.) atau kitab kuning.

"Terdorong dari metode Qira'ati yang mengupas cara membaca yang ada harakatnya, saya ingin menulis yang bisa digunakan untuk membaca yang tidak ada harakatnya," kata Kiai Taufiq (baca: *Kitab Gundul Bukan Lagi Hantu*).

Jauh sebelum Amtsilati, Pengasuh Ponpes Salafiyyah, Seblak, Jombang almarhum KH. Muhammad Ma'shum bin Ali, menggubah metode canggih memahami *sharf* (bentuk dan

dok.WI/Witjak

Qira'ati karya KH. Dachlan Salim Zarkasyi

perubahan kata dalam Bahasa Arab, *red*.).

Metodenya disusun dalam karya berjudul *al-Amtsilah al-Tashrifiyyah*, cetakan CV Pustaka al-Alawiyah Semarang. Di sana diuraikan bentuk-bentuk dan perubahan kata; kata kerja lampau, sekarang, akan datang, kata benda, subjek, dan seterusnya, hingga sangat mendetail.

Saking pentingnya, metode gubahan menantu Hadhratusy Syaikh KH. Muhamad Hasyim Asy'ari ini digunakan di hampir seluruh pesantren di negeri ini. Santri-santri wajib menghafalnya, jika ingin mumpuni menguasai kitab kuning.

"Di pesantren Sunda kitab ini juga digunakan," ujar Pengasuh Ponpes al-Ikhwan Cigadung, Bandung, yang juga Ketua Tanfidziah PCNU Kota Bandung KH. Maftuh Kholil.

Karya ini juga telah diuji Tim Penilai Buku Ditjen Binbaga Islam Tahun 1991/1992. Hasilnya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 58/E/1992, tanggal 05 September 1992, karya ini dinilai memenuhi syarat sebagai bahan bacaan pelajaran keislaman.

Ada juga karya lain berjudul *Murad al-Awamil Mandaya* karya Syeikh Nawawi bin Muhammad Ali bin Ahmad, dari Mandaya, Carenang, Serang, Banten. Karya ini mengulas masalah *nahwu* dengan latar Bahasa Arab yang ringan. Di pesantren wilayah Banten, karya ini menjadi menu wajib bagi santri pemula.

Metode-metode itu tak lapuk dimakan zaman. Bahkan hingga kini masih diterapkan di mana-mana.

Nurul H. Maarif

METODE *AMTSILATI*

Kitab Gundul Bukan Lagi Hantu

KITAB berhuruf gundul atau tanpa harakat, adalah referensi utama bagi keilmuan pesantren khususnya dan dunia Islam umumya. Menguasai kitab, yang sering disebut kitab kuning, ini berarti menguasai keilmuan Islam.

Namun, tidak banyak yang mampu membacanya dengan baik, lantaran dibutuhkan persyaratan *njelimet*. Para santri harus paham *nahwu* (tata bahasa Arab, *red*.), *sharf* (bentuk-bentuk dan perubahan kata dalam bahasa Arab, *red*.), harus mengeram lama di pesantren, hafal ribuan bait *Alfiyyah Ibn Malik* dan sebagainya. Kitab gundul pun seolah menjadi 'hantu' mengerikan, tidak hanya bagi kaum muslim awam, bahkan para santri pesantren sekalipun.

Kenyataan itu menggelisahkan Pengasuh Ponpes Darul Falah, KH. Taufiqul Hakim. Untuk menyiasatinya, pria kelahiran Sidorejo, Bangsri, Jepara 14 Juni 1975 ini, menciptakan metode pembelajaran kitab kuning secara cepat, tepat, dan menyenangkan. Metodenya yang diberi nama Amtsilati, ini terinspirasi metode belajar cepat membaca al-Qur'an Qira'ati karya KH. Dachlan Salim Zarkasyi.

dok.Rumdi

KH. Taufiqul Hakim

"Terdorong dari metode Qira'ati yang mengupas cara membaca yang ada harakatnya, saya membuat tuntunan yang bisa digunakan untuk membaca kitab yang tidak ada harakatnya," ujarnya saat ditemui Rumadi dari the WAHID Institute di kediamannya.

Diceritakannya, sejak 27 Rajab 1421 H, dirinya terus merenung mencari solusi problem ini."Setiap hari saya melakukan *mujahadah* (usaha-usaha spiritual, *red.*) terus-terusan sampai 17 Ramadlan," kata ayah M. Rizqi al-Mubarok ini.

Bertepatan waktu Nuzulul Qur'an itu, seakan-akan ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menulis. "Siang malam saya ikuti dorongan itu dan akhirnya pada 27 Ramadlan selesailah penulisan *Amtsilati* dalam bentuk tulisan tangan. *Amtsilati* ditulis hanya 10 hari," terangnya.

Kini, kata Kiai Taufiq, karyanya yang tujuh jilid tipis itu, telah tersebar ke berbagai penjuru negeri. Tidak hanya di Jawa, tapi juga di Kalimantan, Batam dan bahkan di luar negeri seperti Malaysia. "Sampai saat ini *Amtsilati* telah diterbitkan tidak kurang dari 5 juta eksemplar," ungkap alumni Ponpes al-Manshur, Popongan, Klaten ini.

Bahkan metodenya telah dijadikan skripsi oleh Abdul Rosyid, dengan judul Metode Amtsilati dalam *Proses Penerjemahan: Studi Analisis Buku 'Program Pemula Membaca Kitab Kuning Karya H. Taufiqul Hakim*, di Jurusan Tarjamah Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kelebihan metode Amtsilati, yang merupakan 'rangkuman' *Alfiyyah Ibn Malik*, ini yaitu meletakkan rumus-rumus dan gramatikal Arab secara sistematis. Rumus-rumus itu lantas diikat melalui hafalan yang terangkum dalam dua buku khusus, yaitu *Rumus Qaidati* dan *Khulashah Alfiyyah*.

Menurut kesimpulan Kiai Taufiq, sebetulnya tidak semua bait kitab Alfiyyah karya Ibn Malik, kitab induk yang berisi cara membaca kitab gundul, digunakan untuk membaca kitab kuning. "Hanya 100 sampai 200 bait yang sangat penting dan prioritas. Selainnya hanya penyempurna," ujarnya mengomentari ribuan bait dalam *Alfiyyah*.

Diharapkannya, untuk menguasai kitab gundul secara mumpuni, siapapun tidak perlu bersusahpayah mempelajarinya selama bertahun-tahun, tapi cukup 3 sampai 6 bulan saja.

Untuk menunjang metodenya, Kiai Taufiq juga menulis karya sejenis. Misalnya, *Qaidati*: *Rumus dan Qaidah, Sharfiyah: Metode Praktis Memahami Sharaf dan I'lâl, Tatimmah*: *Praktek Penerapan Rumus 1-2, Khulashah Alfiyah Ibnu Malik*, dan sebagainya.

Nurul H. Maarif

Kreasi Ulama `Ajam

Oleh: Abdul Moqsith Ghazali
Peneliti the WAHID Institute

ULAMA dan keulamaan dalam Islam kuat beraroma Arab-Timur Tengah. Para ilmuwan dari sana menjadi kiblat dan kitab-kitabnya menjadi rujukan umat Islam. Sampai sekarang, ketika terjadi soal atau kasus di suatu kawasan, maka para tokoh agama di daerah biasanya meminta jawaban pada ulama Timur Tengah seperti Yusuf al-Qardlawi, Wahbah al-Zuhaili, Abdullah bin Baz, dan lain-lain. Mereka mentaklid pendapat-pendapat yang datang dari sana. Walhasil, Arab merupakan sumber otoritas keulamaan dan parameter kesahihan tafsir dalam Islam. Pengembangan keilmuan Islam pun hanya mungkin efektif kalau dilakukan oleh para ulama Arab-Timur Tengah.

Sementara para ulama non-Arab dianggap pinggiran dan karya-karyanya dipandang sebelah mata. Ini, salah satunya, karena ulama non-Arab diposisikan atau memposisikan diri sebagai orang`*ajam* (asing) yang tak cukup memadai untuk memahami detail dan seluk-beluk ajaran Islam, agama yang memang pertama kali lahir di Arab. Jika orangnya dianggap *ajam*, maka kitab-kitabnya pun dianggap *ghair mu`tabarah* (kurang absah), sehingga tak pantas menjadi referensi umat Islam. Tak pelak lagi, kitab-kitab yang dikreasikan para ulama Indonesia agak sulit memasuki gelanggang percaturan intelektual Timur Tengah. Karya ulama pribumi tak memiliki wibawa auratik di hadapan ulama Arab.

Padahal, banyak karya ulama *`ajam* yang brilian. Misalnya, karya gemilang KH. Ma`shum Ali dalam bidang ilmu *sharf, al-Amtsilah al-Tashrifiyah*. KH. Hasyim Asy`ari menulis *Adab al-`Alim wa al-Muta`allim*. KH. Bisri Mustofa, menulis kitab tafsir *al-Ibriz*. KH. MA Sahal Mahfudz menulis kitab *Thariqah al-Hushul `ala Ghayah al-Ushul*. Sadar akan posisinya sebagai orang *`ajam,* sejumlah kiai Jawa membuat metode baca al-Qur'an secara kilat, metode Qira'ati, Iqra', al-Bayan, dan Hattaiyah. Bahkan, kini ditemukan metode cepat membaca kitab kuning. Yaitu, metode Amtsilati yang dicipta KH. Taufiqul Hakim, dari Jepara Jawa Tengah. Dengan metode ini, para pelajar Islam tak perlu menghabiskan banyak waktu hanya untuk sekedar membaca kitab berbahasa Arab yang tanpa titik-koma, *syakl* atau *harakat*. Melalui metode ini, *kun fayakun*, setiap orang bisa dengan mudah membaca kitab kuning.

Dengan fakta ini, dua hal bisa dikatakan. *Pertama*, karya ulama Indonesia tak seharusnya dipandang sebelah mata. Walau hidup di "pulau terasing", para ulama Jawa telah menghasilkan karya monumental bahkan dengan kualitas ekspresi dan elokuensi yang tak kalah dengan ulama Timur Tengah.

Dengan kualitas yang mumpuni itu, kebiasaan untuk selalu bertanya soal-soal dalam negeri ke ulama Arab tak perlu dilakukan. Bukan hanya karena yang tahu hakekat persoalan itu adalah ulama Indonesia sendiri, melainkan juga karena mutu dan kualitas ulama Indonesia ternyata setara bahkan dalam beberapa hal melebihi ulama-ulama Arab. Saya kira, ulama Indonesia setingkat KH. MA Sahal Mahfudz, KH. Abdurrahman Wahid, Ustadz M. Quraish Shihab, KH. Hussein Muhammad, KH. Masdar F. Mas'udi tak kalah alim dibanding ulama kontemporer Arab.

Kedua, ini menjadi pelajaran bagi intelektual muda Islam Indonesia untuk tak canggung membuat karya-karya besar Islam. Bukankah, para ulama Jawa itu cukup percaya diri dalam berkarya? Sebab, terus terang, inferioritas atau perasaan rendah diri di hadapan ulama Arab adalah salah satu faktor yang menghambat produktifitas intelektual ulama Indonesia selama ini. Para ulama *`ajam,* seperti telah diteladankan para kiai senior, harus terus membuktikan bahwa karya-karya kreatif Islam bisa dikelola dengan baik di luar tanah dan kawasan Arab.

dok.WI/Witjak

Sistem belajar di pesantren

dok.pesantren online

Referensi kitab klasik di Bahtsul Masa'il

Fatwa untuk Kemaslahatan Publik

Fatwa organisasi keagamaan berfungsi memandu jamaahnya. Dari urusan pribadi hingga publik. Beberapa dibuat untuk merespon zamannya.

Dingin malam yang menusuk tulang, tak mampu memadamkan semangat seratusan kiai NU dari beberapa wilayah Jawa Tengah yang tengah serius membolak-balik lembaran kitab kuning.

Mereka berkumpul dalam bahtsul masail yang digelar PCNU Jepara bersama Pengurus Wilayah Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (PW LBM NU) Jawa Tengah, di Gedung Nahdlatul Ulama Cabang Jepara, Jawa Tengah, September 2007 silam.

Satu hal yang mereka cari: hukum fiqh mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Muria. Perdebatan sengit kerap muncul dalam forum itu. *Mubahatsah* (pembahasan) hukum PLTN Muria, yang dijadwalkan selesai pukul 22.30 WIB, akhirnya molor hingga dini hari.

Berkat kegigihan dan kesabaran para kiai itu, keputusan final dicapai: PLTN Muria hukumnya haram. Dalam sejarah NU, ini fatwa pertama tentang PLTN.

"Awalnya semua peserta disodori beberapa persoalan. Lalu mereka menggali *maraji'* atau referensi dari berbagai ayat, hadis dan kitab-kitab klasik," ungkap Ketua PCNU Jepara KH. Nuruddin Amin, yang akrab dipanggil Gus Nung.

"*Maraji'* yang paling kuat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bersama," imbuhnya.

Bahtsul masa'il adalah forum resmi yang berwenang memfatwa dan menjawab permasalahan yang dihadapi warga nahdliyin. Termasuk rencana pembangunan PLTN Muria yang meresahkan ribuan warga nahdliyin di kawasan itu (baca: *Sama Takutnya, Beda Sikapnya*).

Fatwa ulama NU memang selalu bersinggungan dengan kepentingan warganya. Seperti fatwa hukuman bagi koruptor. "Hukuman yang layak bagi koruptor adalah potong tangan sampai hukuman mati," tegas keputusan yang diambil dalam Munas Alim Ulama NU di Jakarta pada 2002 itu.

Menurut para ulama NU, dalam pandangan syariat, korupsi adalah pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. "Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan pencurian (*sariqah*) dan perampokan (*nahb*)."

Selain korupsi, NU yang sebagian besar warganya berdiam di pelosok-pelosok daerah merasa perlu menjaga lingkungan. Untuk itulah muncul fatwa haram mencemarkan lingkungan

pada Muktamar NU ke-29 di Tasikmalaya.

"Mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar* (kebahayaan), maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*)," tegas fatwa itu.

Bahkan waktu itu muncul usulan, perusak hutan dihukum seberat-beratnya. "Sampai hukuman mati," kata KH. Imam Ghazali Said mengisahkan muktamar itu (baca: *Majalah Sudah Menggantikan Kitab*).

Selain lingkungan, kasus tanah kerap menjadi masalah bagi warga NU. Maka wajar jika forum bahtsul masail Muktamar NU ke-30 di Kediri, Jawa Timur, menelurkan fatwa pembebasan tanah rakyat.

"Pembebasan tanah rakyat dengan harga tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim dan hukumnya haram serta tidak sah."

Di luar fatwa yang dibuat dalam forum resmi, kiai-kiai NU juga banyak membuat fatwa 'swasta'. Maksudnya, fatwa tidak dibuat oleh NU secara organisatoris, tapi oleh kiai-kiai NU yang peduli terhadap suatu masalah. Fatwa 'swasta' biasanya akan dituruti para santri dan alumni pesantren kiai-kiai tersebut.

Misalnya, KH. Thantowi Jauhari Musaddad beserta kiai-kiai di Garut Jawa Barat, pernah mengadakan bahtsul masail untuk menghasilkan fatwa lingkungan. Mereka memutuskan, memelihara dan melestarikan lingkungan hukumnya wajib. Sebaliknya, perusakan alam dan lingkungan hukumnya haram.

Penanaman pohon untuk penghijauan, pelestarian lingkungan dan pencegahan banjir, adalah sedekah jariyah yang akan mendapat limpahan pahala dari Allah SWT.

Bahtsul masail swasta lainnya adalah Forum Pesantren-Petani di Ponpes Sunan Pandanaran, Yogyakarta pada 2005. Forum yang membahas Perpres 36/2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ini diikuti 150 perwakilan pesantren dan kelompok tani di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Lampung, Ampenan NTB, dan Sulawesi Selatan.

"Para kiai sepakat meminta presiden untuk membatalkan Perpres tersebut karena tidak sah dan haram hukumnya," kata Ketua Panitia bahtsul masail, KH. Abdullah Hasan.

Menurut Kiai Hasan, putusan tidak sah dan haram itu karena Perpres tidak mengakomodasi kepentingan pemilik tanah dan kepentingan rakyat secara keseluruhan. "Sedang ganti rugi oleh pemerintah yang dititipkan lewat pengadilan, itu disertai pemaksaan," tuturnya.

"Di samping itu, Perpres tidak mengatur penyelesaian yang adil antara pihak-pihak yang bersengketa," imbuhnya.

Forum juga memutuskan, pembelian tanah secara paksa, hukumnya haram. Bahkan saat itu, banyak kiai yang menilai hal ini sebagai *ghashab* (memanfaatkan barang milik orang lain tanpa izin).

Adanya legitimasi spiritual yang kuat, membuat bahtsul masail banyak dijalankan agamawan dan cendekiawan non-NU. Misalnya, bahtsul masail lintas iman yang membahas Lumpur Lapindo. Forum yang diikuti agamawan Muslim, Kristen, dan Katolik, ini dihelat di Pasar Baru Porong Sidoarjo Jawa Timur, akhir Agustus lalu.

Dalam fatwanya, forum tidak membenarkan pemberian uang oleh Lapindo terhadap masyarakat korban sebagai akad jual beli. "Tidak benar! Dalam kasus ini, Lapindo wajib akad ganti rugi, bukan jual beli. Lapindo wajib mengganti untung seluruh kerusakan akibat dampak luapan lumpur berdasarkan kesepakatan dengan korban," tulis keputusan itu.

Uniknya, untuk menguatkan keputusannya, forum tidak hanya merujuk kitab fiqh klasik, tapi juga referensi dari agama non-muslim. Selain *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, juga dikutip referensi Katholik dalam *Gaudium et Spes part. 27*.

Banyak fatwa NU lainnya yang bertujuan membebaskan warganya berekspresi. Umpamanya, fatwa Muktamar NU ke-10 di Surakarta Jawa Tengah. Di sana, antara lain, diputuskan perempuan boleh berpidato keagamaan di depan laki-laki, karena suaranya bukanlah aurat.

Ada juga fatwa wanita menjadi anggota DPR/ DPRD. Konferensi Besar Syuriah NU di Surabaya Jawa Timur, 19 Maret 1957 memutuskan, menurut hukum Islam wanita diperbolehkan menjadi anggota DPR/ DPRD, jika telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Ada juga fatwa hasil Munas Alim Ulama NU, di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, pada Juli 2006, yang memutuskan keharaman *trafficking* dan kewajiban mencegah terjadinya *trafficking*.

Forum serupa bahtsul masail juga dimiliki Muhammadiyah. Lembaga yang berwenang membuat putusan hukum atau fatwa bagi warga organisasi ini bernama Majlis Tarjih.

Majlis Tarjih pernah memfatwakan wanita boleh memberi pengajaran agama di hadapan laki-laki. Dalam *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah* disebutkan, wanita mengajar pria dibolehkan, karena tidak ada larangan yang mencegahnya. Tentu saja, lanjutnya, disyaratkan adanya keamanan, seperti memejamkan mata hati dan tidak ber-*khalwat* (menyendiri atau berdua-duaan, *red.*).

Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke XX di Garut Jawa Barat, 18-23 April 1976, membuat putusan tentang *Tuntunan Adabul Mar'ah fi al-Islam*. Diantara pointnya, itu perihal *Wanita Islam dalam Bidang Politik*. "Peranan yang langsung berupa praktik politik dalam badan-badan legislative atau DPR dari pusat sampai ke daerah-daerah, dalam hal ini kaum wanita harus ikut serta dan berjuang untuk mencapai jumlah perwakilan memadai," tegas putusan itu.

Ada juga putusan yang membolehkan wanita menjadi hakim, direktur sekolah, direktur perusahaan, camat, lurah, menteri, walikota, dan sebagainya. "Agama tidak memberi alasan bagi yang menolak dan menghalang-halanginya," hasil putusan

dok.WI/Nurul H. Maarif

Aksi santri menolak PLTN

itu menegaskan.

Bahkan pada Munas XXIII di Banda Aceh 1995, Majlis Tarjih Muhammadiyah membuat keputusan tentang *Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan dalam Perspektif Islam*. Dalam Bab Kesimpulan/Rekomendasi dan Keputusan point 5, diputuskan bahwa "Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang, baik pria maupun wanita, untuk memilih jenis pekerjaan/profesi yang disukainya".

Para ulama di Indonesia tentu berfikir, bahwa fatwa apapun harus memihak pada kemaslahatan umat. Bukan untuk kepentingan golongan atau pribadi. Apalagi untuk mendiskreditkan kelompok tertentu.

Nurun Nisa', Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi

Sama Takutnya, Beda Sikapnya

PENGURUS Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara bekerjasama dengan Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng memfatwa haram pembangunan PLTN di Semenanjung Muria, Jawa Tengah. Fatwa yang digodok kiai-kiai NU melalui forum Bahtsul Masail, dari 01-02 September 2007, itu sontak mendulang pro kontra.

Reaksi keras datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). "Bagi kami, itu berlebihan. Kami belum membahas. Tapi, keputusan PCNU Jepara kami nilai sebagai masukan atau rekomendasi," ujar Ketua PBNU Ahmad Bagja.

Hal senada dinyatakan Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi. Ada pihak lain, katanya, yang menunggangi PCNU Jepara. "Itu mungkin disokong oleh kepentingan bisnis yang merasa dirinya dirugikan. Melihat kenyataan seperti itu, banyak yang tertarik untuk cari simpati baik politik, LSM, maupun Pilkada Jateng. Situasi seperti itu tambah meriah dengan adanya tokoh nasional dan internasional," ujar Hasyim dalam penggalan SMS-nya yang beredar luas.

"Biaya demo dan pertemuan itu sangat besar yang tidak mungkin ditanggung PCNU Jepara," tegas Hasyim dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (Rakernas LBMNU), di Gedung Dewantoro, Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (05/09/07). "Problem nuklir di Jepara sudah masuk angin," imbuhnya.

Tak berhenti di situ. Rakernas LBMNU menjadikan fatwa PCNU Jepara sebagai agenda pembahasan. Hanya saja, keputusan final belum dihasilkan. Isu ini pun akan dibahas pada kesempatan lain. "Hal terpenting, bahtsul masail harus berbasis riset yang mendalam," kata Ketua Panitia Rakernas LBM HM Kholil Nafis seolah 'menuding' fatwa haram PLTN NU Jepara tak berbasis riset mendalam.

Bantahan datang dari Ketua PCNU Jepara KH. Nuruddin Amin. Dia mengatakan, kemunculan fatwa itu melalui berbagai informasi yang diserap para kiai. Ulama, katanya, mengedepankan kaidah fiqh *dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan).

"Para kiai tak hanya melakukan refleksi kaidah-kaidah fiqh, tapi juga sejarah panjang PLTN di dunia dan wacana di Indonesia, hingga sikap-sikap pemerintah yang kurang responsif terhadap persoalan ini, utamanya pada masyarakat lapisan bawah," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Nung ini.

Gus Nung mengakui, dalam sebuah perkara seringkali ada *mafsadah* (keburukan) dan *maslahah* (manfaat). al-Qur'an mencontohkan *khamr* (minuman keras) dan *maysir* (judi), yang diakui ada manfaatnya, tapi dampak negatifnya lebih hebat atau dalam bahasa al-Qur'an disebut sebagai *itsmuhuma akbaru min naf'ihima* (dosanya lebih besar daripada manfaatnya), sehingga hukumnya haram.

"Ketentuan al-Qur'an ini menjadi rujukan utama kami dan dirumuskan dalam berbagai kaidah fiqh," kata Gus Nung.

Selama merumuskan fatwa itu, kata Sekretaris Tim Perumus KH. Ahmad Roziqin, pihaknya memegang prinsip *ahlussunnah wal jamaah; tawassuth, i'tidal, tasamuh, dan tawazun*. "Hukum haram ini melalui kajian panjang dari masing-masing kiai. Jadi mereka telah memiliki bekal informasi seputar PLTN, termasuk pandangan dari sisi fiqh," katanya.

PCNU Jepara menilai, secara nyata rencana pembangunan PLTN telah menimbulkan *tarwi' al-muslimin* (keresahan umat). "Jadi, pembangunan PLTN Muria lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Karena itu, kami memutuskan haram!" imbuh Kiai Roziqin.

Mantan Ketua Umum PBNU KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung pengharaman PLTN Muria. Menurutnya, keputusan PCNU Jepara telah sesuai metodologi berfatwa, karena melandaskan dalilnya pada al-Qur'an. "Yang dipakai para ulama di Jepara untuk menyatakan bahwa reaktor nuklir itu membahayakan, itu al-Qur'an al-Karim," katanya.

Kalangan muda NU Jepara justru mengkhawatirkan perdebatan di internal kaum nahdliyin ini. "Jangan-jangan nanti Fatwa Haram PLTN Muria oleh PCNU Jepara dibatalkan PBNU," kata Koordinator Garda Muria Zakariyya el-Anshori.

Kekhawatiran Zakariyya mungkin tak akan terjadi. Sejatinya Hasyim Muzadi pun takut terhadap pembangunan PLTN. "Wong gardu listrik saja *njeblug* (meledak, *red.*), lalu bagaimana nantinya kalau ada kebocoran nuklir? Ini yang dikhawatirkan oleh masyarakat Jepara," tuturnya di PBNU, Senin (03/09/07).

Benar saja. Seminggu kemudian, laboratorium milik Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) di Serpong pun *njeblug*. Walau para pejabat garda depan pembangunan PLTN itu mengatakan tidak ada reaktor yang bocor, namun semangat penolakan seperti kembali menemukan momentumnya. Dan roman-romannya PBNU akan segera menyusul PCNU Jepara.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.WI/Nurul H. Maarif

KH. Nuruddin Amin

dok.pribadi

Dr. KH. Imam Ghazali Said

Pengasuh Ponpes An Nur Wonocolo Surabaya

MAJALAH Sudah Menggantikan KITAB

LEMBAGA Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) adalah lembaga yang berwenang mengkaji keputusan hukum atas berbagai persoalan kemasyarakatan. Tema dominan yang diangkat adalah sosial, politik dan lingkungan. KH. Imam Ghazali Said mengusulkan, LBM NU harus mempertimbangkan metode istiqra'i (penelitian lapangan) supaya kontekstual dengan zaman. Berikut pernyataan editor buku Ahkam al-Fuqaha' fi Muqarrarat Mu'tamar Nahdlatil Ulama' (1926-1999 M), ini kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute:

Tema apa yang banyak di-Bahtsul Masail (BM)-kan?

Tema sosial dan politik. Misalnya soal peran perempuan, baik sebagai kepala desa, anggota parlemen, presiden, pengisi pengajian, dan sebagainya. Tentang perempuan mengisi pengajian, itu sudah dibahas tahun 1928. Dalam kitab acuan NU, memang ada dua pendapat; suara perempuan aurat dan bukan aurat. Tapi keputusan saat itu memilih, suara perempuan bukan aurat.

Adakah perubahan dalam tradisi Bahtsul Masail?

Pada Muktamar NU 1926 sudah dirumuskan bagaimana mengambil keputusan dalam Bahtsul Masail. Misalnya, mazhab dan pendapat siapa yang diunggulkan. Hanya dalam perjalanannya 'menyimpang' dari metodologi yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya asuransi. Pada zaman kitab klasik ditulis, *kan* nggak ada asuransi. Karena tidak menemukan kitabnya, para kiai menukil Majalah *Hidayah Islamiyyah, al-Manar,* dan fatwa beberapa mufti Timur Tengah. Yang dirujuk bukan kitab lagi, tapi majalah.

Artinya Bahtsul Masail sekarang lebih terbuka pada kitab di luar NU?

Ya. Tapi banyak menuai kritik. Misalnya ketika Muktamar ke-27 di Situbondo muncul wacana memasukkan *Tafsir al-Maraghi.* Juga pada 1960-an ketika NU menjadi partai politik, PKI mengampanyekan pembagian tanah. Waktu itu NU merujuk buku-buku modern karya Abdul Qadir Audah dan Yusuf Musa dari al-Ikhwan al-Muslimun.

Soal Tafsir al-Maraghi, waktu itu KH. MA. Sahal Mahfudh mengatakan tidak apa-apa walaupun penulisnya tidak mengakui tawasul. Karena, karya ilmiah, bisa saja satu sisi tidak cocok dengan NU, tapi sisi yang lain cocok. Padahal isi kitab tafsir ini bermazhab Syafii. Hanya tawasul yang tidak cocok. Karena itu, Kiai Sahal menyatakan, kitab itu diterima saja, tapi soal tawasul nggak usah diambil. Ketika terjadi voting, Kiai Sahal kalah. *Tafsir al-Maraghi* tetap ditolak.

Merujuk kitab baru itu mencederai kekhasan NU?

Nggak juga. Karena kalau mencari ke kitab-kitab lama, kita kesulitan. Saya kira itu positif saja.

Bagaimana fatwa tentang lingkungan?

Isunya tentang hutan muncul pada Muktamar NU Cipasung, 1994. Keputusannya, perusak hutan harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan ada usulan hukuman mati. Ini fenomena baru dalam Bahtsul Masail. Pada masa awal *nggak* sampai ke sana, karena isunya belum mengemuka.

Bagaimana soal Fatwa Haram PLTN Muria?

Saya sudah ketemu kiai-kiai Jepara dan diberi makalah hasil keputusannya. Saya melihat ada ketidakpercayaan karena beberapa kasus tidak bisa diatasi pemerintah, seperti lumpur Lapindo Sidoarjo. Lapindo memang ada *mashalih* (kemanfaatan)-nya. Tapi ketika terjadi *mafasid* (kerusakan), pemerintah tidak bisa mengatasi. *Lha* kalau ini terjadi pada PLTN bagaimana?

Yang menarik adalah cara mereka mengambil kitab lama sebagai acuan membahas PLTN. Mereka menggunakan *ilhaq al-masail* (membuat hukum baru dengan membandingkannya pada persoalan lama yang sudah ada hukumnya, *red.*). Karena kitab lama tidak berbicara tentang PLTN, mereka merujuk kepada masalah orang berobat ke dokter. Pengobatan itu ada efek negatifnya. Kalau efek negatifnya tidak bisa diatasi, ya jadinya haram. Demikian juga PLTN.

Seharusnya?

Ya, lebih baik tidak mengutip dari situ. Tapi mengutip metodologinya. Di NU *kan* ada dua cara pengambilan hukum; *manhaji* (mengambil metode) dan *qauli* (mengambil pendapat). Hanya merujuk ke *qauli* itu tidak sesuai. Harusnya lebih diutamakan *manhaj*-nya. Jadi keduanya tetap perlu dikemukakan.

Ada Bahtsul Masail tentang Lumpur Lapindo yang melibatkan banyak tokoh agama. Pandangan Kiai?

Itu yang mengadakan bukan NU. Karena Bahtsul Masail kiai-kiai NU, itu mendapat legitimasi di masyarakat. Dan NU sudah punya pakemnya. Tapi, karena namanya lintas agama, saya kira Bahtsul Masail seperti itu tidak apa-apa. Saran saya, jangan pakai istilah Bahtsul Masail. Pakai saja istilah lain.

Apa kelebihan dan kelemahan Bahtsul Masail?

Pertama, pengetahuan kiai-kiai di daerah dan di pusat sebetulnya berimbang, jadi tidak bisa menganggap orang yang di PBNU, itu lebih hebat. Makanya tidak boleh saling membatalkan antara tingkat cabang, wilayah atau pusat. Bahtsul Masail itu tidak berfungsi seperti pengadilan. Itu hanya kekuatan moral. *Kedua*, para kiai mampu mengeksplorasi teks-teks kitab klasik untuk dikontekstualisasikan sesuai zaman sekarang. *Ketiga*, ada pergeseran perujukan. Karena teks kitab klasik tidak seluruhnya bisa dipakai untuk mengatasi problem sosial, maka yang diambil metodologinya bukan teksnya.

Sedang kelemahannya, pada masa Bahtsul Masail awal, kita tidak diperkenankan merujuk al-Qur'an dan Hadits secara langsung, melainkan harus lewat *al-kutub al-mu'tabarah* NU. Itu serupa kutipan dalam kutipan. Dan sekarang, kelemahan itu diatasi dengan mengambil metodologinya sesuai keputusan Munas Alim Ulama NU Bandar Lampung, 1992. Hanya saja, yang Lampung tidak dilaksanakan, sampai keputusan Muktamar Boyolali. Di sana, hasil keputusannya, setiap jawaban, dalilnya harus al-Qur'an, Hadits, fatwa shahabat dan fatwa ulama.

Harapan untuk Bahtsul Masail ke depan?

Cobalah padukan antara tekstual dan kontekstual. Selama ini *kan* ada hegemoni tekstual kitab klasik. Itu yang disebut dalam ushul fiqh sebagai sistem *istidlali.* Mestinya sekarang pakai sistem *istiqra'i,* penelitian lapangan. Dari penelitian lapangan lalu ditentukan hukumnya. Keduanya dipakai, tapi tidak dominan *istidlali*-nya. Tetap mendominankan *istiqra'i*-nya.

Menabur Damai Lewat Udara

Berbagai media digunakan untuk menyiarkan Islam yang damai. Beberapa pesantren, santri dan masyarakat mendirikan radio untuk itu. Tidak hanya yang bersifat komersial, tapi juga radio komunitas yang berbasis masyarakat.

Sekilas bangunan berlantai dua di Jl. Masjid Raya No. 100 Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan itu seperti kurang terawat. Cat temboknya terkelupas di sana sini. Beberapa dindingnya bahkan diselimuti lumut. Di ruang tamu teronggok satu set sofa tua dan beberapa meja kerja. Beranjak lebih ke dalam, berbaris empat ruangan yang dipakai sebagai gudang dan ruang mesin, ditambah dua ruangan berfungsi sebagai ruang siar.

Gedung ini adalah kantor Radio Suara As'adiyah (RSA), radio swasta tertua di Sulawesi Selatan, bahkan di Sulawesi. Ternyata di balik kebersahajaan penampilannya, radio milik Pondok Pesantren As'adiyah ini telah mengudara 40 tahun lebih. Ini adalah prestasi mengagumkan bagi sebuah radio swasta, bahkan milik pesantren, yang hanya bisa ditandingi oleh radio milik pemerintah seperti Radio Republik Indonesia (RRI).

Dengan tujuan menyebarkan gagasan keIslaman yang menghargai dinamika masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat plural, RSA yang berada pada frekuensi 86.4 AM ini didirikan pada 1967 oleh ulama kharismatik, Gurutta Haji Muhammad Yunus Martan (1906 – 1986 M).

Sejak berdiri, RSA mampu menyampaikan pandangan keagamaan Pondok Pesantren As'adiyah, sebagai salah satu pesantren terbesar di Indonesia bagian timur. Didirikan oleh KH. Muhammad As'ad pada 1928, Pesantren As'adiyah adalah pelopor gerakan Islam tradisionalis moderat di Sulawesi Selatan.

"KH. Muhammad As'ad ini sahabat Pendiri NU KH. Hasyim Asy'ari ketika belajar di Makkah. Karena itu cara pandangnya mirip NU yakni *ahlussunnah wal jamaah*," jelas Direktur RSA Drs. Ahmad Muktamar, MA kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Sedang Gurutta Yunus Martan, imbuh Muktamar, adalah tokoh yang paling sukses memimpin Pesantren As'adiyah. Selain berkembangnya cabang-cabang Pesantren As'adiyah, pendirian radio adalah ide cemerlang yang belum terpikirkan oleh siapapun. Karena itu dulu orang menyebut Gurutta Yunus Martan sebagai kiai yang lahir sebelum zamannya.

"Artinya, ketika orang lain belum memikirkan radio sebagai media dakwah, beliau sudah mendirikan radio ini bersama Dr. Rafi Yunus, H. Badruddin Abduh dan H.M. Yahya," tambah Muktamar yang memimpin RSA sejak 2003 ini.

Dikisahkan Muktamar, pada pertengahan 1970 terjadi kebakaran besar yang menghanguskan hampir seluruh bangunan Pesantren As'adiyah, tak ada satupun yang bisa diselamatkan kecuali RSA. Hal itu karena Gurutta Yunus Martan memerintahkan agar lebih dulu menyelamatkan barang-barang milik RSA. "Begitu pentingnya media radio ini bagi Gurutta Yunus Martan," lanjut pria kelahiran Sengkang 12 Juni 1969 ini.

Selain sebagai alat pembinaan 400 cabang As'adiyah yang tersebar di berbagai provinsi, RSA juga berjasa menyebarkan dakwah Islam yang damai. Sebab itu, salah satu program radio yang siarannya menjangkau Sulawesi Tenggara, beberapa kabupaten di Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, ini adalah Dialog Interaktif Islam dan Pluralisme.

"Di sini kita menghadirkan mereka yang selama ini terpinggirkan seperti Komunitas Tarekat Khalwatiyah, Komunitas Maccena Tapareng, Komunitas Bissu dan lain-lain. Mereka bicara dan masyarakat bebas menanggapinya," papar Koordinator Program Dialog Interaktif Islam dan Pluralisme Subair Umam.

Menurut Nurdin, yang sudah 20 tahun menjadi penyiar di RSA, radio ini adalah *trend setter* masyarakat Wajo. "Untuk menentukan waktu shalat, masjid-masjid raya yang berada dalam jangkauan RSA seolah tidak lagi percaya pada jam. Kalau RSA adzan baru mereka adzan. Begitu pula dalam penentuan zakat fitrah. Meskipun sudah ada pengumuman dari pemerintah, mereka tetap menunggu pengumuman dari RSA," ungkap Nurdin.

Bahkan, apabila radio mengalami gangguan siaran atau terlambat mengudara, maka redaksi akan menerima ratusan telpon dari pendengar menanyakan hal tersebut. "RSA bagi masyarakat Wajo dan sekitarnya seperti garam dalam sayur. Mereka sudah tak bisa ke lain hati," tutur Nurdin bangga.

Kecintaan masyarakat pada radio dakwah yang senantiasa didengarnya juga dirasakan pengelola Radio Persada di Kompleks Pondok Pesantren Sunan Drajat, Desa Banjarwali, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur.

Stasiun Persada FM pernah 'diserbu' pendengar fanatiknya gara-gara program-program seperti pengajian dan dakwah yang selama ini mereka dengarkan dari Radio Persada lenyap berganti hiburan pop. "*Mosok* acara pengajian tiba-tiba berubah musik," sergah salah seorang pendengar setia Radio Persada seperti dikisahkan Direktur Radio Persada Anwar Mubarok.

Anwar yang ikut menemui para tamunya itu menjelaskan, bahwa radio yang dipimpinnya tetap mengudara. Tapi karena daya pancar salah satu radio di Kota Surabaya yang memiliki frekuensi yang sama dengan Radio Persada lebih kuat, maka radio itulah yang ditangkap pemirsa. Anwar berjanji, akan mencarikan solusi agar masalah ini segera selesai.

Sejak mengudara pada awal 2004, radio yang didirikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat KH. Abdul Ghofur, ini seolah menjadi oase di tengah kebutuhan masyarakat terhadap radio dakwah Islam. Dengan program-program yang khas pesantren, radio yang berada pada gelombang 97.2 FM ini langsung menjadi idola masyarakat Lamongan dan sekitarnya.

RSA, radio swasta tertua di Sulawesi

dok.Subri Azhari

Latar pendirian radio ini memang tidak lepas dari keinginan masyarakat di sekitar pesantren untuk mendalami agama. "Urusan agama, orang biasanya tidak bisa langsung diceramahi. Kita berikan apa yang mereka butuhkan berupa hiburan lokal, baru dari sana pesan dakwah kita sisipkan secara perlahan," tutur Anwar yang turut membidani berdirinya radio ini.

Dakwah lewat radio ternyata lebih efektif, karena selain bisa menjangkau ke pelosok, media ini juga mampu merangkul masyarakat dengan latar belakang yang beragam. "Keistimewaan radio ini, berada pada posisi netral. Kita inginkan Islam itu yang damai, mengajak kita semua bahagia dunia akhirat," jelas Anwar.

Maraknya gerakan Islam garis keras yang menggunakan berbagai media, membuat para pendiri Persada FM mengarahkan radio, yang daya jangkaunya mencakup Gresik, Mojokerto, Lamongan, Tuban, sebagian Jombang hingga Rembang, ini menyampaikan pesan Islam damai.

Karena itu dirancang sebuah acara dakwah interaktif yang diasuh langsung KH. Abdul Ghofur dan disiarkan setiap sore hari. "Pengajian ini untuk menyikapi perkembangan mutakhir dalam berbagai bidang. Masyarakat tidak hanya diisi akhiratnya saja. Mereka juga dianjurkan bagaimana bekerja yang halal. Dan selalu pesannya bagaimana damai dunia akhirat," papar Anwar.

Program yang sama juga dibuat Radio Fast 96.4 FM Magelang dengan *coverage area* meliputi eks Karesidenan Kedu plus beberapa kabupaten di Yogyakarta. Radio dengan misi mengembangkan kebudayaan lokal berbasis religi, mempromosikan Islam toleran dan menggalang solidaritas sesama masyarakat pedesaan, ini memiliki program-program konsultasi fiqh sebagai acara unggulan (lihat: *Radio untuk Memfasilitasi Semangat Nyantri Masyarakat*).

Program-program ini diasuh langsung oleh pemilik Radio Fast FM, sekaligus pengasuh Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo Magelang KH. Yusuf Chudlori. Menurut Gus Yusuf, panggilan akrab KH. Yusuf Chudlori, program konsultasi fiqh ini dikemas secara *live* melalui telpon.

"Ini berguna memfasilitasi *ghirah* atau semangat masyarakat mendalami Islam yang sangat tinggi," jelas putra kesebelas pendiri Pesantren API KH. Chudlori dengan Ny. Hj. Nurhalimah ini.

Tidak hanya dilakukan lewat radio komersil, kini pesantren, kelompok-kelompok santri dan masyarakat juga menyuarakan dakwah Islam yang *rahmatan lil 'alamin* lewat radio komunitas (lihat: *Dari Rakom untuk Islam Damai*).

Swasta atau komunitas, yang paling penting dakwah Islam yang damai lewat radio harus konsisten, seperti motto RRI: "Sekali di udara tetap di udara."

Subhi Azhari, Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi

Dari Rakom untuk Islam Damai

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Studio Rakom Bonbar FM Cirebon

PENYEBARAN Islam yang toleran tidak hanya dilakukan lewat radio komersil. Kelompok-kelompok santri dan masyarakat kini juga membentuk radio komunitas (Rakom).

Rakom adalah media yang dikelola oleh suatu masyarakat (komunitas) dengan tujuan untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Rakom, yang dilarang pemerintah menayangkan iklan komersial, isi siarannya dirancang dan diawasi sendiri oleh komunitas tersebut. Menurut Kepmenhub No. 15/2003, daya pancar rakom dibatasi hingga 50 watt, dengan wilayah layanan maksimum 2,5 km. Bahkan PP No. 51/2005 tentang Lembaga Penyiaran Komunitas, rakom hanya boleh mengudara di frekuensi 107.7, 107.8 dan 107.9 Mhz.

Tapi pembatasan itu tidak mengurangi semangat pengelola Radio Medina yang berbasis di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya menyuarakan visi dan misinya. "Kita menyuarakan Islam yang universal, memberi manfaat bagi orang banyak. Karena kami mengemban amanat pesantren," papar H. Dadang Darmawan, salah satu pengurus Radio Medina.

Radio yang mengudara pada gelombang 107.9 FM dan menjangkau sebelas kecamatan di sekitar Singaparna, ini berupaya menanamkan kesadaran tentang kewarganegaraan. Mulai dari bagaimana bertetangga dan berniaga dengan orang lain yang berbeda agama, pendidikan demokrasi hingga kesetaraan jender. "Intinya kita harus merasa bangga dengan keindonesiaan kita," ujar Dadang.

Misi yang sama juga diemban enam Rakom di Wilayah III Cirebon, Jawa Barat. Radio-radio tersebut adalah Caraka FM di Ciborelang Majalengka, Banyu FM di Astanajapura Cirebon, AJ FM di Arjawinangun Cirebon, Sella FM di Bongas Indramayu, Baina FM di Jalaksana Kuningan dan Bonbar FM di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.

Banyu 107.9 FM, misalnya, banyak menyiarkan informasi seputar pesantren-pesantren yang ada di Kecamatan Astanajapura kepada masyarakat. "Melalui radio ini kita ingin mendekatkan pesantren dan kiai dengan masyarakat," kata Ketua DPK Rakom Banyu FM Tabrani.

Tabrani juga merancang program diskusi bertajuk *Dialog Islam Damai* yang diisi para kiai sekitar Astanajapura. "Acaranya 3 kali seminggu. Tujuannya selain penyejukan hati juga untuk membuka dialog kiai dengan masyarakat," jelas Tabrani.

Pembentukan Banyu FM dan lima Rakom lainnya itu dibidani langsung oleh warga dan difasilitasi oleh Fahmina Institute. "Tujuannya agar Rakom menjadi alat pemberdayaan komunitas yang berbasis nilai-nilai keluhuran Islam," kata Koordinator Pendidikan dan Advokasi Fahmina Institute Ade Duryawan.

Untuk tujuan itu, sebelum pembentukan jaringan Rakom itu, Fahmina Institute mengadakan pelatihan untuk Kader Pendidik Agama (KPA) dan Kader Penggerak Warga (KPW) yang dipilih dari warga sekitar Rakom tersebut. Kompetensi yang harus dipunyai KPW diantaranya memiliki kepekaan terhadap problem masyarakat dan mampu mengelola program-program radio komunitas. Sedang KPA adalah, seorang pendidik agama yang humanis dan adil jender dan mampu melakukan pendampingan masyarakat.

"Mereka nantinya yang menggerakkan masyarakat untuk membentuk dan terlibat dalam DPK dan BPPK secara demokratis," jelas Ade.

Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) merupakan perwakilan warga komunitas dan merupakan forum pertanggungjawaban para pengelola program Rakom. Sedang Badan Penyelenggara Penyiaran Komunitas (BPPK) merupakan tim kerja radio komunitas atau organ/tim yang menyelenggarakan siaran Rakom.

Dua lembaga ini yang nantinya mengurus badan hukum Rakom di notaris. "Selanjutnya mengurus perizinan melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) agar sampai ke Menteri Komunikasi dan Informasi," kata Ade (lihat: *Proses Perizinan Radio Komunitas*).

Untuk mewujudkan semua proses itu diperlukan partisipasi aktif warga komunitas. "Karena ini semua milik komunitas. Kita hanya memberi stimulan berupa perangkat keras dan lunaknya saja. Kalau warga tidak bersemangat membesarkan, maka dengan sendirinya Rakom mereka akan tutup buku," pungkas Ade.

Subhi Azhari, Gamal Ferdhi

No	Proses Perizinan Radio Komunitas
1	Pembuatan proposal pendirian radio yang memuat sejarah, latarbelakang pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berita acara pembentukan dan struktur Dewan Penyiaran Komunitas (DPK) dan Badan Pelaksana Penyiaran Komunitas (BPPK), penjelasan program siaran dan peralatan studio.
2	Pengumpulan tandatangan dukungan dari warga dilampiri fotokopi KTP, minimal 250 orang. Disertai pula tandatangan dukungan dari pemerintah desa atau kecamatan setempat.
3	Pembuatan akte notaris kepada notaris setempat dengan menentukan bentuk badan hukum Perkumpulan.
4	Pembuatan surat permohonan izin penyelenggaraan penyiaran dan mengisi formulir persyaratan perijinan yang bisa didapat di KPI-D.
5	Pengiriman seluruh berkas permohonan dan lampirannya kepada KPI-D setempat
6	Staf KPI-D akan melakukan evaluasi dokumen permohonan, pembuktian lapangan dan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait, sebelum akhirnya mengeluarkan surat keputusan tentang ijin siaran.

Sumber: Radio Komunitas dari Lapangan (World Bank)

KH. Yusuf Chudlori
Pengasuh Pesantren API Tegalrejo, Magelang

Radio untuk Memfasilitasi Semangat Nyantri Masyarakat

DENGAN *maksud menyediakan sarana alternatif berdakwah mewujudkan Islam yang rahmatan lil`alamin, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mendirikan Radio Fast 96.4 FM di lingkungan Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang. Bahkan atas permintaan pendengarnya, terbit buku-buku dakwah Islam damai yang disiarkan radio yang mulai mengudara pada 02 Februari 2003 itu. Berikut petikan wawancara Gus Yusuf dengan Arif Hidayat, kontributor the WAHID Institute di Magelang.*

Apa latar belakang pendirian radio ini?

Bermula dari kegelisahan masyarakat, khususnya warga pedesaan, akan radio-radio yang sudah ada yang hanya menampilkan hiburan-hiburan yang semata duniawi. Maka ketika masyarakat merasa kurang, saya mendirikan Fast FM dengan sentuhan duniawi-ukhrawi. Di sinilah Fast FM, yang merupakan kependekan dari *Fastabiqu al-Khairat* (berlomba dalam kebajikan) memposisikan diri sebagai media alternatif bagi masyarakat di wilayah eks-Karesidenan Kedu yaitu Kota Magelang, Kab. Magelang, Parakan, Temanggung, Sukorejo, Ngadirejo, Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Muntilan. Bahkan sampai beberapa kabupaten di Yogyakarta (Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul).

Apa visi dan misinya?

Secara umum Fast FM bertujuan ambil bagian dalam mencerdaskan bangsa. Secara khusus kita menyajikan informasi yang relijius, obyektif, moderat, dan demokratis dengan mengembangkan wacana Islam yang menghargai pluralitas, tanpa membedakan kelompok agama, sosial, politik, maupun kebudayaan. Juga untuk mengembangkan kebudayaan lokal berbasis reliji, mempromosikan Islam toleran dan menggalang solidaritas sesama masyarakat pedesaan. Lebih penting lagi adalah komitmen selalu menjaga keseimbangan antar kepentingan masyarakat, agar tidak terkotak-kotak atau tersekat oleh agama, suku, maupun afiliasi politik. Kami selalu menyematkan arah perjuangan pada komitmen bahwa Islam adalah agama kedamaian yang *rahmatan lil `alamin*.

Bagaimana kiat dakwah radio ini?

Kami menampilkan dakwah Islam yang mengedepankan kebersamaan dan tidak menggurui. Tapi kami juga memutar lagu-lagu pop maupun barat juga musik lokal dan relijius yang disukai masyarakat. Bahkan musisi pop papan atas seperti Dewa 19, Gigi, Sheila on 7 dan lainnya pernah kami undang. Tujuannya agar pesan dakwah bisa sampai ke masyarakat tanpa merasa digurui. Dakwah juga tersaji melalui penyiaran pemecahan masalah-masalah kemasyarakatan dan penyiaran kebudayaan lokal.

KH. Yusuf Chudlori (kanan)

***Sambutan masyarakat*?**

Alhamdulillah, sampai saat ini masyarakat memberikan respon positif terhadap keberadaan radio ini. Beberapa program khusus yang banyak diminati pendengar diantaranya *Menapak Hidup Baru* yang berisi tadarus, siraman ruhani agama Islam dan lagu ruhani agama Islam, kemudian *Baiti Jannati* atau *Rumahku Surgaku* berupa konsultasi keagamaan via telpon yang membahas persoalan pribadi maupun rumah tangga. Juga *Fiqh Interaktif* yang saya asuh, berupa konsultasi fiqh (hukum Islam) yang berkaitan dengan masalah umum seperti politik, sosial, ekonomi dan budaya. Bahkan atas permintaan pendengar, program-program konsultasi fiqh itu telah dibukukan.

Mengapa program konsultasi fiqh begitu diminati?

Dari respon pendengar akan acara ruhani yang diudarakan setiap pagi, kami melihat bahwa saat ini *ghirah* atau semangat masyarakat untuk mendalami Islam sangatlah tinggi. Bahkan sebagian besar masyarakat sebenarnya punya keinginan kuat untuk nyantri. Namun karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, keinginan tersebut tidak terwujud.

Fenomena ini sangat menggembirakan hati, sekaligus tantangan. Acara konsultasi fiqh yang dikemas secara *live* melalui telpon, berguna memfasilitasi semangat tersebut dengan sebaik-baiknya dan agar jangan sampai keinginan luhur memahami agama tadi tidak tersalurkan pada wadah yang tepat, sehingga masyarakat mencari jawaban sendiri yang kadang jauh dari kebenaran. Bahkan menimbulkan pertentangan antar agama dengan kehidupan manusia itu sendiri.

Acara ini juga menjadi jendela masyarakat untuk mengakses sebagian keilmuan dan tradisi pesantren yang dapat menjadi bagian dari solusi problem keumatan dalam kehidupan sehari-hari.

Tapi, ada juga pesantren yang mengharamkan santrinya mendengarkan radio?

Kita harus menghargai perbedaan pendapat itu. Tapi pada dasarnya radio adalah gelas kosong, tinggal mau kita isi madu atau arak. Sebagai media dakwah tentu kita harus menghidangkan madu sesuai porsinya agar dapat dinikmati secara sehat dan bermanfaat. Dan sebagai alat informasi, kami berkomitmen bahwa Islam adalah agama kedamaian dan *rahmatan lil 'alamin*.

Bagi masyarakat yang tidak dapat mendengarkan Radio Fast FM, kami bekerjasama dengan pihak lain mengadakan kegiatan-kegiatan *off air* yang sesuai dengan misi Fast FM. Baik dalam tema dialog kebudayaan, *mujahadah*, pengajian maupun acara lainnya. Dalam acara-acara tersebut saya selalu hadir.

Apa rencana pengembangan Fast FM selanjutnya?

Kami akan menjalin kerjasama pengembangan dan memperluas jaringan radio di beberapa kota di Jawa Tengah, kalau mungkin televisi, *insya Allah*.

Tunas Ketulusan dari Lahan Bencana

Bencana menerjang tak pandang bulu. Semua komponen bangsa dari berbagai latar bahu-membahu. Dengan tulus mereka membantu. Meski kadang dituduh ada udang di balik batu.

Melewati jalan berlubang, retak-retak dan naik turun, Avianto Muhtadi bersama rombongannya tiba juga di Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu tepat pukul setengah sepuluh malam. Meski seminggu berlalu, belum banyak bantuan untuk penduduk daerah terparah yang diguncang gempa berkekuatan 7,9 SR pada Rabu (12/09/07) itu.

Avianto memimpin Community Based Disaster Risk Management (CBDRM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bersamanya, turut serta sejumlah relawan NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, Banser, dan tim dokter. Mereka datang untuk menyalurkan bantuan bagi para korban gempa berupa terpal, beras, mie instant, air mineral, susu bayi, pembalut wanita, pengobatan gratis, dan banyak lagi.

Komitmen kemanusiaan NU pada korban bencana alam diwujudkan dengan merancang program CBDRM pada 2006. “Lembaga ini bermula dari inisiatif Lembaga Penanganan Kesehatan NU (LPKNU) yang ingin mengurangi resiko bencana,” ujar Program Manager CBDRM PBNU Avianto Muhtadi kepada Nurun Nisa dari the WAHID Institute.

Awalnya, tutur Avianto, diadakan seminar perihal CBDRM pada 2005. Kiai dari 18 pengurus NU propinsi, 18 satkorlak, dan 18 ponpes se-Indonesia, diundang sebagai peserta. Saat itu muncul keinginan membentuk gerakan dalam payung NU yang menangani bencana. “Usulan ini kemudian menjadi program satu tahun, 2006-2007, yang didanai AusAid. Para pengusaha NU sendiri belum pernah (mendanai CBDRM, *red*.),” terangnya.

Lembaga ini juga bekerja sama dengan United Nations Coordinator of Humanitarian Assistance (UNCoHA) badan PBB yang mengurus masalah kemanusiaan dan perusahaan-perusahaan yang peduli kemanusiaan.

Program yang ditanganinya, memberi pelatihan manajemen penanggulangan bencana. Tiga *pilot project* dipilih, yaitu Ponpes Nurul Islam Jember, Ponpes Ash-Shiddiqiyyah Jakbar, dan Ponpes Darus-Salam Watucongol Magelang. “Alasan dipilihnya mereka itu karena di Jember dan Jakarta rawan banjir. Di Magelang rawan letusan gunung Merapi. Mereka juga basis NU,” ujarnya.

Melalui program ini, CBDRM telah merekrut 1.500 Santri dan Masyarakat Siaga Bencana (SMSB). Untuk 2008, katanya, direncanakan ada lima *pilot project* lagi. Dan pada 2009 akan merambah luar Jawa. “Kita akan melatih mitigasi atau penanggulangan bencana berupa pemetaan daerah, penanaman pohon, dan membuat tanggul secara berkelanjutan,” ujar Avianto.

Latar belakang dibentuknya CBDRM, kata Avianto, karena NU itu organisasi besar tapi belum sistematis mengurusi bencana. “Ini terlihat dari respon NU yang lamban ketika ada bencana,” Avianto mengakui.

Dia pun diminta PBNU mengonsep CDBRM untuk diajukan ke ajang muktamar yang akan datang supaya menjadi lembaga khusus.

Muhammadiyah juga memiliki tim khusus yang menangani korban bencana, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). Menurut Wakil Sekretaris MDMC, Husnan Nurjuman, embrio MDMC digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 2000.

Waktu itu, ujarnya, bernama Badan Penanggulangan Bencana dan Masalah Kemanusiaan. Badan ini lantas di-sub-kan di bawah pengurus Majelis Kesehatan dan Layanan Kesejahteraan Muhammadiyah. “Baru pada 2007, MDMC resmi berdiri mandiri membawahi urusan bencana dan kemanusiaan,” terangnya.

Melalui ribuan relawan, MDMC membantu korban di Aceh, Yogyakarya, Bengkulu, dan Jakarta. Dananya digalang dari masyarakat, termasuk LAZIS Muhammadiyah. Pun dari hasil kerja sama dengan Direct Relief International Santa Barbara, AusAID, dan UNICEF.

Ketika terjadi gempa Bengkulu misalnya, MDMC menangani 1.000 keluarga pengungsi. Dengan dukungan 7 dapur umum, setidaknya dua ton beras dimasak setiap hari. Mereka juga disertai tim medis dari RSI Cempaka Putih Jakarta.

Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pun memiliki program serupa. Namanya Humanity First Indonesia (HFI). Didirikan pada 2004, HFI menginduk pada HF di London Inggris yang berdiri pada 1994. “HF sifatnya antar benua dan telah ada di 20 negara,” kata Ketua HFI Basyiruddin Pontoh, kepada M. Subhi Azhari dari the WAHID Institute (lihat: *Wadah Khidmat untuk Kemanusiaan*).

Misi HFI memberantas kemiskinan, kebodohan, membantu di bidang kesehatan, dan membantu korban bencana alam. “Kalau ada bencana, HFI memberi pengobatan, dapur umum, membangun sarana prasarana, dan bantuan pasca bencana,” ujarnya.

Menggunakan jasa relawan, HFI turut membantu korban tsunami Aceh, Merapi, gempa Yogyakarta dan Jateng, tsunami Pangandaran, banjir Jakarta, dan sebagainya. “Bantuan datang dari siapa saja. Kita tidak membatasi. Ada yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya insidentil,” katanya.

Selain ormas, lembaga swadaya masyarakat (LSM) membentuk lembaga cepat tanggap untuk menangani bencana. Misalnya, Posko Gus Dur untuk Kemanusiaan, yang dibentuk sejumlah LSM untuk membantu korban gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah. “Posko ini didirikan sebagai bentuk tanggung

jawab dan kepedulian terhadap para korban gempa," kata Ahmad Suaedy yang terlibat mendirikan posko ini.

Posko ini telah menyalurkan dana, tenda, tikar, genset, kasur, baju, masker, selimut, sarung, susu, sembako, mie instan, biskuit, air mineral, obat-obatan, perlengkapan shalat, kompor, pembalut wanita, peralatan mandi, dan sebagainya.

Posko yang juga beroperasi di Aceh dan Porong Sidoarjo, ini bahkan membangun 270 unit rumah transisi seluas 4x6 meter bagi para korban gempa Yogyakarta, yang diserahkan langsung oleh Gus Dur. "Sebanyak 100 unit di Kecamatan Piyungan, 90 unit di Kecamatan Wonokromo, dan 80 unit di Kecamatan Bambanglipuro," kata Direktur the WAHID Institute Yenny Wahid.

Posko ini juga menyumbangkan *crusher* (mesin penghancur puing). "Tidak hanya mesinnya, tapi juga dibarengi pelatihan Puing-puing itu akan dicetak menjadi batako," jelas Yenny.

Di Porong Sidoarjo, 18 kiai mendirikan Posko Independen-populer disebut Posko Kiai. "Banyak rakyat sengsara akibat Lumpur Lapindo. Semua rusak. Akhirnya kita fokus memberikan bantuan pada korban," ujar koordinator lapangan Posko, KH. Hasyim Ahmad.

Menurut pengasuh Ponpes al-Islamiyah Kludan Sidoarjo ini, pendirian Posko memiliki tiga tujuan. *Pertama*, mencarikan bantuan makan. *Kedua*, membantu di bidang kesehatan, bekerja sama dengan RS Siti Hajar dan IDI. *Ketiga*, memberikan keamanan ruhani. "Kita sering kumpul untuk *sharing* masalah dan *istighatsah*," terangnya.

Siapapun bakal tergerak jika saudara sebangsanya terlibas bencana. Oleh sebab itu Crisis Center Gereja Kristen Indonesia (CC-GKI) juga giat membantu korban bencana. Saat gempa Yogyakarta dan Jateng misalnya, pihaknya bekerja sama dengan Ponpes al-Muttaqien Pancasila Sakti, Klaten, pimpinan KH. Muslim Imampuro. "Semua itu karena empati yang mendalam pada para korban," jelas Ketua CC GKI Pendeta Albertus Patty.

Bantuan makanan, minuman, susu bayi, pakaian, selimut, obat-obatan, pelayanan kesehatan, pendirian rumah sederhana, peralatan sekolah, masker, perahu karet dan sebagainya, digalang secara swadaya dari umat Gereja Kristen Indonesia (GKI).

Kendati berlatar Kristen, katanya, tuduhan kristenisasi relatif jarang dialaminya. Ini karena lembaganya melibatkan dokter dan suster muslim, bahkan kiai dan ustadz sebagai pelayan spiritual para korban.

Namun diakui Albertus, di lapangan ada saja masalah kecil. Saat membantu korban gempa di Sragen, bendera Tim GKI diturunkan kelompok Islam radikal. "Setelah mereka pergi, masyarakat korban sendiri yang memasang bendera itu. Ternyata para korban tidak mempermasalahkan," terangnya.

Di Katolik ada Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan

Aksi kemanusiaan CBDRM - NU

dok. CBDRM - NU

Perdamaian (PADMA) Indonesia. Diantara programnya, membantu korban bencana alam yang telah dilakoni sejak 2002. Saat tsunami Aceh, misalnya, PADMA bekerja sama dengan Forum Kepedulian untuk Aceh (Forka) turut membangun mushalla dan asrama pesantren. "Ada dua pesantren putera dan puteri yang kita bangun di Aceh," ujar aktivis PADMA Indonesia Theo Tulasi.

Isu kristenisasi tak luput menerpa. Di Aceh, ujar Theo, pihaknya diusir dari posko oleh kelompok radikal. Operasi pun terhenti sepekan. Diakuinya, PADMA Indonesia memang Katolik, tapi setiap tugasnya tidak mengatasnamakan agama. "Saya tegaskan, PADMA Indonesia tidak bermaksud mengkristenkan orang. Ini kemanusiaan," terangnya.

Pandangan ini juga dimiliki Romo Sandyawan Sumardi. Agamawan Katolik ini tanpa memandang sekat-sekat agama selalu hadir membantu para korban bencana yang tidak berdaya.

"Di Aceh, saya mencarikan ratusan al-Qur'an," kata Romo Sandy (baca: *Kemanusiaan, Refleksi Iman yang Sesungguhnya*).

Bencana yang terjadi beruntun di negeri ini, menggugah kelompok-kelompok agama untuk lebih berkonsentrasi pada urusan kemanusiaan.

Nurun Nisa', Subhi Azhari, Nurul H. Maarif

Romo Sandyawan Sumardi
Rohaniwan Katolik

Kemanusiaan, Refleksi Iman yang Sesungguhnya

dok.WI/ Witjak

TANPA memandang sekat-sekat agama Romo Sandyawan Sumardi, rohaniwan Katolik yang lebih senang disebut sebagai pekerja sosial, selalu hadir dalam tiap bencana, membantu para korban yang tidak berdaya. Berikut petikan pernyataan Romo Sandy kepada Nurun Nisa' dan Widhi Cahya dari the WAHID Institute.

Kenapa bencana alam banyak memakan korban ?

Antara bencana alam dan bencana karena kesalahan atau ulah manusia sudah susah dibedakan. *Global warming* misalnya kalau dirunut merupakan sebab akibat dari keserakahan manusia. Ada karbon, lubang ozon, penebangan hutan, banyaknya korban tsunami juga.

Bagaimana Anda memandang bencana ini?

Tragedi atau bencana sekarang adalah momentum melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan. Kita menjamah orang-orang yang berada pada batas-batas daya hidupnya. Kita dapat bersama bekerja membersihkan puing, mengumpulkan mayat, membagikan logistik, menghidupkan jalur informasi, membangun infrastruktur, mengidentifikasi yang tersisa. Kita menghidupkan komunitas yang terlebur, bukan lewat perhitungan ekonomi. Kita menangkap arti hidup, kemanusiaan. Inilah refleksi iman yang sesungguhnya.

Bagaimana resep Anda menangani korban bencana?

Saya tidak memakai agama. Saya tidak dikenal sebagai romo. Itu tidak penting sama sekali. Tapi saya dikenal sebagai orang yang *ngurusin* korban banjir. Jujur, saya lebih senang dikenal sebagai pekerja sosial. Saya muak dengan simbol status yang feodal.

Di Aceh, saya mencarikan ratusan al-Qur'an. Karena pada awal bencana, bantuan itu terkumpul di tempat militer lalu disebar ke komunitas-komunitas. Kebanyakan ke pesantren, menjadi tempat kumpulnya para pengungsi. Kalau *nggak gitu* ya susah. Kita membuka tenda juga di pesantren. Dan mereka juga tahu kalau saya Kristen.

Kalau di Yogya, kita tidak pakai strategi seperti itu. Dari awal, teman-teman yang pernah bekerja di Aceh merasakan perbedaan bumi langit. Di Yogya tidak perlu lagi dengan bahasa-bahasa formal keagamaan. Begitu korban terima logistik, mereka bilang terima kasih. Kalau sudah dapat dikembalikan dengan bersepeda, walaupun jaraknya jauh.

Aktivitas kemanusiaan Anda pernah diterpa isu kristenisasi?

Isu-isu dari kelompok tertentu memang ada. Saya sudah seminggu di Yogyakarta, ada isu Romo Sandyawan melakukan Kristenisasi. Tapi masyarakat Jogja sudah familiar. Itu sudah biasalah. Di Aceh malah *nggak* ada *loh*. Saya kaget. Kita ini yang penting *mbantu*. *Gak* pakai bendera apapun.

Sumber dana dan akuntabilitasnya?

Sejak 2002, yang delapan tahun bukan dari lembaga donor. Pembiayaan berasal dari masyarakat dan kenalan. Yang program lima tahun donornya dari Jerman, Heart of Children. Dulu laporannya disiarkan KBR 68H. Ada tiga bendahara dan auditor eksternal. Itu betul-betul saya perhatikan. Namun sekarang lebih pada laporan kepada penyumbangnya.

HUMANITY FIRST INDONESIA (HFI)

Wadah Khidmat untuk Kemanusiaan

NAMA Humanity First (HF) mungkin masih asing di telinga kebanyakan masyarakat Indonesia. Namun tidak bagi Jemaat Ahmadiyah. Karena HF menjadi bagian dari pengabdian mereka pada kemanusiaan.

"Selama ini Jemaat Ahmadiyah memilih HF untuk menyalurkan bantuan. Meskipun secara *de jure* kami tidak ada hubungan, secara *ruhiyyah* kami satu visi," jelas Ketua HF Indonesia Basyiruddin Pontoh.

Meski ada hubungan erat, lanjut Basyiruddin, namun jemaat tidak diperkenankan memakai atribut Ahmadiyah saat terlibat pada program-program HF. Itu kebijakan Ahmadiyah pusat dan tidak ada toleransi bagi pelanggarnya. "Kalau ada yang menggunakan fasilitas HF untuk kepentingan jemaat, pasti akan kita tindak tegas," jelasnya.

Humanity First adalah lembaga amal yang didirikan sejumlah tokoh Islam di London, seperti Mr. Moulana Choudri dan Imam Masjid London pada 1994. Lembaga ini mendapat pengakuan dunia internasional ketika ikut terjun membantu para korban perang di Kosovo pertengahan 2004.

Dalam perkembangannya, HF menjelma menjadi lembaga internasional, yang saat ini telah memiliki cabang di 20 negara, termasuk Indonesia. Kantor pusatnya tetap di London.

Di Indonesia, lanjut Basyiruddin, HF berdiri pada 2004 atas prakarsa Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Abdul Basith. Berdirinya juga tak lepas dari anjuran pimpinan Ahmadiyah di London agar setiap negara mendirikan kantor cabang HF.

Program ideal HF, kata Basyiruddin, adalah memberantas kemiskinan, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis. "Termasuk memberi bantuan bagi para korban bencana alam melalui pengobatan, dapur umum, membangun sarana prasarana, dan bantuan pasca bencana," paparnya.

Dikatakannya, HF Indonesia telah membantu korban bencana tsunami Aceh, gempa Yogyakarta, gunung Merapi Magelang, tsunami Pangandaran dan banjir Jakarta. "Saat ini kemampuan kita baru bisa membantu korban bencana, belum ke wilayah pendidikan dan kesehatan," jelasnya.

Dalam misinya, lembaga ini membantu siapapun tanpa melihat latar belakang agama, ras, etnis, afiliasi politik, dan sebagainya. "Kita tidak memilih-milih relawan. Kita menerima siapa saja, tidak hanya dari kalangan jemaat. Dan selama ini kita gunakan jaringan kita, seperti perguruan tinggi, komunitas pecinta alam, LSM, dan sebagainya," katanya.

Demikian juga dalam menggalang bantuan, HF Indonesia terbuka bagi siapapun yang ingin membantu. "Bantuan datang dari siapa saja. Kita tidak membatasi. Ada yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya insidentil," katanya.

Basyiruddin menjamin, seluruh bantuan yang masuk akan dipertanggungjawabkan secara transparan, karena lembaganya mengikuti Undang-Undang Yayasan yang mewajibkan setiap dana yang dikelola untuk diaudit secara publik.

"Kami juga diaudit HF Internasional untuk mengikuti standar internasional, karena lembaga ini telah diakui PBB, di mana pengelolaan dana harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan," tandasnya.

Subhi Azhari

Aksi kemanusiaan HFI di NAD

Geliat Santri
di Film Indie

Tak cuma mengaji, kini para santri juga pandai membuat film indie. Ada dokumenter, juga fiksi. Keterbatasan peralatan dan dana bukan halangan.

Rahmat adalah santri di Pesantren Moderen Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM) Makassar. Tapi santri juga manusia. Dia pun sangat hobi main sepakbola. Sebagai putra Makassar, jelas dia menggilai kesebelasan Persatuan Sepakbola Makassar (PSM). Rahmat tidak sendiri, bersama teman-teman senasibnya di pesantren, mereka membentuk gank PSM Mania.

Tapi, pesantren punya segudang peraturan. Setiap santri tidak boleh keluar tanpa ijin khusus. Dalam sebulan boleh ijin keluar hanya sekali. Itupun pada hari libur, hari Jumat. Suatu hari terdengar kabar pasukan Ayam Jantan dari Timur akan berlaga.

Mereka tak ingin menyiakan kesempatan itu. PSM Mania pun minta ijin, tapi tidak diberi. Karena hasrat sudah tak terbendung terpaksa ambil jalan pintas, loncat pagar. Tapi Satpam pesantren lebih sigap. Mereka pun ditangkap.

Cerita tadi ada dalam *Pagar* (2006), film *indie* (independen) berjenre dokumenter yang dibesut oleh tokoh utama film itu, Rahmat Setiawan, 17 tahun bersama Aditya Ahmad, 18 tahun. Mereka santri Pesantren Modern IMIMM Makassar. Dari film ini Rahmat dan Adit meraih juara tiga nasional kategori *Filmmaker*, dalam kompetisi *Creativity Week 2006* yang digelar British Council Indonesia.

montase Witjak

Selain *Pagar*, Aditya dan Rahmat juga membuat *Assala' Kau Senang Jiee Cezz* (2007), bahasa gaul Makassar yang boleh diartikan "*asal kau senang kawan*". Film ini juga menceritakan kehidupan santri Pesantren IMIMM yang berasal dari berbagai suku, namun saling menyayangi.

"Ini bisa jadi bukti kalau santri tidak cuma bisa *ngaji* atau ilmu agama, tapi juga bisa buat film dan karya besar lain," kata Aditya, kameramen sekaligus sutradara dua film itu.

Aditya mengaku tidak sulit untuk mendapatkan ide cerita. "Banyak hal yang unik dan menarik dari keseharian pesantren yang dapat diangkat menjadi sebuah karya yang baik," kata putra kelahiran Makassar 29 Mei 1989 ini.

Pernyataan Aditya dibenarkan Irfan Amalee yang membuat film berlatar serupa, yaitu *Biru Darahku* (2006).

Ide cerita film itu, ditemukan Irfan saat menjadi ustadz untuk pelajaran sosiologi di Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut. Di akhir semester dia meminta para santrinya membuat diary tentang diri mereka. Irfan menemukan diary Fahri yang isinya melulu bercerita tentang Persib. Persib menjadi agenda terpenting dalam hidup Fahri (lihat: *Semua Orang Bisa Menjadi Filmmaker*).

"Saya berpikir ini sangat layak untuk diangkat jadi film," kata

mantan Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (PPIRM) ini. Sejumlah prestasi diraih *Biru Darahku*. Film ini lolos seleksi untuk diputar di Festival KONFIDEN, festival tahunan film independen yang menjadi barometer perkembangan film indepen-den Indonesia.

"Setidaknya film ini menjadi satu diantara sedikit film yang layak diputar di festival itu. Film ini juga diputar di *Slingshort Film Festival* yang skalanya Asia Tenggara," jelas Irfan yang juga pernah menimati kehidupan pesantren yang sama seperti Fahri, dari 1990 sampai 1996.

Film dengan latar belakang pesantren juga dibuat siswa-siswa Sekolah Alternatif Qaryah Thayyibah (QT), Salatiga. *Sabda Kelabu Seorang Santri* (2006), demikian judul film fiksi itu. Sutradaranya Maia Rosyida, siswi kelas 3 sekolah itu, mengangkat kisah ini dari sebuah cerpen dengan judul yang sama karya Azizah Hefni.

Ada seorang santriwati Nafsa yang kepincut seniornya Dafa. Namun peraturan pesantren menghalangi cinta mereka. Tapi cinta mereka tak bisa dibendung dan ditentang.

Karena ini produksi pertama, pembuat film ini pun meng-akui hasilnya jauh dari sempurna. Tapi mereka patut berbangga *Sabda Kelabu* pernah ditonton sineas Garin Nugroho.

montase Witjak

"Garin sangat penasaran. Bagaimana Kepala Sekolah QT, Bahruddin bisa membuat anak-anak berkarya tanpa harus digurui," ungkap Muntaha al-Hasan, salah satu pendamping di Sekolah QT.

Tak hanya itu, film ini memacu murid-murid sekolah tersebut memproduksi karya sinematografi lainnya. Lewat komunitas-komunitas film yang mereka dirikan di sekolah itu lahir film-film *indie*.

Komunitas film MR Cinemages, selain membuat *Sabda Kelabu Seorang Santri,* juga memproduksi film fiksi seperti *Life is Rock N Roll, Rock… Ohh…, Gadis di Balik Awan* dan *Papi Gue Puber Lagi*. Bahkan komunitas ini bekerja sama dengan LSM Aceh Pinto sedang memproduksi film dokumenter berjudul *Cerita Pendidikan Anak-Anak Korban Tsunami di Pulot*.

Sedang Big Fam Production membesut film drama *Do'a untuk Kakakku dan MTV* yang berisi parodi video klip penyanyi yang sedang ngetop.

Adik-adik kelas mereka pun tak mau kalah. Untuk proyek kelas, murid-murid kelas 1 SMP QT angkatan 2006 membuat film berjenre komedi horor berjudul *Funky Ghost* (2006). "Padahal di sekolah kami tidak ada bidang studi film. Mereka mempelajari apapun sesuai kesukaan dan selera mereka. Dan biasanya de-ngan langsung mempraktekkan," jelas Muntaha.

Pengalaman serupa juga dialami pelajar SMA dan pesantren di Jogjakarta yang tergabung dalam Komunitas Coret. Karena sekolah mereka tidak mengajarkan, mereka belajar menulis dan membuat film dokumenter dalam *Workshop Creative Writing and Documentary* yang digelar Lembaga Kajian islam dan Sosial (LKiS) Jogjakarta.

Hasilnya, lahir film dokumenter berjudul *Dunia Tahfidz* (2007). Film ini menguak kehidupan santri-santri perempuan yang belajar menghapal al-Qur'an di Pesantren Krapyak Jogjakarta. Norma-norma pesantren itu ternyata tidak membelenggu mereka untuk memahami 'dunia luar' dan berkarya.

Komunitas ini juga melahirkan *Bocah Candi* (2007), film dokumenter yang mengisahkan anak-anak di seputar Candi Prambanan yang juga digagas dari workshop itu.

Selain Coret, dari workshop itu lahir komunitas-komunitas serupa di tiga daerah lain. Masing-masing komunitas itu membuat film dokumenter. Komunitas Jeda di Magelang membuat film *Pilang* (2007) dan *Jalan Tika* (2007). Komunitas Oekir di Jepara meluncurkan *Sudah Bukan Cina* (2007). Dan Komunitas Toelis di Solo menelurkan *Raja Ketoprak Tukang Becak* (2007).

Bersama-sama mereka menggali tema mengenai kenyataan sosial di daerahnya. Tujuannya agar terjadi interaksi antar anggota komunitas dan objek film. "Pembuatan film bisa sebagai media pembelajaran agar tumbuh kepedulian terhadap sekitar," jelas Direktur LKiS Farid Wajdi.

Dari kegiatan itu, para anggota komunitas itu berhasil membuang stigma tentang banyak hal, yang lama bercokol di pikiran mereka. Salah satunya adalah stigma tentang waria. Ini didapat saat mereka membuat film *Jalan Tika.*

Film ini mengisahkan tentang Hartoyo yang lahir laki-laki, namun merasa sebagai perempuan. Ia pun memilih dipanggil Kartika alias Tika. Agar tidak menjadi waria, Hartoyo dinikahkan keluarganya pada usia 17 tahun. Pernikahan itu dijalani setahun dengan cinta segitiga, dia, istrinya dan "*partner*"nya. Bahkan hingga dikarunia dua orang anak.

Saat film itu diluncurkan di Magelang, seorang ibu yang diundang dalam acara itu menangis. Ia mengakui, selama ini dirinya salah menilai kehidupan para waria. Si Ibu itu pun memeluk Tika.

"Ini tanda bahwa film juga bisa jadi media mepengaruhi orang," kata K. Ardi, sineas film independen dari Jogjakarta yang menjadi mentor workshop bagi komunitas-komunitas itu.

Menyampaikan sesuatu lewat film memang lebih mudah diserap. "Ketimbang hanya sekedar *ngomong*," imbuh K. Ardi yang telah melahirkan beberapa film dokumenter.

Gamal Ferdhi

MEMBUAT FILM ITU MURAH DAN MUDAH

KETERBATASAN peralatan dan dana bukanlah halangan untuk melahirkan film bermutu. Itu dirasakan Aditya Ahmad dan Rahmat Setiawan. Ketika masih nyantri di Ponpes Modern Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM) Putra Makassar, mereka berdua membuat film dokumeter *Assala' Kau Senang Jie Cezz* (2007).

Dalam film itu ada adegan para santri berebut roti. "Karena uang untuk membeli roti telah habis, batu aku bungkus seperti roti," Adit panggilan akrab Aditya Ahmad, mengisahkan.

Selain *Assala' Kau Senang Jie Cezz*, Adit dan Rahmat menelorkan film dokumenter *Pagar* (2006). Kedua film itu mengisahkan lika-liku kehidupan pesantren.

"Banyak hal yang unik dan menarik dari keseharian pesantren yang dapat diangkat menjadi sebuah karya yang baik," ujar Adit kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Para pemainnya juga diambil dari sesama santri. "Tanpa *casting*, naskah skenario dan honor. Tapi hasilnya justru lebih alami," kata pria kelahiran Makassar 29 Mei 1989 yang kini duduk di Semester II jurusan Broadcasting Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Fajar Makassar.

Untuk mengambil gambar dari berbagai sisi, Adit tidak kehilangan akal. Adegan diambil hingga beberapa kali. Aktornya diminta diam sejenak, guna memberi waktu pada kameramen mengambil gambar pada sisi yang dikehendaki. "Kesannya sih *nyiksa* teman-teman. Tapi apa boleh buat, kameranya cuma ada satu," jelas Adit yang merangkap kameramen sekaligus sutradara dua filmnya.

Ketika pengambilan gambar pada malam hari, misalnya, sang sutradara tetap berupaya menyuguhkan kesan gelap, tanpa mengabaikan kejelasan gambar. Digunakanlah lampu sepeda motor yang dipinjam dari petugas keamanan pesantren.

Adit mengerjakan semua tahap pembuatan film itu sendiri. Hanya untuk proses *editing*, dia meminta bantuan Meditatif, sebuah komunitas film independen yang bermarkas di Gedung Kesenian Makassar. "Karena belum tahu banyak soal *editing*," kata sulung pasangan H. Mahmuddin Nasri, SKM dan Hj. Nur Syamsi, SE ini.

Permasalahan yang sama juga dihadapi Sekolah Alternatif Qaryah Thayyibah (QT), Salatiga. Murid-murid sekolah ini tidak memiliki peralatan sendiri saat membuat film pertamanya, *Sabda Kelabu Seorang Santri* (2006). "Saat itu alat-alat yang kita pakai kebanyakan masih pinjam dari orang lain seperti *handycam* dan *lighting,"* kata Muntaha Al-Hasan, salah satu pendamping di Sekolah QT.

Bahkan ketika itu, pedamping (guru) dan siswa belum ada yang bisa mengedit film. Untungnya mereka punya kenalan di luar kota yang menguasai multimedia dan perfilman. Dikirimlah seorang pendamping bersama dua siswa ke tempat tersebut untuk belajar.

"Setelah kembali, mereka membagi ilmu yang didapat kepada teman-temannya. Keahlian itu diwariskan hingga ke adik-adik kelasnya," jelas Muntaha kepada Gamal Ferdhi dari the WAHID Institute.

Bahkan karena kemauan membuat film yang kuat, para siswa rela iuran Rp 5.000 tiap anak. Uang itu dipakai untuk membeli Mini DV, peralatan kosmetik dan konsumsi. Kostum pun dimodifikasi dari mukena, sorban, dan pakaian yang cocok buat penampilan sosok hantu.

Ini terjadi ketika membuat *Funky Ghost*. Film berjenre komedi horor ini menceritakan kisah Roni, seorang siswa *culun* dengan kepandaian yang pas-pasan. Ia selalu diganggu teman-temannya di sekolah. Gurunya juga menghadapi problem kehidupan dengan gaji kecil. Mereka berdua sepakat bunuh diri.

Film ini juga membutuhkan pencahayaan yang membangkitkan efek menyeramkan. Tapi karena keterbatasan alat, para siswa sekolah itu membuat sendiri pencahayaannya. "Lampu neon kita tempel di kayu lalu diberi kabel yang panjang," ungkap Muntaha.

Irfan Amalee, sutradara sekaligus kameramen film dokumenter *Biru Darahku* (2006), juga melakukan sendiri beberapa tahap pembuatan film. Mulai dari menulis skenario, mengambil gambar hingga mengedit.

Namun dia beruntung, kamera yang digunakannya ketika membuat film itu dari kelas *high end*. "Waktu itu, kamera ini temasuk yang mahal dan masih jarang dipakai. Tapi ini milik organisasi. Saya diberi izin menggunakannya. Juga *handycam* pribadi untuk *back up*," katanya.

Untuk menyunting, Irfan menggunakan komputer pribadinya. "Rekaman suara dilakukan di studio sewaan," jelasnya.

Bahkan tokoh utama film *Biru Darahku*, Fahri bersama Zink, grup *band*-nya yang beraliran *british punk* membuat *soundtrack* khusus untuk film itu. "Pokoknya digarap seperti film *beneran*," kata Irfan kepada Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute.

Membuat film memang bisa dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja, tanpa takut dibatasi pakem-pakem film industri. Tapi dalam membuat film dokumenter, *filmmaker* harus memiliki kedekatan dengan objeknya. "Diperlukan pengamatan dan riset terlebih dulu," kata sineas dari Jogjakarta K Ardi.

"Tapi yang lebih penting, film itu bisa menyampaikan apa yang jadi pemikiran dan keinginan kreatornya," imbuh pria yang film-film dokumenternya berhasil masuk nominasi di beberapa festival ini.

Ardi juga mengatakan peralatan yang digunakan pun tidak usah yang muluk-muluk. "Kalau ada yang punya kamera *handphone* atau *handycam*, gunakan itu saja dulu," kata mentor *Workshop Creative Writing and Documentary* LKiS Yogyakarta ini.

Karena membuat film itu mudah dan murah, "Jika sudah punya keinginan membuat film, segera buat," tandas Ardi.

Gamal Ferdhi

montase Witjak

Irfan Amalee
Sineas Film Independen

”Semua Orang Bisa Menjadi *Filmmaker*”

dok.pribadi

DULU santri bikin film dinilai aneh. Padahal film bisa dipakai sebagai media dakwah. Bahkan menurut filmmaker indie (independen) dari Bandung Irfan Amalee, kini seorang dai harus bisa bikin film. Karena kalau ngomong terus nanti mustami' (pendengar)-nya ngantuk. "Kalau diajak nonton film kan seger," ujar Ketua Bidang Hikmah dan Advokasi Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah (PPIRM) pada 2000-2002.

General Manager Pelangi Mizan ini menyatakan, pesantren kaya nilai yang bisa disampaikan melalui film. Oleh sebab itu, alumni jurusan Tafsir Hadits IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ini pun membuat Biru Darahku (2006).

Film ini bercerita tentang Fahri, santri Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut yang juga bobotoh Persib Bandung. Fahri kesulitan menonton kesebelasan kesayangannya itu bertanding di Bandung karena nyantri di Garut. Fahri pun berniat keluar dari pesantren dan sekolah di Bandung. Ayahnya membujuk agar ia tetap nyantri dengan garansi, setiap Maung Bandung bertanding, ayahnya mengirim sopir untuk menjemput dan mengantarnya ke stadion. Selama bertahun-tahun, ayah dan anak ini bersekongkol menjalankan misi rahasia ini tanpa diketahui pihak pesantren.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang film itu dan gagasan Irfan, Nurul H. Maarif dari the WAHID Institute mendapat kesempatan mewawancarai pria kelahiran Bandung, 28 Februari 1977 ini. Berikut petikannya:

Apa pesan yang ingin disampaikan lewat film ini?

Saya mau memperlihatkan potret masyarakat muslim, diwakili komunitas pesantren, yang banyak disalahfahami. Mereka dianggap sebagai komunitas lokal yang tidak *nyambung* pada isu global, yaitu bola. Jadi di film ini, kita akan melihat pertemuan arus budaya global dengan tradisi lokal. Film ini melihat sisi lain pesantren.

Dari mana idenya?

Saat mengajar Sosiologi di Ponpes Darul Arqam Muhammadiyah Garut, pada akhir semester saya meminta para santri membuat diary tentang diri mereka. Saya menemukan diary Fahri yang serba Persib. Dia bercita-cita jadi dokter, tapi dokter Persib. Atau jadi jurnalis, agar bisa meliput Persib. Persib menjadi agenda terpenting dalam hidupnya. Ini unik. Saya berpikir ini sangat layak diangkat jadi film. Dari sana saya menulis skenario, mengambil gambar dan edit hingga jadi. Fahri kebetulan punya grup band, Zink, beraliran *british punk*. Mereka membuat *soundtrack* khusus untuk film ini. Bersama Fahri dan teman-teman, kami juga memproduksi *CD,* pin, dan *t-shirt Biru Darahku*. Semua laris manis. Pokoknya digarap seperti film *beneran*.

Bagaimana peralatan membuat film ini?

Saya menggunakan kamera yang lumayan *high end*, pakai *HDV*. Waktu itu, kamera ini termasuk yang mahal dan masih jarang dipakai. Kamera ini milik organisasi. Saya diberi izin menggunakannya. Untuk *editing* menggunakan komputer pribadi. Rekaman suara dilakukan di studio sewaan. Saya juga pakai *handycam* pribadi untuk *back up*.

Kita beruntung hidup di masa ketika kita mudah menggunakan teknologi. Kita bisa membuat apapun asal kita mau belajar. Modal saya cuma suka nonton film, terus belajar *adobe premiere* untuk *editing* film, dan beli *handycam*. Dengan begitu saya sudah bisa menjadi *filmmaker*. Hidup ini terlalu sayang untuk tidak didokumentasikan.

Film ini pernah dilombakan?

Ya, diikutsertakan dalam Festival KONFIDEN, festival tahunan film independen di Indonesia. Festival ini jadi barometer perkembangan film independen Indonesia. Saya sangat puas film ini terseleksi. Meski tidak juara, setidaknya film ini menjadi satu diantara sedikit film yang layak diputar di festival itu. Film ini juga diputar di *Slingshort Film Festival* yang skalanya Asia Tenggara.

Apalagi film karya Anda?

Lebih lima film. Ada film animasi *Anak Siaga Bencana* dan *Jambu Batu Merah*. Juga *Cepat Pulang Kucingku Sayang*, yang diangkat dari kisah nyata putri saya yang kucingnya dibuang ayahnya, yaitu saya. Film ini pernah diputar di tivi lokal, STV Bandung, dan banyak respon positif. Tapi yang paling digemari adalah *Danau Bandung*, film dokumenter tentang danau purba yang sekarang jadi Kota Bandung. Film ini juara ke-3 Festival Film Dokumenter Bandung 2005. Dari film ini saya mulai banyak 'difitnah' sebagai *filmmaker*. Saya lebih senang menyebut diri *media maker*; *nulis* buku, bikin desain, bikin film, *ngomong* di *training* atau seminar. Film cuma salah satu media yang saya pilih.

Banyak santri kini membuat film indie, tanggapan Anda?

Waktu pertama terlibat dalam dunia film, banyak juga yang menganggap saya aneh. Tapi setelah melihat hasilnya, mereka tahu bahwa film itu *nggak melulu* seperti film di bioskop atau sinetron. Film bisa juga jadi media dakwah. Bahkan menurut saya, sekarang seorang dai harus bisa bikin film. Kalau *ngomong* terus nanti *mustami'* (pendengar, *red*.)-nya *ngantuk*. Kalau diajak nonton film *kan seger*. Orang pesantren punya nilai dan konten yang bisa disampaikan melalui film. Kalau kita *nggak* setuju dengan film-film yang *nggak* punya nilai, ya kita sebagai santri harus bikin *dong* yang bernilai. Jangan cuma kritik. *Action dong*!

Saat ini membuat film bukan monopoli profesional. Semua orang bisa menjadi *filmmaker*. Dan bikin film bukan masalah profit atau popularitas, tapi masalah mendokumentasikan hidup yang sangat berharga. Jadi kita harus mendukung mereka.

Film apa lagi yang akan Anda buat?

Two Days without Wall, film dokumenter tentang anak-anak bule dari sekolah internasional di Bandung, yang berkunjung ke pesantren di Garut untuk bertanding basket. Anak-anak bule itu punya *stereotype* tentang pesantren: teroris, kumuh, dan terbelakang. Sampai-sampai orang tua dan beberapa guru mereka tidak mengijinkan mereka ke pesantren. Alasannya, terlalu berbahaya. Demikian juga anak-anak pesantren, punya *stereotype* tentang orang Barat: sombong, suka menjajah, bebas, dan sebagainya. Nah, film ini memperlihatkan bagaimana ketika mereka bertemu. Sedikit demi sedikit *prejudice* mereka luntur. Tema yang saya angkat tetap konsisten membuat film tentang pendidikan, multikultur, dan perdamaian.

Harapan Anda untuk pembuat film indie?

Semoga semakin banyak *filmmaker* yang mengangkat isu lokal dan multikultur. Kita kaya akan hal itu. Biarkan sinetron dan film bioskop *ngangkat* tema komersil. Itu lahan mereka. Kita harus menggarap tema yang *nggak* mungkin tampil di bioskop, tapi penting untuk disampaikan pada masyarakat.

Prakarsa Si Lemah Bertahan Hidup

Krisis menumbuhkan solidaritas rakyat. Mereka mengorganisir diri menerapkan simpan-pinjam. Dananya dari kocek pribadi sampai patungan. Ada yang dikelola secara kekerabatan hingga profesional. Keuntungan bukan tujuan.

Siti Mukaromah kaget bukan kepalang. Saat hendak berbelanja, dompetnya tertinggal di lemari rumahnya. Sedihnya lagi, kunci lemari terbawa sang suami ke kantor. Mau tidak mau, ia harus pinjam tetangga. Namun tak satupun yang memberi.

"Mau *minjem* saja susah *banget*. Bukan karena mereka *nggak* punya uang *lho*," kata Siti Mukaromah, ibu rumah tangga di jalan Semanggi II Ciputat Tangerang mengenang peristiwa 17 tahun silam.

Dari peristiwa itu, Bu Joko, panggilan akrab Siti Mukaromah, menyadari betapa sulit dan sedihnya tidak punya uang. Dia pun menerapkan simpan-pinjam kecil-kecilan di kelompok pengajian al-Qur'an tiap Sabtu yang dipimpinnya.

Awalnya, 12 anggota pengajian itu dalam seminggu menabung Rp 500. Seiring waktu, kini tabungan mereka berkembang hingga Rp 100 ribu sampai Rp 125 ribu. Simpanan itu kemudian disepakati sebagai modal pokok anggota yang tidak boleh diambil. Di luar itu, ada anjuran menabung per minggu minimal Rp 5 ribu.

Uang yang terkumpul terus bertambah, yang puncaknya dijadikan modal simpan-pinjam, terutama bagi anggota pengajian. Dari *gethok tular* antar tetangga, anggota bertambah jadi 30 orang. Di luar anggota, simpan-pinjam tidak berlaku.

Kini dana yang terkumpul mencapai Rp 30 juta. Jumlah yang besar bagi kelompok pengajian sekecil itu. Pengajian itu juga tidak membatasi jumlah pinjaman. "Ada yang *pinjem* Rp 3 juta dengan mudah," imbuh alumni Universitas Muhammadiyah Klaten ini.

Prosedur peminjaman pun tak berbelit. Tidak perlu perjanjian dan prasyarat formal lainnya. Lantaran tujuannya untuk meringankan beban anggota kelompok yang sedang membutuhkan dana. Misalnya, untuk bayar semesteran atau menyekolahkan anak, modal usaha, atau pengobatan mendadak. Saling percaya adalah modal dan jaminannya.

Kelompok ini memberlakukan kelebihan bagi peminjam sebesar lima persen dari pinjaman. Tapi proses pengembaliannya tidak mengikat, dengan mencicil antara tiga sampai lima kali, dalam jangka waktu 3-5 bulan.

"Tapi ini juga *nggak* kaku. Kadang ada yang gampang pinjem, tapi susah *ngembaliin*, karena memang belum punya," ujar perempuan asal Klaten ini.

Karena faktor kepercayaan dan keanggotaan yang jelas, hingga kini belum ada kasus peminjam yang kabur. "Lagian pinjamnya juga *nggak* banyak," kata ibu dua putra ini.

Terkait peningkatan ekonomi anggotanya, Bu Joko punya ukuran yang unik. Jika yang meminjam makin sedikit, berarti taraf ekonomi mereka kian baik. "Ukurannya itu saja, *nggak* susah-susah," tegas Bu Joko.

Namun diakuinya, peningkatan ekonomi ini bukan berkat pinjaman itu. Itu murni usaha mereka sendiri. "Pinjaman ini tidak untuk meningkatkan ekonomi. Tapi untuk memudahkan saja," terangnya.

Pengajian ini juga mengumpulkan iuran per minggu Rp 500, khusus untuk membantu warga yang sakit di luar kelompok pengajian, juga pengurusan jenazah.

Menurut Bu Joko, peduli pada yang sakit, yang meninggal, dan yang kesusahan, itu diajarkan Islam. Karena itu, apa yang dilakukan bersama kelompok pengajiannya, tak lain untuk *itba'* (mengikuti, *red*.) Rasulullah SAW. "Walaupun tidak ada seberapanya," akunya.

Simpan-pinjam juga dijalankan Majelis Taklim al-Ma'shumiy, Prajegan, Bondowoso pimpinan Ny. Hj. Siti Ruqayyah Ma'shum. Anggotanya, lebih dari 200 kaum ibu, umumnya tulang pung-gung keluarga. Profesi mereka, antara lain, pedagang kecil dan buruh tani.

Awalnya pada 2004, banyak anggota majelis itu yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Mereka lantas pinjam ke pihak tertentu dengan bunga besar. Belum lagi, pinjaman baru bisa turun jika ada agunan. Padahal mereka tidak punya apapun untuk dijaminkan. Kalau pinjam ke koperasi atau lembaga keuangan, mereka harus menjadi anggota terlebih dahulu dan dikenai biaya administrasi.

Keluhan demi keluhan, akhirnya sampai ke telinga

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Ruqayyah. "Bermula dari niat kami membantu anggota Majelis Taklim al-Ma'shumiy, walaupun tidak banyak," ujar Ruqayyah kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Dengan uang pribadi sebesar Rp 10 juta, Ruqayyah meminjami anggotanya sejak empat tahun lalu. Jumlah pinjaman tidak besar, mengingat modal yang terbatas dan skala usaha anggota majelisnya yang juga kecil. Awalnya, paling banyak Rp 500 ribu. Jika mengembalikan pinjaman tepat waktu, selambatnya 10 bulan, dia boleh meminjam lagi Rp 1 juta.

Pengembalian dibayar mencicil pada pertemuan pengajian seminggu dua kali. Besar cicilan terserah peminjam. Tidak ada ketentuan khusus. Ada yang Rp 50 ribu, Rp 20 ribu, bahkan Rp 5 ribu. Bahkan peminjam yang kebanyakan pedagang bahan makanan pokok, ini tidak dikenai kelebihan sepeserpun.

"Pinjam Rp 1 juta, ya kembalinya Rp 1 juta. Niatnya memang betul-betul untuk meringankan mereka," ujar Ruqayyah.

Kepercayaan dan ikatan emosional dengan jemaah pengajian, adalah jaminannya. Prosedurnya juga tidak formal. "Saya yakin mereka tidak akan lari," katanya yakin.

Namun kendala tetap ada. Misalnya, ada yang lebih 10 bulan belum mengembalikan pinjaman. "Itu beberapa orang saja, karena memang tidak punya," imbuh ibu seorang putra ini.

Sebelum uang pinjaman dikucurkan, dilakukan survei kecil agar tepat sasaran. "Mereka itu *kan* tidak punya sumber penghasilan lain," kata Ruqayyah.

Kini Ruqayyah gembira melihat peningkatan usaha anggota majelisnya. Indikatornya, jumlah peminjam kian menurun. "Atau setidaknya usaha mereka masih bertahan. Karena kalau pinjam ke rentenir, usahanya pasti akan merosot," ujarnya.

Selain meminjami, Ruqayyah juga menganjurkan anggotanya menabung. Di setiap pertemuan, mereka menyimpan seadanya, mulai dari Rp 500 hingga Rp 10 ribu.

Djudju Zubaidah, koordinator LSM Nahdina di Cipasung, Tasikmalaya juga menerapkan tabungan bagi 40 anggota pengajiannya sejak empat tahun silam. "Kami masih merintis. Belum sampai pinjam-meminjam, karena baru untuk menabung saja Rp 1.000 per hari," katanya.

Simpanan itu untuk kebutuhan lebaran, kurban, atau modal usaha. Sisanya, akan dipinjamkan untuk modal usaha kecil masyarakat sekitar.

Usaha simpan-pinjam dalam skala yang lebih besar dan profesional dijalankan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) al-Amin di Pasar Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Lembaga keuangan mikro ini, selain memberikan kredit lunak kepada pedagang dan pengusaha kecil, juga menerapkan tabungan bagi anggotanya.

Kholis, seorang pedagang sandal dan sepatu di Pasar Wangon, merasa terbantu dengan kredit murah yang diberikan BMT al-Amin. Sebelumnya, Kholis menjadi anggota BMT lain di Kecamatan Wangon. Tapi, ia kecewa lantaran pengajuan pinjamannya sebesar Rp 1 juta ditolak. Padahal, telah setahun ia menjadi anggota.

Pinjaman itu sangat berarti buat bapak tiga anak ini. Kios sandal dan sepatunya memerlukan suntikan modal untuk menghadapi lebaran yang kian dekat. Karena kecewa, Kholis mencabut keanggotaannya dari BMT itu.

Untuk mencukupi kebutuhan modal yang kian mendesak, Kholis mengajukan pinjaman ke BMT al-Amin. Pengurus pun mengabulkannya.

Itulah kisah awal Kholis menjadi anggota BMT al-Amin pada 2004. "Sekarang kalau aku butuh modal, tinggal bilang. Prosedur peminjamannya mudah," ungkapnya.

Kholis merasakan manfaat besar menjadi anggota BMT al-Amin. Usahanya kian berkembang. Kios di Pasar Wangon yang dulu berstatus kontrak, kini menjadi miliknya. Selain meminjam, ia pun menabung. Bahkan Kholis dan kelompoknya juga menitipkan tabungan qurban.

"Selain dekat dari tempat usaha, BMT al-Amin memang yang paling kami percaya," katanya kepada Gamal Ferdhi dari the WAHID Institute.

Kepercayaan jugalah yang membuat Jumanto menitipkan hasil jerih payahnya ke BMT al-Amin. Ayah tiga anak yang sehari-hari menarik becak dan memulung barang bekas ini, menjadi anggota sejak BMT ini berdiri.

Ia mengaku beruntung menjadi anggota BMT ini. Di akhir tahun, selain mendapat sisa hasil usaha (SHU), Jumanto mendapat bantuan sembako. Anak laki-lakinya, juga ikut khitanan masal yang digelar BMT ini.

BMT al-Amin didirikan sastrawan *cum* pendakwah Ahmad Tohari bersama karibnya H. Iwan pada 2001. "Lembaga ini memang kami niatkan untuk beramal lewat kredit bagi para pengusaha kecil," katanya (lihat: *Kang Tohari, Sastrawan cum Bankir Orang Kecil*).

Karena niat itulah, para anggota BMT dapat memperoleh kredit lunak tanpa prosedur yang *njelimet*. "Para anggota yang sudah lama dapat meminjam tanpa agunan. *Ngomong* sekarang, dikabulkan sekarang bisa. Karena kita sudah percaya pada mereka," kata Manajer BMT al-Amin, Widia A. Tohari.

Solidaritas ini terus tumbuh tanpa campur tangan pemerintah.

Nurul H. Maarif, Gamal Ferdhi

dok.WI/ Gamal Ferdhi

Ahmad Tohari di BMT al-Amin

AHMAD TOHARI

Sastrawan *cum* Bankir Orang Kecil

DALAM karya sastranya, Ahmad Tohari selalu mengangkat nasib orang-orang kecil. Ini tercermin dalam novel trilogi *Ronggeng Dukuh Paruk*, dengan Srinthil dan Rasus sebagai tokohnya yang telah diterjemahkan dalam enam bahasa dunia.

Namun baginya, pembelaan terhadap orang kecil tidak cukup melalui karya sastra. Kang Tohari, sapaan akrabnya, juga mewujudkan pembelaannya lewat penguatan ekonomi. Dia memelopori berdirinya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) al-Amin dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Artha Leksana. Keduanya untuk memudahkan orang kecil mendapatkan kredit murah.

Selain memberi kredit lunak bagi pedagang dan pengusaha kecil, BMT al-Amin yang berlokasi di Ruko Pasar Wangon, Banyumas yang didirikan pada 2001, juga menerapkan simpanan bagi anggotanya.

"Saya memang berniat membangun perekonomian rakyat. Jadi lembaga ini kami niatkan untuk beramal lewat kredit lunak bagi para pengusaha kecil," kata Kang Tohari.

Kisah perbankan Kang Tohari, dimulai pada 2000. Saat itu, di daerahnya ada BMT Tijarah Ummah yang bangkrut. Pengurusnya terancam dipolisikan, lantaran uang nasabah tak kunjung cair. Bersama karibnya H. Iwan, ia membeli BMT itu seharga Rp 25 juta. "Saya urunan Rp 13 juta dan H. Iwan Rp 12 juta," kenangnya.

Itu baru harga lembaganya. Untuk menalangi uang nasabah yang belum cair, sebesar Rp 74 juta, mereka meminjam dari Bank Muamalat Indonesia senilai Rp 100 juta. Sertifikat rumah Kang Tohari dan H. Iwan dijadikan agunan.

"Kalau ini gagal, rumah saya dan H. Iwan melayang," katanya pada Gamal Ferdhi dari the WAHID Institute.

Tahun demi tahun, masyarakat semakin mempercayai kinerja BMT itu. Direkrutlah tenaga profesional, hingga kini mencapai 24 orang yang sebagian besar lulusan sarjana. Atas kerja keras mereka, aset BMT pada 2005 mencapai Rp 3,7 miliar.

Karena dinilai sehat, maka pada 2006 BMT al-Amin dinaikkan statusnya oleh Bank Indonesia (BI) menjadi BPRS. Agar tetap dapat melayani para pedagang kecil, BMT itu tetap beroperasi, sedang BPRS dijalankan lewat manajemen berbeda. "Kalau BMT *kan* prosedur peminjamannya mudah, sedang BPRS harus sesuai standar BI," jelas pria kelahiran Jatilawang, Banyumas, 13 Juni 1948 ini.

Kendati mengalami kemajuan pesat dan manajemennya profesional, namun dua lembaga keuangan itu tidak meninggalkan ide dasar pendiriannya, yaitu membangun ekonomi rakyat. Salah satunya dengan mengampu koperasi pesantren (kopontren).

Sebagai alumni pesantren sekaligus kiai di desanya, Kang Tohari juga sangat perhatian terhadap santri. Pengurus koperasi sebuah pesantren di Kroya, misalnya, dipersilahkan magang di BMT. Mereka diajarkan mulai dari manajemen sampai teknologi informasi. "Jika sudah bisa, dia harus balik membangun kopontrennya," katanya.

Kang Tohari juga memiliki apresiasi yang tinggi terhadap pengusaha kecil, karena mereka lebih jujur. "Mereka itu kecil, tapi indah dan bermakna. Kalau pedagang kecil merasa terbantu, itu sudah bikin *seneng*," ujarnya.

Sebab itu, BMT al-Amin tidak berbelit-belit dalam memberi pinjaman. Jika calon peminjam telah diketahui latar belakang dan usahanya, dengan mudah akan dikabulkan, bahkan tanpa agunan. Dan pinjaman itu harus untuk modal usaha. "Kalau untuk konsumsi sehari-hari harus pinjam, itu berarti miskin," imbuhnya.

Kaum miskin, menurutnya, bukan diberi pinjaman, tapi sedekah. Untuk keperluan itu, BMT al-Amin menyisihkan 10 persen dari keuntungannya. Bentuknya, antara lain, melalui pemberian beasiswa, pembagian sembako gratis, khitanan masal dan pendirian pendidikan anak usia dini (PAUD).

Kang Tohari bersama H. Iwan menyadari, mereka adalah orang-orang yang diberi Tuhan kemudahan rejeki. "Kita *kan* sudah kenyang," aku Kang Tohari.

Dari kesadaran itu, mereka berdua tidak pernah mengambil sisa hasil usaha (SHU) BMT. "Kita gunakan dulu untuk menolong. Biar tetap di BMT, agar bisa diputar sebagai modal bagi anggota. Dari honor menulis saja saya sudah cukup," pungkasnya.

Gamal Ferdhi, Nurul H. Maarif

dok.WI/ Witjak

Kekuatan di Balik Kesederhanaan

Oleh: Rumadi
Peneliti the WAHID Institute

PERUBAHAN adalah fitrah. Ia selalu inheren dalam setiap detak sejarah. Tidak ada kehidupan tanpa perubahan. Baik menyangkut nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola perilaku, organisasi, lembaga kemasyarakatan, lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, maupun interaksi sosial. Namun kita kadang sulit mengenali perubahan-perubahan itu. Apalagi dalam masyarakat desa, perubahan-perubahan tampak begitu halus dan pelan. Sehingga ada yang mengatakan, masyarakat pedesaan berwatak statis dan jumud.

Emile Durkheim menyebut masyarakat seperti ini masih dalam tahap solidaritas mekanis (*mechanical solidarity*), sebagai lawan solidaritas organis yang terdapat dalam masyarakat heterogen, di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Solidaritas mekanis terdapat dalam masyarakat yang masih sederhana dan relatif homogen. Ikatan warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Sedang solidaritas organis terdapat dalam masyarakat yang heterogen di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dalam masyarakat tergantung pada hubungan fungsional unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Singkatnya, solidaritas mekanis ada dalam masyarakat pedesaan yang berkarakter paguyuban, sedang solidaritas organis ada pada masyarakat perkotaan yang berkarakter patembayan.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat biasanya berjalan dari mekanis ke organis, dari paguyuban ke patembayan. Artinya, masyarakat yang sederhana dan homogen akan berkembang ke arah yang lebih kompleks dan heterogen. Pola perubahan seperti ini, menjadikan beberapa orang melihat sinis kalau sebuah komunitas tetap mempertahankan homogenitas dan kultur paguyuban. Komunitas seperti ini biasa dituduh sebagai komunitas yang tertutup dan ketinggalan zaman.

Namun, dalam pembahasan ini kita justru menemukan relevansi masyarakat berkarakter mekanis-paguyuban dalam pengembangan basis-basis ekonomi mikro. Saling kenal dan percaya, ternyata bisa menjadi modal sosial untuk menggalang basis ekonomi. Meski tidak besar bila dibandingkan dengan hiruk-pikuk bisnis para konglomerat, namun munculnya inisiator-inisiator lokal yang secara *genuine* melakukan penguatan ekonomi menandai perubahan penting dalam masyarakat.

Karakter penting yang perlu dicatat di sini adalah kemandirian. Jika sebagian kita senang bergantung dengan bantuan-bantuan pemerintah, namun kelompok-kelompok kecil yang dilaporkan di sini melakukan inisiatif sendiri. Di tengah banyaknya bantuan karitatif, independensi demikian kian menjadi barang mahal. Inisiatif-inisiatif komunal seperti ini sebenarnya yang memungkinkan menjadi daya tahan masyarakat dari berbagai tempaan krisis.

Dulu orang menduga, suatu masyarakat akan dapat membangun ekonominya bila telah dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan dalam bidang ekonomi, seperti modal, bahan-bahan mentah, alat-alat produksi, tenaga terlatih, fasilitas, kecakapan mengatur, serta mengurus seluk-beluk ekonomi. Namun pengalaman membuktikan, syarat-syarat ekonomis saja tak cukup untuk melancarkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan perubahan-perubahan dalam masyarakat yang dapat menetralisir faktor-faktor masyarakat yang menghalangi dan mendukung proses pembangunan ekonomi.

Pada titik ini kita menemukan betapa usaha-usaha masyarakat untuk membentengi kekuatan ekonominya dengan upaya-upaya kecil seperti melalui majlis taklim, koperasi pasar, koperasi simpan-pinjam dan sebagainya benar-benar menjadi obat yang bisa menetralisir ancaman yang mengombang-ambingkan perekonomian masyarakat. Memang, usaha ini sulit menjadi besar, tapi kalau benteng-benteng sosial seperti ini tumbuh di mana-mana, bukan tidak mungkin akan menjadi kekuatan dahsyat. Kedahsyatan itu bukan saja terletak pada perputaran modal yang ada di dalamnya, tapi yang jauh lebih penting adalah keberanian masyarakat untuk mengambil inisiatif secara independen.

Sampai di sini kita menemukan kekuatan komunitas keagamaan. Agama sebenarnya bisa menjadi modal sosial yang kuat untuk urusan seperti ini. Jamaah majlis taklim misalnya, ia bukan semata-mata tempat orang mencari pencerahan spiritual keagamaan, tapi bisa menjadi modal kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan ekonomi. Jika agama diyakini mempunyai spirit liberasi, justru di tangan ibu-ibu majlis taklim inilah kita menemukan semangat itu. Di balik kesederhanaan cara berpikir, justru di situ kita temukan kekuatan.

Ramai Santri Tekuni Eksakta

Terpana menatap monitor komputer

Dulu santri identik dengan kitab klasik. Dinilai gagap teknologi. Kini, mereka ramai menekuni bidang eksakta. Memajukan pesantren alasan utamanya.

Sebagai santri kampung, Taufiq begitu kagum pada komputer. Piranti itu mampu menjawab apa saja, bahkan menampilkan gambar. Rasa penasaran terus menggelayut di benaknya. Kursus komputer pun ditekuninya sembari nyantri. Tapi malang, saat ujian kursus, Taufiq gagal. Nilainya di bawah standar.

"Dari situlah saya 'dendam'. Saya betul-betul ingin mempelajari komputer lebih jauh dan mendalam," ungkap pria bernama lengkap Taufiq Masyriqan mengisahkan awal perkenalannya dengan komputer saat menjadi santri Ponpes Darul Iman Kadupandak, Pandeglang Banten.

Setelah enam tahun *nyantri* dan lulus dari MTs dan MA Darul Iman, putera kelahiran Pasir Waru Lebak, Banten, ini lantas mengambil Program Studi (Prodi) Teknik Informatika UIN Jakarta. Kuliah pun dijalaninya sambil *nyantri* di Pesantren Luhur Darus-Sunnah Jakarta.

Menekuni dua bidang ilmu berbeda, tak mudah bagi mahasiswa semester VII ini. "Jurusan saya di MA, itu Bahasa Arab. Minim ilmu eksakta," kata Taufiq. Untuk mengejar ketertinggalan, ia dibantu kawan-kawan sekelasnya di kampus.

Taufiq tetap semangat. Ini karena cita-citanya ingin mengembangkan dakwah berbasis dunia maya. Misalnya, dengan mem*block* situs-situs mesum supaya tidak bebas akses. Diakuinya, situs-situs itu sulit ditembus. "Tapi *insya Allah* saya tidak patah semangat. Ini jihad saya di dunia maya," katanya optimis.

Menurutnya, santri tidak hanya harus piawai kitab kuning, tapi juga teknologi. Dakwah santri pun tidak bisa terpaku pada media ceramah, tapi juga internet. "Dunia maya itu lebih global," jelasnya.

Taufiq tidak seperti kebanyakan santri yang lebih memilih program agama ketika melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun dia tidak sendirian. Ada juga Saidatul Husna yang kuliah di Prodi Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Motivasi mahasiswi semester II ini memilih jurusan itu, karena penilaian negatif masyarakat terhadap gizi para santri. Makanan santri dinilai miskin gizi, tidak sehat, dan kotor karena diolah sembarangan. "Saya akan berusaha menata ulang makanan di pesantren," kata alumni Ponpes Darul Ulum, Jombang ini.

Menurut dara asal Bangil, Pasuruan ini, kesan negatif itu akan luntur jika santri mumpuni di bidang pangan. Kendati berasal dari pesantren, Saida tidak kerepotan mengikuti kuliahnya. Bahkan dari ratusan mahasiswa penerima Beasiswa Santri Berprestasi Depag RI, hanya ia yang memperoleh IPK 3,72. "Saya kaget, *kok* dapat IPK tertinggi. Ini tertinggi seangkatan mahasiswa Depag saja," kata Saida.

Motivasi serupa diungkapkan Zayini Nahdhoh, mahasiswi semester IV Prodi Teknik Pangan dan Hasil Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ia ingin meningkatkan kadar gizi di pesantrennya. "Setidaknya saya bisa memperbaiki kekurangan itu," harap alumni MTs dan MA Sunan Pandanaran Kaliurang Yogyakarta ini.

Dara asal Cisurupan, Garut, yang kini masih *nyantri* di Pesantren Sunan Pandanaran, ini juga ingin meningkatkan hasil pertanian di desanya. Caranya dengan memperbaiki teknologi pengolahan hasil pertanian.

Zayini punya penilaian sendiri terhadap rekan-rekan santri yang mengambil prodi eksakta. "Mereka umumnya *kendel* (berani), tidak minder dan mentalnya lebih kuat," ungkapnya. Kendati sempat kerepotan di awal kuliah, kini nilai akademisnya bisa bersaing dengan kawan-kawannya yang berasal dari non-pesantren. Semester II dan III pun dijalaninya dengan ringan.

Gito Waluyo, mahasiswa semester IV Prodi Ilmu dan Industri Peternakan UGM, punya motivasi tak beda. Peternakan, kata alumni Pesantren Darul Ulum, Kulonprogo, Yogyakarta ini, adalah bidang berprospek besar untuk meningkatkan taraf ekonomi pesantren, juga masyarakat.

Peternakan, imbuh putera asli Girimulyo Kulonprogo ini, akrab dengan kehidupan santri. Jadi, memajukan perekonomian santri bisa dilakukan melalui bidang ini. "Saya bercita-cita menjadi pengusaha dan pendidik, untuk memajukan dunia pesantren," harapnya.

Memang, agar tidak dilibas jaman, pesantren harus akrab dengan teknologi. Karena itulah Helvea Rezano mengambil Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Helvea yang kini duduk di semester II, ingin mengembangkan program kitab kuning berbasis teknologi. "Ini untuk memajukan pesantren," terang alumni Pesantren al-Rahmah, Dahu, Malang ini.

Demikian juga Doli Rizky Panggabean. Mahasiswa Prodi Teknik Geologi UGM asal Tanjung Balai, Sumut ini menyatakan, santri tidak boleh hanya menguasai bidang agama. Dengan menekuni bidang ini, alumni Pesantren Darunnajah Jakarta ini mendapat banyak bukti tentang kekuasaan Tuhan.

Lulusan MA Darunnajah ini berharap, ilmunya bisa diterapkan di negeri ini yang rawan bencana. "Saya juga ingin memperkaya ilmu pesantren dengan ke-geologi-an," katanya.

Ada juga santri yang menekuni kedokteran. Rifki Zakariyya, mahasiswa Prodi Kedokteran UGM misalnya. Dengan menjadi dokter, alumni SMA Darul Ulum, Jombang ini berharap bisa menginjeksikan nilai-nilai agama pada masyarakat. "Bekal agama dokter yang dari umum *kan* tidak sebesar santri," terang pria asal Blitar, Jatim ini.

Sedang Edo Abdullah Fakih, alumni Pesantren Candangpinggan, Indramayu mengambil Prodi Matematika UIN Jakarta. Dengan menekuni bidang ini, Edo ingin mengubah persepsi masyarakat bahwa hitung-menghitung bikin puyeng santri. "Santri juga mampu *kok*. Saya sendiri *nggak* terlalu kerepotan," aku pria asal Arjawinangun Cirebon. Edo kini tengah memikirkan metode mudah menekuni Matematika.

Keluarganya yang berlatar santri tidak mempermasalahkan. "Mereka terserah saja. Yang penting sesuai otak dan kemampuan," ungkap putera almarhum KH. Syathori Salim – pendiri Pesantren mas Maliman, Arjawinangun, Cirebon ini.

Kisah di balik kesuksesan mereka menembus prodi eksakta beragam. Para penerima beasiswa Depag, misalnya harus menjalani ujian Depag dan universitas yang diinginkan. "Kami ujiannya normal dan bahkan dobel. Karenanya, penyaringan menjadi lebih ketat," ujar Rifki.

Sedang Taufiq melalui PMDK. Ketika ujian, ia nyaris tidak ditanyai pernik-pernik rencana prodinya. "Ini barangkali yang membuat saya lulus," selorohnya. Di PMDK, ia menempati ranking ke-8 dari ratusan pendaftar lainnya.

Saidatul Husna mengaku tidak mempersiapkan diri secara khusus menghadapi SPMB. "Persiapan biasa-biasa saja, tidak *ngoyo*," katanya. "Les juga *sih*, tapi tidak intensif, karena waktu itu sambil *nyantri*," imbuhnya.

Kini banyak santri menggeluti bidang eksakta. Apalagi setelah Depag RI membikin program Beasiswa Santri Berprestasi. Mereka tergabung dalam Community of Santri Scholar (CSS), yang dibentuk di Grand Hotel Lembang Jawa Barat, 10-13 Desember 2007. Namun program yang telah berjalan tiga tahun ini perlu dievaluasi.

Zayini berharap penyebaran informasi yang merata, termasuk pada pesantren kecil di kampung-kampung. "Di sana *kan* ada santri berbakat, yang punya hak sama," katanya. "Pesantren juga banyak di belahan Indonesia Timur," imbuh Rifki. Dia melihat, penerimanya kebanyakan dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Para santri ini seolah menyusuri jejak Ibn Sina (w. 1037 M) yang bergelar Bapak Dokter Dunia. al-Khawarizmi (w. 850 M) dikenal sebagai ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. *Al-Jabar*, adalah buku pertamanya yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Ia juga dijuluki Bapak Aljabar. Al-Battani (w. 929 M), menemukan pengganti busur dengan sinus, tangen, dan kotangen. Abu al-Wafa (w. 997 M) menemukan metode membuat tabel sinus memperkenalkan sekan dan kosekan.

Perkembangan sains di masa Islam klasik adalah buah persinggungan para ilmuwan Islam masa lalu dengan berbagai peradaban. Mereka tak alergi bersinggungan dengan yang lain.

Nurul H. Maarif

dok.WI/ Gamal Ferdhi

AHMAD SHALAHUDDIN

MERANCANG ISLAM DIGITAL

DI SELA padatnya jadual kuliah, tekadnya menghafal al-Qur'an tak pernah luntur. Targetpun ditetapkan. Dalam sehari, setidaknya sekaca halaman al-Qur'an dihafal. Itu pun dijalaninya di sela waktu istirahat kuliah, yang tak lebih 2 jam sehari.

Hafalan itu lantas disetorkan pada gurunya di Ponpes Sunan Pandanaran, Kaliurang Yogyakarta, tempatnya *nyantri* sejak kelas 1 Madrasah Aliyah (MA), setiap hari usai Maghrib dan Shubuh, kecuali Jumat. "*Alhamdulillah*, sekarang saya sudah hafal enam juz al-Qur'an," ujar Ahmad Shalahuddin, yang juga pernah *ngaji* di Ponpes Dar al-Tauhid, Arjawinangun Cirebon.

Di luar setoran al-Qur'an, bersama santri lainnya ia mengaji berbagai kitab kuning khas pesantren. Misalnya, *al-Adab an-Nabawi*, *Mukhtar al-Ahadits an-Nabawiyyah*, *Irsyad al-'Ibad*, *Jami' al-'Ulum wa al-Hikam*, *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*, dan sebagainya.

Begitulah kesibukan Solah – sapaan akrab Ahmad Shalahuddin – yang sehari-hari menjadi santri sekaligus mahasiswa semester empat Program Studi (Prodi) Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Ketertarikannya pada Ilmu Komputer bukan disengaja. Awalnya Solah ingin mengambil Program Studi Matematika. "Tapi ibu saya *nyeplos*, kok *nggak* Ilmu Komputer saja?" kata pria kelahiran Arjawinangun, Cirebon, 08 April 1988 ini.

Karena waktu pendaftaran tersisa dua hari lagi, Solah lantas menuruti ceplosan ibunya, kendati dengan basis keilmuan pas-pasan. Maklum, kebanyakan pesantren kurang memperhatikan ilmu eksakta. "Dulu di pesantren, saya belajar komputernya konyol," ujarnya berseloroh.

Kendati serba pas-pasan, bukan berarti ia tak mampu mengikuti mata pelajaran yang disajikan di bangku kuliah. Menurutnya, tidak ada pelajaran yang sulit. Hanya Matematika ia sedikit keteteran, terutama di semester pertama dan kedua.

Bergelut di dua bidang berbeda tidak mudah buat Solah. Ini ibarat menerobos tembok kokoh tradisi. Apalagi ia dari keluarga santri totok. Kedua orang tuanya alumni Ponpes Tebuireng, Jombang. Ayahnya alumni Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sedang ibunya alumni Fakultas Tarbiyah STAIN Sunan Gunung Djati Cirebon.

dok. pribadi

Namun, menguasai keduanya secara bersamaan, bukanlah hal mustahil. "*Insya Allah* saya bisa menggapai itu dan mengejarnya dengan semangat," janji mahasiswa yang memperoleh Beasiswa Santri Berprestasi Departemen Agama (Depag) RI 2006/2007 ini.

Solah adalah penerima beasiswa Depag angkatan pertama bagi UGM. Ia berhasil menyisihkan ratusan santri lainnya dari berbagai pesantren. Di Prodi Ilmu Komputer, ia mempelajari berbagai bahasa pemrograman. Tak heran jika bersama empat kawannya, ia berhasil membuat game untuk HP. *Slider Puzzle*, demikian nama game ini. "Ini kerja kelompok dan sebagai program kampus. Dengan bahasa pemrograman *Java*," ujarnya.

Usai studi kelak, selain mengajarkan Ilmu Komputer, ia berangan-angan membikin program komputer yang bisa dipakai untuk mendeteksi benda-benda yang hilang. Lingkupnya, ujarnya, untuk sementara hanya di sekitar rumah saja. "Ini masih angan-angan," ujarnya tanpa mau memerinci lebih jauh.

Angan lainnya adalah membikin virus yang bisa mempengaruhi psikologi para *netter*. "Lebih tepatnya mempengaruhi tingkat spiritualitasnya," jelasnya. Sistem dan cara kerjanya sudah terekam di benaknya, tinggal direalisasikan.

Ia juga punya cita-cita lain, yaitu mengubah kekolotan kaum santri di bidang teknologi. Caranya, dengan mendirikan pesantren *tahfidh* (hafalan al-Qur'an, *red*.) yang didukung kemampuan teknologi informasi. "Sepertinya ini keinginan yang agak bodoh. Tapi saya ingin pesantren bisa menyongsong masa depan Islam yang digital," harap Sholah.

Nurul H. Maarif

MOBILITAS SOSIAL KAUM SANTRI

Oleh: Mastuki HS.
Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Pusat

LEMBAGA pendidikan menjadi sarana yang kongkrit bagi kalangan santri untuk melakukan gerak mobilitas sosial, bahkan sebagai perangkat sosial (*social elevator*) yang mengantarkan seorang santri menuju kedudukan (kelas) yang lebih tinggi. Jika menilik ke belakang, proses terjadinya mobilitas sosial dan perkembangan kelas menengah santri sejatinya sudah dimulai sejak dasawarsa 1980-an. Kehadiran santri baru (neosantri) pada dasawarsa ini berkaitan dengan ledakan jumlah santri yang masuk ke perguruan tinggi, setelah menamatkan pendidikan menengahnya dari madrasah, pesantren, dan sekolah Islam.

Bersamaan dengan proses integrasi dengan *mainstream* pendidikan nasional yang dirintis sejak 1970-an, peluang dan akses anak-anak santri (dari desa, periferal, atau kota) yang sedang studi di pesantren, madrasah, dan sekolah lebih terbuka memasuki perguruan tinggi. Kaum santri baik yang berlatar belakang sosial-budaya dan keagamaan tradisional maupun modern sama-sama memperoleh kesempatan memasuki jenjang pendidikan modern. Pergumulan dan pengalaman akademik di pendidikan tinggi itulah yang menyebabkan para santri masuk ke dalam komunitas kelas menengah terpelajar (*a well educated middle class*) dan bersentuhan dengan gagasan-gagasan modernitas.

Pada masa berikutnya, kalangan santri juga mendapat kemudahan meraih jenjang pendidikan lebih tinggi di dalam maupun di luar negeri, menikmati bacaan dan lektur keagamaan yang semakin luas serta tersedianya sarana mengartikulasikan kegiatan keilmuan. Situasi ini mengakibatkan proses intelektualisasi massif di kalangan kaum santri dan dengan segera menjadi katalisator bagi terjadinya *intellectual booming* di kalangan santri. Ledakan itu pada akhirnya mendorong mobilitas sosial kaum santri, baik vertikal maupun horizontal, dalam jumlah besar. Pada awal 1990-an, gugus besar dari kelas menengah Indonesia diperkirakan berjumlah lima belas juta orang. Jumlah yang luar biasa besar dalam sejarah Indonesia modern. Jika sepertiga dari jumlah tersebut adalah kelas menengah santri, potensi puak ini tentu patut diperhitungkan.

Capaian dalam bidang pendidikan menambah bobot kredibilitas intelektual Muslim kalangan santri. Sebagian mereka mulai tampil ke permukaan sosial dan mengisi ruang-ruang mobilitas yang tersedia secara beragam seperti LSM, pers, media massa dan penerbitan, perguruan tinggi, ormas, lembaga-lembaga keislaman, partai politik, aktivitas dakwah, spiritualitas dan seni, lembaga profesi, lembaga keuangan syariah, kewirausahaan, birokrasi, teknokrasi, administrator, bahkan TNI dan Polri. Sebagian yang lain terlibat dalam diskursus intelektual dan sosial-politik di ruang publik Indonesia.

Terbukanya ruang artikulasi dan saluran mobilitas sosial yang semakin beragam bagi kalangan santri menambah *performance* dan *confidence* mereka berhadapan dengan kelas menengah kota lainnya yang lebih dahulu mapan. Kelas yang disebut terakhir ini karena kebutuhan primer dan sekundernya telah terpenuhi, mengalihkan seleranya pada produk barang dan jasa. Pada saat kelas menengah kota ini membesar, puak kelas menengah santri juga mulai tumbuh. Proses dialektika yang dinamis, respons, persinggungan dan pergulatan antar stratum kelas-kelas menengah kota ini mendorong terciptanya pasar-pasar baru yang muncul secara tak berpreseden bagi produk-produk intelektual keagamaan. Situasi ini memberi tempat bagi lahirnya kaum "profesional" keagamaan Islam.

Kemunculan puak ini di dalam struktur perkotaan menjadi indikasi menguatnya kelas menengah santri kota, yang karena kepentingan-kepentingan kelasnya dan disebabkan transformasinya dari kelas agraris sebelumnya, memerlukan saluran dan artikulasi yang tepat. Survivalitas kelas menengah dihadapkan pada perebutan peluang struktur budaya yang tersedia sangat beragam di perkotaan. Lagi-lagi pendidikan akademis di perguruan tinggi menemukan signifikansi-relatif-nya dalam bentuk perangkat kecerdasan yang memungkinkan para para santri lebih mampu menjajakan pengetahuan keislaman yang relevan dengan kebutuhan kelas menengah kota.

Pertemuan kepentingan kelas kembali membuka pintu begitu lebar pada peningkatan mobilitas horisontal dan vertikal kaum santri. Banyak di antara kelas menengah santri kota menikmati situasi yang menguntungkan itu untuk mengokohkan identitas kelas mereka. Karena jumlah kalangan santri yang mengalami mobilitas sosial terus bertambah, pada gilirannya mereka menambah deret hitung dan deret ukur kelas menengah santri di Indonesia.

Mimpi Regulasi Tanpa Diskriminasi

Maraknya kekerasan berbasis agama semakin memprihatinkan. Pemerintah dinilai abai melindungi warganya. Banyak lahir peraturan diskriminatif.

Pagar hidup perempuan Ahmadiyah

Miris melihat aksi kekerasan dengan mencatut Islam, puluhan ulama dan nyai pesantren dari seluruh pelosok Indonesia menggelar forum bahtsul masail (pembahasan masalah dari sudut keagamaan, *red.*) bertema *Peran Pesantren dan Pemimpin Agama dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Agama*.

Dari hasil forum yang digelar di Jakarta dari 23 – 25 Maret lalu itu, mereka menelurkan rekomendasi bagi pemimpin agama dan masyarakat. Tapi sorotan paling tajam justru tertuju kepada pemerintah (lihat: *Dari Bahtsul Masail Nasional Kiai Pesantren*).

Penilaian miring itu muncul karena selama ini pemerintah dinilai abai melindungi hak-hak warganya dalam kasus kekerasan tersebut. Alih-alih melindungi, kata seorang peserta, tidak jarang aparat negara justru menjadi aktor penindasan dan diskriminasi melalui kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkannya.

Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965, misalnya, memuat soal penodaan agama. Undang Undang inilah yang secara tidak langsung hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Aturan yang menjadi landasan KUHP Pasal 156a, ini kerap dipakai oleh kelompok tertentu menuduh kelompok lain menodai agama.

Bahkan, jeratan regulasi ini diperkuat dengan dibentuk Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan (Bakor Pakem) yang salah satu fungsinya mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat. Badan yang dikoordinasikan Kejaksaan Agung ini bisa membuat vonis sesat tidaknya sebuah aliran keagamaan.

"Di masyarakat kita sangat rentan terjadi masalah yang menjurus suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Kegiatan itu dilakukan guna memelihara ketertiban dan ketentraman umum," kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto Wisnu saat seminar *Jaminan Perlindungan Hukum dan HAM untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah Menurut Agama dan Kepercayaan* yang diselenggarakan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dari 13-15 Pebruari lalu di Jakarta.

Namun bagi Ketua PBNU KH. Salahuddin Wahid (Gus Solah), cara-cara pemerintah yang mencampuri urusan agama masyarakat adalah bentuk pembatasan hak kebebasan beragama yang telah dijamin konstitusi. Dia mengatakan bahwa negara tidak dapat menentukan mana agama yang benar dan mana agama yang salah. "Konsekuensinya, negara tidak dapat melarang cara beribadah tertentu walaupun oleh mayoritas masyarakat hal itu dipandang menyimpang," jelas Gus Solah.

Pendapat Gus Solah didukung Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP). Dr. Djohan Effendi menganggap peraturan yang hanya menjadikan satu atau beberapa agama sebagai acuan, menunjukkan eksklusifitas sistem perundang-undangan Indonesia. "Undang-undang itu *kan* untuk semua, seharusnya tidak bersifat sektarian," ujar Djohan kepada Subhi Azhari dari the WAHID Institute.

Ia menyesalkan aturan yang masih menggunakan istilah agama yang 'diakui' dan 'tidak diakui'. "Bagaimana mungkin suatu agama harus mendapat pengakuan negara, sementara agama tersebut sudah ada sebelum negara ini lahir," tegas mantan Menteri Sekretaris Negara di era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Istilah 'agamanya belum diakui' masih digunakan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU

dok.WI/ Mubarik

Adminduk). Kriteria itu dipakai untuk membedakan cara pelayanan administrasi kependudukan setiap pemeluk agama, baik di kelurahan, kecamatan atau Dinas Kependudukan (lihat: *Inilah Pasal-pasal Diskriminatif Itu*).

Rumusan seperti ini menurut Rudi Soraya dari Majelis Nasional Baha'i Indonesia sangat merugikan agama-agama yang masuk kategori belum diakui. Selain karena adanya definisi agama yang sempit, penggolongan agama seperti ini mengakibatkan terjadinya perlakuan yang tidak adil bagi agama yang belum diakui tadi, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

"Berbagai perlakuan buruk seperti penghancuran tempat ibadah, pengusiran dari tempat tinggal, tidak boleh kawin, anak-anak dikeluarkan dari sekolah hingga dipaksa pindah agama banyak kami alami," jelas Soraya.

Diskriminasi juga masih dirasakan para penghayat kepercayaan. Meski dalam UU Adminduk mereka sudah boleh mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS) dengan mengosongkan identitas dalam kolom agama di KTP atau Kartu Keluarga, namun kebijakan ini tetap mengundang masalah.

Seperti diakui Engkus Ruswana, Presidium Badan Kerja sama Organisasi Kepercayaan (BKOK), para penghayat kepercayaan sering dituduh komunis atau atheis yang rentan diperlakukan diskriminatif. Tuduhan ini menimbulkan ketakutan mendalam untuk menyatakan identitas sehingga mereka kerap beribadah secara sembunyi-sembunyi.

Pelanggaran hak para penghayat kepercayaan juga timbul dari penerapan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ditegaskan pada pasal 2, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Meskipun pada awalnya tidak ada masalah, namun setelah Menteri Agama pada tahun 1978 menyurati para gubernur yang menegaskan bahwa perkawinan hanya sah jika berdasarkan hukum agama, perkawinan penghayat kepercayaan setelah itu tidak lagi dibenarkan.

Selain status perkawinan penghayat kepercayaan, undang undang produk Orde Baru ini juga melarang perkawinan beda agama, padahal sebelumnya praktek ini lazim di masyarakat. Pemerintah sama sekali tidak mengizinkan perkawinan jenis ini karena undang-undang ini didasarkan pada hukum perdata Islam (fiqh) dari satu pendapat (mazhab) yang tidak membolehkan perkawinan beda agama.

Seharusnya negara, menurut Djohan, bukan mendefinisikan sah tidaknya perkawinan. Apabila ada penduduk yang melakukan perkawinan, apakah berdasar agama, kepercayaan atau bahkan yang tidak beragama, mestinya tugas negara mencatatnya. "Nah, di situlah negara berperan."

Hal senada disampaikan Frans Magnis Suseno, SJ. Bagi dosen STF Driyarkara ini, perkawinan adalah hak sipil setiap warga negara yang harus dijamin. Karena apabila hak perkawinan ini tidak mendapat pengesahan oleh negara, hal itu akan menimbulkan masalah menyangkut sahnya anak, warisan dan sebagainya.

Namun regulasi bagaikan macan di atas kertas. Intervensi negara ke ruang-ruang privat warganya ternyata tidak berpengaruh apapun, tetap saja banyak orang yang menikah beda agama. "Orang lebih mengikuti patokan moral ketimbang regulasi yang ada," jelas Koordinator KONTRAS, Usman Hamid.

Peraturan lain yang juga menimbulkan masalah dalam hubungan antar agama adalah Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Aturan yang lahir dari pertentangan yang tajam antara berbagai kepentingan ideologi di masyarakat ini mewajibkan pelajaran agama di semua sekolah.

Dalam pemberian pelajaran agama, regulasi itu memerintahkan setiap sekolah harus menyediakan guru yang seagama bagi masing-masing anak didik. Bagi penyelenggara pendidikan yang berafiliasi pada agama tertentu, ketentuan ini terasa memberatkan. Akibatnya, ketika tidak bisa memenuhinya, mereka kerap dicurigai memurtadkan peserta didiknya dari agama lain. "Masyarakat melihat ini sebagai paksaan. Ini yang membuat mereka tidak terima," ungkap Djohan.

Seirama dengan UU Sisdiknas, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) juga menambah daftar peraturan yang mengancam kerukunan antar umat beragama. Pasal-pasal mengenai pengasuhan, misalnya, sangat problematis karena pengasuhan hanya boleh bagi pengasuh dan anak asuh yang seagama.

Hal ini menurut Frans Magnis Suseno bisa menimbulkan diskriminasi terhadap anak-anak terlantar yang belum bisa menentukan agama yang dianut. Menurutnya, anak bisa diasuh oleh siapapun meski berbeda agama.

"Yang penting anak itu harus diasuh dengan baik. Tetapi saya bisa mengerti bahwa di situ ada masalah dari orang-orang yang sangat agamis. Tidak saja dari sudut Islam, tetapi mungkin juga ada orang Kristiani keberatan jika anak Kristiani yang terlantar dibesarkan oleh orang Islam atau orang Hindu," jelasnya.

Dengan melihat banyaknya aturan yang lebih berpihak kepada agama-agama 'resmi', timbul pertanyaan, bagaimana seharusnya negara memposisikan dirinya terhadap agama-agama 'tidak resmi' dalam bingkai kerukunan antar umat

beragama. Apakah mereka akan terus didiskriminasi?

Bagi Romo Magnis, persoalannya menjadi tidak sederhana itu karena negara telah dipenjara oleh kepentingan agama-agama mayoritas dan tidak berani keluar darinya. "Bisa saja karena tidak ingin memutus sesuatu yang ditolak oleh agama-agama yang besar. Mungkin pemerintah tidak memiliki cukup keberanian dan tanggung jawab," jelasnya.

Sedangkan Djohan menilai bangsa kita tengah berada dalam situasi yang tidak sehat, saling curiga, sehingga masalah agama menjadi sangat sensitif. Baginya, negara seharusnya tidak terlalu jauh mencampuri urusan agama karena itu sepenuhnya tanggung jawab individu dan masyarakat.

Kalaupun ingin mencampuri urusan agama, negara tidak boleh keluar dari pertimbangan HAM, yakni untuk menjaga moral publik, keamanan publik, kesehatan publik dan menghargai kebebasan orang lain. "Orang yang menyakiti orang lain yang dianggap sesat, seperti Ahmadiyah di Manis Lor, itu termasuk mengancam keamanan publik. Itu yang harus dibatasi," papar Usman Hamid.

Djohan menggaris bawahi, bahwa proses masuk-nya agama ke dalam aturan negara tidak bisa dilepaskan dari fenomena kebangkitan agama-agama pada tahun 60-an. Hal ini ditandai dengan lahirnya gerakan-gerakan pembaharuan agama, seperti aliran-aliran kharismatik dalam kekristenan dan gerakan pemurnian agama dalam Islam.

"Kalau dulu, ketika antara abangan dengan santri tidak terlalu jelas bedanya, yang jadi patokan adalah budi pekerti orang. Tetapi ketika terjadi proses santrinisasi, ini lalu muncul pertentangan di masyarakat," jelas Djohan.

Lebih-lebih, ketika keluar berbagai fatwa dari MUI yang mengharamkan praktek-praktek yang terkait dengan hubungan antar agama seperti larangan doa bersama, pluralisme, dan sebagainya, tingkat keretakan sosial justru semakin lebar. Sehingga muncul kesimpulan dari beberapa tokoh agama, semakin kental agama maka semakin kendor ikatan sosial di masyarakat.

dok.WI/Mubarik

Karena itu, bagi Usman, seharusnya setiap regulasi tidak mencampuri urusan yang sifatnya relasi antar manusia, yang mungkin bisa memunculkan prasangka sosial, kebencian dan tudingan-tudingan yang justru menghilangkan esensi dasar dari agama itu sendiri. Regulasi model begini, merupakan interpretasi sosial yang keliru terhadap kehidupan politik masyarakat. "Ini sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini. Jadi harusnya diperbaharui," tegasnya.

Mekanisme hukum yang tersedia memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk mendorong perubahan jika pemerintah tidak mau memperbaharui. "Kalau peraturan di bawah undang-undang bisa masuk ke Mahkamah Agung (MA), kalau setingkat undang undang bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK)," jelas Usman.

Selain faktor ketatanegaraan di atas, faktor penting lainnya adalah kepentingan politik. Dari situlah, Magnis mencurigai agama-agama besar takut kehilangan pengaruhnya, karena itu meminjam tangan negara untuk melindungi kepentingan mereka.

Karena itu, Adnan Buyung Nasution mengingatkan, jika negara tidak kembali menyadari perannya sebagai pelindung segenap warganya, dan berpegang pada demokrasi dan supremasi hukum, maka itu artinya telah terjadi dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain. "Bisa juga terjadi diktator mayoritas terhadap minoritas," tandas anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu.

Subhi Azhari

INILAH PASAL-PASAL DISKRIMINATIF ITU

BUNYI PASAL	SUBSTANSI
Undang-undang No. 1 PNPS/1965 **Pasal 1** Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukung-an umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu	• Adanya aliran-aliran yang dianggap menyimpang atau sesat. • Kebebasan menganut kepercayaan yang diyakini terancam.
Undang-undang No. 23 / 2006 tentang Adminduk **Pasal 8** (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. Pasal 61 (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan. Pasal 64 (3) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan	• Negara menilai ada agama-agama dan kepercayaan di masyarakat yang resmi dan tidak resmi. • Dampak penilaian itu, perlakuan diskriminatif dalam pelayanan administrasi kependudukan. • Selain itu, mereka juga rentan dipaksa memeluk satu agama yang diakui negara (resmi) untuk mendapat pelayanan publik.
Undang-undang No. 1 / 1974 tentang Perkawinan **Pasal 2** Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.	• Tidak diperbolehkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan yang belum diakui. • Tidak diperbolehkan perkawinan beda agama. • Melanggar hak asasi.

dari berbagai sumber diolah oleh Subhi Azhari

Dari Bahtsul Masail Nasional
Kiai Pesantren

dok.WI/Witjak

Sidang Komisi Bahtsul Masa'il Nasional Kiai Pesantren

PULUHAN kiai dari berbagai daerah di Tanah Air dengan tekun mendengarkan arahan dari KH. A. Mustofa Bisri (Pendiri Mata Air Foundation) dan KH. Abdurrahman Wahid (Pendiri the WAHID Institute), Senin (24/3/2008). Mereka adalah peserta *Bahtsul Masail Nasional Peran Pesantren dalam Mencegah Kekerasan Berbasis Agama*. Di hari yang sama, selain dari Gus Dur dan Gus Mus, mereka juga mendapat paparan soal dampak sosial dari Anas Saidi (Peneliti Senior LIPI) dan ekonomi dari Hendri Saparini (Direktur Pelaksana Econit) yang ditimbulkan dari kekerasan atas nama agama.

Kekerasan berbasis agama menjadi kajian para kiai dan aktivis agama yang menggelar forum itu di Jakarta dari 23-25 Maret 2008. Dua masalah mendapat sorotan seksama. *Pertama*, bagaimana kewajiban pemerintah dalam melindungi warganya? *Kedua*, bagaimanakah hukum kekerasan dengan mengatasnamakan agama?

Forum menyimpulkan, fungsi pemerintah adalah untuk mengatur kehidupan dunia (*siyasah ad-dunya*), sehingga masyarakat yang ada di dalamnya dapat hidup dengan aman, nyaman dan tenang. Kepala pemerintahan bertugas memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara untuk memperoleh rasa aman, keadilan (hukum, ekonomi, dan sosial). Sebuah hadits menyebutkan; *al-sulthan zhill Allah fi al-ardhi ya'wi ilaihi kullu mazhlum* (seorang pemimpin adalah bayangan Allah di bumi, sejauh ia berfungsi sebagai tempat berlindung orang-orang yang terzalimi). Pemerintah wajib menegakkan supremasi hukum. Semuanya dilaksanakan tanpa diskriminasi berdasarkan perbedaan suku, agama, aliran politik, sebaran geografis, dan sebagainya.

Namun peserta bahtsul masail prihatin berbagai ketegangan dan kekerasan antar kelompok berdasarkan agama di dalam masyarakat, terus-menerus terjadi tanpa ada penyelesaian yang komprehensif dan adil dari pemerintah untuk melindungi semua warga negara. Justru banyak aparat negara yang lalai menyelesaikan masalah secara adil sehingga terjadi pembiaran intimidasi dan kekerasan oleh satu kelompok ke kelompok lain yang lebih lemah (*dhu'afa'*) dan kelompok minoritas. Alih-alih memberikan perlindungan, tidak jarang aparat negara mendiskriminasi warganya melalui kebijakan dan perundang-undangan yang dikeluarkannya.

"Berkumpulnya kita di sini juga sebagai upaya menghalau stigma, bahwa semua ulama dan kiai itu gemar memfatwa sesat kelompok lain," kata salah satu peserta Gurutta Imran Muin Yusuf pengasuh pesantren al-Urwatul Wutsqaa, Sidrap Sulawesi Selatan.

Dari alasan-alasan tersebut pada akhir acara, KH. A. Malik Madani (Yogyakarta), KH. Imam Ghazali Said MA (Surabaya) dan KH. Ubaidillah Sodaqoh (Semarang), membacakan rekomendasi dari peserta bahtsul masa'il, yang difasilitasi the WAHID Institute dan Yayasan Mata Air ini, bagi pemerintah, pemimpin agama dan masyarakat. Mereka menilai pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara untuk memperoleh rasa aman dan jaminan hukum.

Sedangkan Presiden diharapkan, "Menetapkan panduan bagi semua aparat negara, termasuk Pemerintah Daerah, dalam menangani intimidasi dan kekerasan berbasis agama berdasarkan konstitusi negara," kata juru bicara bahtsul masail KH. A. Malik Madani, MA.

Selain itu, mereka juga menghimbau pemimpin agama mendalami lagi tafsir teks-teks keagamaan, "Antara lain kata jihad dan *dzimmi*, yang cenderung dijadikan dalih pembenar untuk melakukan tindakan kekerasan," kata KH. A. Malik membacakan rekomendasi para kiai pesantren itu.

Pemimpin agama, diharapkan mendorong dan memudahkan komunitasnya untuk proaktif memprakarsai forum-forum dialog antar-umat beragama, memediasi konflik dengan melibatkan komunitas, dan melindungi kelompok-kelompok yang dizalimi oleh kelompok lain. Sedang pengasuh pesantren dihimbau untuk menyegarkan kembali wawasan kebangsaan dengan mendorong kajian-kajian sejarah perjuangan para kiai dalam mendirikan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Serta memasukkan *fiqh ad-dawlah* (pendidikan kewarganegaraan) di dalam kurikulum pesantren," tegas Malik saat membaca rekomendasi para kiai itu.

Mereka juga berharap masyarakat meningkatkan solidaritas antar-warga dalam menangani ketegangan-ketegangan setempat. "Juga mencermati setiap ajakan yang bermuatan hasutan untuk melakukan tindakan intimidasi berkekerasan, serta selalu melakukan *tabayyun* (klarifikasi) setiap kali menerima informasi yang mengundang penilaian buruk atas pihak tertentu," tandas rekomendasi itu.

Rekomendasi yang dibacakan di Jakarta pada 25 Maret 2008 itu disepakati oleh KH. Abdurrahman Wahid (Jakarta), KH. A Mustofa Bisri (Rembang), H Anas Saidi MA, KH. Dr. Zakky Mubarak, MA (Jakarta), Prof. KH. A. Malik Madani, MA (Yogyakarta), KH. A. Thonthowi J. Musaddad MA (Garut), KH. Maftuh Kholil (Bandung), KH. Imam Ghazali Said, MA (Surabaya), KH. Imam Nakho'i, MA (Situbondo), KH. Wasil Sarbini (Jember), KH. Dr. Musta'in Syafi'i (Jombang), Kiai Mujiburrahman, PhD (Banjarmasin), TGH Subki Sasaki dan Baiq Ely Mahmudah (Lombok NTB), Hj Hindun Anisa, MA (Jepara), Hj. Yenny Zannuba Wahid MPA, Dra Hj. Maria Ulfah Anshor, MA, Dr. Rumadi, Dr. Abd Moqsith Ghazali, Ahmad Suaedy, Musoffa Ichsan, Achmad Z. Huda, M. Faridu Ashrih, M. Zuhdi (Jakarta), Hj. Siti Huzaenah (Purwokerto), KH. Najib Hasan (Kudus), KH. Abdul Chobir (Cipasung Tasikmalaya), KH. Baharuddin (Makassar), KH. Imran Mu'in, Lc (Sidrap Sulsel), KH. Ubaidillah Sodaqoh dan KH. A. Buchori Masrurie (Semarang), KH. M. Dian Nafi' (Solo), KH. Jazuli Kasmani (Klaten), KH. Yusuf Chudlori (Magelang), KH. Maman Imanulhaq (Cirebon), Kiai Muhammad Furqan (Temanggung), Nanang Maulani (Garut), Dindin Abdullah Ghozali (Bandung), dan Fauzi Shahab (Banyumas).

Gamal Ferdhi

Kalau para pembaca serius terhadap perkembangan Islam moderat, tentu haruslah diberi perhatian dan apresiasi cukup besar terhadap kajian Islam setempat atau yang bersifat lokal. Ia merupakan bagian dari pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri. Untuk itulah buku ini merupakan rintisan yang baik, meskipun masih dalam tahap yang sangat awal.

Abdurrahman Wahid, pendiri *the WAHID Institute*

Sajian warna-warni dinamika terkini kaum santri. Diracik dan disuguhkan "orang dalam". Dikelola sekelompok analis muda berpikiran terbuka yang menguasai pokok masalah dan memahami konteks persoalan dengan baik. Dikemas renyah dengan gaya jurnalistik. Ditelaah dari sudut yang tidak biasa. Bahkan kadang mengejutkan.

Asrori S. Karni, *Redaktur Majalah GATRA*

Ini sebuah bacaan yang tidak ditulis satu-arah untuk publik yang harus menelan bahan mentah-mentah seperti "khotbah" salat Jumat. Atau seperti selebaran "penuh doktrin" di masjid-masjid, yang isinya membuat bulu kuduk berdiri karena sarat ancaman dosa dan neraka. Kutipan kalimat para kiai atau pemikir di sini dipilih yang tenang, rileks, melegakan seperti meneguk air es di panas terik.

Toriq Hadad, *Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO*

The WAHID Institute (WI) merupakan lembaga independen dan nirlaba yang didirikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid tahun 2004. Sejak kelahirannya WI didedikasikan untuk mendorong kehidupan beragama yang toleran, damai dan menghargai hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Dalam program-programnya Institute juga berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik melalui pemberantasan kemiskinan, peningkatan penghasilan masyarakat serta pendidikan dan beasiswa. WI terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak dengan mengabaikan perbedaan agama, keyakinan, etnis, kelompok sosial dan ras.

The WAHID Institute
Seeding Plural and Peaceful Islam

Bekerjasama dengan

The Asia Foundation

www.wahidinstitute.org

info@wahidinstitute.org